



Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) TPB/SDGS TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal* (TPB/SDGs) merupakan Agenda Global 2015 - 2030 dan dilaksanakan oleh seluruh Negara di Dunia. Sebagai amanat dari Sidang Umum PBB yang melibatkan 159 Kepala Negara pada bulan September 2015, TPB/SDGs berisikan 17 goals dan 169 target.

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki RAD TPB/SDGS 2019-2023 yang telah habis masa berlakunya. Maka akan disusun kembali RAD TPB/SDGs 2025-2029 mengikuti periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, RAD disusun untuk melaksanakan Tujuan dan Target yang telah ditetapkan secara global tersebut, namun dalam perjalanannya, Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi NTB dihadapkan dengan beberapa perubahan kebijakan Pembangunan Nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi NTB disamping itu adanya penyempurnaan metadata SDGs tahun 2024 yang akan menyempurnakan RAD TPB/SDGs periode 2025-2029.

Dengan mempertimbangkan dinamika regulasi dan hasil evaluasi, maka RAD TPB/SDGS 2025-2029 yang telah ada mengalami perbaikan dan penguatan baik terhadap tujuan dan target maupun terhadap program yang diampuh oleh Instansi terkait, sebagai upaya untuk memperlancar dan mempercepat keberhasilan pencapaian Tujuan dan Target yang di emban dalam RAD TPB/SDGS 2025-2029. Secara garis besar, RAD TPB/SDGS 2025-2029 memuat keterkaitan antara TPB/SDGs dengan kebijakan pembangunan Nasional dan dilengkapi pula dengan matriks yang berisikan sasaran, program, kegiatan, sumber daya pendukung dan instansi pelaksana.

RAD TPB/SDGs 2025-2029 disusun melalui serangkaian proses diskusi dengan berbagai pihak yang meliputi perwakilan dari kementerian/lembaga, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media, akademisi dan pakar. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap RAD TPB/SGDS periode 2025-2029. Semoga ikhtiar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan Tujuan dan Target pembangunan global dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



LALU MUHAMAD IQBAL



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 157) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 212);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
6. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

RAD TPB dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sesuai dengan bidang tugasnya dalam upaya percepatan pencapaian target TPB dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
- b. Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi dalam upaya percepatan pencapaian target TPB.

Pasal 3

RAD TPB bertujuan:

- a. mencapai sasaran daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selaras dengan sasaran TPB daerah melalui koordinasi program dan kegiatan multipihak baik dengan kementerian/lembaga, Ormas, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha; dan
- b. meningkatkan peran dan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota, Ormas, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha dalam pelaksanaan pencapaian TPB Daerah.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pasal 4

- (1) RAD TPB merupakan dokumen perencanaan yang memuat 17 (tujuh belas) tujuan TPB, arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat

BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian

BAB IV : Kebijakan dan Perkuatan Lingkungan yang Mendukung

BAB V : Penutup

- (3) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan peninjauan kembali paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB.
- (3) Perubahan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang RAD TPB.

BAB III

TIM PELAKSANA RAD TPB DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA RAD TPB

Pasal 6

- (1) Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran TPB dibentuk Tim Pelaksana RAD TPB.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah, Akademisi, lembaga nonpemerintah, profesional media dan tokoh masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB.
- (5) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana RAD TPB, dibentuk sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, operasional dan administrasi Tim Pelaksana RAD TPB.
- (2) Sekretariat Tim Pelaksana RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Pembangunan Daerah.

- (3) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Sekretraiat Tim Pelaksana RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan RAD TPB di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana RAD TPB.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan RAD TPB dilaksanakan sesuai dengan tujuan TPB.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan RAD TPB setiap tahun kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana TPB .
- (2) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan RAD TPB di daerahnya setiap tahun kepada Gubernur melalui Tim Pelaksana TPB.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat pada bulan Agustus pada tahun berkenaan.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

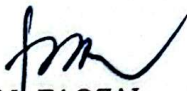
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Desember 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,


LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 20

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Keselarasan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Terhadap RPJMD	1
1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	4
1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian SDGs	5
1.4 Metodologi Penyusunan RAD TPB/SDGs	6
1.5 Sistematika RAD TPB/SDGs	7
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs DI NTB	9
2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun.....	9
2.1.1 Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.....	9
2.1.2 Sistem dan Upaya Perlindungan Sosial Daerah	12
2.1.3 Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah	12
2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	14
2.2.1 Menghilangkan Kelaparan	14
2.2.2 Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi	15
2.2.3 Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan	21
2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	25
2.3.1 Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)	25
2.3.2 Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita	26
2.3.3 Mengakhiri Epidemik Penyakit Menular	28
2.3.4 Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)	30
2.3.5 Mencapai Cakupan Kesehatan Universal	31
2.3.6 Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi	32
2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	34



2.4.1 Partisipasi Pendidikan Penduduk NTB	34
2.4.2 Disparitas Pendidikan Antara Perempuan dan Laki-Laki	40
2.4.3 Guru dan Peserta Didik	40
2.4.4 Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan	41
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	42
2.5.1 Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	45
2.5.2 Menghapus Semua Praktek Berbahaya	47
2.5.3 Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin	49
2.5.4 Menjamin Akses Universal terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi	50
2.5.5 Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan	51
2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	52
2.6.1 Menjamin Akses Air Minum Layak dan Terjangkau	52
2.6.2 Menjamin Penyediaan Sanitasi Layak dan Terjangkau	53
2.6.3 Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	54
2.6.4 Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau sebagai Air Baku	55
2.6.5 Jumlah DAS yang Dilindungi Mata Airnya dan Dipulihkan kesehatannya	56
2.7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern	57
2.7.1 Kebutuhan Energi Daerah	58
2.7.2 Produksi dan Penggunaan Energi	60
2.7.3 Energi Baru Terbarukan (EBT)	61
2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	63
2.8.1 Perkembangan Ekonomi Makro	63
2.8.2 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	64
2.8.3 Peningkatan Pariwisata	65
2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	68
2.9.1 Pembangunan Infrastruktur	68
2.10 Mengurangi Kesenjangan	76
2.10.1 Kesenjangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	76
2.10.2 Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	82
2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	82



2.11.1 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau.....	83
2.11.2 Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.....	84
2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	90
2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	92
2.13.1 Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Kabupaten / Kota	92
2.13.2. Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	93
2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan.....	94
2.14.1 Jumlah Kawasan Konservasi Perairan di Daerah	94
2.14.2 Kepatuhan Pelaku Usaha	98
2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan.....	99
2.16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	102
2.16.1 Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan.	102
2.16.2 Membangun Kelembagaan yang Tangguh.	104
2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	105
2.17.1 Mobilisasi Sumber Daya Domestik.....	105
2.17.2 Kemitraan Multipihak.	107
2.17.3 Teknologi Informasi.	108
2.17.4 Ketersediaan Data.....	113
BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs.....	114
3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	114
3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	120
3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	125
3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	132
3.5 Tujuan 5 Kesenjangan Gender.....	137
3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	140
3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	143
3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	146
3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	151
3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	153
3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	156
3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	159
3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	161



3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan	165
3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan	167
3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.....	170
3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	175
BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG	177
4.1 Partisipasi Non State Actor (NSA)	177
4.1.1. Peran Non State Actor	177
4.1.2. Kerangka, Strategi dan Rencana Aksi Organisasi Masyarakat Sipil.....	178
4.2 Interlinkages/Roadmap	181
4.3 Kerangka Kerja, Strategi, dan Rencana Aksi Pendanaan SDGs Kerangka Kerja.....	183
4.3.1. Penguatan Peran Pemerintah Daerah Kerangka Kerja.....	186
4.4 Pendanaan SDGs.....	189
4.5 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	189
4.5.1 Mekanisme Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi.....	191
4.5.2 Mekanisme Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi	191
4.5.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak Non Pemerintah.....	192
BAB V	195
PENUTUP.....	195
DAFTAR PUSTAKA	198

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterkaitan RPJMD, RPJMN, Terhadap SDGs	3
Tabel 2.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan)	10
Tabel 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan)	10
Tabel 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan)	10
Tabel 2.4 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024.....	11
Tabel 2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2019-2024	13
Tabel 2.6 Konsumsi Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2019-2024	14
Tabel 2.7 Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB Provinsi NTB Tahun 2019-2024	16
Tabel 2.8 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2019-2024	19
Tabel 2.9 Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2019-2024	20
Tabel 2.10 Cadangan Pangan Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	21
Tabel 2.11 Perkembangan Harga Pangan Ditingkat Eceran di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	21
Tabel 2.12 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019-2024	22
Tabel 2.13 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2019-2024	22
Tabel 2.14 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019-2024.....	22
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Sub Sektor Peternakan (Ternak Sapi) Tahun 2020-2024.....	23
Tabel 2.16 Kematian Bayi Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Utama Perluasan Akses Pendidikan.....	34
Tabel 2.18 Perkembangan Lulusan SD/MI dan Angka Melanjutkan ke SMP/MTs Tahun 2019-2024	39
Tabel 2.19 Perkembangan Lulusan SMP/MTs dan Angka Melanjutkan ke SMA/MA dan SMK Tahun 2019-2024.....	40
Tabel 2.20 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2023/2024	41
Tabel 2.21 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024	46



Tabel 2.22	Persentase Ruta yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Provinsi NTB Tahun 2018-2024.....	53
Tabel 2.23	Luas Lahan Kritis dalam KPH yang Direhabilitasi Tahun 2020-2024 dan Jumlah DAS Prioritas yang Dllindungi Mata Airnya dan Dipulihkan Kesehatannya Tahun 2020-2024	57
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Proovinsi NTB Tahun 2022-2024.....	58
Tabel 2.25	Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2024	58
Tabel 2.26	Kebutuhan Pembangkit Listrik Energi Sumber Daya Mineral di NTB Tahun 2017-2020, 2025-2050	59
Tabel 2.27	Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2024	61
Tabel 2.28	Rekap Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) Tahun 2020-2024	62
Tabel 2.29	Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024	64
Tabel 2.30	Angka Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Menginap pada Hotel Bintang Tahun 2019-2024.....	65
Tabel 2.31	Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2024	66
Tabel 2.32	Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2024	68
Tabel 2.33	Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat	69
Tabel 2.34	Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat	69
Tabel 2.35	Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat	73
Tabel 2.36	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB	74
Tabel 2.37	Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024	74
Tabel 2.38	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 – 2024.....	78
Tabel 2.39	TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	79
Tabel 2.40	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 (Persen).....	81
Tabel 2.41	Jumlah Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019-2024	82
Tabel 2.42	Data Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	84
Tabel 2.43	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024	85
Tabel 2.44	Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2022-2024	86





Tabel 2.45	Hasil Uji Indeks Kualitas Udara.....	86
Tabel 2.46	Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se-NTB Tahun 2024	87
Tabel 2.47	Neraca Pengelolaan Sampah NTB.....	91
Tabel 2.48	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB	96
Tabel 2.49	Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024	98
Tabel 2.50	Perubahan Tutupan Lahan Berupa Hutan di Provinsi NTB	99
Tabel 2.51	Luas Degradasi Hutan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2022	101
Tabel 2.52	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2024.....	102
Tabel 2.53	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2024	104
Tabel 2.54	Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2019-2024	105
Tabel 2.55	Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2019 -2024 (dalam Milyar).....	106
Tabel 2.56	Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2019 – 2024.....	107
Tabel 2.57	Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2024	108
Tabel 2.58	Perkembangan Ekspor Tahun 2020 – 2024	109
Tabel 2.59	Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024	110
Tabel 2.60	Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2024	111
Tabel 2.61	Operasi Pasar 2019-2024	112
Tabel 3.1	Target Pencapaian Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	118
Tabel 3.2	Target Pencapaian Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	123
Tabel 3.3	Target Pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	127
Tabel 3.4	Target Pencapaian Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	134
Tabel 3.5	Target Pencapaian Tujuan 5 Kesenjangan Gender	139
Tabel 3.6	Target Pencapaian Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	142
Tabel 3.7	Target Pencapaian Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	145
Tabel 3.8	Target Pencapaian Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	149
Tabel 3.9	Target Pencapaian Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	152
Tabel 3.10	Target Pencapaian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	155
Tabel 3.11	Target Pencapaian Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan	158





Tabel 3. 12	Target Pencapaian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab .	160
Tabel 3.13	Target Pencapaian Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	163
Tabel 3.14	Target Pencapaian Tujuan 14 Ekosistem Lautan	166
Tabel 3.15	Target Pencapaian Tujuan 15 Ekosistem Daratan	169
Tabel 3.16	Target Pencapaian Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.....	172
Tabel 3.17	Target Pencapaian Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	176



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah dan Persentase Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	9
Grafik 2.2	Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024	13
Grafik 2.3	Penemuan Kurang Gizi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	16
Grafik 2.4	Status Gizi Balita di Provinsi NTB Tahun 2024.....	17
Grafik 2.5	Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019-2024.....	18
Grafik 2.6	Perkembangan Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2019-2024	20
Grafik 2.7	Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	23
Grafik 2.8	Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	24
Grafik 2.9	Populasi Ternak Unggas Tahun 2019-2024	24
Grafik 2.10	Angka Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019-2024	25
Grafik 2.11	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.....	25
Grafik 2.12	Jumlah Kematian Bayi di Provinsi NTB	26
Grafik 2.13	Jumlah Kasus Kematian Bayi di Provinsi NTB 2020-2024.....	27
Grafik 2.14	Tren Kasus Baru HIV-AIDS di Provinsi NTB 2019-2024.....	29
Grafik 2.15	Tren Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) TB Paru, Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru di Provinsi NTB Tahun 2019-2024	29
Grafik 2.16	Tren Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024	31
Grafik 2.17	Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2024	32
Grafik 2.18	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas menurut Kab/Kota se Provinsi NTB Tahun 2019-2024	33
Grafik 2.19	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2019-2024	35
Grafik 2.20	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2019-2024.....	36
Grafik 2.21	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2024	36
Grafik 2.22	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2019-2024	37
Grafik 2.23	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2019-2024.....	38
Grafik 2.24	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2024.....	38
Grafik 2.25	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2019-2024	39



Grafik 2.26	Pendidikan yang Memiliki Akreditasi Minimal B SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat.....	41
Grafik 2.27	Perguruan Tinggi di Provinsi NTB Tahun 2024	42
Grafik 2.28	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di NTB Tahun 2019-2024	43
Grafik 2.29	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di NTB Tahun 2019-2024	44
Grafik 2.30	Realisasi Kinerja PPRG Tahun 2019-2024	44
Grafik 2.31	Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019-2024	45
Grafik 2.32	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Tahun 2019-2024.....	48
Grafik 2.33	Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Provinsi NTB Tahun 2023.....	50
Grafik 2.34	Target dan Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2019-2024	52
Grafik 2.35	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019-2024	54
Grafik 2.36	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2021-2024.....	63
Grafik 2.37	PDRB NTB Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2019-2024	75
Grafik 2.38	Perkembangan Gini Ratio di Provinsi NTB Tahun 2019-2024	77
Grafik 2.39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2020 -2024	79
Grafik 2.40	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB Tahun 2020-2024.....	80
Grafik 2.41	Jumlah Sampah yang Masuk ke TPA Tahun 2024	92
Grafik 2.42	Proporsi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Tahun 2024.....	94
Grafik 2.43	Potensi Penurunan Emisi GRK Tahun 2019-2024.....	94
Grafik 2.44	Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024	97
Grafik 2.45	Proporsi Tutupan Lahan Provinsi NTB tahun 2020-2024	100
Grafik 2.46	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024	105
Grafik 2.47	Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2024 (Rp.Milyar)	108





DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pemutakhiran Roadmap SDGs Sebagai Acuan Penyusunan RAN SDGs	181
Gambar 4.2	Klaster Kebijakan Prioritas Roadmap SDGs (Bappenas 2023)	182
Gambar 4.3	Indikator TPB/SDGs Provinsi NTB Berdasarkan Pilar Pembangunan	190
Gambar 4.4	Alur Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB	191
Gambar 4.5	Alur Pelaporan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs	192
Gambar 4.6	Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah	193





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2015-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium / *Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. TPB/SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan.

Berbeda dari pendahulunya *Millennium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

No One Left Behind merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan - persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Sejalan dengan perumusan SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden. Jumlah target TPB/SDGs yang telah diintegrasikan dengan RPJMN tahun 2025-2029 sebanyak 124 target. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia karena bagi Indonesia melaksanakan TPB/SDGs sejatinya adalah melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional dan dukungan Indonesia untuk keberhasilan pencapaian Agenda 2030 di tingkat global. Upaya Pemerintah untuk melaksanakan perumusan RAN dan RAD sesuai dengan periode pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, juga merupakan bentuk komitmen yang tinggi terhadap TPB/SDGs.

Setelah berakhirnya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur NTB Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mendapatkan perhatian yang cukup intens dengan dibuatnya target pencapaian TPB/SDGs tahun 2024-2026.

Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa untuk mencapai sasaran TPB/SDGs akan disusun 3 (tiga) dokumen perencanaan, yaitu: Peta Jalan TPB/SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi. Rencana Aksi Daerah dilengkapi dengan matriks yang berisikan sasaran, program, kegiatan, sumber daya pendukung dan instansi pelaksana.



Di tingkat Nasional, RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya.

Di tingkat Daerah Provinsi NTB, RPJMD Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 yang berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik Provinsi NTB dimana Tujuan TPB/SDGs mendapat prioritas dalam pencapaiannya.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 124 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMD 2025-2029, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender, serta upaya untuk mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara

keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati.

Sinergi RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 dan TPB/SDGs ditunjukkan pada keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi NTB seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Keterkaitan RPJMD, RPJMN, Terhadap SDGs

NO	RPJMD NTB 2025-2029 Misi		RPJMN 2025-2029 Misi (Asta Cita)		SDGs TUJUAN
1	Membangun Manusi yang berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif	4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan Penyandang disabilitas	G.3 G.4 G.5	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Pendidikan Berkualitas Kesetaraan Gender
2	Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Fondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang berkeadilan	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	G.1 G.2 G.3 G.6 G.7 G.11 G.12 G.13 G.14 G.15	Tanpa kemiskinan Tanpa Kelaparan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Air Bersih dan Sanitasi Layak Energi Bersih dan Terjangkau Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Penanganan Perubahan Iklim Ekosistem Lautan Ekosistem Daratan
		6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	G.1 G.2 G.8	Tanpa kemiskinan Tanpa Kelaparan Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi
3	Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan, dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang berkelanjutan	3	Memantapkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	G.8 G.9	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi dan Infrastruktur
		5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	G.8 G.9	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi dan Infrastruktur



NO	RPJMD NTB 2025-2029 Misi	RPJMN 2025-2029 Misi (Asta Cita)	SDGs TUJUAN	
4	Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga	4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan Penyandang disabilitas	G.3 G.4 G.5	Kehidupan Sehat dan Sejahtera Pendidikan Berkualitas Kesetaraan Gender
5	Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah lingkungan dan Investasi Berkelanjutan	8 Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	G.10 G.16	Berkurangnya Kesenjangan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
6	Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan	3 Memantapkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	G.8 G.9	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi Industri, Inovasi dan Infrastruktur
		8 Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	G.10 G.16	Berkurangnya Kesenjangan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
7	Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah	7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	G.16 G.17	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Kemitraan Untuk mencapai Tujuan
		1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	G.4 G.16 G.17	Pendidikan Berkualitas Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Kemitraan Untuk mencapai Tujuan

Sumber: Sekretariat SDGs, 2025 (diolah)

1.2 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Prinsip pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang holistik, inklusif, dan berkeadilan.

Universal

SDGs berlaku untuk semua negara, baik negara maju maupun berkembang, tanpa terkecuali. Tidak ada negara yang dikecualikan dari tanggung jawab untuk mencapai 17 tujuan SDGs. Setiap negara menyesuaikan target SDGs dengan konteks nasional, tetapi tetap berfokus pada tujuan global, seperti pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan peningkatan



kesejahteraan. Contoh: Negara maju seperti Jepang fokus pada inovasi teknologi hijau, sementara negara berkembang seperti Indonesia menekankan pengentasan kemiskinan dan akses pendidikan.

Terintegrasi Antar Dimensi

SDGs mencakup tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kebijakan dirancang untuk menciptakan sinergi antar dimensi, misalnya, pembangunan infrastruktur (ekonomi) harus ramah lingkungan dan mendukung pemerataan sosial. Contoh: Program energi terbarukan tidak hanya mendukung lingkungan (SDGs 13), tetapi juga menciptakan lapangan kerja (SDGs 8) dan meningkatkan akses energi bagi komunitas terpencil (SDGs 7).

Inklusif

Pelaksanaan SDGs melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas lokal. Partisipasi aktif dari berbagai kelompok memastikan kebijakan relevan dan mencerminkan kebutuhan beragam masyarakat. Contoh: Konsultasi publik dalam perencanaan pembangunan kota untuk memastikan suara kelompok marginal seperti penyandang disabilitas didengar.

No One Left Behind

Tidak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Kebijakan difokuskan pada pemberdayaan kelompok marginal, pemerataan akses terhadap layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), dan pengurangan ketimpangan. Contoh: Program bantuan sosial untuk keluarga miskin atau penyediaan fasilitas pendidikan inklusif bagi anak-anak di daerah terpencil.

Sarana Pelaksanaan SDGs

Sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*) diatur dalam SDGs 17 (Kemitraan untuk Tujuan) dan mencakup: (a) Keuangan: Mobilisasi sumber daya keuangan domestik dan internasional, termasuk pajak, bantuan pembangunan, dan investasi swasta; (b) Teknologi: Transfer teknologi, inovasi, dan digitalisasi untuk mendukung pencapaian SDGs, misalnya teknologi pertanian ramah lingkungan; (c) Kapasitas: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan institusi; (d) Perdagangan: Sistem perdagangan global yang adil untuk mendukung negara berkembang; (e) Kemitraan: Kolaborasi antar negara, sektor swasta, akademisi, filantropi, dan masyarakat sipil untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya; (f) Data dan Pemantauan: Pengumpulan data yang akurat dan sistem pemantauan untuk mengukur kemajuan SDGs.

1.3 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian SDGs

Beberapa upaya penting yang dilakukan sebagai komitmen pemerintah Provinsi NTB dalam percepatan pencapaian SDGs di Tahun 2030 adalah peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, yang dicirikan salah satunya dengan meningkatnya proporsi belanja



langsung dan memprioritaskan target - target SDGs yang memiliki daya ungkit untuk mengintegrasikan pencapaian target lainnya.

Pemerintah Daerah NTB secara konsisten menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional dan daerah. Komitmen ini tercermin melalui pengarusutamaan SDGs ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari RPJMD Tahun 2025-2029 hingga Rencana Aksi Daerah (RAD) di 10 kab./kota. Pendekatan ini memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan bukan hanya menjadi retorika internasional, melainkan terimplementasi nyata dalam kebijakan, program, dan kegiatan di semua level pemerintahan.

Pelaksanaan SDGs di Provinsi NTB mengedepankan pendekatan inklusif dan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil (OMS), filantropi, media, komunitas lokal, maupun kelompok rentan. Pembentukan Tim Pelaksana Daerah TPB/SDGs dan Sekretariat TPB/SDGs menjadi wujud nyata dari tata kelola multipihak yang bersifat partisipatif dan desentralistik. Proses penyusunan dokumen RAD SDGs pun dilaksanakan melalui mekanisme konsultasi publik untuk memastikan keterwakilan suara berbagai kelompok masyarakat.

Pemerintah Provinsi NTB mendukung pelaksanaan TPB/SDGs dengan membentuk Tim Pelaksanaan Daerah SDGs dan Tim Sekretariat SDGs dan membentuk SDGs *Centre* yang nantinya berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota, Surat Keputusan Gubernur NTB tersebut antara lain:

- a. Surat Keputusan Gubernur NTB tanggal 16 Juli 2025 Nomor 100.3.3./334 Tahun 2025, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.
- b. Surat Keputusan Gubernur NTB tanggal 16 Juli 2025 Nomor 100.3.3./-333 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.

Pemerintah NTB juga membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai kesempatan bagi pemangku kepentingan di NTB baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Filantropi maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDG's, serta memberi masukan bagi penyusun kebijakan dalam rangka SDG's di daerah.

1.4 Metodologi Penyusunan RAD TPB/SDGs

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka Provinsi NTB Menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2025-2029. Perpres merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga, daerah dan juga merupakan acuan bagi pihak nonpemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD menjadi sangat penting.

Koordinasi Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dengan BAPPEDA NTB kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs, melibatkan keempat platform partisipasi yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 
- 
- a. Rapat sosialisasi TPB/SDGs baik dilingkup pemerintah dan lembaga non pemerintah serta stakeholder lainnya. Sosialisasi juga dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota se-NTB.
 - b. Rapat koordinasi untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs dilaksanakan dalam beberapa kegiatan. Dalam rapat koordinasi melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan isu TPB/SDGs. Rapat koordinasi selanjutnya melibatkan pihak nonpemerintah yang terdiri dari mitra pembangunan di Provinsi NTB, organisasi kemasyarakatan, pengusaha, akademisi, serta media dan filantropi. Dalam rapat koordinasi ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak nonpemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.
 - c. Tahap berikutnya adalah pembentukan Tim Sekretariat TPB/SDGs dan Tim Penyusun RAD TPB/SDGs.
 - d. Tahap selanjutnya adalah penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap Tujuan/Goals untuk membahas pengisian matriks RAD. Matriks terdiri dari matriks bagian 1 yang merupakan matrik utama yang berisi target tahunan setiap indikator, matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah yang mendukung indikator SDGs, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan nonpemerintah.
 - e. Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan/Goals juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (baseline) secara runtun waktu (series) sesuai dengan ketersediaan data. Pokja dan sub pokja juga melakukan pembahasan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator output terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga tahun 2030.
 - f. Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui diskusi-diskusi/FGD dan surat elektronik (email). Melalui pendekatan ini, Tim penyusun RAD TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD.

1.5 Sistematika RAD TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi NTB terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Tentang pendahuluan menjelaskan mengenai (1) Keselarasan TPB/SDGs dengan RPJMD; (2) Komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam melaksanakan TPB/SDGs; (3) Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs; (4) Metodologi Penyusunan RAD TPB/SDGs; (5) Sistematika RAD TPB/SDGs.

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs DI NTB

Menjabarkan tentang (1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; (2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta



meningkatkan pertanian berkelanjutan; (3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; (4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; (5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum; (6) Pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak; (7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern; (8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (9) Membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; (10) Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara; (11) Kota dan Pemukiman berkelanjutan; (12) Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; (13) Penangan perubahan iklim dan penanggulangan bencana; (14) Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lautan; (15) Pelestarian dan pemanfaatan ekosistem daratan; (16) Menciptakan perdamaian, menyediakan akses keadilan dan membangun kelembagaan yang tangguh; (17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global.

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN

Merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah Provinsi NTB yang terdapat pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029 yang kemudian diselaraskan dengan 17 Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan arah kebijakan ini, pemerintah Provinsi NTB menentukan program-program pembangunan yang diselaraskan dengan Tujuan TPB/SDGs seperti yang tertuang dalam dokumen perencanaan Renstra maupun Renja OPD setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan program kegiatan nonpemerintah sebagaimana tertuang dalam matrik Lampiran II.

BAB IV KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

Menguraikan penguatan ekosistem pendukung, mencakup partisipasi Nonstate Actor (MSA), interlinkages dan roadmap, pendanaan, dan mekanisme pemantauan dan evaluasi.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup pada bagian ini diuraikan tentang rangkuman upaya proses penyusunan RAD SDGs, manfaat penyusunan Renaksi SDGs dan sasaran Renaksi SDGs.



BAB II

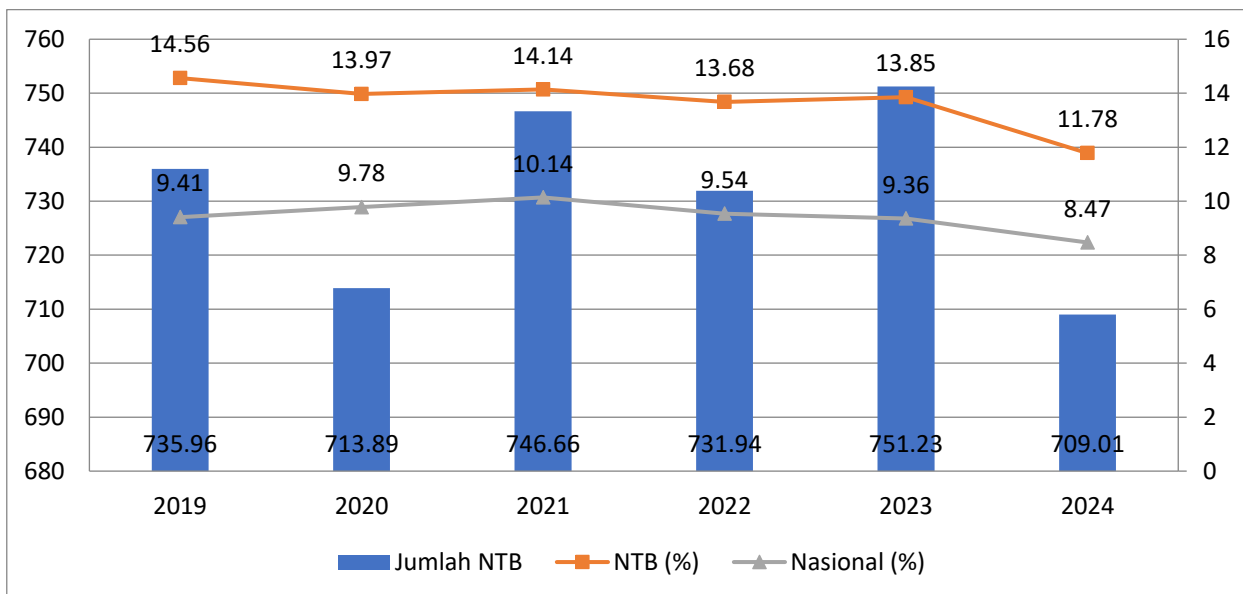
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs DI NTB

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

2.1.1 Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi

Dalam 5 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi NTB menurun dari 14.56 persen pada tahun 2019 menjadi 11,78 persen pada September 2024, atau rata-rata turun 0,14 persen per tahun. Dengan jumlah penduduk miskin sebesar 709.010 ribu jiwa pada tahun 2024. Pada tahun 2024 angka kemiskinan di NTB mengalami penurunan mencapai 11,78% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 654.570 jiwa. Angka kemiskinan di Provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional yang mencapai 8.47% di tahun 2024. Perkembangan jumlah dan tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi NTB, disajikan pada grafik 2.1 berikut.

Grafik 2.1 Jumlah dan Persentase Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: BPS NTB, 2025

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah pengeluaran (rupiah) minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan NTB per Maret 2023 sebesar Rp 498.996 per bulan naik 1,85 persen dibandingkan September 2022. Pada Maret 2024 Garis Kemiskinan NTB naik menjadi Rp 534.703/kapita/bulan. Garis Kemiskinan dibedakan menjadi Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan. Pada tahun 2019 Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 286.871/kapita/bulan, sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 98.009/kapita/bulan. Pada tahun 2024 Garis Kemiskinan Makanan meningkat menjadi Rp 404.637/kapita/bulan sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan meningkat menjadi Rp

130.066/kapita/bulan. Garis Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi Garis Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan. Garis Kemiskinan Perkotaan di NTB tahun 2019 sebesar Rp 396.696/kapita/bulan, sementara Garis Kemiskinan Pedesaan mencapai Rp 374.123/kapita/bulan. Pada tahun 2024 Garis Kemiskinan Perkotaan meningkat menjadi Rp 547.412/kapita/bulan, sementara Garis Kemiskinan Pedesaan meningkat menjadi Rp 520.679/kapita/bulan. Perkembangan Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan tahun 2019-2024, Perkembangan Garis Kemiskinan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2024 serta Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.1 sampai tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.1 Perkembangan Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan)

Uraian	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan (Rp/Kapita/Bln)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	286,871	302,545	318,425	342,789	374,441	404,637
Bukan Makanan	98,009	102,397	105,080	117,038	124,555	130,066
Jumlah	384,880	404,942	423,505	459,827	498,996	534,703

Sumber: BPS NTB, 2025

Tabel 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan)

Daerah	Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan (Rp/Kapita/Bln)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perkotaan	396,696	417,730	434,451	470,431	511,463	547,412
Pedesaan	374,123	393,218	412,646	448,965	485,682	520,679
Perkotaan+ Pedesaan	384,880	404,941	423,505	459,826	498,996	534,703

Sumber: BPS NTB, 2025

Tabel 2.3 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan)

No	Uraian	Tahun						Peningkatan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Lombok Barat	431.862	439.595	466.495	503.509	546.421	576.478	144.616
2	Lombok Tengah	404.633	421.439	447.200	480.657	520.852	549.400	144.767
3	Lombok Timur	430.727	447.263	472.304	503.525	546.404	583.957	153.230
4	Sumbawa	340.254	369.115	376.307	404.396	441.977	477.774	137.520
5	Dompu	328.740	362.142	370.120	404.413	442.451	469.647	140.907
6	Bima	327.602	356.352	363.228	395.040	429.327	451.386	123.784
7	Sumbawa Barat	468.122	489.863	499.013	518.619	565.599	611.142	143.020



No	Uraian	Tahun						Peningkatan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
8	Lombok Utara	437.543	451.721	478.906	514.755	556.462	594.789	157.246
9	Kota Mataram	480.304	499.959	524.762	562.661	616.536	657.667	177.363
10	Kota Bima	352.593	383.161	399.193	432.959	471.841	496.096	143.503
Provinsi NTB		384.880	404.941	423.505	459.826	498.996	534.703	149.823

Sumber: BPS Provinsi NTB, Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2025

Dari tabel 2.3 diketahui bahwa pada tahun 2019, rata-rata Garis Kemiskinan di Provinsi NTB Rp 384.880 per kapita per bulan, Garis kemiskinan paling tinggi terdapat di Kota Mataram (Rp 480.304 per kapita per bulan), sedangkan Garis Kemiskinan terendah di Kabupaten Bima (Rp 327.602. per kapita per bulan). Dan pada tahun 2024 rata-rata Garis Kemiskinan di Provinsi NTB Rp 534.703 per kapita per bulan. Garis kemiskinan paling tinggi terdapat di Kota Mataram (Rp 657.667 per kapita per bulan), sedangkan Garis Kemiskinan terendah di Kabupaten Bima (Rp 451.386 per kapita per bulan)

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin, tetapi perlu juga diperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Perkembangan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi NTB, termasuk 10 kabupaten/kota disajikan pada tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun						Peningkatan / Penurunan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Lombok Barat	3,42	2,91	1,7	1.82	1.78	1.84	-1.58
2	Lombok Tengah	1,56	1,42	1,69	2.01	2.12	1.56	0
3	Lombok Timur	1,48	1,84	2,88	2.58	3.57	2.66	1.18
4	Sumbawa	2,56	2,22	1,78	2.52	2.27	1.98	-0.58
5	Dompu	1,62	1,65	1,33	1.49	1.84	1.62	0
6	Bima	2,18	2,41	1,32	2.4	2.19	1.89	0.29
7	Sumbawa Barat	2,83	2,81	2,68	2.64	2.03	2.33	-0.5
8	Lombok Utara	7,39	7,09	5,69	6.08	4.44	4.81	-2.58
9	Kota Mataram	1,55	1,86	0,93	1.18	1.94	2.15	0.6
10	Kota Bima	1,58	0,60	1,12	1.28	1.5	1.44	-0.14
Provinsi NTB		2,33	2,58	2,24	2.49	2.38	2.44	0.11

Sumber: BPS NTB, 2025

Dari tabel di 2.4 diketahui Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 tertinggi pada tahun 2019, ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara sebesar 7,39 point, sedangkan P1 yang terendah di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1,48 point. PI tertinggi pada tahun 2024, ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara sebesar 4,81 point, sedangkan PI yang terendah di Kabupaten Lombok Tengah sebesar 1,56 point.



Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan.

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan pendapatan. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah melalui berbagai program antara lain Program jamban keluarga, pembangunan rumah tidak layak huni, BUMDES, kawasan rumah pangan lestari, kelompok usaha bersama, bank sampah, dan air bersih. Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah sejauh ini masih belum optimal yang tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok masyarakat 40 persen terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

2.1.2 Sistem dan Upaya Perlindungan Sosial Daerah

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Ada 4 bentuk perlindungan sosial utama untuk memenuhi kebutuhan dasar pengembangan SDM Indonesia seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai/Beras Sejahtera (BPNT/Rastra), Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

Program perlindungan sosial yang ada saat ini merupakan dasar bagi Indonesia untuk membangun sistem yang mengatasi risiko dan tantangan di masa depan. Program-program tersebut perlu dikembangkan dan beradaptasi dengan tren demografi, teknologi, dan lingkungan yang sedang muncul. Sistem perlindungan sosial di masa depan harus dapat diakses semua penduduk Indonesia tanpa memandang di mana mereka berada dan apa mata pencaharian mereka, serta harus memperluas perlindungan kepada penduduk usia lanjut miskin yang porsinya semakin besar serta para penyandang cacat

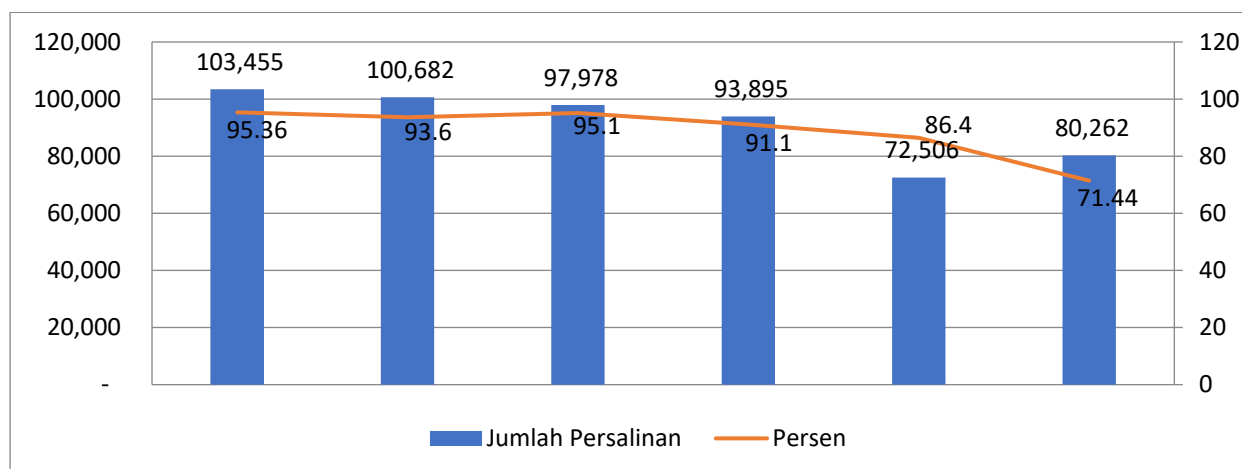
Perkembangan peserta jaminan kesehatan di Provinsi NTB cukup positif. Kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2024 terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 3,361,469 orang atau sebanyak 59.32 persen dari total penduduk, (PBI) APBD sebanyak 958,691 orang atau sebanyak 16.92 persen dari total penduduk, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 961,134 orang atau sebesar 16.96 persen, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Mandiri (PBPU Mandiri) sebanyak 296,283 atau 5,23 persen dan Bukan Pekerja (BP) sebanyak 79,672 atau 1,41 persen saat ini jamkesda dan asuransi swasta ataupun asuransi perusahaan sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2.1.3 Akses Terhadap Pelayanan Dasar untuk Penduduk Kelompok 40% Terbawah

Akses pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa aspek. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2019 sebesar 95.36 persen berarti sekitar

4,64 persen persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan (seperti: dukun beranak). Cakupan ini menurun jika dibandingkan dengan cakupan tahun 2024 yaitu 71.44 persen.

Grafik 2.2 Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025

Akses Pelayanan Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah terjadi peningkatan partisipasi pendidikan yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan, baik pada pendidikan formal maupun nonformal. Perkembangan APM di Provinsi NTB tahun 2019-2024 disajikan pada Tabel 2.5 berikut .

Tabel 2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2019-2024

No	Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	APM SMP/MTS/Paket B (%)	APM SMA/MA/SMK/Paket C (%)
1	2019	98.87	83.92	66.04
2	2020	98,78	84,98	66,81
3	2021	98,81	85,28	67,09
4	2022	98,83	86,05	67,61
5	2023	98,73	84,03	68,04
6	2024	98.57	83.55	71.09

Sumber: BPS NTB, 2025

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari ketiga jenjang Pendidikan APM hampir semua mengalami kenaikan. APM mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir 100 persen penduduk bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya, sementara APM yang semakin rendah menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak bersekolah pada jenjang yang

sesuai usianya. Dari tabel 2.5 terlihat bahwa tertinggi pada APM SD/MI/Paket A hamper mendekati 100 persen dan terendah APM SMA/MA/SMK/Paket C.

2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.2.1 Menghilangkan Kelaparan

Ketersediaan energi berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2020, secara umum tingkat ketersediaan energi untuk konsumsi masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 6.108,44 kkal/kapita/hari atau 254,52 persen lebih tinggi dari Angka Kecukupan Gizi/Energi yang dianjurkan yaitu sebesar 2.400 Kkal/kapita/hari. Ketersediaan kalori menurut sumbernya didominasi oleh bahan pangan yang berasal dari nabati. Besarnya sumbangan kalori yang bersumber dari nabati terhadap penyediaan energi sebesar 4,335.493 Kalori atau 70.98 persen dan sisanya 1,772.946 Kalori atau 29.02 persen bersumber dari pangan hewani.

Tabel 2.6 Konsumsi Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN						Rata-rata	Laju Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2,451.70	2,442.00	2,543.00	2,460.40	2,484.92	2.418	2,466.67	-0.24
	Tingkat Konsumsi Energi (% dari 2.150 kkal/kap/hari untuk tahun 2019-2022 Tahun 2023 menggunakan 2.100 kkal/kap/hari)	114.03	113.58	118.28	114.44	118,33	115.14	115.09	-0.24
2.	Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)	69,53	74,00	74,0	77,2	76,12	74.50	74,23	1,45
	Tingkat Konsumsi Protein 9% dari 57 gram/kap/hari)	121,98	129,82	130,9	135,4	133,54	130.70	130,22	1,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan tabel di 2.6 terlihat bahwa tingkat konsumsi energi penduduk NTB tahun 2024 sebesar 2.418 kkal/Kap/hari. Nilai capaian ini meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 2.484.92 Kkal/Kap/Hari. Capaian ini juga 118,33 persen di atas Angka Kecukupan Energi yang diipersyaratkan sebesar 2.100 kkal/kap/hari. Tingkat konsumsi Protein adalah perbandingan antara banyaknya protein yang dikonsumsi (gram) terhadap kecukupan protein, dalam satuan persen AKP. Konsumsi protein per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan gram. Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah sebesar 57 gram/kapita/hari. Konsumsi protein per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi protein rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Tingkat konsumsi protein penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2023 sebesar 76,12 gram/kap/hari atau 106,73% dari Target Tingkat Konsumsi Protein yang ditetapkan sebesar 71,32 gr/kap/hari. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat Konsumsi Protein tahun 2023 sebesar 76,12 gram/kap/hari lebih rendah dari capaian tahun 2022 sebesar 74,8



gram/kap/hari dan lebih tinggi dari Angka Kecukupan Protein (AKP) yang dipersyaratkan sebesar 57 gram/kap/hari. Namun peningkatan konsumsi protein masih didominasi oleh konsumsi protein yang berasal dari sumber pangan nabati terutama padi-padian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: (a) perilaku masyarakat yang masih merasa belum makan jika belum makan nasi; dan (b) masih rendahnya daya beli masyarakat. rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan.

Sedangkan Tingkat Konsumsi Energi adalah perbandingan antara banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi, dalam satuan % AKE. Konsumsi energi per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan kkal. Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari. Konsumsi energi per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi energi rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga (ART).

Tingkat konsumsi energi adalah perbandingan antara banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi, dalam satuan % AKE. Konsumsi energi per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan kkal. Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari. Konsumsi energi per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi energi rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga (ART).

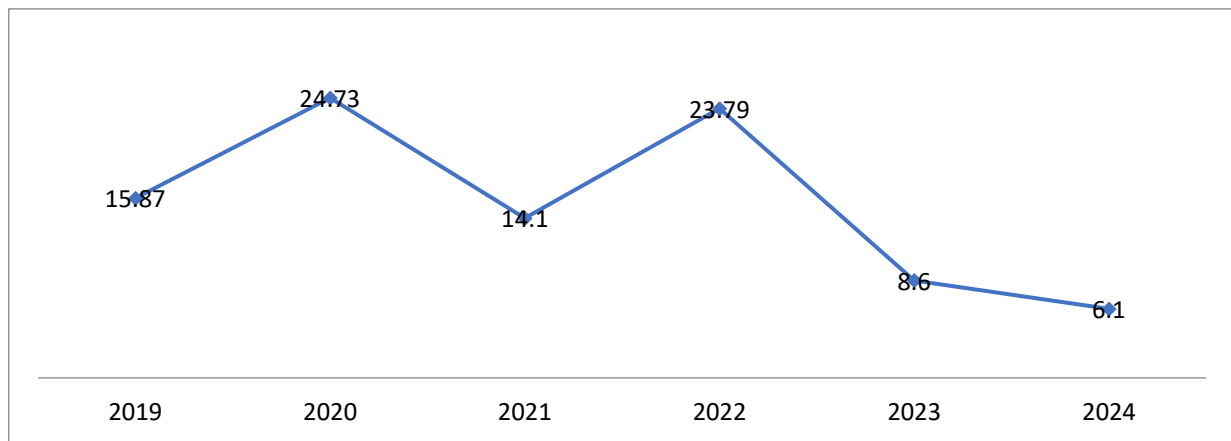
Berbagai ikhtiar kegiatan pada tahun 2020 telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung peningkatan Tingkat ketersediaan Energi Masyarakat NTB adalah memberikan hasil kajian berupa penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), Penyusunan Prognosa Ketersediaan Pangan Strategis dan pemantauan ketersediaan pangan di pinggilangan. Penyusunan Kajian ini melibatkan Instansi terkait seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan beberapa OPD terkait lainnya.

Dari sisi kebutuhan pangan, masalah dan tantangan yang dihadapi antara lain: (1) permintaan pangan dalam hal: jumlah, keragaman, kualitas, kandungan gizi, serta keamanan pangan, sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan rumah tangga, dan pengetahuan gizi masyarakat; (2) permintaan makanan jadi dan kebiasaan makan di luar rumah meningkat sejalan dengan urbanisasi dan meningkatnya proporsi perempuan bekerja; dan (3) akses pangan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil termasuk pulau-pulau kecil (akses fisik) dan bagi masyarakat berpendapatan rendah (akses ekonomi) masih terbatas.

2.2.2 Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target RPJMD yaitu penurunan prevalensi kurang gizi, melalui kegiatan pendidikan gizi masyarakat, penanggulangan kurang gizi baik gizi makro maupun gizi mikro, surveilans gizi dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Surveilans gizi melalui laporan rutin penemuan kasus gizi buruk yang sudah dikonfirmasi BB/PB atau BB/TB, perkembangannya dari tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut.

Grafik 2.3 Penemuan Kurang Gizi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025

Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB masih cukup tinggi, meskipun menunjukkan trend yang cenderung menurun. Pada periode 2019 - 2024 menurun dari 15,87 persen menjadi 6,1 persen tahun 2024. Pemerintah Daerah menunjukkan keseriusannya dalam menangani gizi buruk dan gizi kurang. Beberapa faktor penyebab keberhasilan penurunan prevalensi gizi kurang adalah Asupan gizi yang terus membaik, terus meningkatnya partisipasi masyarakat di posyandu, Hygiene sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih yang terus membaik, dan faktor-faktor lainnya.

Penilaian status gizi dilakukan setiap tahun di lakukan melalui survei Pemantuan Status Gizi (PSG). Rincian hasil pengukuran status gizi menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan tinggi badan menurut umur (TB/U) di Provinsi NTB tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB Provinsi NTB Tahun 2019-2024

No	Tahun	Uraian	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus (BB/TB)	
			Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
1	2019	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang	9.752	16,74				
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan			16.172	27,75		
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur					3.633	6,23
2	2020	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang	53.009	14,1				
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan			77.037	20,9		
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur					23.988	6,4
3	2021	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang	63,698	14,10				
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan			2,581	19,20		
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur					24,054	5,60
4	2022	Jumlah balita 0-59 bulan yang	68,128	15,10				

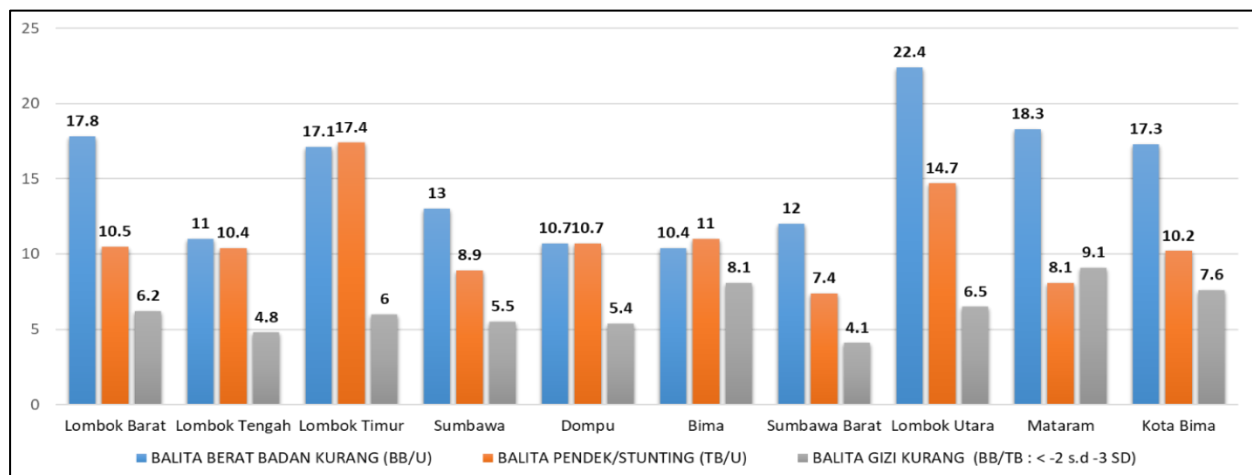


No	Tahun	Uraian	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus (BB/TB)	
			Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
		ditimbang						
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan			5,500	15,70		
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur					6,210	5,80
5	2023	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang	59.340	13.45				
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan			59.157	13.47		
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur					25.022	5.7
6	2024	Jumlah balita 0-59 bulan yang ditimbang	62.593	14.8				
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur tinggi badan			51.545	12.2		
		Jumlah balita 0-59 bulan yang diukur					26.890	6.4

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025

Hasil pengukuran status gizi balita per kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat tahun 2019 terlihat pada grafik 2.4 berikut.

Grafik 2.4 Status Gizi Balita di Provinsi NTB Tahun 2024



Sumber: NTB Satu Data, 2025

Pada grafik 2.4. terlihat bahwa balita stunting tertinggi sebesar 19.350 balita atau 17,4 persen berada di Kabupaten Lombok Timur. Balita Wasting tertinggi berada di Kota mataram sejumlah 2.297 balita atau 9,1 persen dan gizi kurang tertinggi berada di kabupaten Lombok Utara dengan umlah 4.889 balita atau sebesar 22,4 persen. Masalah gizi kurang, balita pendek dan balita kurus masih menjadi persoalan di NTB, sehingga memerlukan penanganan yang komperhensif dan terpadu baik itu lintas sektor dan lintas program dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Penilaian menggunakan indeks BB/U memberikan gambaran kondisi status gizi balita pada saat sekarang, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah kekurangan berat badan (kurang gizi atau gizi buruk) itu disebabkan oleh bentuk badan yang “kurus-tinggi” atau “gemuk-

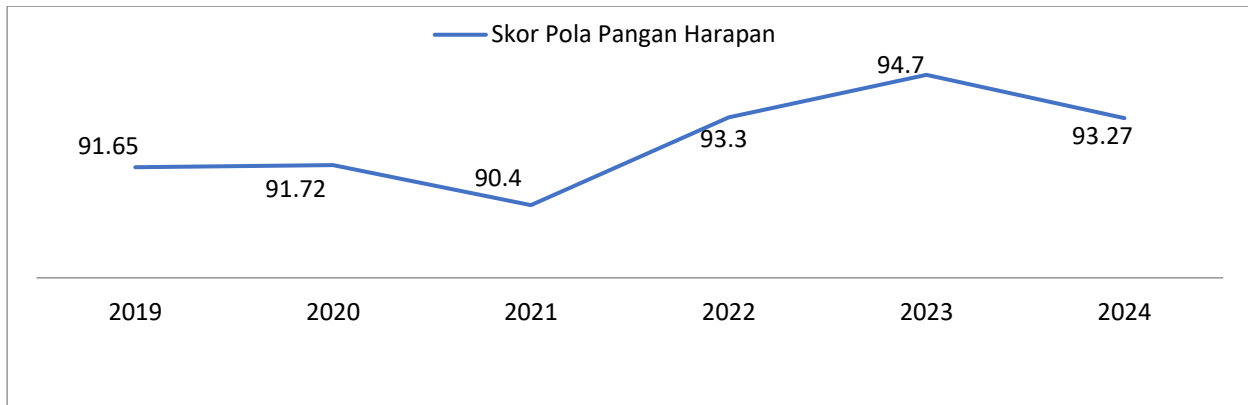


pendek”. Karena itu diperlukan indeks pengukuran lain, yaitu PB/U atau TB/U. Panjang badan atau Tinggi badan akan memberikan sumbangan berat badan yang cukup meskipun kondisinya kurus. Indikator panjang badan atau tinggi badan menurut umur memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya KRONIS sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan. Klarifikasi lebih lanjut untuk melihat dua indeks yang lainnya (PB/U atau TB/U dan BB/PB atau BB/TB) sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran penanganan yang lebih tepat.

Pada grafik 2.4. menunjukkan bahwa balita NTB masih ada yang berpostur stunted. Indikator panjang atau tinggi badan dapat mencerminkan gizi masa lalu anak, yaitu gizi ketika masih dalam kandungan hingga 2 tahun pertama kehidupannya. Penanganan masalah pendek (stunted) harus menjadi perhatian kita bersama, strategi penanganan untuk anak-anak pendek tersebut adalah dengan memperbaiki jumlah dan bioavailabilitas mikronutrien dalam diet dengan cara meningkatkan konsumsi makanan bersumber hewani dan bukannya meningkatkan asupan energi. Selain itu perlu adanya intervensi untuk menurunkan angka kemiskinan karena akan sangat berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat, disamping meningkatkan sosialisasi untuk memperbaiki pola asuh terutama dalam pemberian makanan pada anak dan gizi anak selama dalam kandungan. Status gizi seorang anak berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah provinsi NTB telah menginisiasi program Generasi Emas NTB (GEN), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak. Program ini dimulai dari pemantauan ibu hamil yang menjadi sasaran yang dilakukan oleh tenaga terlatih GEN, yaitu Kader GEN dan Pendamping Desa. Disamping itu, terkait dengan pelaksanaan GEN, jajaran Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB melaksanakan kegiatan Aksi Kepedulian yang dikenal dengan program Aksi Mahasiswa untuk Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang merupakan bagian dari program Aksi Seribu Hari atau disingkat ASHAR. Program GEN merupakan program jangka panjang Pemerintah Provinsi NTB, dengan tujuan pada tahun 2025 akan lahir generasi unggul, generasi emas dari NTB.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan agama. Pola Pangan Harapan (PPH) menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan Dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020. Pola pangan harapan (PPH) dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan berdasarkan data susenas yang dipersentase kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.100 (Kkal/kap/hari) dan kecukupan konsumsi protein (52 gram/kap/hari). Perkembangan capaian PPH dari tahun 2019–2024 dapat dilihat pada grafik 2.5 berikut:

Grafik 2.5 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan grafik 2.5 terlihat bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk NTB sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 menunjukkan kualitas yang terus membaik atau mengarah ke konsumsi yang beragam dengan skor PPH mendekati 100. Walaupun pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,43. PPH dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan berdasarkan data susenas yang dipersentase kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.000 (Kkal/kap/hari) dan kecukupan konsumsi protein (52 gram/kap/hari). Perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk NTB tahun 2019 – 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2019-2024

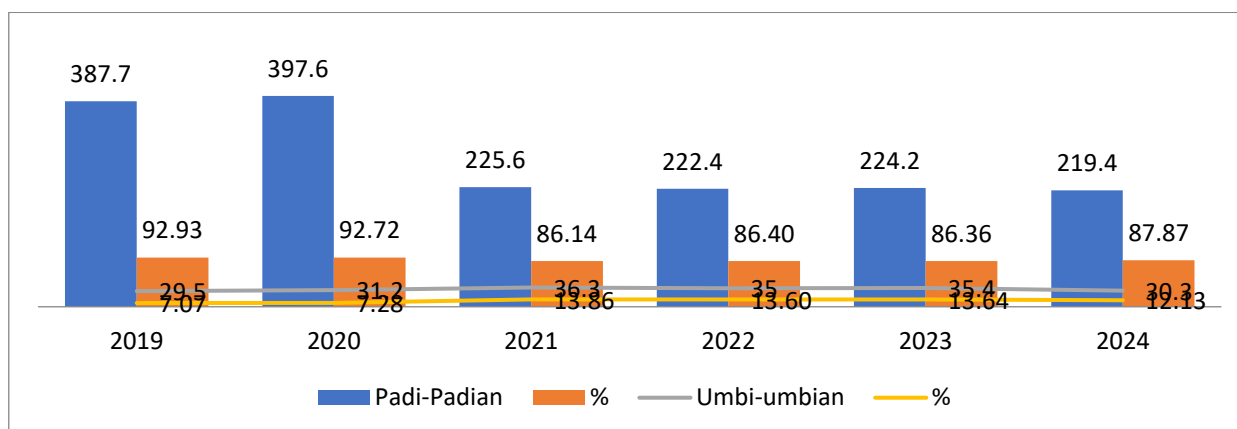
No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/ hari)	Konsumsi Aktual Tahun (gr/kap/hari)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi-padian	275	387,7	397,6	392,2	391,2	395.06	389.40
2	Umbi-umbian	100	29,5	31,2	34,7	41,5	42.59	31.62
3	Pangan Hewani	150	110,4	124,9	127,7	132,2	135.68	141.13
4	Minyak dan Lemak	20	22,2	22,9	23,3	25,3	24.53	23.71
5	Buah/Biji Berminyak	10	3,2	3,4	3,7	3,1	3.45	2.83
6	Kacang-kacangan	35	26,5	22,6	22,9	26,3	21.08	24.06
7	Gula	30	16,8	15,9	17,0	17,2	15.23	12.28
8	Sayur dan Buah	250	275,5	280,4	276,9	294,0	310.22	287.55
9	Lain-lain	-	120,3	149,7	149,3	136,3	135.45	133.67

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan tabel 2.8 terlihat bahwa konsumsi aktual padi-padian masih diatas konsumsi ideal 275 gr/kapita/hari, terutama konsumsi beras yang masih cukup tinggi, hal ini salah satu penyebab belum beragamnya pola konsumsi pangan masyarakat. Tingginya konsumsi protein sumbangan kelompok pangan padi-padian (beras) mencapai 72,0 persen, padahal protein beras memiliki kandungan 98 persen indeks glikemik. Indeks Glikemik adalah zat yang mempercepat merubah karbohidrat menjadi gula, sehingga menyebabkan masyarakat banyak menderita penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, obesitas (kegemukan). Alternatif lain sumber karbohidrat yang perlu ditingkatkan konsumsinya adalah umbi-umbian, berdasarkan data diatas konsumsi umbi-umbian masih jauh dibawah konsumsi

ideal. Perkembangan konsumsi padi-padian dan umbi-umbian penduduk NTB Tahun 2019-2024 disajikan pada grafik 2.6 berikut

Grafik 2.6 Perkembangan Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2019-2024



Sumber: NTB Satu Data, 2025

Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.00 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari, sebagai penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Provinsi NTB tahun 2019-2024 cukup berfluktuatif, namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan. Secara keseluruhan ketersediaan energi mengalami peningkatan mencapai 3,74 persen/tahun dan 3,03 persen/tahun untuk protein. Perkembangan ketersediaan energi dan protein tahun 2019-2020 disajikan pada tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.9 Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN						Rata-rata	Laju Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2,451.70	2,442.00	2,543.00	2,460.40	2,484.92	2,418	2,466.67	-0.24
	Tingkat Konsumsi Energi (% dari 2.150 kkal/kap/hari untuk tahun 2019-2022 Tahun 2023 menggunakan 2.100 kkal/kap/hari)	114.03	113.58	118.28	114.44	118,33	115.14	115.09	-0.24
2.	Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)	69,53	74,00	74,0	77,2	76,12	74.50	74,23	1,45
	Tingkat Konsumsi Protein 9% dari 57 gram/kap/hari)	121,98	129,82	130,9	135,4	133,54	130.70	130,22	1,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025

Selain menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama pada saat terjadi bencana, pakeklik serta menjaga stabilitas harga. Cadangan pangan merupakan salah satu

indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah. Perkembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di Provinsi NTB tahun 2019-2024 disajikan pada tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10 Cadangan Pangan Provinsi NTB Tahun 2019-2024

No	Uraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)					
		Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NTB	67.75	61.58	43.32	33.24	56.879	104.401
2	Cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota	140.41	232.62	175.68	184.04	201.039	186.007
Jumlah		208.16	294.20	219.00	217.28	257.918	290.408

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga pangan, dilakukan pemantauan harga pangan ditingkat pengumpul, sebagai upaya antisipasi jika terjadi gejolak harga untuk dilakukan operasi pasar pada saat harga pangan sudah melebihi batas toleransi yang ditentukan. Perkembangan harga pangan ditingkat pengumpul tahun 2019-2024 di Provinsi NTB, disajikan pada tabel 2.11 berikut.

Tabel 2. 11 Perkembangan Harga Pangan Ditingkat Eceran di Provinsi NTB Tahun 2019-2024

Tahun	Harga (Rp)						
	Beras Medium	Cabe merah keriting	Bawang merah	Daging ayam	Minyak Goreng bermerk	Daging Sapi	Cabe Rawit
2019	8.713	29.896	22.996	38.983	13.300	119.267	32.529
2020	8.738	29.238	29.121	38.771	14.304	122.000	28.821
2021	8.408	36.188	23.550	39.796	15.338	122.371	51.125
2022	8.475	38.425	26.971	40.425	21.692	121.746	47.983
2023	10.225	34.692	28.444	38.682	19.470	121.935	35.062
2024	13.077	43.075	29.854	41.316	18.808	121.855	40.521
Rata-rata	9.607	35,219	26,823	39,662	17,152	121,529	39,340
Peningkatan Tahunan (%)	33.37	30.60	22.97	5.65	29.29	2.12	19.72

Sumber: Bank Indonesia diolah oleh Pusdatin Kementan, 2025

Pemantauan arus keluar masuk komoditas bahan pangan dari dan menuju Provinsi NTB dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan tenaga Enumerator yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan laut. Melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan laut lokasi pemantauan yaitu Pelabuhan Lembar, Labuhan Haji, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Sape, Benete, Kempo dan Pelabuhan Bima

2.2.3 Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

Sektor pertanian NTB terdiri atas tiga sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Komoditi strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai. Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024 mengalami perkembangan seperti yang terlihat pada tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019-2024

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi (Gabah ing Giling)	2,095,118	2,323,700	1,419,559.84	1,452,945.00	1,538,536.92	1.453.408
2	Jagung (Pipilan Kering)	1,278,271	86,494.7	1,019,225	1,421,922	1,249,262	1.636.497
3	Kedelai (Biji Kering)	10,948	51,365	71,908	40,680	32,415	8.770

Sumber: BPS NTB, 2025

Sedangkan komoditas pertanian lainnya adalah tanaman hortikultura yang terdiri dari Cabai dan Bawang merah sebagai mana tabel 2.13 berikut:

Tabel 2.13 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2019-2024

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cabe (buah segar)	109,037	1,190,818	234,528	181,926	989,894	110.303
2	Bawang merah (umbi kering)	222,805	208,156	212,885	161,411	188,740	159.885

Sumber: BPS, 2024

Komoditi tanaman perkebunan NTB adalah kopi, kakao, kelapa, jambu mete dan tembakau dengan produksi tahun 2019 -2024 sebagaimana tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14 Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019-2024

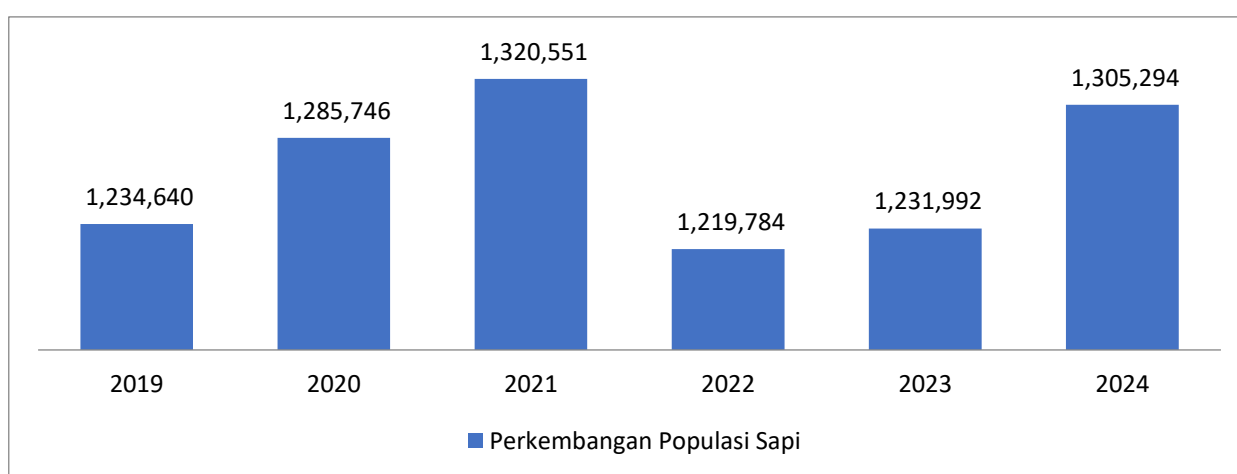
NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (TON)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kopi (biji berasan)	5.358,71	5.615,59	6.327,70	6.384,25	6.428,86	6.423,36
2	Kelapa (kopra)	47,140.68	47.645,55	48.851,24	48.892,38	49.683,62	49.809,25
3	Kakao (biji kering)	2,497.24	2.566,06	2.638,63	2.520,26	2.569,15	2.589,40
4	Jambu Mete (biji gelondong)	10,564.62	11.313,34	11.616,70	10.850,09	10.129,97	9.812,38
5	Tembakau (daun kering)	62.758,58	57.064,91	52.631,98	59.786,26	66.436,64	77.344,93

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2025

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pengembangan sub sektor peternakan yang sangat besar karena didukung ketersediaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan peternakan. Upaya peningkatkan populasi dan produksi peternakan dilakukan melalui program intensifikasi pengembangan komoditas terutama pada komoditas strategis

yang mendukung peningkatan sektor ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sub sektor peternakan merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan pertanian yang memiliki nilai strategis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam konteks pembangunan ekonomi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mendukung Program ketahanan pangan nasional di NTB. Sub sektor peternakan merupakan salah satu program unggulan daerah dan diharapkan sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan serta memiliki daya ungkit sektor ekonomi lainnya. Keberhasilan sub sektor peternakan ditunjukkan oleh indikator peningkatan populasi ternak sapi dalam kurun waktu 2019 - 2024 telah berhasil meningkatkan rata-rata pertumbuhan populasi sebesar 5,41 persen yang tersebar di Kabupaten/Kota sebagaimana pada grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7 Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2025

Pelestarian sumberdaya ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus dipertahankan bahkan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dibutuhkan program dan kegiatan yang bersifat intensif-massiv dan inovatif dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan NTB BSS. Capaian kinerja subsektor peternakan (ternak sapi) sebagaimana tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Sub Sektor Peternakan (Ternak Sapi) Tahun 2020-2024

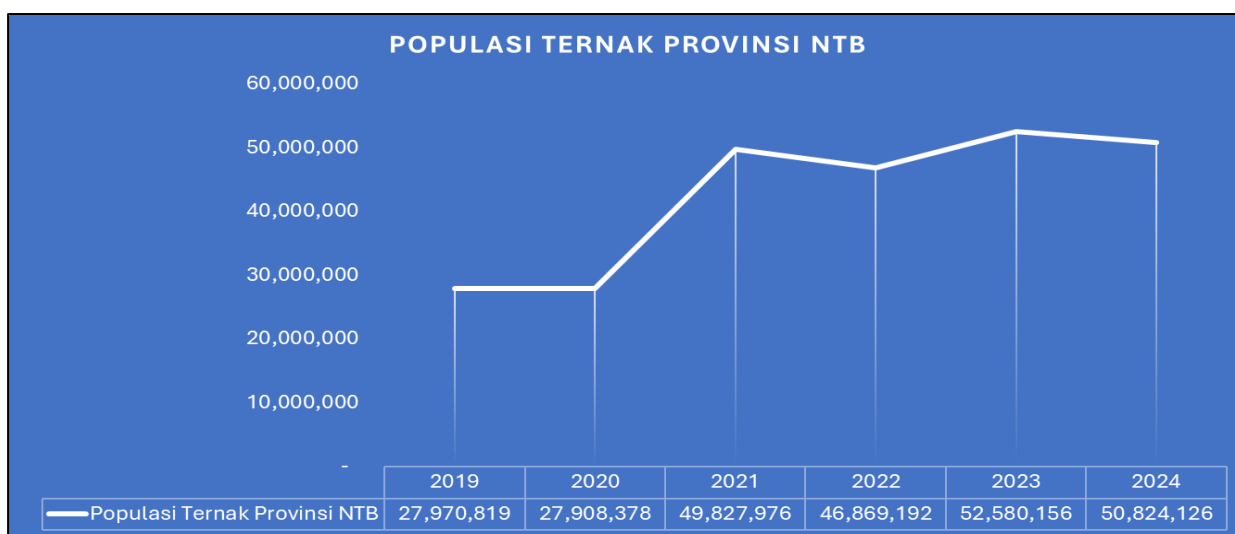
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Populasi	Ekor	1.285.746	1.320.551	1.219.784	1.288.610	1.308.204
2	Induk Produktif	Ekor	578.586	597.345	548.902.80	579.874.50	588.691.80
		%	45	45	45	45	45
3	Kelahiran Pedet	Ekor	462.869	477.876	411.677.10	434.905.88	441.518.85
		%	80	80	75	75	75
4	Kematian Pedet	Ekor	46.287	47.787	41.167.71	43.490.59	44.151.89
		%	10	10	10	10	10
5	Pemotongan Betina Produktif	Ekor	60	10	0	0	0
		%	1	0.19	0	0	0
5	Pengeluaran Bibit	Ekor	318	1.101	160	2.543	2.543
6	Pengeluaran Ternak Potong	Ekor	9.222	13.979	17.330	42.533	42.533

	INDIKATORKINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
7	Serapan TenagaKerja	Orang	321.437	331.858	304.946	322.152.50	327.051
8	Kesejahteraan Masyarakat (NTP)	%	107	108.61	106.98	205.02	108.79

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2025

Disamping sapi komoditas strategis peternakan yang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat digambarkan dalam populasi ternak sebagaimana grafik 2.8 berikut.

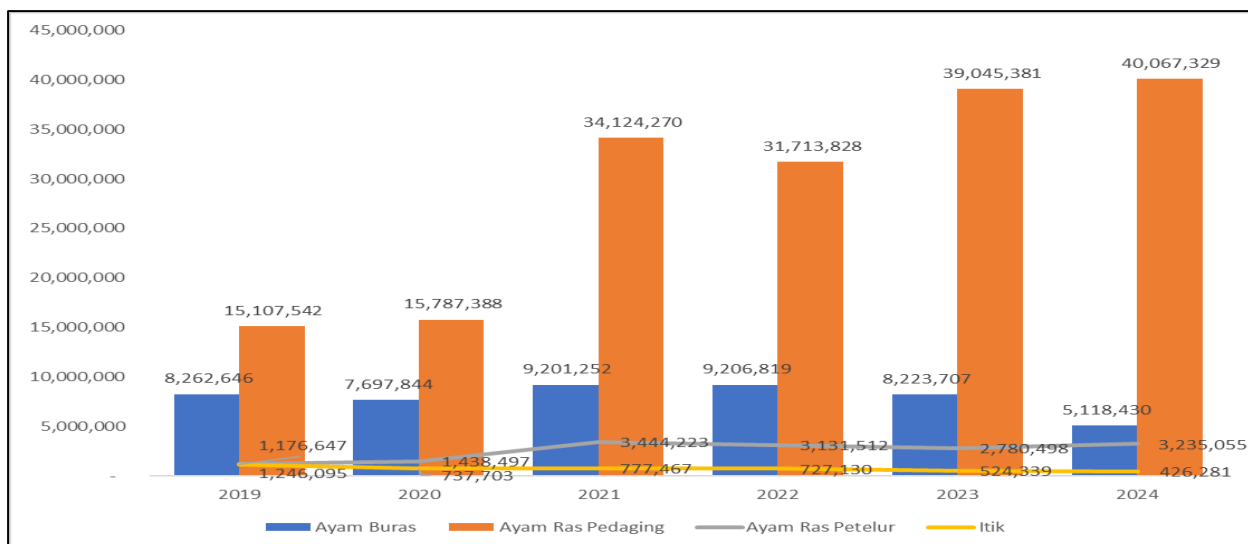
Grafik 2.8 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2025

Dari grafik 2.8 terlihat bahwa populasi ternak tertinggi terjadi pada tahun 2023 dimana populasi ternak mencapai 52.580.156 ekor, dengan populasi tertinggi pada ayam ras pedaging sebesar 39.045.381. Populasi ayam ras pedaging lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar 40.067.329 ekor. Tetapi secara populasi ternak tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dengan populasi sebanyak 50.824.126 ekor. Secara umum populasi ternak di NTB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk perkembangan Populasi Unggas dapat di lihat pada grafik 2.9 berikut ini.

Grafik 2.9 Populasi Ternak Unggas Tahun 2019-2024



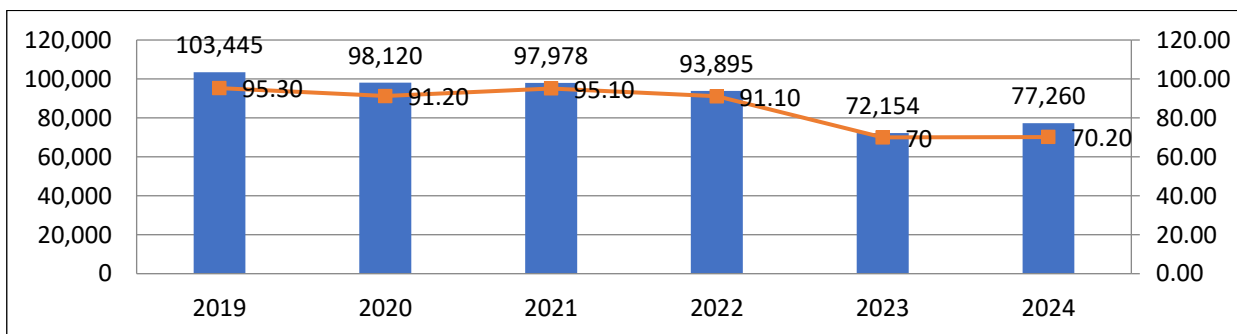
Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2025

Pengukuran pencapaian target kinerja sasaran berdasarkan pemetaan kinerja pada awal tahun 2024 memberikan gambaran tercapainya atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan dokumen penetapan kinerja tingkat satuan kerja perangkat daerah tahun 2024.

2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

2.3.1 Mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI)

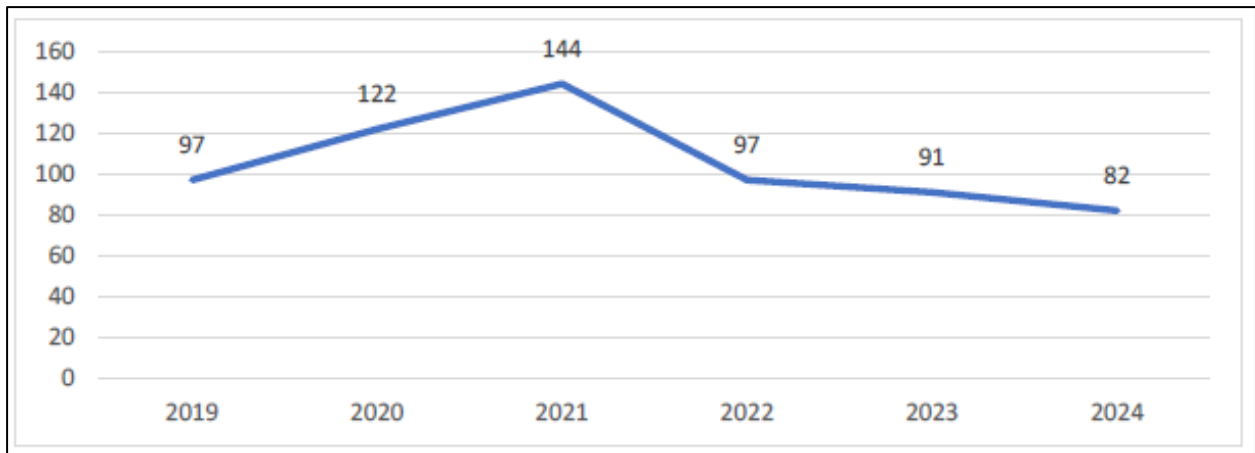
Grafik 2.10 Angka Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB 20245

Akses pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami peningkatan pada beberapa aspek. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2019 sebesar 95.30 persen berarti sekitar 4,70 persen persalinan ditolong oleh tenaga non kesehatan (seperti: dukun beranak). Cakupan ini menurun jika dibandingkan dengan cakupan tahun 2024 yaitu 70.20 persen, artinya tingkat kesadaran ibu melahirkan pada tenaga kesehatan semakin menurun. Untuk tahun-tahun berikutnya, diharapkan dapat terus melakukan pengawasan pada ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan K4 agar pada saat memasuki masa persalinan dapat tetap tertangani oleh tenaga kesehatan. Kematian ibu menurut WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari. Adapun data kematian ibu bisa dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 2.11 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber data: Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2025

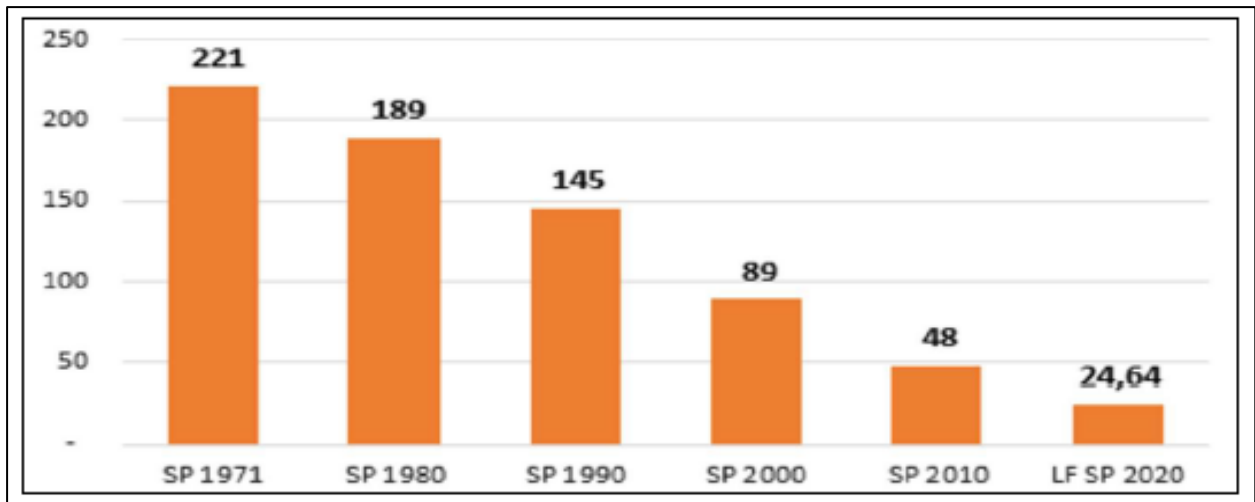
Jumlah kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain lain.

Data jumlah kematian ibu melalui pelaporan Dinas Kesehatan secara berjenjang menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2019 sebanyak 97 kasus menjadi 82 kasus pada tahun 2024. Penyebab kematian ibu terbanyak Adalah perdarahan.

2.3.2 Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk karena indikator ini merupakan refleksi sosial ekonomi yang terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak, status gizi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Jumlah Kematian neonatal, bayi dan balita dapat di lihat pada grafik 2.12 berikut:

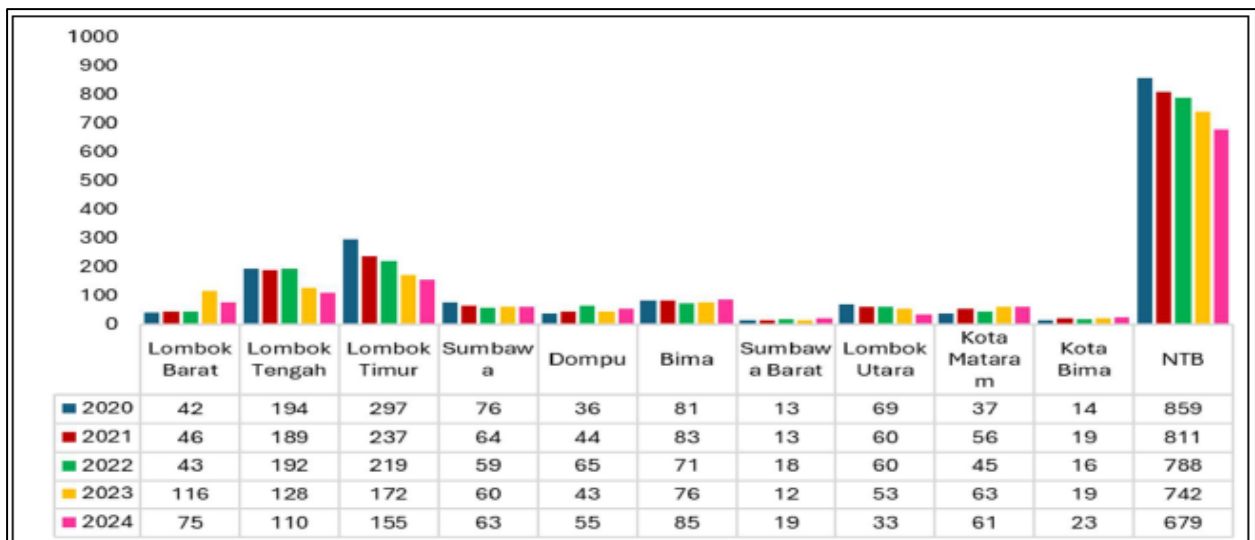
Grafik 2.12 Jumlah Kematian Bayi di Provinsi NTB



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2024

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate/IMR) adalah banyaknya kematian bayi usia di bawah 1 tahun (0–11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Dalam rentang 50 tahun (periode 1971–2022), penurunan angka kematian bayi di NTB hampir 90 persen. Angka kematian bayi di NTB menurun signifikan dari 48 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 24,64 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP 2020. Peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata-rata lama pemberian ASI membuat bayi semakin mampu bertahan hidup. Sedangkan jumlah kematian bayi di Provinsi NTB juga cenderung menurun setiap tahunnya, sebagaimana terlihat dalam grafik 2.13 berikut.

Grafik 2.13 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Provinsi NTB 2020–2024



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2025

Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) di Provinsi NTB pada tahun 2007 sebesar 72/1000 kelahiran hidup mengalami penurunan menjadi 57/1000 kelahiran hidup sesuai data SDKI 2012. Jumlah kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2019–2024, sebagaimana tabel 2.16 berikut.



Tabel 2.16 Kematian Bayi Tahun 2020-2024

NO	Kab/ Kota	2020		2021		2022		2023		2024	
		Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup
1	Lombok Barat	42	13,663	46	13,148	43	12,474	116	12,514	116	12.684
2	Lombok Tengah	194	19,145	189	18,234	192	18,856	128	17,277	128	12.828
3	Lombok Timur	297	24,651	237	23,508	219	24,600	172	22,896	172	20.248
4	Sumbawa	76	9,052	64	8,613	59	8,112	60	7,767	60	5.994
5	Dompu	36	5,763	44	5,571	65	369	43	4,576	43	4.195
6	Bima	81	10,084	83	9,655	71	9,611	76	9,010	76	7.207
7	Sumbawa Barat	13	3,495	13	3,393	18	2,459	12	2,296	12	2.073
8	Lombok Utara	69	4,443	60	4,244	60	4,236	53	3,888	53	3.543
9	Kota Mataram	14	8,842	19	8,564	16	6,483	63	5,723	63	5.168
10	Kota Bima	37	3,339	56	3,235	45	3,062	19	2,828	19	2.315
NTB		859	102,477	811	98,165	788	95,262	742	88,775	742	76.255
Proporsi (per 1.000 KH)		8.38		8.26		8.27		8.36		9,73	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024

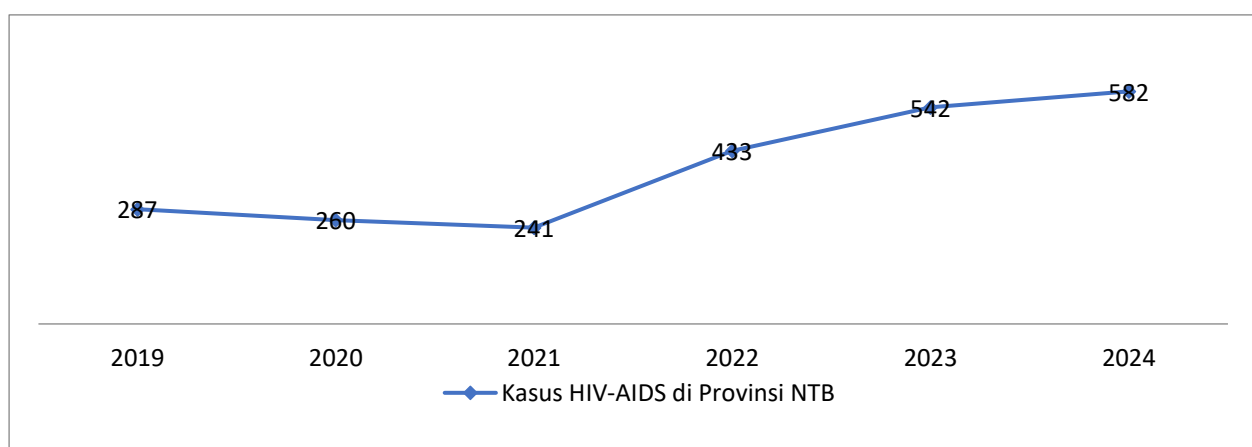
Tabel 2.16. diatas menunjukkan bahwa kematian bayi terbanyak terjadi di Lombok Timur. Jumlah penduduk dan luas wilayah terbesar di Provinsi NTB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kematian bayi di Kabupaten Lombok Timur. Mendekatkan dan memudahkan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tersebar di wilayah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan, meningkatkan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan kontinyu terutama tetang kesehatan reproduksi serta sosialisasi yang lebih intens adalah beberapa upaya yang diharapkan dapat menekan kasus kematian pada bayi. Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta kegawatdaruratan maternal termasuk kompetensi SDM, fasilitas, puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); 2) peningkatan layanan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, serta pentingnya pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan bagi ibu hamil; 3) peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak; 4) peningkatan peran Posyandu; dan 5) peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan terutama imunisasi dan manfaatnya kepada masyarakat umum.

2.3.3 Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular

Kasus HIV/AIDS merupakan fenomena gunung es, jumlah kasus yang ditemukan sangat sedikit dibandingkan dengan kenyataannya. HIV/AIDS patut mendapat perhatian serius dari semua pihak mengingat eksese yang dapat ditimbulkan bagi masyarakat luas. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, maka Provinsi NTB berpotensi sebagai tempat terjadinya penularan HIV-AIDS. Demikian juga sebagai salah satu daerah pengirim tenaga kerja ke luar negeri, kemungkinan terjadinya penularan HIV-AIDS cukup besar. Kasus HIV-AIDS ditemukan di seluruh kabupaten/ kota se-Provinsi NTB. Jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi NTB setiap tahun terus mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Provinsi mencatat, jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2024 sebanyak 582 kasus ini meningkat 40 orang dibandingkan tahun 2023 sebanyak 542 kasus. Jumlah riil kasus penderita HIV/AIDS diyakini lebih besar dari kasus yang terdata saat ini.

Sebab banyak orang dengan gejala HIV/AIDS tidak berani memeriksakan diri karena stigma negatif dari lingkungan sekitar. Kasus HIV/AIDS terbanyak ditemui pada kelompok umur 25-49 tahun. Sedangkan profesi penderita tertinggi adalah wiraswasta, lalu diikuti ibu rumah tangga. Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan, sekitar 76 persen adalah kelompok laki-laki dan sisanya perempuan. Komitmen penganggaran pemerintah daerah berperan penting dalam pencegahan penularan penyakit menular ini. Sejauh ini, seluruh pemerintah daerah telah membentuk komisi penanggulangan AIDS untuk mengkoordinir pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara efektif dan terpadu di daerah. Namun seluruh program penanggulangan semestinya didukung ketersediaan pembiayaan yang memadai untuk berbagai kegiatan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2008. Berikut tren kasus baru HIV – AIDS terlihat pada grafik 2.14 berikut.

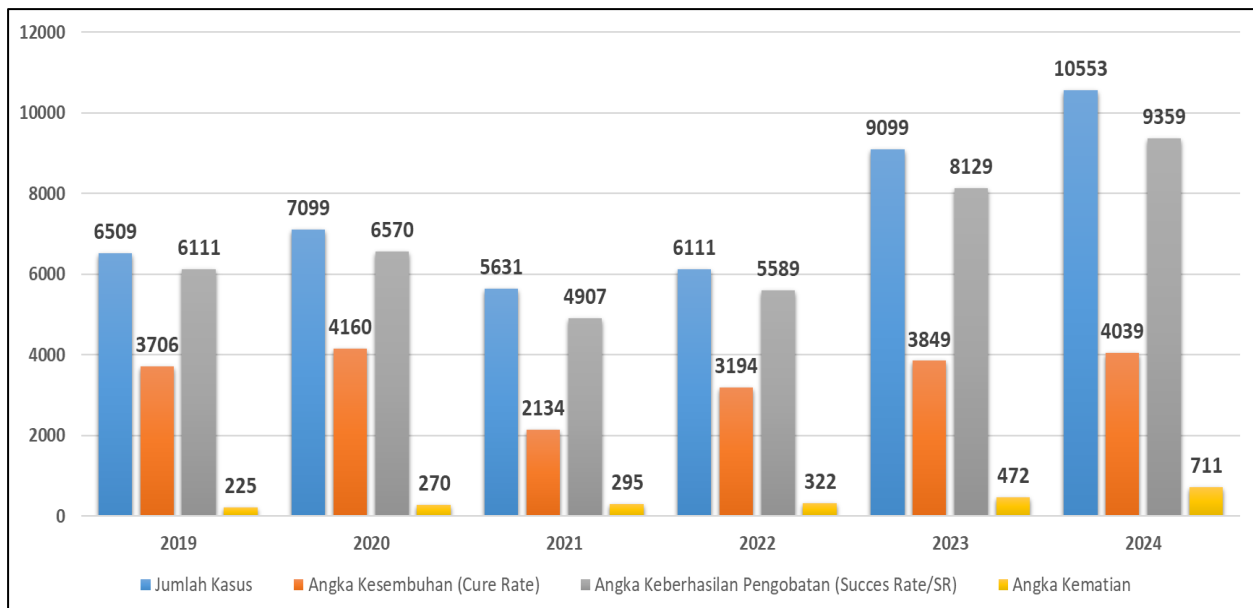
Grafik 2.14 Tren Kasus Baru HIV-AIDS di Provinsi NTB 2019-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Prov. NTB, 2025

Tuberkulosis (TB) yang juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini merupakan bakteri basil yang sangat kuat sehingga memerlukan waktu lama untuk mengobatinya. Tujuan penemuan dan penanggulangan penyakit TB adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di Provinsi NTB, pada tahun 2018 dilaporkan bahwa jumlah kasus pasien TB mencapai 6.583 orang, dan dinyatakan sembuh melalui pengobatan sebanyak 5.678 orang dengan kematian sebanyak 257 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah kasus pasien TB adalah 6.509 orang, dengan 6.111 orang merupakan sembuh dengan pengobatan dan kasus kematian sebanyak 225 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Kasus TB ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dimana angka kasus menjadi 7.099 orang atau naik 9,06% dibandingkan tahun 2019. Tetapi Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 6.570 orang, dan kematian sebanyak 270. Trend keberhasilan pengobatan (SR) di Provinsi NTB tahun 2019-2024 terlihat pada grafik 2.15 berikut.

Grafik 2.15 Tren Keberhasilan Pengobatan (*Succes Rate*) TB Paru, Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2025

Grafik 2.15. memperlihatkan bahwa SR pengobatan TB Paru cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah kasus TP sejumlah 6.509 orang dengan angka kesembuhan 3.706 dan angka keberhasilan pengobatan (SR) sejumlah 6.111 atau 93,9 persen dan angka kematian 3,5 persen. Pada Tahun 2024 umlah kasus TB meningkat menjadi 10.553 kasus dengan angka kesembuhan 4.039 dengan angka keberhasilan pengobatan (SR) 9.359 atau 88,7 persen lebih rendah 0,6 persen dibandingkan tahun 2023 dan angka kematian 711 kasus atau 0,07 persen, secara umum walaupun kasus TB dari tahun ketahun mengalami peningkatan tetapi Tingkat pengobatan dan kesembuhan juga semakin membaik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pelayanan Kesehatan semakin membaik.

Mengingat TB adalah kasus yang membutuhkan penanganan yang lama dan bersifat menular, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam penanggulangannya. Penjangkauan suspek yang lebih intens dan luas, sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat, pelatihan yang kontinyu bagi petugas kesehatan serta dukungan dalam penganggaran adalah upaya yang bisa dilakukan untuk menurunkan angka kejadian TB.

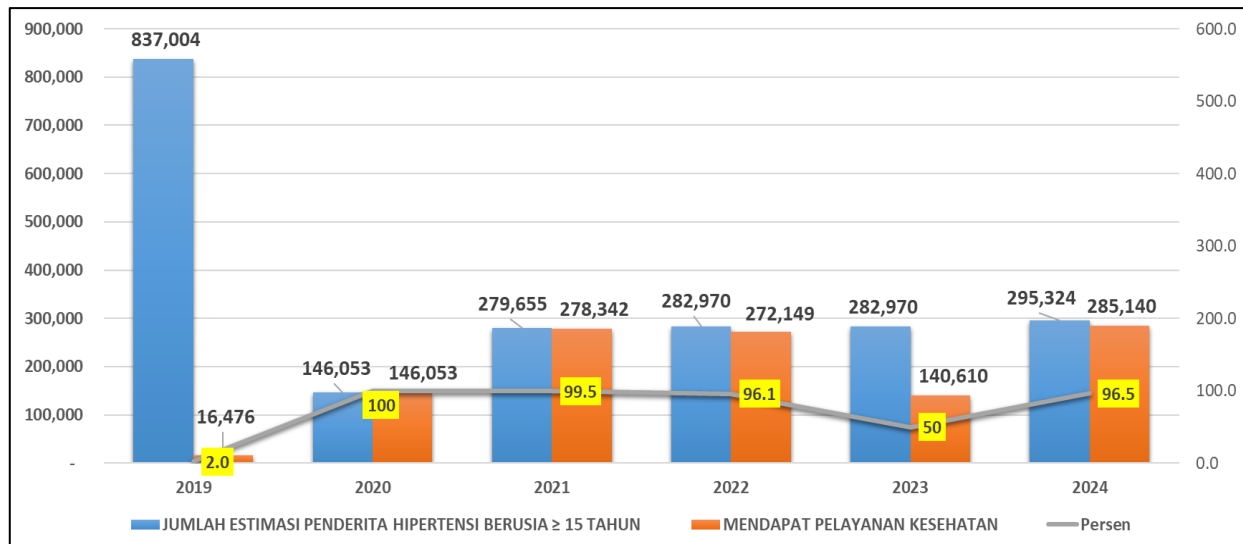
2.3.4 Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis, tidak ditularkan dari orang ke orang. PTM mempunyai durasi yang panjang dan umumnya berkembang lambat. Empat jenis PTM utama menurut WHO adalah penyakit kardiovaskular (penyakit jantung koroner, stroke), kanker, penyakit pernafasan kronis (asma dan penyakit paru obstruksi kronis), dan Diabetes Melitus (DM).

Peningkatan kasus PTM kemungkinan akan terus berlanjut seiring dengan perubahan life style atau perilaku masyarakat seperti kurang olahraga atau aktifitas fisik, pola makan dengan gizi tidak seimbang, lebih banyak mengonsumsi fast food atau junk food, perokok dan lingkungan yang tidak bebas asap rokok. Di Provinsi NTB, faktor resiko dan PTM yang dilaporkan kabupaten/kota adalah hipertensi, obesitas dan pemeriksaan kanker leher rahim dan payudara. Deteksi dini faktor resiko PTM di semua tingkatan pelayanan kesehatan, penanggulangan faktor

resiko PTM dan pencegahan dan penanggulangan faktor resiko PTM berbasis masyarakat merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menekan resiko atau angka kematian akibat PTM. Salah satu deteksi dini faktor resiko PTM adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah yang dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan.

Grafik 2.16 Tren Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2025

Grafik 2.16 menunjukkan bahwa penderita hipertensi berusia ≥ 18 tahun tiga tahun terakhir berfluktuasi dan tahun 2024 jumlah penderita hipertensi 285.140 orang dan 96,5 persen mendapat pelayanan kesehatan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 140.610 kasus dan 50 persen mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan melihat trend pada grafik maka kinerja tenaga kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk memenuhi target 100 persen penyakit hipertensi ini bisa terlayani.

2.3.5 Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Jumlah penduduk yang tercakup dalam JKN terus ditingkatkan. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Prabayar Peran serta masyarakat adalah syarat mutlak bagi keberhasilan, kelangsungan dan kemandirian pembangunan di bidang kesehatan yang diwujudkan antara lain sebagai penyelenggara berbagai upaya pelayanan kesehatan dan dalam membiayai pemeliharaan kesehatan. Peran serta dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan terlaksana antara lain dalam bentuk pengeluaran biaya langsung untuk kesehatan, dana sehat, asuransi sosial di bidang kesehatan dan berbagai bentuk pembiayaan kesehatan prabayar.

Perkembangan peserta jaminan kesehatan di Provinsi NTB cukup positif. Kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2024 sebanyak 99.6 persen tetapi mengalami peningkatan 2.29 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 97.31 persen. Jamkesda dan asuransi swasta ataupun asuransi perusahaan sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

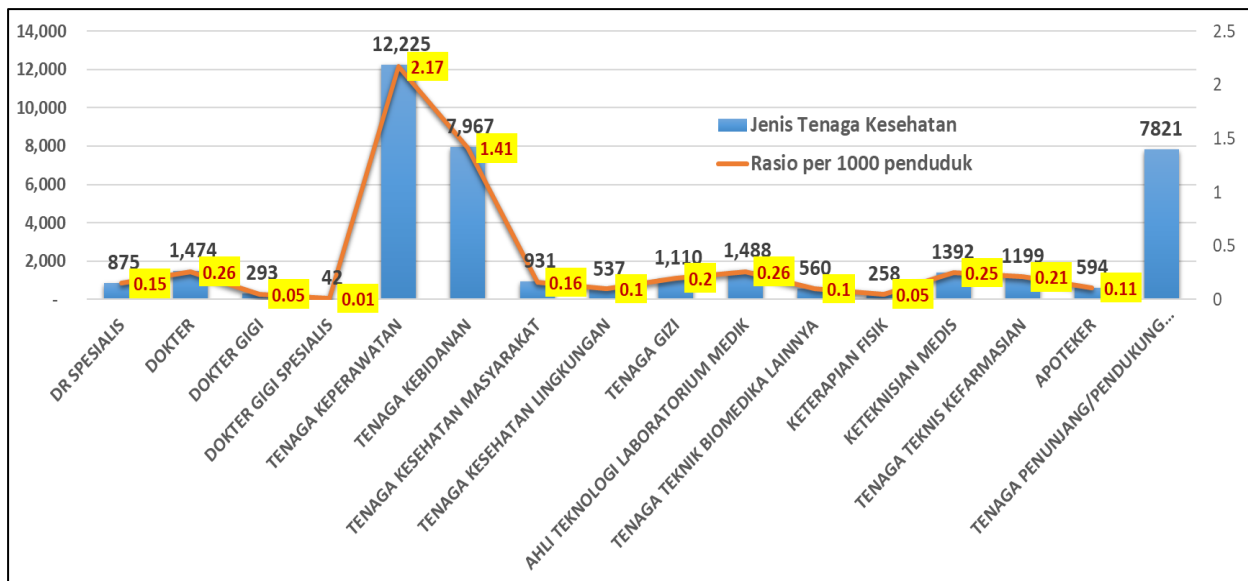
2.3.6 Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Informasi tentang fertilitas diperoleh dengan menanyakan kepada semua Wanita Usia Subur (WUS) yang menjadi sampel SDKI mengenai jumlah anak yang pernah dilahirkan seumur hidupnya, baik pria maupun wanita, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Untuk mendapatkan laporan lengkap tentang anak, WUS ditanya tentang jumlah anak yang tinggal di rumah, tinggal di tempat lain, dan yang sudah meninggal. Setiap anak yang lahir hidup ditanyakan jenis kelamin, tanggal lahir, dan status kelangsungan hidup. Sedangkan anak yang sudah meninggal ditanyakan umur ketika meninggal. Berdasarkan SDKI, angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) di Provinsi NTB mengalami stagnasi dalam satu dekade terakhir, yaitu 2,41 anak per 1.000 perempuan pada tahun 2023 dan pada angka 2.43 pada Tahun 2024, mengalami peningkatan 0.02 pada Tahun 2024. Sementara itu, Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern: (b) Kelompok Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 73,22 persen pada tahun 2023 dan meningkat 9.78 persen pada angka 83 persen. Unmet need pelayanan kesehatan menurun dari 9.04 tahun 2023 menjadi 8,24 persen pada tahun 2024. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin.

Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat. Namun, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan belum merata. Tenaga Kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga sanitarian, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya.

Berdasarkan Data dari aplikasi SISDMK Kemenkes RI per 31 Oktober 2024 jumlah total tenaga kesehatan di NTB pada tahun 2024 adalah 13.123 orang, dengan rincian tenaga medis 8.353, tenaga keperawatan 2.326, tenaga kefarmasian 1.194, tenaga kesehatan masyarakat 620, tenaga gizi 1.154, dan sisanya merupakan gabungan dari tenaga terapis dan teknis medis. Proporsi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.17 Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2024

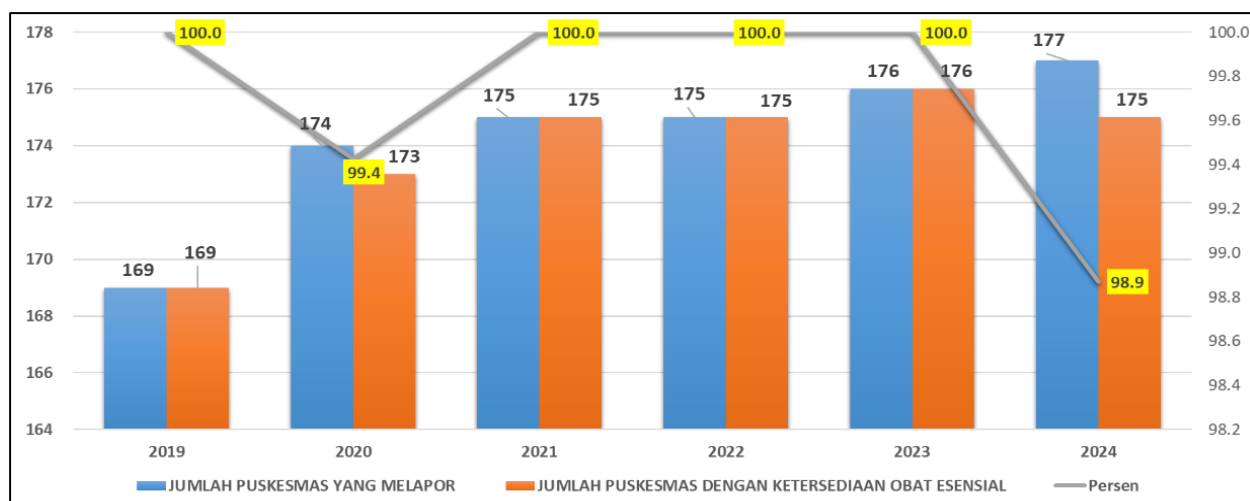


Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2025

Grafik 2.17. memperlihatkan bahwa proporsi terbanyak adalah tenaga perawat sebanyak 12.225 orang dengan rasio per 1000 penduduk 2,17, diikuti oleh tenaga kebidanan sebanyak 7.967 orang dengan rasio per 1000 penduduk 1,41. Rasio dokter spesialis ini berada di atas target rasio yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebesar 11 per 100.000 penduduk (target 2019). Berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025. Tahun 2025 (per 100.000 penduduk), Dokter Spesialis 12, Dokter Umum 50, Dokter Gigi 14, perawat 200, Bidan 130, Perawat gigi 21, Apoteker 15, Tenaga teknis kefarmasian 30, SKM 18, Sanitarian 20, Gizi 18, Keterampilan Fisik 6 dan Keteknisan Medis 18. Tenaga dokter gigi di fasilitas kesehatan yang ada di Provinsi NTB sebanyak 240 pada tahun 2023 dengan rasio 3,40 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2025. Rasio dokter gigi di Provinsi NTB masih dibawah target rasio yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebesar 14 per 100.000 penduduk (tahun 2019). Tenaga perawat di fasilitas kesehatan yang ada Provinsi NTB sebanyak 12.307 dan rasio tenaga perawat adalah 158,30 per 100.000 penduduk, masih di bawah target rasio yang ditetapkan berdasarkan Kepmenko Bid.Kesra No.54 Tahun 2013 yaitu sebesar 180 per 100.000 penduduk (tahun 2019).

Gambaran tentang ketersediaan obat dan vaksin di Kabupaten/Kota se Provinsi NTB tahun 2019-2024 dapat dilihat pada grafik 2.18 berikut.

Grafik 2.18 Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas menurut Kab/Kota se Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2025

2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

2.4.1 Partisipasi Pendidikan Penduduk NTB

Perluasan akses pendidikan merupakan pilar kebijakan yang diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2019 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pencapaian yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB.

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Utama Perluasan Akses Pendidikan

SASARAN (IKU)	REALISASI TAHUN (%)				
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2023/2024
ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)					
a APK PAUD	86.95	42.18	43.77	42.13	100
b APK SD/MI/PAKET A	105.86	107.21	107.07	105.80	100
c APK SMP/MTs/PAKET B	108.22	92.59	93.32	92.28	100
d APK SMA/MA/SMK/PAKET C	106.41	110.36	115.78	95.79	100
ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)					
a APM SD/MI/PAKET A	99.63	93.24	92.41	98.57	98.60
b APM SMP/MTs/PAKET B	99.17	76.78	78.71	83.55	85.00
c APM SMA/MA/SMK/PAKET C	96.52	98.07	98.50%	71.09	75.00
ANGKA MELANJUTKAN /CR					
a CR ke SMP/MTs	100.05	100.05	100	100	100
b CR ke SMA/MA/SMK	86.95	86.95	86.95	86.95	100



SASARAN (IKU)	REALISASI TAHUN (%)				
	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2023/2024
MENURUNNYA ANGKA DROP OUT					
a SD/MI	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
b SMP/MTs	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
c SMA/MA/SMK	0.16	0.20	0.16	0,14	0,12

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

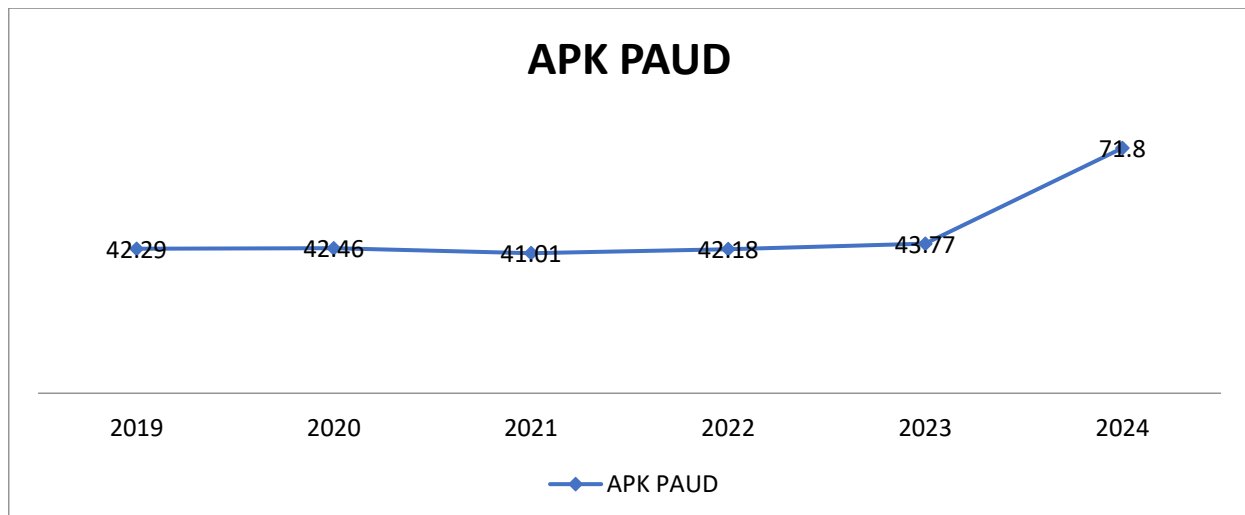
Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perluasan Akses Pendidikan yang ditargetkan untuk tahun 2019 pada umumnya dapat dicapai dan sebagian melampaui target yang ditetapkan. Capaian Akses Partisipasi Kasar (APK) PAUD ditargetkan pada 2019 sebesar 78,22 persen bisa dicapai sebesar 81,53 persen, Angka Partisipasi SD/MI/Paket A Setara yang ditargetkan mencapai 108,00 persen dapat direalisasikan sebesar 106,23 persen, Capaian APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B yang ditargetkan mencapai 110,01 persen dapat direalisasikan sebesar 109,17 persen, Capaian APK SMA/AMK/MA/SMALB/Paket C yang ditargetkan mencapai 98,13 persen dapat direalisasikan 98,55 persen, sehingga ada pencapaian diatas target sebesar 0.42 persen. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A yang ditargetkan mencapai 99,72 persen, dapat direalisasikan 99,61 persen. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yang ditargetkan mencapai 98,54 persen, dapat direalisasikan 98.60 persen, sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 0.6 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C yang ditargetkan mencapai 90,50 persen, dapat direalisasikan 88,42 persen. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs ditargetkan sebesar 100,00 persen dapat terealisasi sebesar 100,018 persen sehingga ada pencapaian di atas target sebesar 0,18 persen. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK ditargetkan sebesar 99,98 persen dapat terealisasi sebesar 99.32 persen. Harapan menurunnya angka Drop Out SD/MI ditargetkan sebesar 0,28 persen dapat terealisasi sebesar 0,09 persen. Angka DO SMP/MTs ditargetkan sebesar 0.15 persen dapat terealisasi sebesar 0,15 persen, Angka DO SMA/MA/SMK ditargetkan sebesar 0.32 persen dapat terealisasi sebesar 0,49 persen,

ANGKA PARTISIPASI KASAR

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD telah mencapai 71,8 persen pada Tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 28.03 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Gambaran perkembangan Garfik APK PAUD selama 6 tahun terakhir 2019-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.19. berikut.

Grafik 2.19 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2019-2024

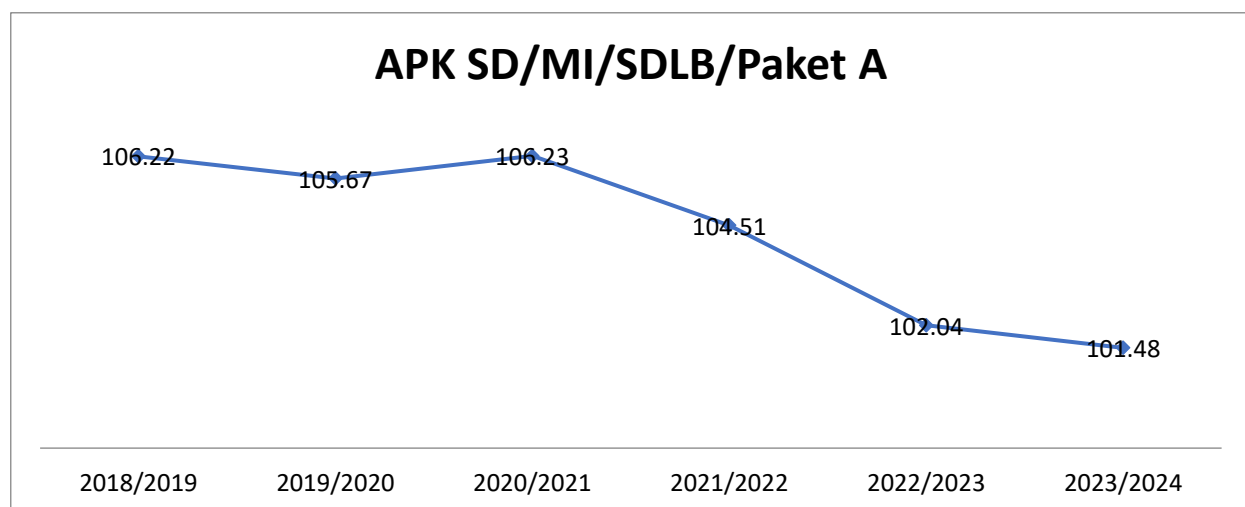


Sumber : BPS NTB, 2025

APK SD/MI/SDLB/Paket A

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A mencapai 101.48 persen tahun 2023/2024 menurun sebesar 0.56 persen jika dibandingkan tahun 2022/2023. APK tertinggi pada tahun 2020/2021 sebesar 106.23 persen. Gambaran perkembangan Grafik APK SD/MI selama 6 tahun terakhir (2018/2019 s/d 2023/2024) dapat dilihat pada Grafik 2.20 berikut.

Grafik 2.20 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2019-2024

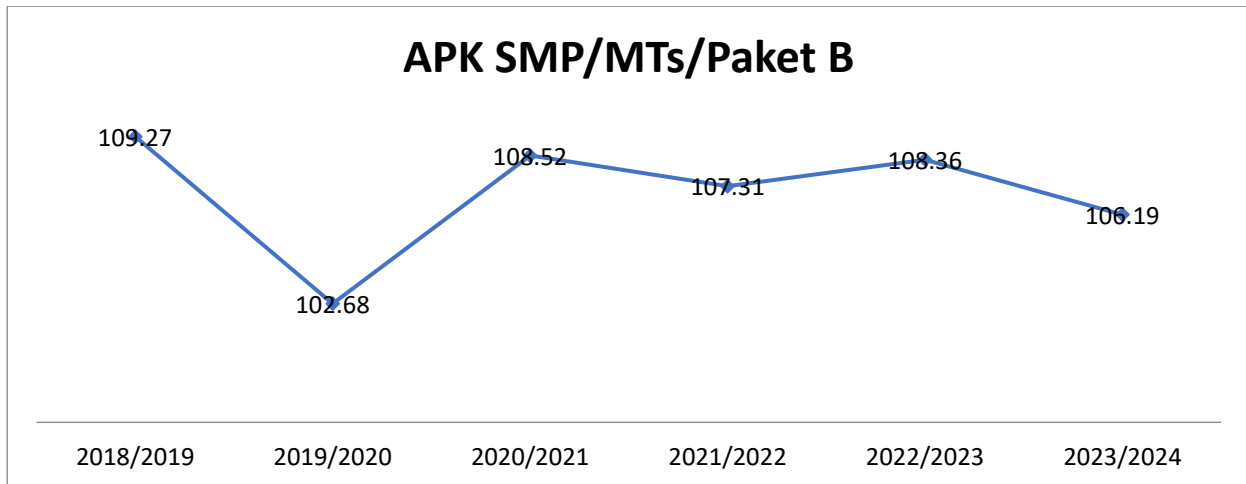


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 2025, diolah

SMP/MTs/SMLB/SMPT/Paket B

Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B tahun 2023/2024 mencapai 106.19 persen menurun sebesar 2.17 persen dibandingkan tahun 2022/2023. Dan APK tertinggi pada tahun 2018/2019 sebesar 109,27. Gambaran perkembangan Grafik APK SMP/MTs selama 6 tahun terakhir (2018/2019 s/d 2023/2024) dapat dilihat pada Grafik 2.21. berikut :

Grafik 2.21 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2024

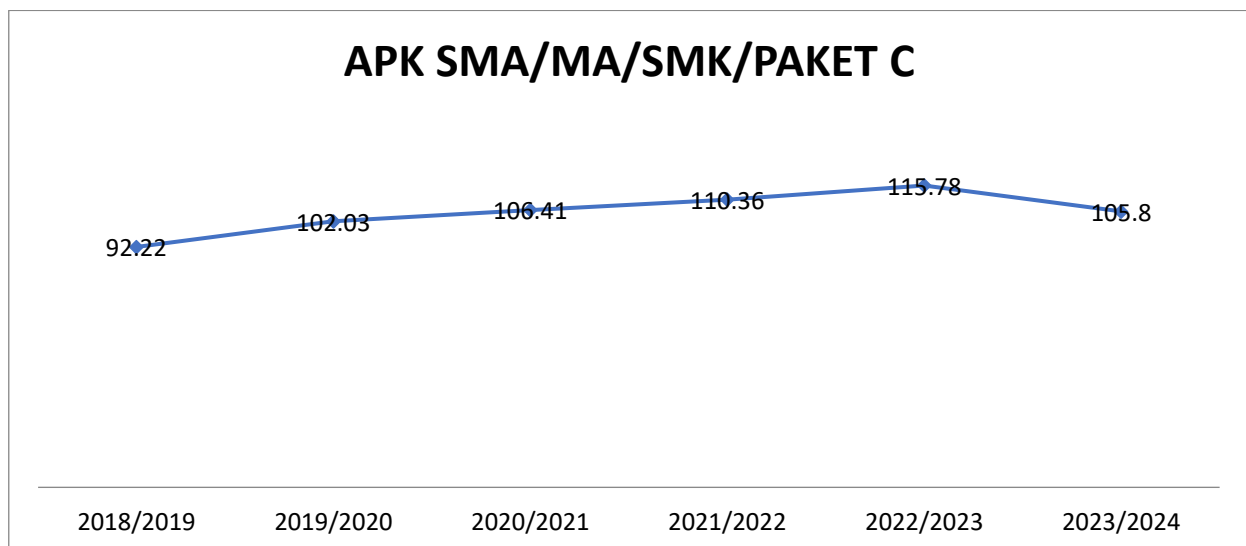


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 2025, diolah

APK SMA/MA/SMK/Paket C

Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C sebesar 105.80 persen tahun 2023/2024, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022/2023 sebesar 9.96 persen dengan capaian APK seperti itu, berarti pada tahun 2022/2023 jumlah anak usia pendidikan menengah yang bersekolah lebih rendah dari pada anak yang tidak bersekolah. Gambaran perkembangan Grafik APK SMA/MA/SMK dan Paket C selama 6 tahun terakhir (2018/2019 s/d 2022/2024) dapat dilihat pada Grafik 2.22. berikut :

Grafik 2.22 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2019-2024



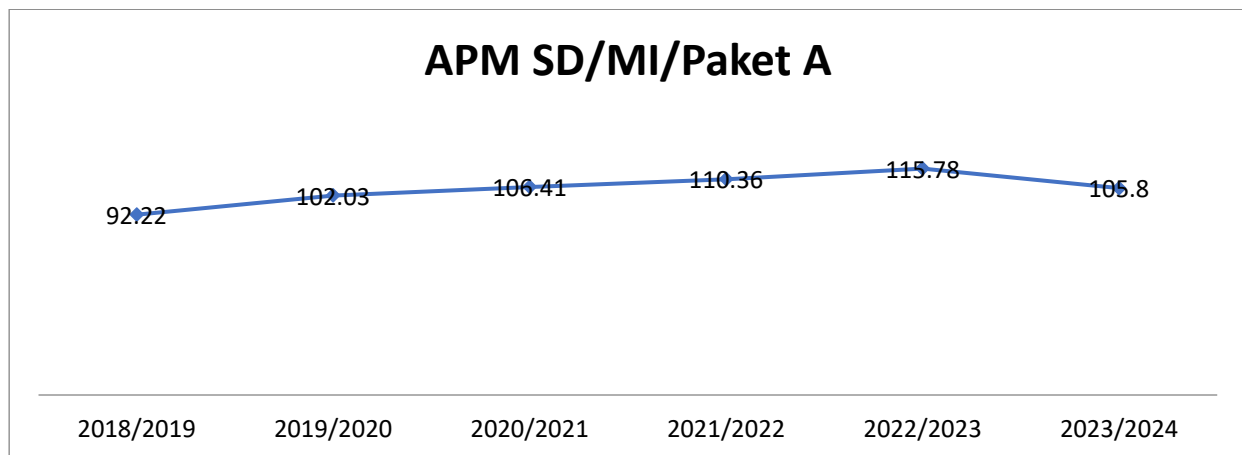
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 2025, diolah

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)

APM SD/MI/SDLB/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2023/2024 sebesar 105.80 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2022/2023 sebesar 115.78 persen. APM tertinggi terjadi pada tahun 2022/2023 dengan capaian 115.78 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anak sekolah sesuai kelompok umurnya semakin menurun. Gambaran perkembangan Grafik APM SD/MI/Paket A selama 6 tahun terakhir (2018/2019 s.d 2023/2024) dapat dilihat pada grafik 2.23 berikut ini :

Grafik 2.23 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2019-2024

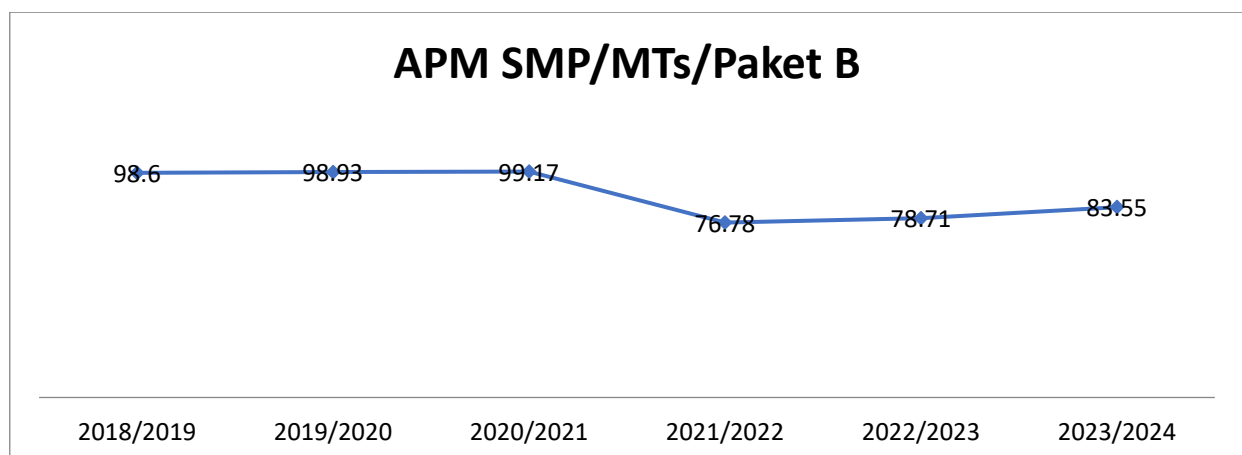


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 2025, diolah

APM SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B pencapaian tahun 2023/2024 sebesar 83,55 persen lebih tinggi 4.84 dibandingkan Tahun Ajaran 2022/2023 dengan realisasi 78.71 persen. Gambaran perkembangan Grafik APM SMP/MTs/Paket B selama 6 tahun terakhir (2018/2019 s.d 2023/2024) dapat dilihat pada grafik 2.24.berikut.

Grafik 2.24 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2024

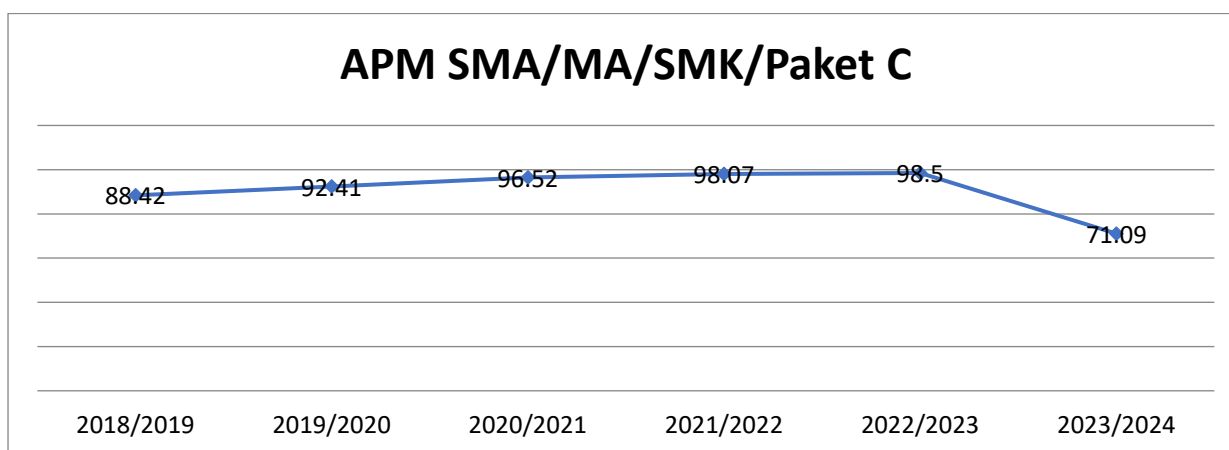


Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 2025, diolah

APM SMA/MA/SMK/Paket C

Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C tahun ajaran 2023/2024 dapat direalisasikan 71.09 persen, menurun 27.41 persen Dibanding tahun 2022/2023 sebesar 98.50 persen. Gambaran perkembangan Grafik SMA/MA/SMK/Paket C selama 6 tahun terakhir (2018/2019 s/d 2023/2024) dapat dilihat pada grafik 2.25. berikut :

Grafik 2.25 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 2025, diolah

Angka Melanjutkan (CR).

Angka melanjutkan ke SMP/MTs.

Lulusan SD/MI tahun pelajaran 2018/2019 sebesar 97.184 anak, yang melanjutkan ke SMP/MTs tahun pelajaran 2018/2029 sebesar 97.361 anak atau 100,18 persen, dan lulusan tahun pelajaran 2023/2024 sebanyak 98.516 orang dan melanjutkan ke SMP/MTs tahun pelajaran 2023/2024 sebesar 98.564 atau 100.05 persen hal ini berarti secara umum lulusan SD/MI tidak ada yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs bahkan yang melanjutkan lebih besar dari lulusan SD/MI berarti ada lulusan tahun sebelumnya atau pendatang dari luar daerah. Seperti terlihat pada table 2.18 berikut :

Tabel 2.18 Perkembangan Lulusan SD/MI dan Angka Melanjutkan ke SMP/MTs Tahun 2019-2024

No	Tahun	Lulusan SD/MI Tahun sebelumnya	Melanjutkan SMP/MTs	
			Jumlah	%
1	2018/2019	97.184	97.361	100,18
2	2019/2020	98.516	98.564	100,45
3	2020/2021	98.516	98.564	100.05
4	2021/2022	98.516	98.564	100.05
5	2022/2023	98.516	98.564	100.05
6	2023/2024	98.516	98.564	100.05

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA

Lulusan SMP/MTs tahun pelajaran 2018/2019 sebesar 84.077 anak, yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA sebesar 83.505 anak atau 99,32 persen. Dan lulusan SMP/MTs tahun 2023/2024 sebesar 85.742 dan yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK sebesar 85.742 atau 99.99 persen. Dari data ini dapat dilihat bahwa angka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi semakin meningkat dari tahun ke tahun, data tersebut dapat di lihat pada tabel 2.19 berikut

Tabel 2.19 Perkembangan Lulusan SMP/MTs dan Angka Melanjutkan ke SMA/MA dan SMK Tahun 2019-2024

No	Tahun	Lulusan SMP/MTs Tahun sebelumnya	Melanjutkan SMA/MA/SMK	
			Jumlah	%
1	2018/2019	84.077	83.505	99,32
2	2019/2020	85.742	85.733	99,99
3	2020/2021	85.742	85.733	99.99
4	2021/2022	85.742	85.742	99.99
5	2022/2023	85.742	85.742	99.99
6	2023/2024	85.742	85.742	99.99

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

2.4.2 Disparitas Pendidikan Antara Perempuan dan Laki-Laki

Akses masyarakat terhadap pendidikan di Indonesia sudah cukup merata yang ditunjukkan dengan rasio APK antara perempuan dan laki-laki pada berbagai jenjang. Pada tahun 2024, Rasio APK SD/MI/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 110.58 persen rasio APK SMP/MTs/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 91,73 persen dan rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat antara perempuan dan laki-laki sebesar 89,20 persen. Pada jenjang pendidikan tinggi, rasio APK perempuan terhadap laki- laki mencapai 34,80 persen. Rasio APK antara laki-laki dan perempuan yang mencapai 1 menandakan bahwa partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan telah setara.

2.4.3 Guru dan Peserta Didik

Guru menurut UU no. 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mempunyai peran penting dan kedudukan strategis dalam bidang pendidikan. Berhasil atau tidaknya sebuah proses belajar mengajar ditentukan oleh keberadaan guru. Ketimpangan distribusi maupun kualitas guru akan menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Jumlah guru di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ajaran 2023/2024 tercatat bahwa jumlah guru di Provinsi NTB sebesar 122 ribu orang. Terjadi kenaikan sebesar 0,04 persen dibandingkan pada tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 119 ribu orang. Rasio guru-murid dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah

peserta didik (murid) dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio guru-murid yang terlalu tinggi akan mengurangi efektivitas proses pembelajaran. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah menunjukkan bahwa proses pengajaran tidak efisien, karena guru mengajar sedikit siswa. Rasio guru-murid dapat bervariasi dan bergantung pada banyak faktor.

Tabel 2.20 Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2023/2024

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU (DALAM RIBUAN)	JUMLAH MURID (DALAM RIBUAN)	RASIO GURU MURID
1	2	3	4
SD/MI	55.56	626.19	1 : 11
SMP/MTs	38.36	290.94	1 : 8
SMA/MI	20.83	188.34	1 : 9
SMK	7.83	77.72	1 : 10

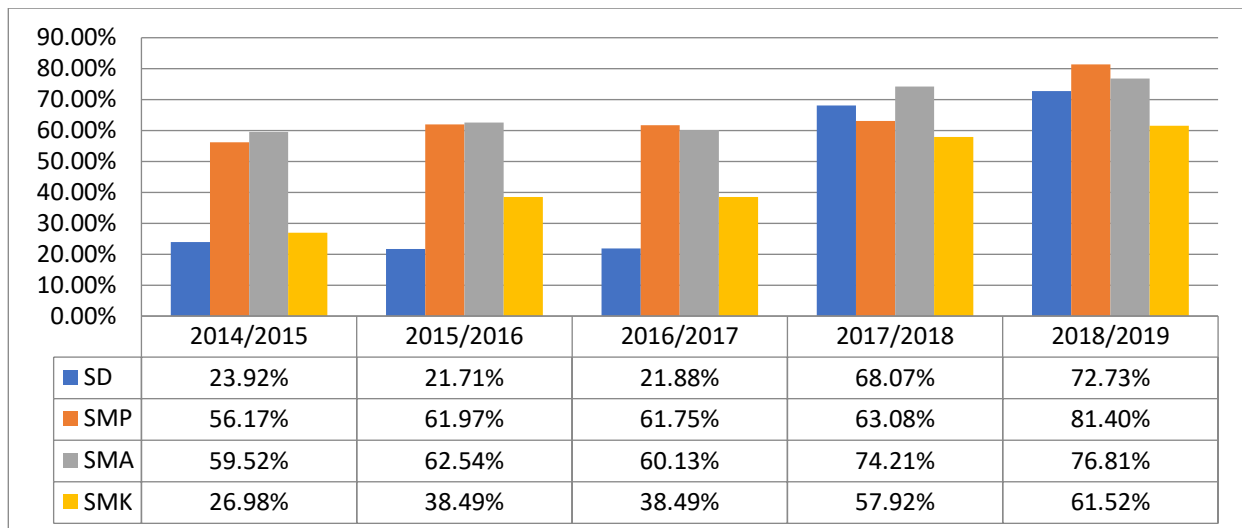
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

Pada tabel 2.20 terlihat bahwa pada semua jenjang pendidikan, rasio guru murid sudah berada di atas standar ideal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio minimal jumlah murid terhadap guru pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya adalah 20 orang. Sedangkan pada SMK idealnya adalah satu guru bertanggung jawab terhadap 15 murid. Meskipun demikian, rasio guru-murid bukan merupakan faktor mutlak dalam keberhasilan proses belajar anak. Keterampilan dan pengalaman guru juga perlu dipertimbangkan

2.4.4 Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan

Parameter penting untuk mengukur kualitas institusi pendidikan adalah akreditasi kelembagaannya. Dari Gambar 2.25 dapat terlihat bahwa di tingkat satuan pendidikan jenjang SD, SMP maupun SMA, sudah banyak satuan pendidikan yang memiliki kualitas yang baik. Persentase satuan pendidikan yang memiliki akreditasi minimal B mencapai lebih dari 60%.

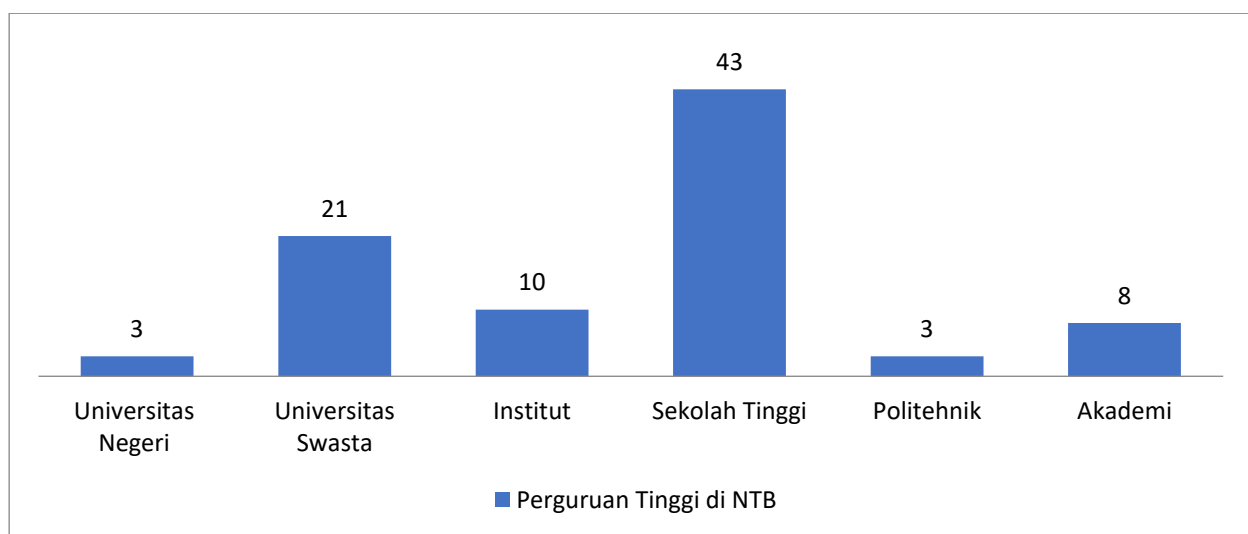
Grafik 2.26 Pendidikan yang Memiliki Akreditasi Minimal B SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB 2020, diolah

Sedangkan untuk Provinsi NTB dari 88 Perguruan tinggi dengan status Ristekdikti sebanyak 55 Perguruan tinggi dimana tercatat 1 Perguruan tinggi Negeri dan 54 Perguruan Tinggi swasta.

Grafik 2.27 Perguruan Tinggi di Provinsi NTB Tahun 2024



Sumber : Kemenristekdikti 2025, diolah

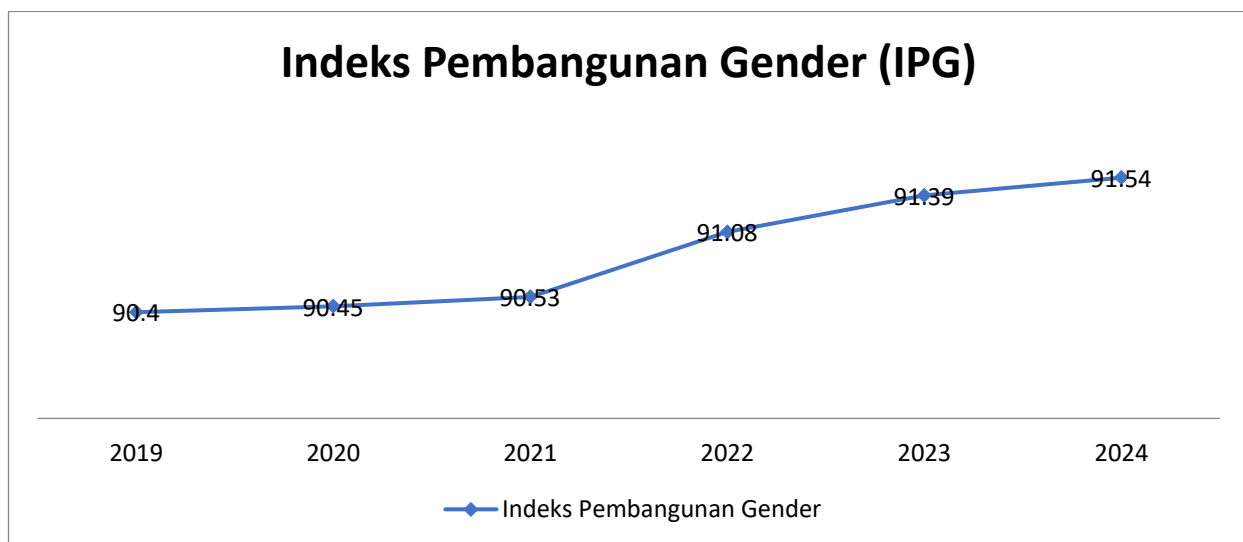
2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan, dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah. Sedangkan gender itu sendiri adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan bukan merupakan kodrat, sehingga dapat berubah sesuai jaman dan bersifat lokal tergantung pada kondisi daerah setempat.

Arah kebijakan Pengarusutamaan Gender pada RPJMN adalah meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); serta meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Kemudian, arah kebijakan RPJMN tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan RPJMD menjadi (1) meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indikator jumlah SKPD/OPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); (2) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dengan indikator capaian meningkatnya cakupan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kabupaten/kota layak anak; Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi remaja dengan indikator capaiannya meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan.

Capaian kinerja lainnya dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD/OPD yaitu meningkatkan Indeks pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG adalah mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, ekonomi dan pengambilan keputusan dan penguasaan sumber daya ekonomi. Perkembangan IPG di NTB dapat dilihat pada grafik 2.28 berikut ini :

Grafik 2.28 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di NTB Tahun 2019-2024

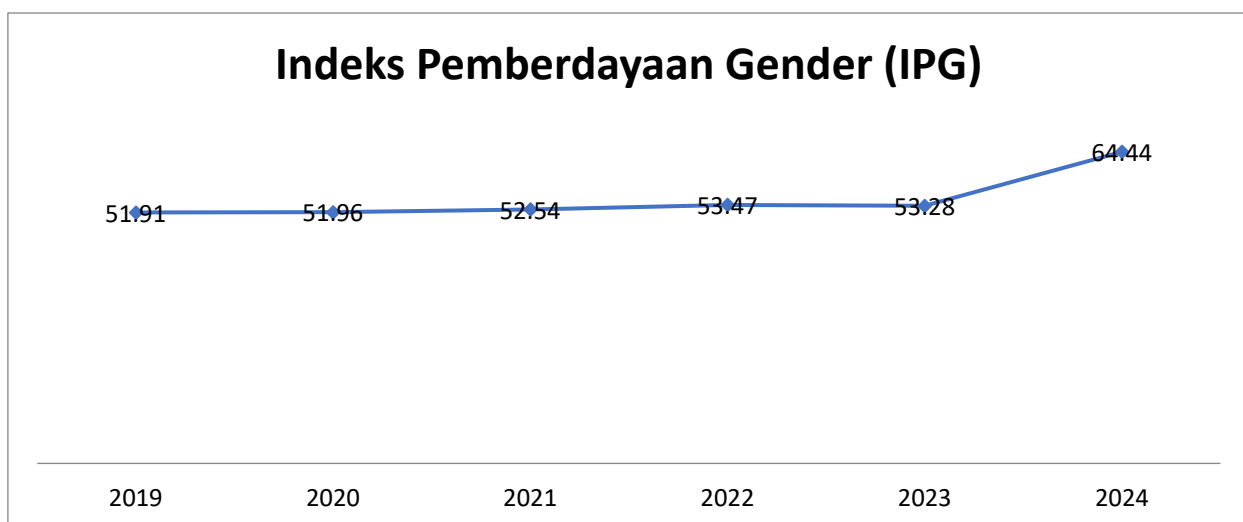


Sumber : BPS NTB, 2025

Grafik 2.28. Menunjukkan bahwa IPG di Provinsi NTB menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 90,4 dan tahun 2024 menjadi 91.54 Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut karena adanya peningkatan beberapa indikator dalam komponen IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

Selain IPG, ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender adalah IDG. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. IDG menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan dapat berperan sebagai pengambil keputusan jika dibandingkan dengan keadaan tahun-tahun sebelumnya. Namun dari aspek kualitas, masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Indeks Pemberdayaan Gender di Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada Grafik 2.29.

Grafik 2.29 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di NTB Tahun 2019-2024



Sumber : BPS NTB, 2025

Grafik 2.29. menggambarkan IDG NTB tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dimana IDG NTB tertinggi ada pada tahun 2024 dengan realisasi 64.44 meningkat sebesar 11,16 dibandingkan tahun 2023 realisasi 53.28. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah wanita yang berperan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi di Provinsi NTB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan program/kegiatan pemerintah maupun lembaga non pemerintah untuk mendorong peningkatan peranan perempuan dalam posisi manajerial. Untuk lebih terencana, maka program/kegiatan terkait gender dimasukkan dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Realisasi kinerja PPRG di NTB dapat dilihat pada grafik 2.30.

Grafik 2.30 Realisasi Kinerja PPRG Tahun 2019-2024



Sumber : DP3APPKB Provinsi NTB, 2025

Gambar 2.30 menunjukkan realisasi kinerja PPRG Provinsi NTB pada tahun 2019 dari 45 OPD target 51,11 persen terealisasi 15.56 persen .Mulai Tahun 2021 sampai 2024 terealisasi 100 persen OPD yang menerapkan dokumen PPRG.

Realisasi kinerja PPRG yang terus meningkat setiap tahunnya berpengaruh positif terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Hal ini dapat diartikan bahwa perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan kebijakan khususnya yang kaitannya dengan pemberdayaan perempuan untuk menduduki posisi manajerial.

2.5.1 Menghapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai “suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun kehidupan pribadi Data Kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB dapat dilihat pada Grafik 2.30. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya mengalami kenaikan tahun 2022 jumlah kasus sebanyak 334 dan tahun 2023 sebanyak 664 kasus meningkat 330 kasus dan tahun 2024 menurun menjadi 127 kasus ini adalah kasus terendah selama 5 tahun terakhir yang artinya semakin tingginya kesadaran tentang perlindungan terhadap perempuan data bisa dilihat seperti pada grafik 2.31 berikut.

Grafik 2.31 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019-2024



Sumber : DP3APPKB Provinsi NTB, 2025

Upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di NTB dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban tindak kekerasan. kualitas SDM pemberi pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya dukungan dana yang cukup untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Program yang mendukung indikator ini adalah program penguatan kelembagaan PUG dan anak, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Sementara itu Pemerintah NTB telah berupaya keras menekan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTP/KTA) dengan berbagai cara antara lain:

1. Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota lebih memperhatikan masalah pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri karena banyak TKW yang meninggalkan anak-anak mereka, sehingga rentan menghadapi kekerasan dan seksual di sekitar lingkungannya.
2. Sosialisasi kepada masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga menggelar seminar dan diskusi Fasilitasi dan sosialisasi Kabupaten/kota Menuju Layak Anak (KLA).

Untuk cakupan penanganan korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 100 persen pada tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan yang melapor selalu mendapatkan pelayanan dan penanganan. Keadaan ini karena dukungan dan telah berfungsinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota. Perkembangan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana tabel 2.21 berikut.

Tabel 2.21 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2020-2024

INDIKATOR	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024



		Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real	Target	Real
Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	62,41	100	68,15	100	75,52	100	85,50	100	90,00	100

Sumber : DP3APPKB Provinsi NTB, 2025

Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain: melatih tenaga pendamping Perempuan dan anak korban kekerasan, peningkatan fungsi mobil operasional “MOLIN” (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) dalam penjangkauan kasus kekerasan, surveillance ISO 9001-2015 bagi pengelola P2TP2A yang anggarannya bersumber dari dana DEKON). Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, antara lain; Belum maksimalnya pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) tentang KLA dalam upaya pencapaian indikator KLA di Kabupaten/Kota.

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

2.5.2 Menghapus Semua Praktek Berbahaya

Rata-rata usia kawin pertama perempuan (Indikator kinerja pada Renstra dan RPJMD). Gambaran umum indikator kinerja pada nomor urut 8 (delapan) pada Renstra DP3APPKB Provinsi NTB dan nomor urut 24 dari 31 indikator kinerja RPJMD Tahun 2013- 2018 (Revisi RPJMD Tahun 2017) yaitu rata-rata usia kawin pertama perempuan. Indikator tersebut merupakan tolok ukur yang dapat merangkum beberapa indikator kinerja pada 2 (dua) urusan yaitu pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana dengan sasaran strategis adalah terwujudnya pendewasaan usia perkawinan (PUP). Intervensi program dan kegiatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan dini/muda pada usia 10-20 Tahun, sedangkan usia yang paling aman bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan pertama yaitu usia 21 – 30 tahun.

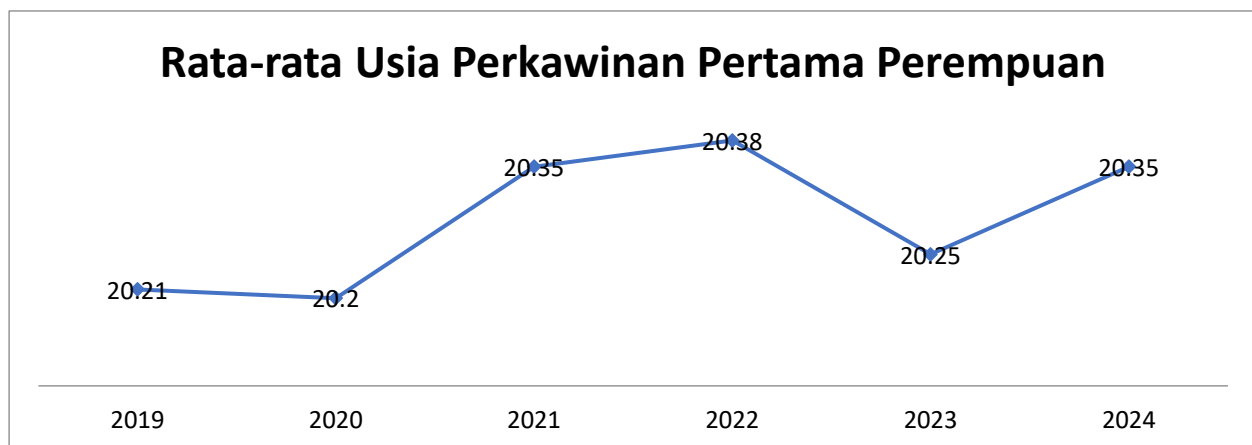
Dampak negatif dari perkawinan dini/muda antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya kasus perceraian, rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan dan swasta, tingginya angka kematian ibu dan bayi yang disumbang oleh perkawinan terlalu muda yaitu usia di bawah 18 tahun sebesar 3% dan usia terlalu tua di atas 34 tahun sebesar 4,7% berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 dan dampak jangka panjang yaitu

memperpanjang mata rantai kemiskinan karena perkawinan dini/muda dilakukan sebagian besar oleh keluarga miskin.

Apabila sasaran strategis dapat diwujudkan dengan target 21 tahun di akhir program (Tahun 2018) dari rata-rata usia kawin pertama perempuan, maka dampak positifnya adalah mencegah ledakan jumlah penduduk, mencegah risiko kehamilan dan melahirkan sekaligus memperpendek waktu kehamilan dan melahirkan dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan perempuan sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat diturunkan, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan yang mandiri dan berkarier dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Rata-rata usia kawin perempuan pertama diatas 10 tahun mengalami fluktuasi, angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 20.38 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 20.25 persen dan meningkat kembali pada tahun 2024 sebesar 20.35 persen. Rata-rata usia kawin pertama perempuan dapat dilihat seperti pada grafik 2.32 berikut.

Grafik 2.32 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Tahun 2019-2024



Sumber : DP3APKB Provinsi NTB, 2025

Sasaran strategisnya Provinsi NTB yang menjadi kinerja DP3AP2KB adalah terwujudnya pendewasaan usia perkawinan dengan indikator kinerja rata-rata usia kawin pertama perempuan dengan jenis indikator kinerja outcome intermediate. Permasalahan yang mendasar yaitu ingin merubah budaya perkawinan dini/muda dikalangan remaja putri yaitu usia 10-20 Tahun menjadi pendewasaan usia perkawinan dengan usia antara 21-30 tahun (usia yang paling aman untuk kehamilan dan melahirkan).

Untuk merubah budaya adalah hal yang sangat sulit di wujudkan, mengingat beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor pendidikan, tingkat pengetahuan, ekonomi keluarga, pengasuhan anak, teknologi semakin canggih, administrasi catatan sipil, desa/kelurahan dan kolaborasi program dan kegiatan dengan lintas program/lintas sektor terkait belum maksimal. Pengukuran kinerja outcome intermediate diperlukan waktu yang panjang dan tidak bisa saat ini melaksanakan program dan kegiatan saat ini juga dilakukan pengukuran, berbeda halnya dengan jenis indikator kinerja outcome atau hasil sesaat.



Tantangan yang dihadapi untuk menurunkan angka perkawinan anak dan juga angka kelahiran pada usia 15-19 tahun adalah: 1) mensinergikan dan mengharmonisasikan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, seperti UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Kependudukan dengan UU Perlindungan Anak; 2) mengubah norma dan nilai dalam masyarakat akan perkawinan dini; 3) menangani kerentanan akibat kemiskinan dan memberi kesempatan lebih besar pada anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan ekonomi; dan 4) meningkatkan cakupan pelayanan pendidikan khususnya di daerah terluar, terpencil dan tertinggal.

2.5.3 Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin

Perempuan berpeluang besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau menduduki posisi manajerial baik di lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Dengan semakin besarnya partisipasi perempuan diharapkan akan menjamin penghapusan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, secara individu atau antar kelompok tanpa ada yang terpinggirkan. Menyuarakan kepentingan perempuan dalam kebijakan di daerah seharusnya dimaknai sebagai tindakan yang juga relevan bagi kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara termasuk perempuan untuk dipilih sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Untuk memperjuangkan kepentingan perempuan tersebut, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi sangat penting. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan parlemen harus bisa memberikan keadilan maupun kesetaraan gender. Negara telah menjamin kepentingan perempuan tersebut dengan adanya kebijakan afirmasi, yaitu sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif yang dituangkan dalam UU Nomor 10 tahun 2008.

Implementasi dari undang-undang mengenai keterwakilan perempuan dalam politik tersebut belum tercapai secara optimal. Hal ini terlihat dari akses perempuan dalam bidang politik masih rendah. Pada Pemilu tahun 2024 keterwakilan perempuan dari daerah pemilihan Provinsi NTB di DPR dan DPD hanya 1,54 persen dimana NTB menjadi Provinsi terendah yang keterwakilan perempuan di parlemen, sedangkan di DPRD Tingkat 1 sebesar 10,77 persen (KPU Provinsi NTB, 2025). Dari sisi internal, rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang politik disebabkan beberapa hal seperti rendahnya pendidikan maupun kultur atau budaya. Dari sisi kultur/budaya, perempuan cenderung mengikuti pilihan laki-laki dan tidak berhak mengambil keputusan sendiri termasuk dalam pilihan politik. Sementara dari sisi eksternal adalah pandangan masyarakat bahwa memasuki dunia politik memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang cukup besar, sehingga identik dengan dunia laki-laki. Faktor-faktor tersebut secara langsung akan membatasi jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif.

Selain itu, Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di Pemerintah Provinsi NTB Eselon II juga masih rendah yaitu sebesar 29,63 persen. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kapasitas bagi: 1) perempuan kader partai politik; 2) perempuan sebagai tokoh



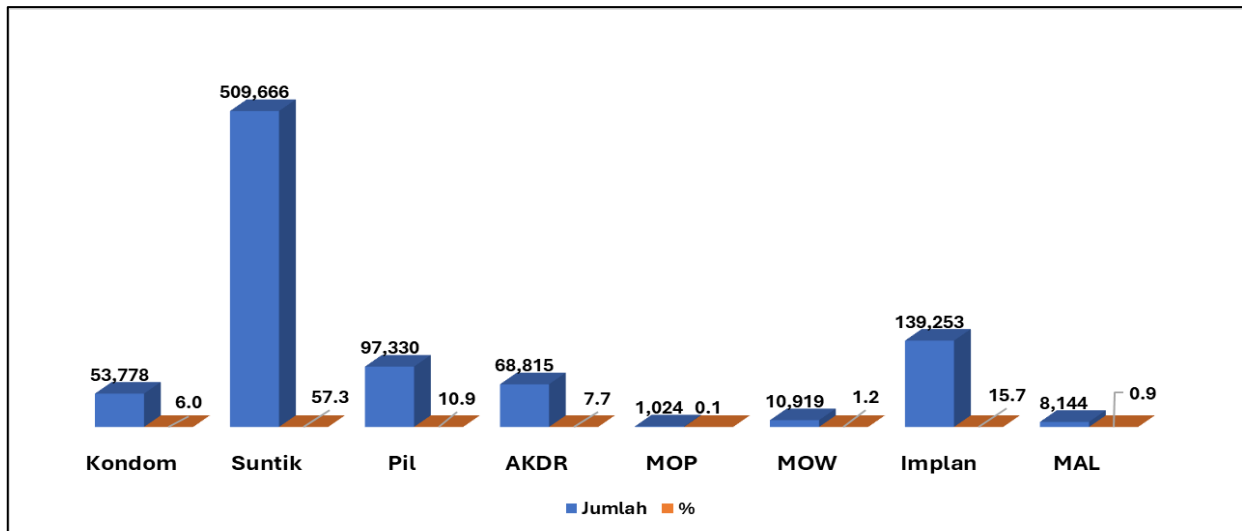
agama dan tokoh masyarakat; 3) perempuan calon kepala daerah; 4) perempuan anggota legislatif yang terpilih; dan 5) perempuan sebagai kepala daerah. Tantangan lain dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah melakukan “affirmative action” terutama melalui terobosan politik.

2.5.4 Menjamin Akses Universal terhadap Kesehatan Seksual dan Reproduksi dan Hak Reproduksi

Data SDKI 2007 dan 2012 menunjukkan Unmet Need pelayanan KB telah menurun dari 13,1 persen pada tahun 2007 dan 11,4% pada tahun 2012. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman perempuan menikah usia 15-49 tahun tentang suatu cara kontrasepsi modern meningkat dari 98,3 persen menjadi 98,9 persen dan laki-laki meningkat dari 94,1 persen menjadi 97,2 persen pada periode yang sama. Untuk menjamin perempuan mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan reproduksi, Undang-Undang No. 36/2009 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi, pendidikan dan pelayanan kepada remaja sepanjang tidak bertentangan dengan nilai moral dan agama. Selanjutnya, untuk pelaksanaannya telah ada Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Tantangan yang dihadapi adalah pelaksanaan advokasi dan KIE yang efektif responsif gender yang dapat meningkatkan kesertaan ber KB. Dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan kematian bayi perlu pemecahan masalah sejak dari hulu, salah satunya melalui program Keluarga Berencana (KB).

Pasangan Usia Subur (PUS) Provinsi NTB tahun 2024 sebanyak 891,623 dengan jumlah unmet need KB sebanyak 71,073 atau 7,97 Persen. Peserta KB baru pada tahun 2023 sebanyak 137.643 orang meningkat jika dibandingkan dengan peserta KB baru pada tahun 2018 yaitu sebanyak 124.206 orang. Peserta KB aktif pada tahun 2019 sebanyak 777.583 orang menurun dari jumlah KB aktif pada tahun 2018 sebanyak 781.421 orang. Peserta KB baru pada tahun 2019 menggunakan kontrasepsi MKJP (IUD, MOP, MOW dan implant) sebanyak 70,43 persen dan non MKJP (suntik, pil, kondom) sebanyak 29,57 persen sedangkan peserta KB aktif pada tahun 2016 menggunakan kontrasepsi MKJP (IUD, MOP, MOW dan implant) sebanyak 27 persen dan non MKJP (suntik, pil, kondom) sebanyak 73 persen.

Grafik 2.33 Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Provinsi NTB Tahun 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Grafik 2.33. menunjukkan bahwa peserta KB aktif sebagian besar menggunakan KB suntik, karena penggunaan KB suntik tidak memerlukan banyak tahap yang sulit, termasuk metode kontrasepsi yang terhitung murah untuk masyarakat dan akses untuk memperoleh layanan KB suntik relatif lebih mudah.

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah. Tantangan lainnya adalah peningkatan cakupan serta kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah serta manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi.

2.5.5 Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Kaum Perempuan

Pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas tersebut, dibuat regulasi untuk memperlancar pelaksanaannya yaitu dengan dikeluarkannya PERDA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Adapun isi Perda tersebut adalah : (1) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan, (2) Mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak korban kekerasan dan peraturan perundang-undangan, (3) Melakukan Pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, (4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, (5) menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat, (6) Mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban, (7) melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi NTB juga mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yaitu PERDA Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2015. Dalam Perda Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2015 dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- Memberi pedoman kepada pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan kebijakan dan strategi perlindungan perempuan dan anak;
- Memperkuat lingkungan protektif bagi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- Mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan anak;
- Meningkatkan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak; dan
- Meningkatkan peran lembaga pemerintah, badan usaha, media dan/atau LSM di daerah.

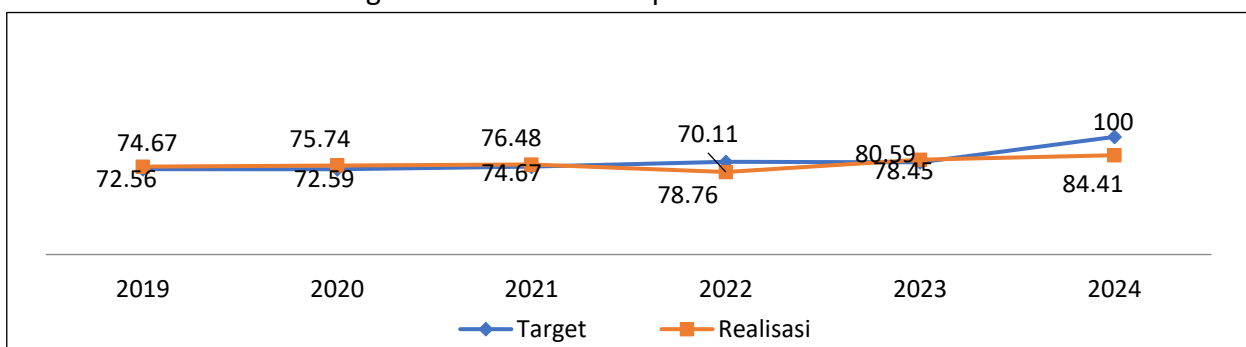
2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

RPJMN 2024-2029 mengamanatkan pembangunan infrastruktur antara lain diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum dan sanitasi maupun irigasi, guna menunjang ketahanan air dan pangan. Target yang harus dicapai adalah meningkatnya akses terhadap layanan air minum yang layak dan berkelanjutan bagi semua.

2.6.1 Menjamin Akses Air Minum Layak dan Terjangkau

Indikator kinerja dengan sasaran strategis Cakupan Air Minum, pada tahun 2024 realisasi kinerja telah mencapai 84.41 persen (angka sementara) meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 80.59 persen. Tercapainya target cakupan air minum ini dikarenakan adanya dukungan penanganan dan pembiayaan secara bersinergi yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sumber pembiayaan tersebut meliputi program/kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) lintas kabupaten.

Grafik 2.34 Target dan Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas PUPR Provinsi NTB, 2025

Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi cakupan air bersih perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah berupa pembangunan sumur bor produksi. Pembangunan sumur bor pada 9 (sembilan) lokasi di 3 (tiga) Kabupaten. Sementara

sumur bor pembiayaan yang dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, melalui Program Penelitian, Mitigasi dan pelayanan Geologi, Sub Program Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah. Adapun sumur bor yang dibangun berjenis sumur bor produksi sebanyak 9 titik yang dibangun beberapa lokasi.

Akses terhadap Sumber Air Minum Keluarga. Air minum yang layak yang dapat diakses oleh masyarakat masih sangat minim. Masalah kemiskinan sebagai salah satu penyebab rendahnya kemampuan penduduk mengakses air minum yang layak. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan, rendahnya kualitas bangunan septic tank dan masih buruknya sistem pembuangan limbah juga mempengaruhi ketersediaan sumber air minum.

Pada tahun 2024 penduduk di Provinsi NTB yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak sebanyak 84.41 persen. Air minum layak tersebut diperoleh melalui sarana sumur gali terlindung memenuhi syarat 45,93 persen dan perpipaan yang memenuhi syarat (PDAM, BPSPAM) sebanyak 41,95 persen dan sisanya diperoleh melalui jaringan non perpipaan yang memenuhi syarat seperti sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung dan penampungan air hujan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana air minum yang telah terbangun, mengingat belum mantapnya lembaga penyelenggara dan tarif air minum yang belum memenuhi prinsip pemulihan biaya, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas, kontinuitas, maupun kualitas. Selain itu, pemanfaatan alternatif sumber air baku, antara lain melalui daur ulang air dan pemanfaatan air hujan belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

2.6.2 Menjamin Penyediaan Sanitasi Layak dan Terjangkau

Data terkait pelayanan sanita yang baik untuk masyarakat di Provinsi NTB dapat dilihat pada Tabel 2.22. Setiap tahunnya akses terhadap layanan sanitasi layak di provinsi NTB mengalami peningkatan, tahun 2019 cakupan akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 80,02 persen, pada tahun 2020 meningkat menjadi 82,89 persen, tahun 2021 teradi penurunan menjadi 82,85 persen, tahun 2022 meningkat menjadi 83,12 persen, tahun 2023 meningkat menjadi 96,03 persen tetapi tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 85,45 persen. Program/kegiatan untuk mendukung peningkatan pelayanan sanitasi yang baik untuk masyarakat NTB terus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB untuk teknisnya dan Dinas Kesehatan Provinsi untuk sosialisasinya.

Tabel 2.22 Persentase Rata yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Provinsi NTB Tahun 2018-2024

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Lombok Barat	69.51	69.57	74,10	75,74	93,94	76,34
2	Kabupaten Lombok Tengah	79.24	84.23	79,14	82,10	93,26	84,89
3	Kabupaten Lombok Timur	80.06	83.19	84,54	83,35	97,11	89,63



No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Kabupaten Sumbawa	81.72	85.24	88,01	84,54	96,42	85,39
5	Kabupaten Dompu	78.77	79.26	83,72	78,09	98,93	64,83
6	Kabupaten Bima	76.06	81.83	81,04	83,33	99,11	87,79
7	Kabupaten Sumbawa Barat	97.35	97.76	92,93	97,18	96,38	100
8	Kabupaten Lombok Utara	80.57	86.22	79,23	81,44	91,15	74,02
9	Kota Mataram	89.6	91.45	91,63	91,36	99,58	98,89
10	Kota Bima	94.18	88.32	90,68	90,23	98,83	97,61
Nusa Tenggara Barat		80.02	82.89	82,85	83,12	96,03	85,45

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2024

2.6.3 Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

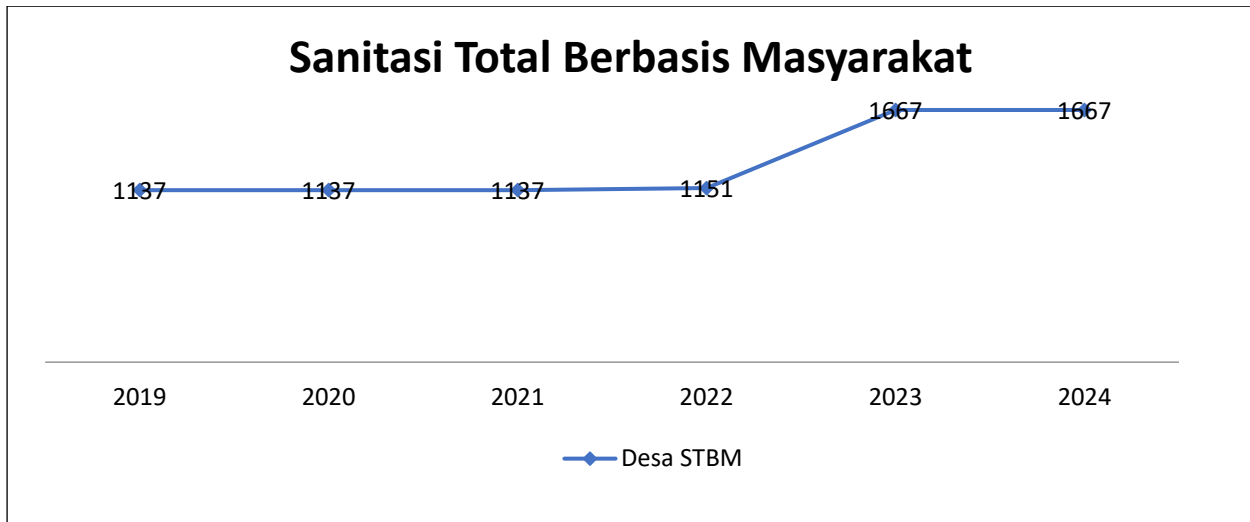
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. STBM meliputi 5 (lima) kriteria yaitu (1) stop buang air besar sembarangan; (2) cuci tangan pakai sabun; (3) pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga; (4) pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman; dan (5) pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Pengertian setiap kriteria dari STBM adalah : Stop buang air besar sembarangan (BABS) adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit. Cuci tangan pakai sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga. Pengamanan sampah rumah tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang. Pengamanan limbah cair rumah tangga adalah melakukan kegiatan baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah banyaknya desa/kelurahan yang melaksanakan STBM guna mendukung peningkatan akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan terutama upaya menghentikan praktik BABS. pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar.

Pada Tahun 2024 desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi layak sebanyak dari target 1667 desa/kelurahan terealisasi 1667 desa/kelurahan. Pelaksanaan STBM di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pembangunan fisik sarana buang air besar (jamban) dan Dinas Kesehatan untuk sosialisasi dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan STBM.

Grafik 2.35 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025

2.6.4 Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau sebagai Air Baku

Peningkatan kualitas air sungai sebagai air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangatlah penting. Salah satu sektor yang sangat membutuhkan penyediaan air baku adalah sektor pertanian.

Dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan mendukung pemenuhan kebutuhan air baku, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI). Kegiatan strategis lainnya dalam rangka pengamanan daerah permukiman terhadap bencana banjir dilakukan melalui perkuatan tebing sungai. Pada tahun 2023 dilaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Lahan Kering (JILK) pada lahan kering menjadi lahan agrowisata di Kecamatan Sembalun (JILK Pangsor, Bale Ijuk) dan Pringgabaya (JILK Gunung Malang), peningkatan Jaringan Irigasi pada 1 DI untuk luas areal irigasi 1.939,92 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 6 DI untuk luas areal irigasi 2.665,05 Ha. Perkuatan tebing sungai 4 Lokasi/daerah aliran sungai, pengamanan wilayah permukiman + 1.750 KK. Pembangunan sumur untuk air tanah pada 5 lokasi dan Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya sebanyak 65 unit.

Prasarana sumber daya air di Provinsi NTB mampu mendukung produksi padi sebesar 2,5 juta ton/tahun melampaui target produksi 2,4 juta ton. Salah satu bendungan yang menopang penyediaan air irigasi adalah Bendungan Pandan Dure pertanian seluas 5.168 Ha. Selain pembangunan waduk Pandan Dure, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan waduk Tanju-Mila di Kabupaten Dompu dan waduk Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat yang sumber pendanaannya dari APBN serta pengadaan lahan dari APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten. Dari dana APBD Provinsi telah dibangun Embung Prode di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang akan mengairi areal tanah kritis seluas 500 Ha.

Dalam rangka menunjang ketahanan air dan pangan, sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah “menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang berada pada kisaran 66,5-68,6. Capaian IKLH tahun 2023 adalah 71,92 ”Pada saat ini kondisi kualitas air sungai menurun



karena pencemaran limbah domestik, dan parameter Chemical Oxygen Demand (COD) pada sungai di sebagian besar provinsi telah melebihi baku mutu. Sementara penurunan kualitas air sungai dan danau disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang berdampak pada ketersediaan air.

2.6.5 Jumlah DAS yang Dilindungi Mata Airnya dan Dipulihkan Kesehatannya

Daerah Aliran Sungai (DAS) ialah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. Kegunaan dari DAS adalah menerima, menyimpan, dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya melalui sungai.

Saat ini sebagian Daerah Aliran Sungai di Indonesia mengalami kerusakan sebagai akibat dari perubahan tata guna lahan, pertambahan jumlah penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan DAS. Gejala Kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat dilihat dari penyusutan luas hutan dan kerusakan lahan terutama kawasan lindung di sekitar Daerah Aliran Sungai.

Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terjadi mengakibatkan kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan dan kemarau. Selain itu juga penurunan cadangan air serta tingginya laju sedimentasi dan erosi. Dampak yang dirasakan kemudian adalah terjadinya banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Selain itu, kerusakan DAS juga mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai yang mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh erosi dari lahan kritis, limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian (perkebunan).

Untuk mengatasi kerusakan DAS, dibuatlah RPDAST (Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu) yang merupakan konsep pembangunan yang mengakomodir berbagai peraturan perundang-undangan dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana jangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan pelestarian sumber daya air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.

Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi NTB tahun 2013 – 2017 sebanyak 3 (tiga) RPDAST, antara lain (1) RPDAST DAS Dodokan, (2) RPDAST DAS Palung, dan (3) RPDAST DAS Moyo. Program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB yang mendukung indikator tersebut adalah program pengendalian DAS dan hutan lindung dengan kegiatan penyelenggaraan RHL, reklamasi hutan, perhutanan sosial dan perencanaan DAS dengan indikator pulihnya kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW. Tahun 2018 – 2019 ditargetkan akan membuat RPDAST di DAS Sari Tahun 2018, tetapi untuk 2019 belum ditentukan DAS yang akan dibuatkan RPDAST.

Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi dan jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya di Provinsi NTB dapat dilihat dalam Tabel 2.23. Tahun 2020 seluas 6820 Ha dan Tahun 2024 seluas 528,20 Ha. Untuk DAS yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya pada tahun 2020 data tidak tersedia, data baru tersedia tahun 2022 sebanyak 540 das sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.23 Luas Lahan Kritis dalam KPH yang Direhabilitasi Tahun 2020-2024 dan Jumlah DAS Prioritas yang Dilindungi Mata Airnya dan Dipulihkan Kesehatannya Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas Lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi (Ha)	6820	6111,38	6200	5179,1	528,20
2.	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	NA	NA	540	540	540

Sumber : Dinas LHK Provinsi NTB, 2025

Jumlah DAS di Provinsi NTB sebanyak 570 Daerah Aliran Sungai. Dari 540 DAS, yang dipulihkan sebanyak 187 DAS namun fokus pada 3 DAS, yaitu DAS Moyo, Palung dan Sari. Sedangkan 383 DAS lainnya dikategorikan dalam DAS yang dipertahankan (BPDAS Provinsi NTB, 2017). Artinya masih banyak DAS di Provinsi NTB dikategorikan DAS yang perlu dipulihkan kesehatannya.

Hasil analisa spatial terhadap penilaian masing-masing indikator kriteria dan sub kriteria penentuan klasifikasi DAS menunjukan fenomena sebagai berikut :

1. DAS yang hidrologisnya kritis yang ditandai oleh rendahnya persentase penutupan lahan, tingginya laju erosi tahunan, dan besarnya nisbah debit sungai maksimum (musim hujan) dan debit minimum (musim kemarau) serta kandungan lumpur (sediment load) yang berlebihan.
2. Urgensi perlindungan investasi yang telah, sedang atau akan dibangun bangunan vital dengan investasi besar di daerah hilirnya, antara lain : waduk, bendungan, dan bangunan vital pengaliran lainnya.
3. Potensi banjir di wilayah BPDAS Dodokan Moyosari sangat tinggi hal ini disebabkan karena kondisi topografi yang terjal, dan rata-rata curah hujan wilayah yang cukup tinggi, berdampak pada tingginya limpasan permukaan (run off) pada musim penghujan.
4. Daerah perladangan dan perkebunan serta pola olah lahan yang tersebar di wilayah BPDAS Dodokan Moyosari secara umum berpotensi terhadap kerusakan tanah dan lingkungan karena tidak menerapkan atau tidak didasarkan pada kaidah-kaidah konservasi tanah dengan benar.
5. Daerah dimana tingkat pendapatan penduduk rendah, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumberdaya alam tanah, air dan hutan ternyata juga masih rendah. Kondisi ini perlu di dorong adanya pengembangan kelembagaan yang intensif khususnya dalam upaya pengelolaan DAS.

2.7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Peningkatan daya saing perekonomian Indonesia menjadi hal utama yang perlu menjadi perhatian. Salah satu titik berat peningkatan daya saing perekonomian diarahkan pada ketahanan energi khususnya pasokan energi primer dan optimalisasi penggunaan gas dan batubara, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada impor atau pada jenis energi tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan bidang ESDM hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Urusan pemerintahan bidang ESDM di Kabupaten/Kota berpindah menjadi kewenangan Provinsi. Sementara itu terkait sub urusan minyak dan gas serta

pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

2.7.1 Kebutuhan Energi Daerah

Upaya meningkatkan rasio elektrifikasi dilakukan dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik baik melalui jaringan PLN maupun Non PLN. Beberapa terobosan yang telah dan sedang dilaksanakan diantaranya melalui:

- 1) Program 'Listrik Murah dan Hemat' yaitu memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik. Harapannya dengan sambungan listrik tersebut dapat masyarakat meningkatkan produktifitasnya dalam mencapai kesejahteraan.
- 2) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Lighting Emitting Diode (PJU-LED) jaringan listrik PLN yang dipasang di sepanjang jalan Negara mulai dari gerbang barat Pulau Lombok di Pelabuhan Lembar hingga di ujung timur di Pelabuhan Kayangan. Selanjutnya pembangunan penerangan jalan umum juga dilaksanakan mulai dari pelabuhan Poto Tano di ujung barat hingga pelabuhan Sape di ujung timur P. Sumbawa yang akan menjadi pelita di sepanjang ruas jalan negara.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi yaitu dengan membangun fasilitas kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Program ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber energi terbarukan sesuai dengan potensi energi alam setempat seperti : pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik secara tersebar maupun terpusat (komunal) dan hybrid PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Tabel 2.24 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Proovinsi NTB Tahun 2022-2024

No	Indikator Kinerja		Satuan	2022	2023	2024
1	Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	Target	%	99,88	99,99	99.99
		Realisasi		99,98	99,99	99.99

Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTB, 2025

Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) merupakan persentase penduduk (KK) NTB yang dapat menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100 persen. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2024. Angka rasio elektrifikasi yang dimkasud adalah terdiri dari rasio elektrifikasi PLN dan rasio elektrifikasi non PLN.

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan RPJMD 2019 - 2023 adalah peningkatan cakupan listrik/rasio elektrifikasi sebagaimana tabel 2.25 berikut.

Tabel 2.25 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH PELANGGAN RUMAH TANGGA	JUMLAH PELANGGAN RUMAH	JUMLAH PELANGGAN RUMAH	RE PLN (%)	RE TOTAL (%)



			PLN	TANGGA NON PLN	TANGGA TOTAL		
	NTB	1.910.205	1.905.896	4.308	1.910.205	99.77%	99.99%
1.	KotaMataram	159,488	159,488	0	159,488	100.00%	100.00%
2.	Kab.LombokBarat	282,435	282,047	388	282,435	99.86%	100.00%
3.	Kab.LombokTengah	371,288	371,238	50	371,288	99.99%	100.00%
4.	Kab.LombokTimur	463,164	462,695	469	463,164	99.90%	100.00%
5.	Kab.LombokUtara	93,619	93,081	537	93,618	99.43%	100.00%
6.	KotaBima	54,591	54,591	0	54,591	100.00%	100.00%
7.	Kab.Bima	163,478	163,138	340	163,478	99.79%	100.00%
8.	Kab.Dompu	97,748	97,480	268	97,748	99.73%	100.00%
9.	Kab.Sumbawa	174,440	172,647	1.793	174,440	98.97%	99.35%
10.	Kab.SumbawaBarat	49,954	49,491	463	49,954	99.07%	100.00%

Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTB, 2025

Dari Tabel 2.25 diatas terlihat bahwa seluruh wilayah kabupaten/kota telah mencapai Rasio Elektrifikasi sebesar 99,99 persen dengan jumlah rumah tangga total 1.765.867 KK. Adapun Rasio Elektrifikasi PLN sebesar 99,75 persen (1.763.862 KK) dan non PLN sebesar 0,24 persen (2.005 KK)

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan listrik untuk penduduk NTB, pemerintah Provinsi NTB merencanakan Kebutuhan pembangkit Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di NTB Tahun 2017-2020, 2025, 2030, 2040 dan 2050 yang dapat dilihat pada tabel 2.26 berikut

Tabel 2.26 Kebutuhan Pembangkit Listrik Energi Sumber Daya Mineral di NTB Tahun 2017-2020, 2025-2050

JenisPembangkit	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2025	2030	2040	2050
On Grid								
PLTD (MW)	140	140	127	114	50	40	20	-
PLTD Sewa (MW)	180	50	46	43	25	20	10	-
PLTU Batubara(MW)	184	234	334	434	654	654	654	654
PLTG (MW)	300	300	300	300	360	420	480	540
PLTMH (MW)	4	4	4	4	4	5	7	15
PLTS (MW)	20	50	95	180	215	250	270	400
PLTM (MW)	12	30	35	40	50	55	55	60
PLTP (MW)	-	-	-	20	20	100	169	169
PLTA (MW)	30	30	30	30	30	50	60	60
PLTBayu (MW)	7	10	10	10	25	25	50	50
PLTBm (MW)	6	6	6	6	10	15	25	25
PLTSa (MW)	2	2	2	2	4	6	8	10
Off Grid								
PLTMH (MW)	1	1	1	1	1	1	1	1
PLTS (MW)	5	5	5	5	5	5	5	5

Total	890	862	995	1,189	1,453	1,646	1,814	1,989

Sumber : Draft Rencana Umum Kebutuhan Energi Daerah Provinsi NTB

2.7.2 Produksi dan Penggunaan Energi

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan urusan bidang ESDM cukup tinggi, seperti halnya untuk pengembangan ketenagalistrikan merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga dibutuhkan biaya tinggi. Penyediaan tenaga listrik di NTB dikembangkan melalui dua cara yaitu melalui listrik konvensional PT. PLN (on grid) dan layanan Energi Baru Terbarukan (off grid) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, karena minimnya akses menuju wilayah tersebut.

Pada tahun 2019 ekspor konsentrat mengalami peningkatan menjadi 300.264,165 DMT dengan nilai USD 399.865.631,20 hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi adanya izin ekspor konsentrat bagi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Dan pada tahun 2020, masa pandemi Covid-19 sektor pertambangan masih mengalami pertumbuhan hal ini terbukti dengan meningkatnya produksi tembaga menjadi 539.561,924 DMT meningkat 79,69% dengan nilai sebesar USD 969.775.717,720.

Berdasarkan data BPS tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian (termasuk subsektor pertambangan bijih logam) terhadap total PDRB sebesar 5,38 persen naik 4,06 persen dibandingkan dengan akhir tahun 2018 sebesar -1,32 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan pertambangan bijih logam sebesar 4,06 point. Adapun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian (tidak termasuk subsektor pertambangan bijih logam) terhadap total PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,27 point dari 3,92 persen pada tahun 2016 menjadi 4,19 persen tahun 2017. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan mineral masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertambangan mineral dan batubara. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan perumahan berakibat pada tingginya permintaan bahan galian terutama batuan. Eksploitasi terhadap komoditi pertambangan batuan yang memiliki nilai ekonomi serta menjadi bahan baku utama pembangunan menyebabkan munculnya kegiatan penambangan baik perorangan maupun kelompok di seluruh Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi telah mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba). Peraturan Daerah ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU Minerba harus direvisi menyesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan. Penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan

sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Perkembangan kondisi pengusahaan mineral logam hingga tahun 2017 dengan terbitnya IUP Khusus Operasi Produksi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 414K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan luas lahan IUP OP sebesar 25.000 Ha di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penyesuaian Kontrak Karya yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan satu Kontrak Karya milik PT. Sumbawa Timur Mining yang belum disesuaikan menjadi IUP.

Program pengelolaan mineral dan batubara dengan sasaran meningkatnya pengendalian usaha pertambangan mineral dan batubara dengan indikator sasaran persentase wilayah izin usaha pertambangan yang melaksanakan kaidah Pertambangan yang baik dan benar (good mining practices). Realisasi pada tahun 2023 sebesar% dari target sebesar 31,67%. Sampai dengan akhir tahun 2023 terdapat 222 Izin usaha Pertambangan yang menjadi kewenangan Provinsi NTB diantaranya telah dilakukan pembinaan dan pengawasan untuk menerapkan good mining practices, izin tersebut merupakan izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara maupun izin baru pasca beralkunya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui bantuan Inspektur tambang Kementerian ESDM yang ada di Provinsi NTB, Pemerintah Daerah Provinsi secara bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pertambangan.

Tabel 2.27 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	KOMODITAS								JML IUP
		MINERAL BUKAN LOGAM		JML	BATUAN			LOGAM	JML	
		Eksplorasi	Operasi Produksi		Eksplorasi	Operasi Produksi	SIPB	IPR		
1	Kab.Lobar	-	-	-	4	13	0	-	-	17
2	Kab.Loteng	-	-	-	8	11	1	-	-	20
3	Kab.Lotim	-	-	-	23	49	0	-	-	72
4	Kab.Sumbawa	-	-	-	4	24	1	-	-	29
5	Kab.Dompu	-	-	-	1	15	0	3	3	19
6	Kab.Bima	-	-	-	0	5	0	-	-	5
7	KSB	-	-	-	3	12	0	-	-	15
8	KLU	-	-	-	5	7	0	-	-	12
9	KotaMataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	KotaBima	-	-	-	1	4	0	-	-	5
Total					49	140	2	3	3	194

Sumber : Dinas ESDM Provinsi NTB, 2025

2.7.3 Energi Baru Terbarukan (EBT)

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional. Dalam RUED-P memuat kebijakan energi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berdasarkan proyeksi Optimistic bahwa target kontribusi energi baru terbarukan terhadap

bauran energi total pada tahun 2025 sebesar 22,86% dan pada tahun 2050 diharapkan mencapai 29%. Untuk mencapai target tersebut, direncanakan melalui strategi dan langkah kebijakan sebagaimana tertuang dalam dokumen RUED-P 2015-2050.

Program pengelolaan energi baru terbarukan dengan sasaran meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dengan indikator sasaran persentase (%) kontribusi energi baru terbarukan dalam bauran energi. Pemanfaatan energi baru terbarukan ini merupakan salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendukung terpenuhinya capaian bauran energi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah Provinsi NTB sebesar 23 persen pada tahun 2025. Realisasi bauran energi hingga 2023 sebesar 22,42 persen dari target sebesar 19,18 persen atau 116,95 persen dari target 19,18 persen. Capaian tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 18,16 persen. Realisasi bauran energi tahun 2023 ini memberikan harapan tercapainya rencana bauran energi tahun 2025. Banyak faktor yang mempengaruhi realisasi bauran energi tersebut, salah satu yang terpenting dalam mencapai target bauran adalah adanya komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk dalam mengurangi ketergantungan terhadap pengguna energi fosil dan beralih menggunakan energi terbarukan. Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mendorong pemakaian energi terbarukan dengan berbagai kemudahan salah satunya dengan memberikan insentif pajak bagi pengguna energi terbarukan. Namun demikian, hal yang menggembirakan adalah adanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan dalam pembangkit listrik yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menyumbang bauran energi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap energi baru terbarukan akan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang terdiri dari Kegiatan Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati, dan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi.

Tabel 2.28 Rekap Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) Tahun 2020-2024

NO.	EBT	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PLTM/PLTMH yang Dibangun (kW)	6.169	6.169	6.169	6.169	6.169
2	Jumlah SHS/PLTS yang Dibangun (Unit)	11.735	11.735	11.735	11.735	11.735

Sumber : Draft RUED Provinsi NTB, 2024

Tabel 2.28. menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit EBT jenis PLTM/PLTMH tahun 2020-2024 sebesar 6.169 kW, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. EBT PLTS yang dibangun pada tahun 2020-2024 sebanyak 11.735 unit menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 12.598 unit.

2.8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2.8.1 Perkembangan Ekonomi Makro

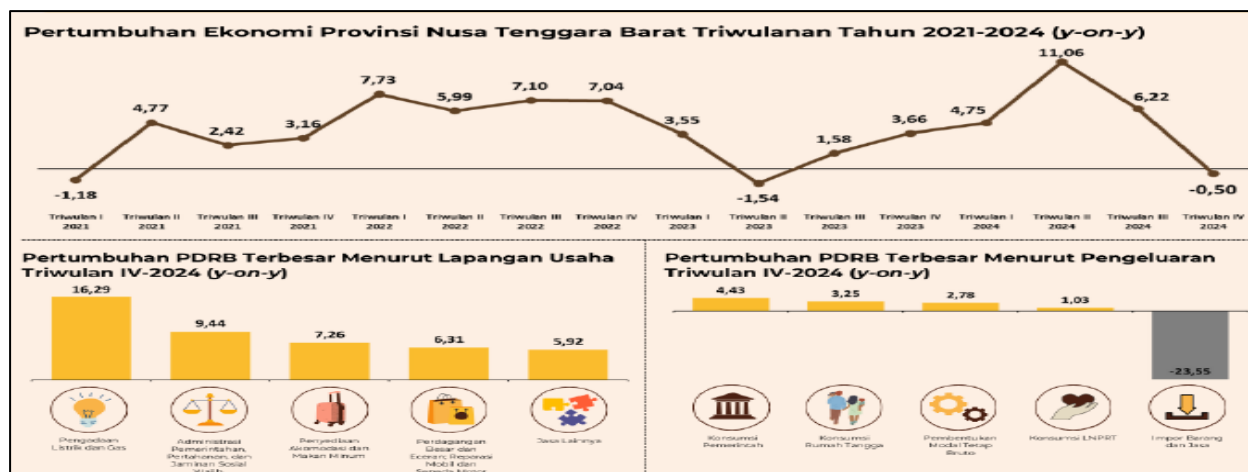
Pertumbuhan ekonomi memberikan stimulus bagi produktivitas, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan tentu saja akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tidak heran selain menjadi tolak ukur berjalannya roda perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU). Data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, dan indikator turunannya disajikan setiap triwulan untuk memberikan gambaran perekonomian wilayah.

Ekonomi Nusa Tenggara Barat Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV-2023 mengalami kontraksi sebesar 0,50 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi terdalam sebesar 16,84 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi terdalam sebesar 41,43 persen. Ekonomi Nusa Tenggara Barat selama 2024 terhadap 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,30 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,66 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 11,26 persen.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,66 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,08 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,37 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,56 persen. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,19 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,87 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh 5,72 persen; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 5,24; dan Jasa Lainnya tumbuh sebesar 4,81 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki share paling dominan terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat tumbuh sebesar 1,54 persen. Sedangkan lapangan usaha Konstruksi yang share-nya tertinggi keempat tumbuh sebesar 2,93 persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 11,26 persen dan diikuti komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 5,77 persen. Berikutnya komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 5,17 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,45 persen; dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 3,11 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi faktor pengurang tumbuh sebesar 3,87 persen. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi NTB bisa dilihat pada grafik 2.36 berikut.

Grafik 2.36 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2021-2024



Sumber : BPS NTB, 2025

2.8.2 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengukur kinerjanya melalui tiga indikator kinerja pokok, yakni:

- Persentase Koperasi yang Aktif sampai dengan tahun 2024 jumlahnya sebanyak 2.599 unit
- Penumbuhan 10.000 Wira Usaha Baru, hingga tahun 2020 menuju NTB GEMILANG
- Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari'ah, sampai dengan tahun 2022 KSP Pola syari'ah yang telah terbentuk sebanyak 430 unit.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM. Dalam periode Januari sampai dengan Desember 2020, sesuai bidang masing-masing dilakukan telah dilakukan bantuan konsultasi kepada lebih dari 800 UMKM lama termasuk pengurus dari 33 koperasi lama dan 5 koperasi baru serta 8 kampung UKM Digital, sedangkan jumlah KUMKM yang berkunjung langsung ke Kantor PLUT KUMKM sebanyak 256 orang

Pada Tahun 2017 telah diinisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan telah mendapat respon positif dari Bapak Gubernur dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. BLUD KUMKM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan Koperasi dan UKM.

Tabel 2.29 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	4.218	4.363	4.606	4.726	4.873
2	Jumlah Koperasi Aktif	2.521	2.707	2.343	2.483	2.599
3	Persentase Koperasi Aktif	59,76	62,04	50,87	52,54	53,73

Sumber : BPS NTB, 2025

Meskipun secara jumlah meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2023, persentase koperasi aktif menunjukkan penurunan tahun 2022 dan meningkat Kembali di tahun 2023,

artinya makin banyak koperasi yang aktif. Sampai tahun 2023 persentase koperasi aktif mencapai 52,54 persen.

2.8.3 Peningkatan Pariwisata

Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Keberhasilan Kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan baik mancanegara dan nusantara seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30 Angka Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Menginap pada Hotel Bintang Tahun 2019-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan wisatawan	400,595	964,036	1,376,295	2,119,927	2,324,592
- Mancanegara	39,982	11,890	126,539	678,378	883,345
- Nusantara	360,613	952,146	1,249,756	1,441,549	1,441,247
Rata-rata Lama Menginap (Malam)	2.01	2.23	2.31	1,89	1.7

Sumber : BPS NTB, 2025

Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak terlepas dari program unggulan yang mengiringi capaian angka kunjungan tersebut. Program Visit Lombok Sumbawa yang mengantarkan NTB pada jumlah kunjungan satu juta wisatawan, dilanjutkan dengan program Pesona Lombok Sumbawa yang telah mengantarkan pada angka kunjungan sebesar dua juta wisatawan dan diperkuat lagi dengan penguatan branding Friendly Lombok dan Passionate Sumbawa telah mengantarkan pada jumlah kunjungan mencapai 2.119,927 wisatawan pada akhir tahun 2023 dan meningkat pada tahun 2024 dengan angka kunjungan 2.324.592.

Keberhasilan lain yang diperoleh NTB di tingkat internasional adalah sejak 7 Oktober 2013 Gunung Rinjani sudah menyandang predikat Geopark Nasional dan pada tahun 2018 menjadi Unesco Global Geopark. Hal ini sangat penting mengingat Gunung Rinjani merupakan destinasi wisata pendakian yang sudah terkenal di mancanegara. Sejak tanggal 20 November 2017 menyusul Gunung Tambora menjadi Geopark Nasional.

Penguatan Branding Pariwisata Halal merupakan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan muslim sebagai pasar potensial. Ruang lingkup pengembangan Pariwisata Halal mengacu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yaitu dengan:

- a) Mengupayakan ketersediaan fasilitas umum dan tempat beribadah serta mendorong pengelola destinasi Pariwisata Halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah, mendorong terbentuknya desa wisata dengan potensi religious;

- b) Meningkatkan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal dengan melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, PHRI dan HPI dengan melakukan pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran Wisata Halal ke pasar potensial, pengembangan dan pementapan citra daerah sebagai Destinasi Halal yang aman, nyaman dan berdaya saing dengan melibatkan peran media yang efektif dan efisien;
- c) Mendorong industri Pariwisata Halal dengan prinsip syariah yang disertifikasi DSN-MUI;
- d) Meningkatkan peran kelembagaan baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah dan penyediaan SDM Pariwisata untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, mendorong partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata dalam perekonomian pariwisata, mengembangkan keterampilan keterampilan tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan disektor pariwisata, menangkap peluang dalam pemanfaatan digitalisasi, serta meningkatkan kompetensi pariwisata, sertifikasi peserta pelatihan dan professional SDM pariwisata

Untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, dengan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target kunjungan wisatawan tahun 2024 yaitu melakukan standarisasi fasilitas umum pada destinasi secara bertahap, meningkatnya fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis, baik kuantitas maupun kualitas, peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi serta mengupayakan konektivitas dari pasar potensial serta didukung dengan peningkatan mutu SDM Pariwisata. Melakukan promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas dan memperbanyak event promosi yang mengangkat potensi NTB dan citra kawasan pariwisata daerah baik di dalam maupun di luar daerah. Event dan promosi yang dilaksanakan dan diikuti tahun 2024 disajikan pada table 2.31 berikut:

Tabel 2.31 Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2024

NO	NAMA EVENT	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN
1	Porsche Sprint Challenge	Januari 2024	Pertamina Mandalika, Lombok Tengah
2	Sedekah Ponan	11 Februari 2024	Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa
3	Festival Bau Nyale	16-17 Februari 2024	Pantai Seger, Lombok Tengah
4	Merumatta Coast Trail	24 Februari 2024	Pantai Senggigi, Lombok Barat
5	Pesona Khanza Ramadhan 2024 di NTB	18 Maret-5 April 2024	Lapangan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Kota Mataram
6	Festival Rimpu Mantika	27 April 2024	Lawata, Kota Bima
7	Lebaran Topat	29 April 2024	Lombok Barat
8	Rinjani 100	24-26 Mei 2024	Sembalun, Lombok Timur



NO	NAMA EVENT	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN
9	L'etape Indonesia	26 Mei 2024	Mandalika, Lombok Tengah
10	Asia Road Racing Championship	26 Mei 2024	Mandalika, Lombok Tengah
11	MXGP Samota	30 Juni 2024	Sirkuit Samota, Sumbawa
12	Sykarara Begawai Jelo Nyesek	Juli 2024	Lombok Tengah
13	Festival Melala	6 Juli 2024	Kabupaten Sumbawa
14	MXGP Lombok	7 Juli 2024	Sirkuit Eks Bandara Selaparang
15	Alunan Budaya Pringgasele	12-20 Juli 2024	Desa Pringgasele, Lombok Timur
16	Festival Lakey	25-28 Juli 2024	Kabupaten Dompu
17	Shell Eco Marathon	26 Juli 2024	Sirkuit Mandalika
18	Sail Boat Race	25 Agustus 2024	Pantai Elak-elak, Lombok Barat
19	Gili Festival	September 2024	Gili Trawangan, Lombok Utara
20	Lombok Sumbawa Tenun Festival	September 2024	Kota Mataram
21	Ballona Festival	1-15 September 2024	Pantai Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat
22	Perang Topat	19 September 2024	Lingsar, Lombok Barat
23	MotoGP Mandalika	27-29 September 2024	Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah
24	Lombok Sumbawa Fair	27-29 September 2024	Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah
25	Senggigi Sunset Jazz	29 September 2024	Pantai Kerandangan, Lombok Barat
26	Pacoa Jara	Oktober 2024	Kabupaten Dompu
27	Alunan Budaya Pengadangan	16 Oktober 2024	Lombok Timur
28	Festival Perang Topat	19 November 2024	Pura Lingsar, Lombok Barat
29	Peosna Pantai Karakat	Desember 2024	Lombok Timur
30	Festival Budaya Maloka	Desember 2024	Lombok Timur
31	Maulid Adat Bayan		Lombok Utara
32	Lombok Syariah Festival		

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2025

Selain upaya melalui media promosi dan event-event kepariwisataan, upaya lain yang dilakukan adalah dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Upaya pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur menuju destinasi, secara bertahap menyiapkan fasilitas umum, penguatan Branding Wisata Syariah sebagaimana amanat Perda 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pembangunan TIC di destinasi unggulan, pengembangan destinasi berbasis ecotourism baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa melalui pengembangan desa wisata. Pembenahan infrastruktur destinasi pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis.

2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

2.9.1 Pembangunan Infrastruktur

Meningkatnya jumlah penduduk provinsi NTB akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan. tabel berikut 2.32 berikut.

Tabel 2.32 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Unit	Seat
1	AKDP Lombok	85	2767
2	AKDP Sumbawa dan Sumbawa Barat	160	3189
3	AKDP Dompu	64	2244
4	AKDP Bima	70	1883

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

Untuk meningkatkan konektivitas selain dengan angkutan reguler Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis, baik angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Pada tahun 2024, angkutan darat memiliki 9 rute perintis yang dilayani oleh BUS DAMRI serta dua rute multimoda yaitu rute Lombok International Airport - Mataram - Senggigi dan rute Lombok International Airport - Pancor.

Sistim angkutan pelayaran di NTB menggunakan angkutan penyeberangan dan angkutan laut. Angkutan penyeberangan saat ini didominasi dengan angkutan jarak pendek yang menghubungkan dan menjahit sabuk selatan indonesia dari Jawa, Bali, NTB dan NTT kedepan diperlukan intervensi pemerintah dengan mendorong pengembangan lintas jarak jauh Long Distance Ferry dengan menggunakan kapal ro-ro agar bisa menghubungkan NTB (Sumbawa dan Lombok) secara langsung ke Jawa Timur (Surabaya, Probolinggo dan Banyuwangi) yang mayoritas menjadi tujuan akhir bagi angkutan barang di NTB. Penggunaan Long Distance Ferry diharapkan mengalihkan pergerakan barang dari moda darat menjadi menggunakan moda laut.

Terkait dengan pengembangan angkutan laut, selain menggunakan kapal Pelni sebagai angkutan berjadwal untuk aksesibilitas antar wilayah di NTB dan menuju ke provinsi lain maka perlu juga dikembangkan angkutan perintis guna menghubungkan daerah-daerah terpencil di wilayah tengah Indonesia (Jawa, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan) sehingga bisa mendorong meningkatnya mobilitas orang dan barang di wilayah-wilayah terpencil. Konektivitas antar wilayah di NTB terutama yang menuju kawasan wisata utama, pulau-pulau kecil dan kawasan strategis dan potensial lainnya perlu didorong dengan memanfaatkan kapal-kapal pelra dan kapal cepat yang dilakukan secara terjadwal dan terkoneksi dengan moda angkutan lainnya sehingga bisa memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya.

Tabel 2.33 Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	RUTE	KETERANGAN
1	2	3
1	Lembar - Padangbai	
2	Lembar - Jangkar	
3	Lembar – Waingapu	
4	Lembar - Tj. Perak	
5	Gili Mas Tj. Wangi	
6	Gili Mas - Rute Cruise	
7	Pemenang - 3 Gili	
8	Senggigi – Trawangan	
9	Senggigi – Padangbai	
10	Lab. Lombok – Benete	
11	Kayangan - Poto Tano	
12	Badas - Moyo, Medang, Sibotok	
13	Bima – Makassar	
14	Sape – Waikelo	
15	Sape – Waingapu	
16	Bima - Reo - Jampea – Makassar - Jampea - Reo - Bima - Waikelo -- Ende - Pulau Raijua - Sabu/Seba - Pulau Raijua - Ende - Waikelo - Bima	Rute Tol Laut
17	Bima - Carik - Celukan Bawang - Sepekan - Kangean - Kalianget - Surabaya - Kalianget - Kangean - Sepekan - Celukan Bawang - Carik - Bima	Rute Tol Laut
18	Bima – Calabai - Labuhan Lombok - Sailus – Sapuka – Balobaloang Besar – Makassar – Balobaloang Besar – Sapuka – Sailus - Labuhan Lombok – Calabai – Bima	Rute Tol Laut
19	Bima - Labuhanbajo – Bonerate – Selayar – Bau Bau – Selayar – Bonerate – Labuhan bajo – Bima	Rute Tol Laut

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

Tabel 2.34 Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	RUTE	KET



NO	RUTE	KET
1	2	3
1	Terminal Mandalika – Pancor – PP	AKDP
2	Terminal Mandalika – Labuhan Lombok – PP	AKDP
3	Terminal Mandalika – Masbagik – Labuhan Lombok – Sembalun – PP	AKDP
4	Terminal Mandalika – Taliwang PP	AKDP
5	Terminal Mandalika – Sumbawa Besar – PP	AKDP
6	Terminal Mandalika – Sumbawa Besar – Lunyuk – PP	AKDP
7	Terminal Mandalika – Empang – PP	AKDP
8	Terminal Mandalika – Praya – Empang – PP	AKDP
9	Terminal Mandalika – Dompup – PP	AKDP
10	Terminal Mandalika – Bima – PP	AKDP
11	Lembar – Terminal Mandalika – Labuhan Lombok	AKDP
12	Lembar – Terminal Mandalika – Pancor – PP	AKDP
13	Sumbawa Besar – Ginte Dompup – Bima – PP	AKDP
14	Calabai–Cabang Soriutu–Praya–Terminal Mandalika–PP	AKDP
15	Calabai – Cabang Soriuru – Terminal Mandalika – PP	AKDP
16	Bima – Ginte Dompup – Kore – PP	AKDP
17	Bima – Telabiu – Ginte Dompup – PP	AKDP
18	Sape – Sima – Ginte Dompup – PP	AKDP
19	Bima – Ginte Dompup – Lab.Kenanga – PP	AKDP
20	Bima – Ginte Dompup – Kilo – PP	AKDP
21	Tente – Ginte Dompup – Kore – Bima – PP	AKDP
22	Tonggo – Jereweh – Taliwang – Praya –Terminal Mandalika – PP	AKDP
23	Taliwang – Alas - Sumbawa Besar – PP	AKDP
24	Bima – Dompup – Hu'u – PP	AKDP
25	Sembalun – Terminal Mandalika – PP	AKDP
26	Pelampang – Sumbawa Besar – Utan – Terminal Mandalika – PP	AKDP
27	Terminal Mandalika – Labuhan Lombok –Sembalun – PP	AKDP
28	Pelampang – Sumbawa – Terminal Mandalika – PP	AKDP
29	Terminal Mandalika – Tanjung – Bayan – PP	AKDP
30	Pelampang – Sumbawa – Praya – Terminal Mandalika–PP	AKDP
31	Terminal Mandalika – Praya – Kopang –Sumbawa – PP	AKDP
32	Empang – Sumbawa – Mataram – PP	AKDP
33	Empang – Lape – Sumbawa – Praya – Terminal Mandalika – PP	AKDP
34	Empang – Pelampang – Terminal Mandalika – PP	AKDP
35	Kempo – Dompup – Bima – PP	AKDP
36	Kesi – Dompup – Bima – PP	AKDP



NO	RUTE	KET
37	Labuhan Lombok – Masbagik Terminal Mandalika – PP	AKDP
38	Lunyuk – Sumbawa – Praya – Terminal Mandalika – PP	AKDP
39	Sumbawa – Maluk PP	AKDP
40	Sekongkang – Maluk – Taliwang – Pototano – Alas – Sumbawa Besar – PP	AKDP
41	Sekongkang – Taliwang – Terminal Mandalika – PP	AKDP
42	Sekongkang – Taliwang – Pototano – Alas PP	AKDP
43	Sekongkang – Taliwang – Pototano – Alas – Sumbawa Besar – PP	AKDP
44	Sekongkang – Taliwang – Sumbawa Besar – PP	AKDP
45	Sumbawa – Tano – Taliwang – Maluk PP	AKDP
46	Tonggo – Jereweh – Taliwang – Pototano – Alas – Sumbawa PP	AKDP
47	Tonggo – Taliwang – Pototano – Sumbawa – PP	AKDP
48	Tonggo – Taliwang – Sumbawa – PP	AKDP
49	Santong – Tanjung – Gunungsari–Terminal Mandalika–PP	AKDP
50	Sumbawa Besar – Alas – Tano – Taliwang – PP	AKDP
51	Dompus – Sumbawa – Mataram – PP	AKDP
52	Bayan – Tanjung – Gunungsari – Terminal Mandalika – PP	AKDP
53	Bayan – Tanjung – Terminal Mandalika – PP	AKDP
54	Bima – Dompus – Terminal Mandalika – PP	AKDP
55	Bima – Dompus – Calabai – Lb. Kenanga – PP	AKDP
56	Sembelia – Lb.Lombok – Terminal Mandalika – PP	AKDP
57	Sembelia – Kayangan–Terminal Mandalika –Lembar – PP	AKDP
58	Sembelia – Terminal Mandalika – PP	AKDP
59	Bima – Dompus – Lb. Kananga (Melalui Kempo – Doropeti – Calabai) – PP	AKDP
60	Bima – Dompus – Sumbawa Besar – PP	AKDP
61	Calabai – Dompus – Sumbawa Besar – Praya – Terminal Mandalika – PP	AKDP
62	Calabai – Dompus – Bima – PP	AKDP
63	Calabai – Manggalewa – Praya – Terminal Mandalika – PP	AKDP
64	Sumbawa – Utan – Terminal Mandalika – PP	AKDP
65	Sumbawa – Alas – Pototano – Taliwang –Sekotong – PP	AKDP
66	Taliwang – Maluk–Sekongkang–Terminal Mandalika – PP	AKDP
67	Taliwang – Sumbawa Besar – PP	AKDP
68	Taliwang – Seteluk – Pototano – Utan – Sumbawa –	AKDP



NO	RUTE	KET
	PP	
69	Tanjung – Gunungsari – Terminal Mandalika – PP	AKDP
70	Tente – Dompou – Calabai – PP	AKDP
71	Tente – Dompou – Sumbawa Besar – PP	AKDP
72	Tonggo – Sekongkang – Maluk – Jereweh – Taliwang – Pototano – Sumbawa Besar – PP	AKDP
73	Sape – Sumbawa – Bima PP	AKDP
74	Terminal Mandalika – Taliwang – Jereweh – Maluk – Tonggo PP	AKDP
75	Terminal Mandalika – Taliwang – Maluk – Tonggo – PP	AKDP
76	Sumbawa – Alas – Pototano – Taliwang – PP	AKDP
77	Alas – Pototano – Taliwang – Maluk – Sekongkang – PP	AKDP
78	Bima – Dompou – PP	AKDP
79	Bima – Sumbawa Besar – PP	AKDP
80	Bima – Tente – Dompou – Hu'u – PP	AKDP
81	Calabai – Bima – Dompou – PP	AKDP
82	Jereweh – Taliwang – Pototano – LabuhanLornbok – Terminal Mandalika – PP	AKDP
83	Labangka – Plampang – Sumbawa – Praya –Terminal Mandalika – PP	AKDP
84	Labangka – Sumbawa – Utan – Rhee – Terminal Mandalika – PP	AKDP
85	Maluk – Taliwang – Terminal Mandalika – PP	AKDP
86	Maluk – Taliwang – Pototano–Alas – Sumbawa Besar – PP	AKDP
87	Mataram – Jereweh – Maluk – Sekongkang –Tonggo – PP	AKDP
88	Mataram – Praya – Labangka – PP	AKDP
89	Mataram – Sumbawa Besar – Dompou PP	AKDP
90	Mataram – Pelampang – Labangka PP	AKDP
91	Mataram – Bangkombangko – PP	AKDP
92	Mataram – Labangka – PP	AKDP
93	Mataram – Leweng – PP	AKDP
94	Mataram – Lunyuk – PP	AKDP
95	Mataram – Mata – PP	AKDP
96	Mataram – Moyo – PP	AKDP
97	Mataram – Pesugulan – PP	AKDP
98	Mataram – Praya – Sumbawa Besar – Labangka – PP	AKDP
99	Mataram – Sampar Goal – PP	AKDP
100	Mataram – Santong – PP	AKDP
101	Mataram – Sumbawa Besar – Ropang – PP	AKDP
102	Mataram – Talonang – PP	AKDP
103	Mataram – Praya – Awang Melalui Ganti – PP	AKDP



NO	RUTE	KET
104	Mataram – Sumbawa – Lendanggoar – Orong Telu – PP	AKDP
105	Pelabuhan Lembar – Terminal Mandalika – PP	AKDP
106	Sumbawa – Sampar Goal – PP	AKDP
107	Terminal Mandalika – MoyoHilir	Angkutan Perintis
108	Terminal Mandalika – Sumbawa Besar – Lantung	Angkutan Perintis
109	Terminal Mandalika – Sumbawa – Matta	Angkutan Perintis
110	Terminal Mandalika – Praya – Taliwang – Talonang	Angkutan Perintis
111	Terminal Sumer Payung – Sampar Goal	Angkutan Perintis
112	Terminal Mandalika – Aikmel – Pesugulan	Angkutan Perintis
113	Terminal Mandalika – Santong (Gunung Sari)	Angkutan Perintis
114	Terminal Mandalika – Tawun – Sekotong – Bangko-Bangko	Angkutan Perintis
115	Terminal Mandalika – Leweng	Angkutan Perintis
116	Bandar Udara BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal	Angkutan KSPN
117	Terminal Mandalika – Epicentrum Mall – Bandar Udara BIZAM – Sirkuit Kuta Mandalika – Pantai Mawun – Pantai Selong Belanak	Angkutan KSPN
118	Terminal Mandalika – Pelabuhan Lembar – Pelabuhan Gilimas – Pantai Tawun – Pantai Sekotong – Bangko-Bangko	Angkutan KSPN
119	Terminal Bangsal – Geopark Rinjani	Angkutan KSPN
120	Pelabuhan Penyeberangan Kayangan – Kuta Mandalika	Angkutan KSPN
121	Senggigi – Epicentrum Mall – Terminal Mandalika – Pool Damri – Bandara	Pemadu Moda
122	Selong – Masbagik – Kopang – Praya – Bandara	Pemadu Moda

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

Tabel 2.35 Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Rute		Ket.
1	Bandara International Zainudin Abdul Majid (BIZAM)	Sumbawa	
2		Bima	
3		Denpasar	
4		Surabaya	
5		Semarang	
6		Yogyakarta	
7		Jakarta	
8		Banjarmasin	
9		Makassar	
10		Labuan Bajo	
11		Kuala Lumpur	
12		Singapura	



No	Rute		Ket.
13	Bandara Sultan Kaharuddin	BIZAM	
14		Denpasar	
15	Bandara Sultan Salahuddin	BIZAM	
16		Denpasar	
17		Makassar	
18		Labuhan Bajo	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

Selain membuka konektivitas antar wilayah, pemerintah juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	Meninggal Dunia (Jiwa)
1	2020	1.264	293
2	2021	1.376	375
3	2022	1.775	391
4	2023	1.939	379
5	2024	2.202	394

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

Dari data pada tabel 2.36 terlihat bahwa jumlah kejadian kecelakaan tahun 2024 2.202 kejadian dengan korban meninggal sebanyak 394 jiwa meningkat 263 kejadian dan korban meninggal meningkat 15 jiwa. Salah satu eksese negatif dari konektivitas transportasi adalah terjadinya angka kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi, untuk itu dibuat sebuah Rasio Fatalitas untuk mengukur keberhasilan penanganan lalu lintas dengan menghitung jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dibanding dengan 1/10.000 jumlah seluruh kendaraan yang ada. Tabel berikut menampilkan Data Rasio Fatalitas di Provinsi NTB tahun 2019-2024.

Tabel 2.37 Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024

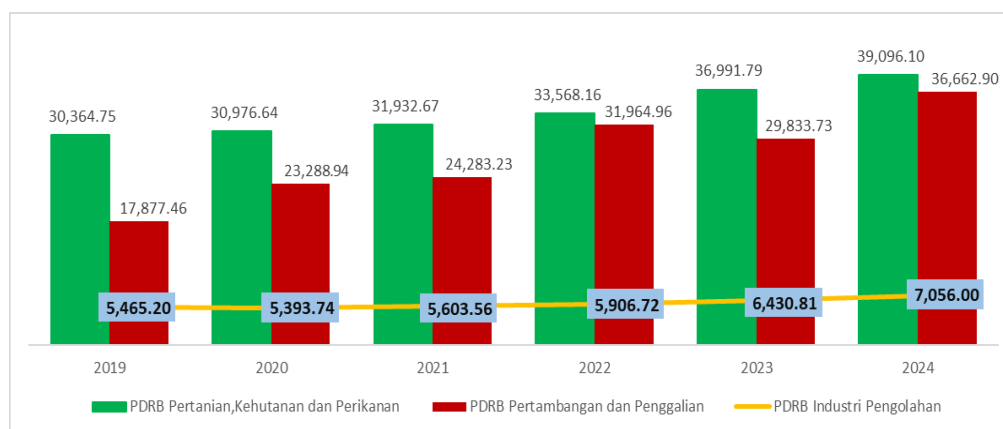
No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rasio Fatalitas
1	2020	1.647.061	293	2.39
2	2021	1.636.592	375	2.29

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rasio Fatalitas
3	2022	1.742.667	391	2.24
4	2023	1.837.342	379	2.06
5	2024	2.072.681	394	2.02

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2024

Dari tabel 2.37 perkembangan rasio fatalitas Dimana Rasio fatalitas (atau tingkat fatalitas kasus) adalah perbandingan antara jumlah kematian akibat suatu penyebab (seperti penyakit atau kecelakaan) dengan jumlah total kasus yang teridentifikasi dalam periode waktu tertentu, yang seringkali dinyatakan dalam persentase. Rasio fatalitas semakin tinggi semakin buruk. Ini karena rasio fatalitas yang tinggi menunjukkan bahwa dari setiap kejadian kecelakaan, ada kemungkinan lebih besar seseorang meninggal dunia. Tingginya rasio ini mengindikasikan tingginya tingkat keparahan kecelakaan dan rendahnya keselamatan di jalan. Untuk kasus di NTB menunjukkan penurunan setiap tahunnya yang artinya semakin baiknya pengamanan keselamatan di jalan.

Grafik 2.37 PDRB NTB Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2019-2024



Sumber : BPS NTB 2024 (diolah)

Perkembangan PDRB NTB berdasarkan jenis usaha di NTB untuk PDRB Pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana PDRB tahun 2024 sebesar 39.096,10 Miliar mengalami peningkatan sebesar 2.104,31 milyar dibandingkan PDRB tahun 2023. PDRB Pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan sebesar 6.829,17 Milyar pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 . PDRB Industri pengolahan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 625,19 Milyar rupiah dibandingkan tahun 2023 Jadi secara keseluruhan semua jenis usaha mengalami peningkatan di NTB yang berarti terjadi peningkatan penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat.

Industri nasional juga telah menerapkan praktik produksi dan pengelolaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Data Bank Dunia menunjukkan adanya penurunan rasio emisi



terhadap nilai tambah industri dari 0,13% pada tahun 2010 menjadi 0,12% pada tahun 2014. Selain itu selama periode 2010 hingga 2014 terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan emisi CO₂ per kapita dari -5,21% pada tahun 2010 menjadi -6,46% pada tahun 2014. Walaupun demikian, tantangan yang dihadapi agar penurunan emisi gas rumah kaca terus berkelanjutan adalah dengan menyesuaikan seluruh teknologi industri/produksi, transportasi dan rumah tangga agar efisien dan ramah lingkungan terutama di sektor-sektor prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Pertumbuhan industri yang berkelanjutan juga ditentukan oleh penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), serta inovasi. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia secara umum telah menunjukkan perbaikan dari sisi litbang dan inovasi. Data dari IMF dan Bank Dunia dalam R&D Magazine menunjukkan bahwa proporsi anggaran Litbang terhadap PDB di Indonesia meningkat dari 0,08% pada tahun 2013 menjadi 0,3% pada tahun 2016. Kinerja ini diikuti dengan peningkatan ranking jumlah ilmuwan dan insinyur di Indonesia dari ranking ke-51 pada tahun 2012 menjadi ranking ke-35 pada tahun 2017 (WEF, 2017). Walaupun demikian, proporsi anggaran Litbang masih kecil jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah peningkatan Iptek dan inovasi yang didukung alokasi anggaran yang memadai melalui pelibatan swasta dalam pendanaan Litbang, serta adanya keterkaitan antara SDM berkualitas, Litbang dan kebutuhan pengembangan industri.

Penguasaan Iptek juga ditunjukkan oleh penguasaan dan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu indikatornya yaitu proporsi penduduk terlayani mobile broadband. Selama periode 2009 – 2014, jumlah penduduk yang terlayani jaringan pita lebar meningkat dari 1,86% menjadi 6,66% (Kemenkominfo, 2015). Proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler juga terus meningkat dari 38,5% pada tahun 2010 menjadi 58,3% pada tahun 2016 (Susenas, 2016). Indonesia tercatat sebagai negara urutan ke-8 di dunia dengan penduduk terbanyak pengguna internet (Internet World Statistic). Kondisi ini didukung oleh perluasan jumlah kabupaten/kota yang dijangkau backbone serat optik pita lebar nasional hingga mencapai 72% pada tahun 2014 (Kemenkominfo, 2015). Pada tahun 2019, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet ditargetkan mencapai 100% di wilayah Universal Service Obligation (USO). Tantangan yang dihadapi dalam akses teknologi dan informasi adalah peningkatan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi produk, dan daya saing industri, serta perluasan akses ke pasar.

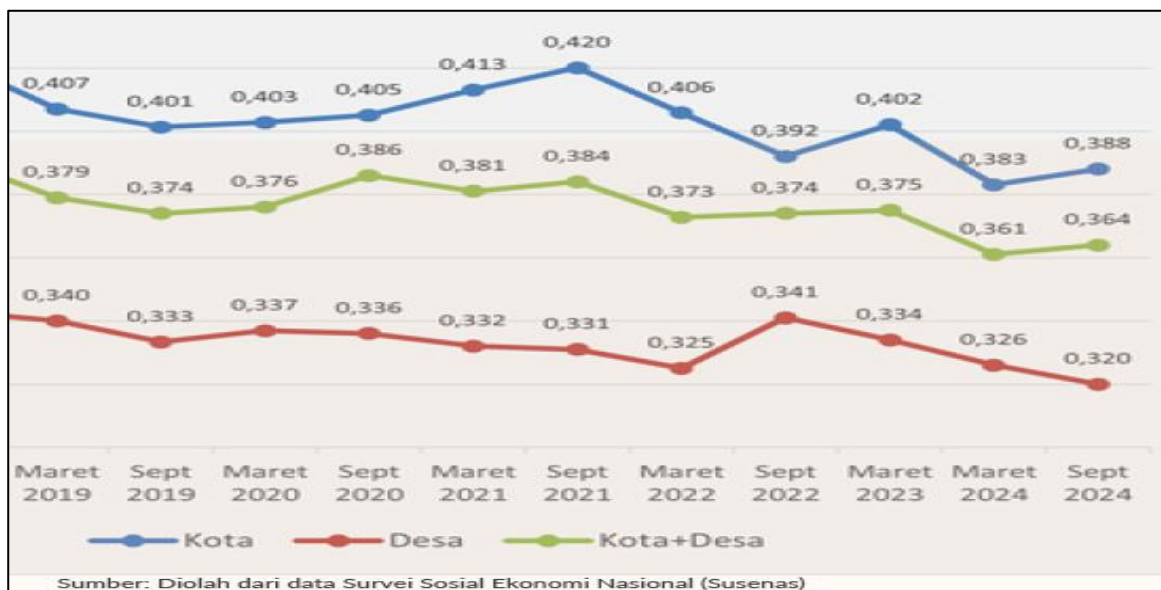
2.10 Mengurangi Kesenjangan

2.10.1 Kesenjangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di NTB yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,364. Angka ini naik 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,361 dan menurun 0,011 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,375. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,388; naik dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,383 dan turun dibanding gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,402. Gini ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,320; turun dibanding gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,326 dan gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,334. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,04 persen. Hal ini berarti

pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,04 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 20,70 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

Grafik 2.38 Perkembangan Gini Ratio di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 19,04 persen. Kondisi ini menurun 0,07 persen poin dibandingkan

kondisi Maret 2024 yang sebesar 19,11 persen. Jika dilihat berdasarkan daerah, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 18,04 persen. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 20,70 persen. Dengan demikian menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat di daerah perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2.38 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Nusa Tenggara Barat
Tahun 2022 – 2024

Daerah/Tahun	Penduduk 40% terbawah	Penduduk 40% menengah	Penduduk 20% atas	Gini Ratio
Perkotaan				
Maret 2023	17,21	34,97	47,82	0,402
Maret 2024	18,31	35,20	46,49	0,383
September 2024	18,04	35,32	46,65	0,388
Perdesaan				
Maret 2023	19,91	38,59	41,50	0,334
Maret 2023	20,26	3,71	41,03	0,326
September 2024	20,70	38,79	40,51	0,320
Perkotaan +Perdesaan				
Maret 2023	18,34	36,31	45,36	0,375
Maret 2023	19,11	36,62	44,27	0,361
September 2024	19,04	36,45	44,51	0,364

Sumber : BPS NTB

Kebijakan perlindungan sosial yang komprehensif adalah upaya yang sedang dibangun untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Selain perlindungan social tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan trobosan yaitu melawan kemiskinan dari desa diantaranya dengan memanfaatkan basis data terpadu, menspasialkan desa-desa miskin sesuai data BDT yang saat ini menjadi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta membuat kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se –NTB untuk menganggarkan dan melaksanakan tujuh program dalam percepatan penanggulangann kemiskinan berdasarkan data DTKS. Ketujuh program tersebut adalah : Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Jamban Keluarga, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Pengelolaan sampah (Bank sampah) dan Cakupan Air bersih.

Walaupun anggaran fungsi perlindungan sosial meningkat setiap tahun, masih terdapat beberapa tantangan utama dalam upaya mengurangi ketimpangan, penanggulangan kemiskinan dan kerentanan. Tantangan utama tersebut adalah (1) pemutakhiran data penerima program yang belum sesuai dengan kondisi dinamis di lapangan, dan (2) keterbatasan jumlah dan

kapasitas sumber daya manusia di lapangan yang mengawal program-program ini seperti pendamping/fasilitator, tenaga guru dan tenaga kesehatan yang terdidik, terlatih, serta memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dan tantangan di daerah.

Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran

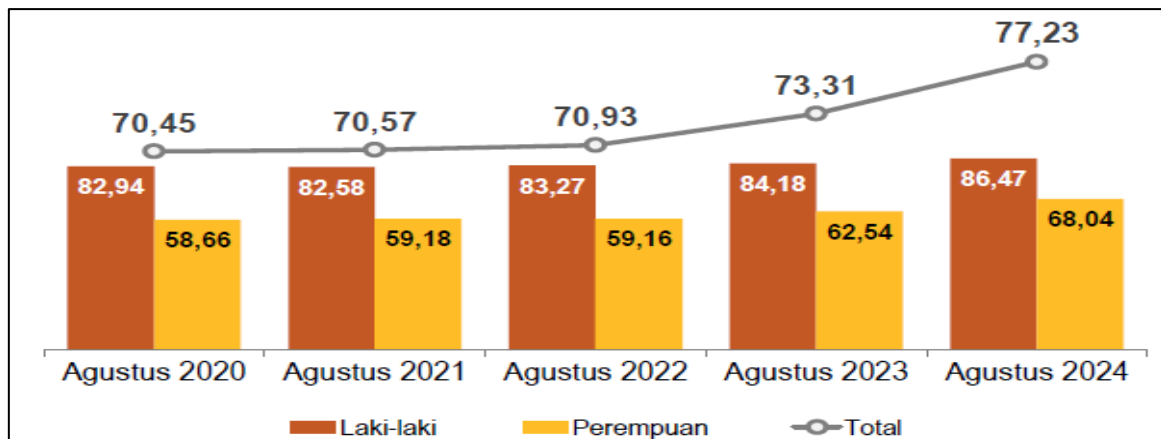
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan dua variable ketenagakerjaan yang sangat penting diperhatikan dalam pembangunan wilayah. Data BPS Provinsi NTB, diketahui bahwa selama tahun 2019 – 2024 jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan pengangguran mengalami fluktuasi, sehingga berdampak kepada TPAK dan TPT, seperti disajikan pada tabel 2.39 dan grafik 2.39 berikut.

Tabel 2.39 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2019-2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk Usia Kerja (orang):	3,817,696	3,882,460	3,946,546	4,059,604	4.133.780
	Laki-laki (orang)	1,853,517	1,890,023	1,926,328	2,020,540	2.061.160
	Perempuan (orang)	1,964,179	1,992,437	2,020,218	2,039,064	2.072.620
2	Angkatan Kerja (orang):	2.689.38	2,739,890	2,799,178	2,976,225	3.192.560
	Laki-laki (orang)	1,537,239	1,560,836	1,603,994	1,700,943	1.782.340
	Perempuan (orang)	1,152,147	1,179,054	1,195,184	1,275,282	1.410.220
	TPAK (%)	70.45	70.57	70.93	73.31	
3	Pengangguran (orang):	113,430	82,495	80,833	83,243	87.011
	Laki-laki (orang)	76,357	55,559	57,956	55,944	50.369
	Perempuan (orang)	37,073	26,936	22,877	27,299	36.642
	TPT (%)	4.22	3.01	2.89	2.8	2,73

Sumber: BPS Provinsi NTB

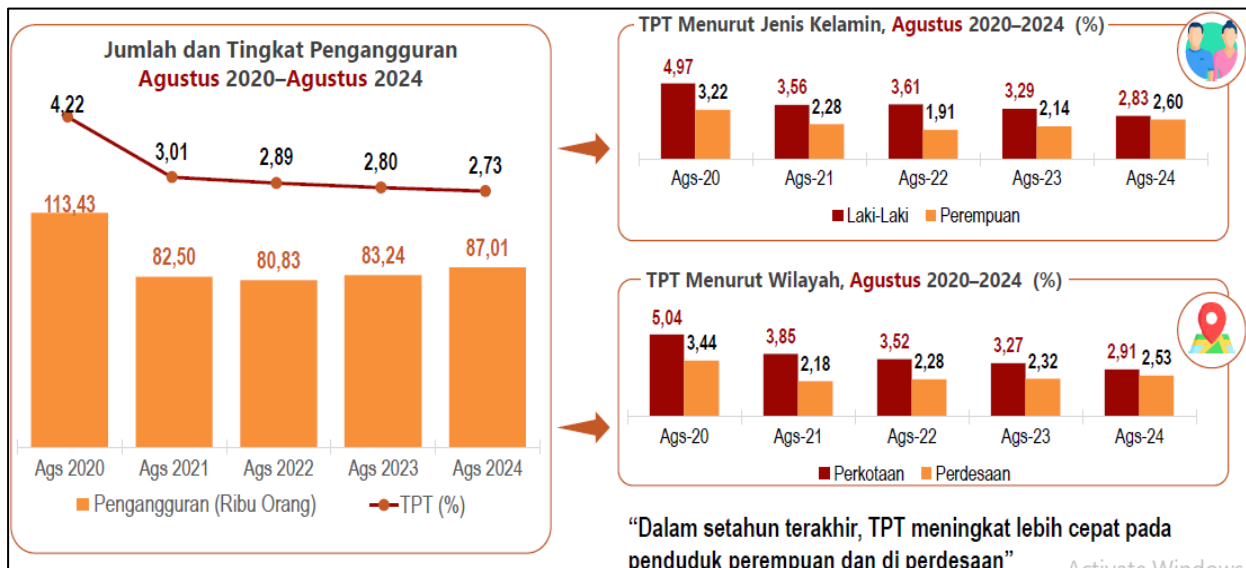
Grafik 2.39 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2020 -2024



Sumber : Badan Pusat Statistik NTB,2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi NTB tahun 2020 – 2024 cenderung mengalami fluktuasi yang disebabkan adanya fluktuasi jumlah angkatan kerja dan jumlah tenaga kerja dari tahun ke tahun, yaitu dari 70.45 persen pada tahun 2020 naik menjadi 77,23 persen pada tahun 2024. TPAK NTB terus meningkat yang disebabkan oleh relatif tingginya peningkatan TPAK perempuan. Apabila dibandingkan dengan TPAK Indonesia pada tahun 2024 mencapai 70,63 persen, maka TPAK Provinsi NTB masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Grafik 2.40 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB,2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB tahun 2020 – 2024 cenderung menurun, yaitu dari 4,22 persen pada tahun 2020 menjadi 2,73 persen pada tahun 2024. TPT menurut jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan Perempuan, Tahun 2024 TPT laki-laki berada pada 2,91 persen lebih tinggi 0,23 dibandingkan TPT Perempuan sebesar 2,60 persen, hal ini karena permintaan tenaga kerja Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Sedangkan TPT menurut wilayah pada tahun 2024 perkotaan lebih tinggi 0,38 dibandingkan perdesaan dengan angka 2,91 untuk perkotaan dengan angka 2,91 persen dan perdesaan dengan angka 2,53. Apabila dibandingkan dengan TPT Indonesia agustus tahun 2024 dengan angka 4,91 persen, TPT Provinsi NTB selalu berada di bawah Indonesia yaitu dengan capaian 2,73 persen.

Peningkatan TPAK dan penurunan TPT dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja dan penciptaan peluang berusaha pada berbagai sektor ekonomi/lapangan usaha. Sebaran angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang bekerja pada berbagai sektor ekonomi disajikan pada tabel 2.40 berikut.

Tabel 2.40 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 (Persen)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.68	32.61	34.57	33.54	36,16
Pertambangan dan Penggalian	1.09	1.45	1.5	1.1	1,43
Industri Pengolahan	11.14	12.09	10.11	12.37	10,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.35	0.29	0.51	0.67	0,68
Konstruksi	6.29	6.58	6.19	6.29	6,24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor	20.99	21.23	22.04	18.32	18,89
Transportasi dan Pergudangan	3.7	3.48	3.36	2.82	2,69
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.26	4.62	5.51	4.78	5,72
Informasi dan Komunikasi	0.36	0.49	0.53	0.43	0,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.18	0.89	0.89	1.06	1,19
Jasa Perusahaan	0.65	0.81	0.68	0.95	1,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4.23	3.8	3.83	4.1	3,92
Jasa Pendidikan	6	5.27	5.59	5.46	5,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.32	1.74	1.52	1.47	1,90
Pengadaan Listrik dan Gas, Real Estate, Jasa Lainnya	4.15	4.36	3.83	4.01	3,78
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Dari tabel di atas, diketahui bahwa menurut sektor ekonomi/lapangan usaha, penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja pada lapangan usaha pertanian di provinsi NTB masih cukup tinggi yang mencapai lebih dari 30 persen. Sedangkan tenaga kerja yang bekerja pada sektor yang masih rendah yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang.

2.10.2 Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Tabel 2.41 Jumlah Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019-2024

NO	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perusahaan	3.869	3,683	7,048	17,845	18.117
2	Jumlah Tenaga Kerja yang mengikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	38.554	266,508	365,177	625,611	622.830

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, 2025

Tabel 2.41. menunjukkan Jumlah perusahaan di NTB pada Tahun 2024 sebesar 18.117 perusahaan, meningkat sejumlah 272 perusahaan dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 17.845. Jumlah tenaga kerja yang mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2024 sebanyak 622.830 orang, menurun sebesar 2.781 orang dibandingkan dengan tahun 2024 sejumlah 622.830.

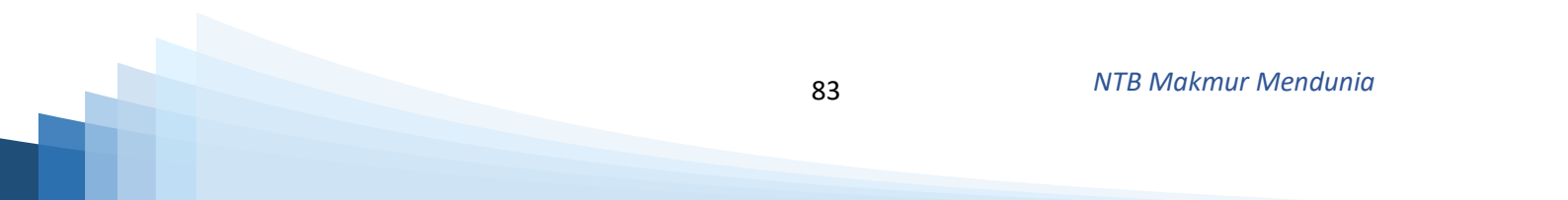
2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Data proyeksi penduduk BPS menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan diprediksi jumlahnya akan semakin meningkat menjadi 66,6 persen di tahun 2035. Bank Dunia juga memperkirakan di tahun 2045 sebanyak 220 juta orang atau 70 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Indonesia merupakan negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Diperkirakan pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 318, juta jiwa dan sekitar 67,1 persen penduduk akan tinggal di kawasan perkotaan Namun, hingga saat ini, belum seluruh masyarakat perkotaan dapat mengakses layanan dasar dan infrastruktur dasar perkotaan yang tersedia. Di sisi lain, pertumbuhan 1 persen penduduk perkotaan di Indonesia hanya berkontribusi pada peningkatan 1,4 persen PDB per kapita. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan dengan China dan negara di Asia Timur dan Pasifik lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan urbanisasi dibutuhkan, tidak hanya untuk menjamin perkotaan yang inklusif dari segi akses terhadap layanan dan infrastruktur dasar, tetapi juga optimal dalam memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Urbanisasi dan pembangunan perkotaan merupakan salah satu agenda prioritas yang harus tercapai pada tahun 2030 melalui Tujuan 11 mengenai kota dan permukiman yang berkelanjutan.



2.11.1 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan yang meliputi: (1) rumah layak huni dan terjangkau, dan (2) lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Penanganan perumahan Tidak layak Huni di Provinsi NTB tahun 2024 mencapai 20.162 rumah, lebih tinggi dari tahun 2023 sebanyak 2.675 rumah atau meningkat 7,54 persen. Perkembangan jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi NTB dan sebarannya di 10 kabupaten/kota yang ditangani selama tahun 2020-2024 mencapai 22.225 rumah dengan perkembangannya disajikan pada tabel 2.42 berikut.





Tabel 2.42 Data Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2019-2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Lombok Barat	1,018	329	447	377	11,975	2,171
2	Lombok Tengah	1,427	532	831	640	1,764	3,430
3	Lombok Timur	1,678	941	1,104	444	1,112	4,167
4	Sumbawa	1,315	516	1,170	225	1,741	3,226
5	Dompu	825	95	249	119	316	1,288
6	Bima	855	244	2,111	67	87	3,277
7	Sumbawa Barat	501	175	767	308	677	1,751
8	Lombok Utara	241	102	69	131	693	543
9	Kota Mataram	663	176	187	228	1,175	1,254
10	Kota Bima	611	215	156	136	382	1,118
JUMLAH		9,134	3,325	7,091	2,675	20,162	22,225

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024

Menurut pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang standar Pelayanan Minimal, ada dua jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah provinsi.

2.11.2 Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk

Nilai Indeks risiko di tingkat Provinsi merupakan rata-rata dari indkes risiko kabupaten/kota pada provinsi tersebut. Indeks Risiko Bencana Provinsi NTB (IRBI) di tahun 2023 sebesar 115,37 menurun menjadi 113,64 .Wilayah Provinsi NTB dilewati oleh patahan sesar Flores Back Arc Thrust, sesar Lombok Strait Strike-slip Fault, sesar Teluk Panas Fault dan sesar Sape Strike-slip Fault (PusGen, 2017). Nusa Tenggara Barat pernah diguncang gempabumi dengan skala 6,4 Skala Richter (SR) pada tahun 2018. Gempabumi tersebut menyebabkan 564 jiwa meninggal dunia dan 1.584 jiwa luka-luka. Selain itu, Nusa Tenggara Barat juga memiliki 3 Gunungapi yang aktif yakni Gunung Rinjani, Gunung Sangeangapi, dan Gunung Tambora (PVMBG). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2024 dengan angka 113,64 (Sedang) dengan ancaman bencana Gempabumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang ekstrim/abrasi, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrim. Pemerintah provinsi berkomitmen dengan pemerintah kabupaten/kota serta semua pihak untuk bersinergi dalam penanganan penanggulangan bencana baik skala lokal maupun regional. Sinergitas yang kuat, terarah, terpadu dan koordinasi yang baik diharapkan mampu meminimalisir dampak terjadinya bencana. Faktor lain yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah Masih kurangnya sistim peringatan dini (early warning system) dan informasi yang memadai dan dapat bekerja dengan lebih baik, menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dalam menghadapi bencana yang terjadi.

Nusa Tenggara Barat sangat potensial di sektor pariwisata karena didukung oleh sumberdaya alam yang sangat mendukung dari puncak gunung hingga dasar lautan. Sektor

pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat NTB, namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan inovasi dan rekayasa dengan mengembangkan display sistem peringatan dini meteorologi, klimatologi, yaitu suatu sistem basis data modern yang dapat memberikan dukungan proses penganalisaan cuaca, iklim, kualitas udara dan geofisika serta unsur pendukung lainnya secara cepat, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan:

Risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan diperkirakan akan semakin besar mengingat semakin banyaknya penduduk perkotaan. Pembangunan kota dan permukiman juga harus memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup (Target 11.5 dan 11.6). Dalam kurun waktu 2009-2014 (Tabel 6) kualitas lingkungan hidup meningkat, namun kualitas udara semakin memburuk yang kemungkinan besar disebabkan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30 persen IKA, 30 persen IKU dan 40 persen IKTL. Data untuk NTB IKLH dengan nilai 73,18.

Tabel 2.43 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024

Indikator	Satuan	2023	2024		Kondisi Kinerja Akhir 2024
			Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	1.92	5.34	3.18	73.18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relative terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Metode yang digunakan untuk data IKA adalah dengan pemantauan dan pengambilan sample 10 sungai yang menjadi prioritas Provinsi dan 3 sungai yang menjadi prioritas Nasional, serta melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Pemantauan dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli.



Tabel 2.44 Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2022-2024

NILAI INDIKATOR	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	43.39	47.78	47.78

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Indeks Kualitas Udara

Kondisi kualitas udara jalan raya di Provinsi NTB dapat diketahui dengan melihat hasil pemantauan setiap parameter yang diukur. Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melakukan uji kualitas udara di seluruh Kabupaten/Kota. Baku Mutu yang dipakai adalah PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara seperti table 2.45 berikut ini.

Tabel 2.45 Hasil Uji Indeks Kualitas Udara

No	Parameter	Metode/Alat	Prinsip Pengukuran	Standar Waktu Pengukuran	Baku Mutu (ug/m3)
1	Total Suspended Partikulat (TSP)	High Volume Air Sampler (HVAS)	Gravimetri	24 jam	150
2	Sulfur dioksida (SO ₂)	Spektrofotometer/UV Fluorescence	Menggunakan efek fluorescence, UV Fluorescence sebagai teknik pengukuran	1jam 24 jam 1 tahun	900 365 60
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Spektrometer	Metode Saltzman	1jam 24 jam 1 tahun	400 150 100
4	Carbon Monoksida (CO)	Analyzer (NDIR)	Penyerapan panjang gelombang tertentu dari spectrum infra merah oleh CO	1 jam 24 jam	30000 10000
5	Ozone (O ₃)	Spektrofotometer	Chemiluminescent	1 jam 1 tahun	235 50
6	Timbal (Pb)	Gravimetri/AAS	Atomisasi kation Pb dengan pengukuran panjang gelombang	24 jam	2
7	Hidrokarbon (HC)	FID GC	Flame Ionisasi atom HC dan dideteksi dengan detector FID	1 jam	160

Sumber: PP No. 41 tahun 1999

Sumber pencemaran udara yang paling tinggi yaitu asap dari sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor. Dimana diketahui jumlah kendaraan bermotor tiap tahun terus meningkat sehingga menyebabkan tekanan terhadap lingkungan. Pembentukan gas buang tersebut terjadi selama pembakaran bahan bakar fosil bensin dan solar didalam mesin. Jenis proses pembakaran yang terjadi pada mesin kendaraan bermotor tidak sempurna didalam industri dan menghasilkan bahan pencemar pada kadar yang lebih tinggi. Bahan pencemar yang terutama terdapat didalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, oksida nitrogen (Nox), sulfur (Sox), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb).

Jumlah penduduk di Provinsi NTB yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk sangat bergantung kepada alat transportasi dalam melakukan aktivitasnya, sehingga

kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi meningkat. Selain jumlah kendaraan dan panjang jalan, curah hujan juga sangat berpengaruh dalam proses pencemaran udara dimana Bahan bahan pencemar tersebut dapat jatuh ke tanah bersama air hujan atau mengendap bersama debu, dan mengkontaminasi tanah dan air. Senyawa tersebut selanjutnya juga dapat masuk ke dalam rantai makanan yang pada akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia melalui sayuran, susu ternak, dan produk lainnya dari ternak hewan.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, diketahui bahwa hasil pemantauan udara ambien pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata konsentrasi NO₂ tertinggi berasal dari sector transportasi dan terendah dari sector pemukiman, sedangkan untuk SO₂ konsentrasirata-rata tertinggi berasal dari sector industry dan terendah berasal dari sector perkantoran/komersil.

Pemantauan kualitas udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili kondisi udara ambien di kabupaten/kota di NTB, yaitu area transportasi, industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu perumahan dan perkantoran/perdagangan. Pemantauan kualitas udara ini menggunakan passive sampler yang terpasang di setiap kab/kota, dan dipapar selama 14 hari. Hasil paparan selama 14 hari tersebut dikirim ke PUSARPEDAL untuk diuji dan hasilnya dikirimkan kembali kepada Dinas LHK NTB sebagaimana tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46 Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se-NTB Tahun 2024

No	Provinsi	Kota	Konsentrasi Rata-rata (µg/Nm ³)	
			NO ₂	SO ₂
1	NTB (5200)	DOMPU (5205)	6,45	6,33
2	NTB (5200)	KAB.BIMA (5206)	5,07	6,01
3	NTB (5200)	KAB.SUMBAWA BARAT (5207)	5,28	5,07
4	NTB (5200)	KOTA.BIMA (5272)	5,9	5,37
5	NTB (5200)	LOMBOK BARAT (5201)	5,02	5,64
6	NTB (5200)	LOMBOK TENGAH (52020)	6,37	5,99
7	NTB (5200)	LOMBOK TIMUR (5203)	8,16	6,55
8	NTB (5200)	LOMBOK UTARA (5208)	6,03	6,58
9	NTB (5200)	MATARAM (5271)	7,05	5,72
10	NTB (5200)	SUMBAWA (5204)	6,26	5,39

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Berdasarkan tabel diatas nilai NO₂ tertinggi ada pada kabupaten Lombok Timur yaitu 8,16 dan yang terendah ada pada kabupaten Lombok Barat 5,02. Sedangkan Konsetrasi SO₂ tertinggi ada pada kabupaten Lombok Utara 6,58 dan yang terndah ada pada kabupaten Sumbawa Barat 5,07.

Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan adalah rekapitulasi luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Perhitungan indeks merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Luasan kelas penutupan yang dihitung yaitu: Hutan Lahan kering



primer, Hutan Lahan kering sekunder, Hutan rawa Primer, Hutan rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove sekunder dan Hutan Tanaman.

Upaya lainnya yaitu merehabilitasi daerah tangkapan yang dilakukan dengan membangun 2 unit bangunan sipil teknis berupa DAM Penahan yang berfungsi mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakannya melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2024 Indeks Tutupan Lahan NTB mencapai 66,49 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 mencapai 66,6. Berbagai upaya peningkatan tutupan lahan didorong melalui beberapa kegiatan, antara lain kegiatan rehabilitasi lahan kritis seluas 1.700 Ha dari target 3.800 Ha, Penyediaan bibit sebanyak 700.000 batang yang ekuivalen dengan lahan seluas 1.400 Ha (dengan asumsi jarak tanam 4 x 5 m dan jumlah bibit per hektarnya 500 batang) dan rehabilitasi daerah tangkapan air seluas 700 Ha. Selain itu, Dinas LHK telah melaksanakan pembangunan 13 unit Dam Penahan dan 7 unit Dam Pengendali untuk mengurangi daya rusak air pada lahan kritis.

Untuk mendukung pengembangan jenis tanaman endemik yang berkualitas baik, juga dilaksanakan pengembangan perbenihan tanaman hutan dengan target 5 jenis. Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan program, telah dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat, pengukuran calon lokasi RHL serta penyusunan Rancangan Teknisnya bersama KPH dan Pemerintah Desa.

Terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang telah melakukan RHL di wilayah kerjanya antara lain PT. Sumbawa Juta Raya memiliki rencana penanaman dan pemeliharaan DAS pada kawasan Hutan Lindung seluas 1.103 ha dalam wilayah DAS Moyo, Kec. Lopok Kab. Sumbawa. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.5640/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/10/2017 tentang Penetapan Lokasi Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. Sumbawa Juta Raya tanggal 26 Oktober 2017. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap sampai pada tahun 2026.

Bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sebagian besar disebabkan oleh faktor hidrologi, meteorologi dan perubahan iklim. Tiga jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan menjadi perhatian khusus adalah bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Pemerintah provinsi berkomitmen dengan pemerintah kabupaten/kota serta semua pihak untuk bersinergi dalam penanganan penanggulangan bencana baik skala lokal maupun regional.

Sinergitas yang kuat, terarah, terpadu dan koordinasi yang baik diharapkan mampu meminimalisir dampak terjadinya bencana. Faktor lain yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah Masih kurangnya sistem peringatan dini (early warning system) dan informasi yang memadai dan dapat bekerja dengan lebih baik, menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dalam menghadapi bencana yang terjadi. Nusa Tenggara Barat sangat potensial di sektor pariwisata karena didukung oleh sumberdaya alam yang sangat mendukung dari puncak gunung hingga dasar lautan. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat NTB, namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan inovasi dan



rekayasa dengan mengembangkan display sistem peringatan dini meteorologi, klimatologi, yaitu suatu sistem basis data modern yang dapat memberikan dukungan proses penganalisaan cuaca, iklim, kualitas udara dan geofisika serta unsur pendukung lainnya secara cepat, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan:

Pembangunan kota yang terpadu dan inklusif.

Untuk mengukur proses pembangunan perkotaan yang inklusif (Target 11.3), digunakan ukuran keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sektor swasta, komunitas filantropi, serta akademisi dalam proses perencanaan pembangunan seperti misalnya dalam Musrenbang. Pemerintah provinsi NTB setiap pelaksanaan musrenbang provinsi selalu melibatkan sektor swasta, mitra pembangunan seperti NGO, organisasi masyarakat, akademisi, dan filantropi dalam setiap perencanaan pembangunan. Penerapan sistem informasi perencanaan (e-planning/entebePLAN) yang dibangun merupakan upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 7 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renja, e-RKPD, e-Musrenbang, e-KUA PPAS, e-Pokir, dan e-ASB.

Tahun 2017, Bappeda Provinsi NTB telah terpilih sebagai SKPD terbaik I berdasarkan penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB. Perhargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan data dan informasi, khususnya pemanfaatan data spasial dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang terukur dan berkelanjutan, Bappeda telah mengembangkan inovasi NTB SATU PETA berbasis informasi geospasial tematik dan dapat diakses melalui website <http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id>. Inovasi tersebut menghantarkan Provinsi NTB sebagai provinsi yang dinilai mampu melaksanakan perencanaan tata guna lahan partisipatif.

Untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan kegiatan : (1) Forum SKPD yang bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan SKPD lingkup Provinsi NTB, (2) Sarasehan Pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder yaitu unsur SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra pembangunan Provinsi NTB (LSM), pihak swasta dan lainnya. (3) Musrenbang RKPD Provinsi NTB adalah momen yang dipergunakan untuk menselaraskan program/kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target prioritas daerah dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

Program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper).

Salah satu pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan SCP adalah penerapan Proper yang menggambarkan pola produksi berkelanjutan yang dicerminkan dengan ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Proper dikembangkan dengan prinsip dasar antara lain peserta bersifat selektif, artinya peserta Proper diperuntukkan bagi industri yang proses produksinya menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan peduli terhadap citra atau reputasi perusahaannya.

Terdapat lima kategori Proper, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah dan Hitam, yang merupakan urutan capaian kinerja perusahaan dari yang terbaik/konsisten sampai dengan terendah. Jumlah perusahaan yang menerima Proper untuk masing-masing kategorinya pada Kategori Emas untuk industri yang telah konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi dan



jasa, serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Kategori Hijau bagi yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan dan juga telah memanfaatkan sumber daya secara efisien serta melaksanakan tanggungjawab sosial dengan baik. Kategori Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kategori Merah untuk yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Kategori Hitam, diberikan kepada perusahaan dan/atau kegiatannya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, serta melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Namun tantangan yang dihadapi antara lain perlunya upaya untuk mendorong perusahaan besar melaksanakan praktek usaha berkelanjutan dan pelibatan perusahaan lainnya dalam program Proper. Selain itu, saat ini telah dicetuskan program Green Industry melalui Green Industry Award oleh Kementerian Perindustrian. Program ini merupakan bentuk insentif nonfinansial kepada perusahaan ramah lingkungan dengan karakteristik yang mirip dengan Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Kedua program tersebut perlu dilakukan sinkronisasi agar memberi nilai tambah bagi industri. Pada tahun 2023 di NTB, terdapat 19 perusahaan yang dipantau. Hasil evaluasi pemantauan terhadap AMDAL dan UKL-UPL dari 19 perusahaan tersebut 12 perusahaan telah mendapatkan peringkat PROPER BIRU, 3 perusahaan mendapatkan peringkat PROPER HIJAU dan 3 perusahaan mendapatkan peringkat PROPER MERAH.

Pengelolaan sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Sampai akhir Desember 2024, Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 64 persen. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Provinsi NTB menjadi ancaman yang serius bagi keberlanjutan lingkungan hidup. Sampah telah mencemari perairan seperti sungai, waduk, bending, laut, dan juga tempat-tempat strategis seperti pantai, jalan, dan yang lainnya. Hal ini akan berimbas ke sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan sebagai penopang ekonomi masyarakat NTB. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan kegiatan terkait pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 14 tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Dalam Pengelolaan Sampah, proyeksi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Provinsi NTB sebesar 2.605,23 ton/hari dan mencapai 2.784,29 ton/hari pada tahun 2025. Jakstranas, Jakstrada Provinsi dan Jakstarada Kabupaten/Kota menargetkan neraca pengelolaan sampah sebesar 30% pengurangan dan 70 persen penanganan pada tahun 2025.

Mempertimbangkan kondisi pengelolaan sampah yang belum berjalan dengan baik di Provinsi NTB, Pemerintah Provinsi NTB dalam RPJMD 2024-2029, mencoba merencanakan akselerasi pencapaian target neraca pengelolaan sampah 2 (dua) tahun lebih maju dari target nasional yaitu 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan di tahun 2024.

2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

2.12.1 Penanganan Sampah



Tabel 2.47 Neraca Pengelolaan Sampah NTB

Tahun	Kondisi 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Pengurangan	1,85	10	6,8	15	7,19	20	9,34	25	12,78	30	13,40
Penanganan	18,21	30	34,91	40	37,63	50	39,68	60	42,20	70	42,28
Total	20	40	40,99	55	44,82	70	49,02	85	54,98	100	55,68

Sumber : UPT Persampahan kebon Kongok, 2024

Kondisi Tahun 2018, yang bersumber dari data potensi timbunan sampah yang dibandingkan dengan Data pengelolaan di TPA dan daur ulang swadaya. Data pengurangan dan penanganan sampah akan semakin meningkat dengan adanya penanganan sampah berbasis Desa. Terjadi Peningkatan Neraca Pengelolaan Sampah dari 20,06 persen di Tahun 2018 menjadi 55,68 persen di Tahun 2023. Angka ini berarti, dari 100 persen sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya, sejumlah 55,68 persen nya terkelola. Dengan proyeksi timbunan sampah per hari di NTB yg mencapai 2.673 Ton/hari (berdasarkan proyeksi timbunan sampahnya yg berkisar antara 0,4 kg sd 0,7 kg/org/hari), berarti terdapat sejumlah 1.488 ton sampah terkelola atau lebih dari 595 truck setiap harinya (dengan asumsi setiap truck mengangkut 2,5 ton). Jika diakumulasikan, selama program Zero Waste dari Tahun 2018 ke tahun 20223, terjadi peningkatan jumlah sampah terkelola dari 195.714 ton/tahun di tahun 2018 menjadi 543.120 ton/tahun pada tahun 2023 atau jika diakumulasikan terdapat lebih dari 2,39 juta ton sampah yang terkelola dengan baik dalam periode program Zero Waste dari tahun 2019- 2023. Neraca Pengelolaan Sampah ini menunjukkan upaya Penanganan dan Pengurangan Sampah yang dilaksanakan di NTB. Penanganan sampah adalah setiap upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk sampah yang masuk ke TPA. Pengurangan sampah adalah setiap upaya penyelesaian sampah di sumbernya, sebelum masuk ke TPA dan umumnya dilakukan oleh Non Pemerintah. Angka Penanganan Sampah dari Tahun 2018 ke tahun 2023 menunjukkan peningkatan lebih dari 2 kali lipat, dari 18,21 % ke 42,28 %. Angka ini setara dengan peningkatan dari 486 ton/hari menjadi 1.130 ton/hari ATAU dari 177.664 ton/tahun menjadi 412.502 ton/tahun. g. Angka Pengurangan Sampah dari Tahun 2018 ke Tahun 2022 menunjukkan peningkatan lebih dari 7 kali lipat dari 1,85 % ke 13,40 %. Angka ini setara dengan peningkatan dari 49,45 ton/hari menjadi 358,18 ton/hari ATAU dari 18.049 ton/tahun menjadi 130.736,43 ton/tahun. Angka pengurangan ini berarti bisa mencegah sampah masuk ke TPA sebanyak lebih dari 100.000 ton setiap tahunnya. Dengan demikian, bisa membantu meminimalisir potensi dampak sampah yang tidak terkelola dengan baik.

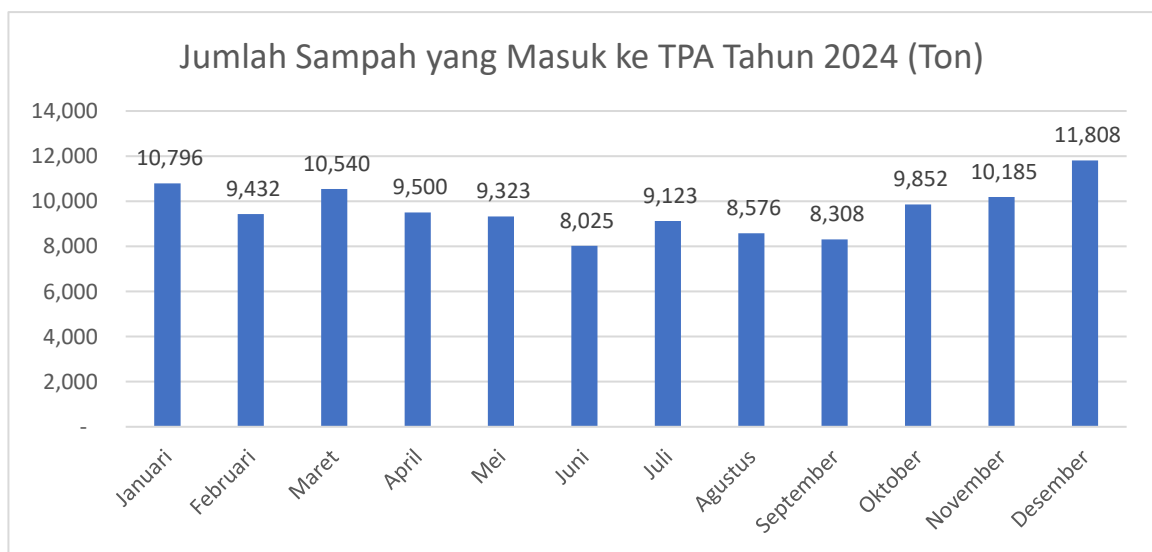
Angka Pengurangan Sampah menjadi salah satu indikator meningkatnya Partisipasi masyarakat dan para pihak dalam pengelolaan sampah. Jika dibandingkan dengan angka Penanganan yang sebesar 2 kali lipat, angka Pengurangan Sampah mencapai lebih dari 7 kali lipat dibandingkan sebelum program ini dijalankan. Ini menunjukkan, bahwa



pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi peluang yang baik di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan penanganan sampah.

Secara hitungan ekonomis, upaya pengurangan ini juga membantu pemerintah menghemat biaya pengelolaan sampah sampai dengan Rp.6.536.821.500,- (dengan asumsi biaya KJP TPAR Kebon Kongok sebesar 50.000/ton) atau 63.145.695.690,- jika menggunakan asumsi biaya Kompensasi Jasa Pelayanan yg ada di Jawa Barat (Rp.483.000/ton) atau sebesar Rp. 76.219.338.690,- jika menggunakan angka typing fee pada pengelolaan sampah di Jakarta (Rp. 583.000/ton). Dibawah ini adalah grafik jumlah sampah yang masuk ke TPA tahun 2024.

Grafik 2.41 Jumlah Sampah yang Masuk ke TPA Tahun 2024



Sumber: UPT Persampahan Kebon Kongok, 2024

2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

2.13.1 Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tingkat Kabupaten / Kota

Isu perubahan iklim merupakan isu yang tak perlu lagi diperdebatkan kebenarannya. Nusa Tenggara Baratsangat potensial di sektor pariwisata karena didukung oleh sumberdaya alam yang sangat mendukung dari puncak gunung hingga dasar lautan. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat NTB, namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan inovasi dan rekayasa dengan mengembangkan display sistem peringatan dini meteorologi, klimatologi, yaitu suatu sistem basis data modern yang dapat memberikan dukungan proses penganalisaan cuaca, iklim, kualitas udara dan geofisika serta unsur pendukung lainnya secara cepat, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan tugas- tugas kemanusiaan: Selain bekerjasama dengan BMKG, BPBD Provinsi NTB juga bekerjasama dengan industry pariwisata melakukan pembentukan Prosedur Tetap (Protap/ SOP) kebencanaan dan pembentukan tim siaga bencana di semua hotel terutama di kawasan Senggigi.



Mengawali langkah-langkah tersebut, BPBD Provinsi NTB telah mengadakan workshop penanggulangan bencana bagi hotel-hotel di wilayah pesisir dan Gili di pulau Lombok pada bulan September dan November 2016. Kegiatan ini bertujuan agar industri pariwisata dapat memahami manajemen potensi ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam upaya penjaminan keamanan para wisatawan di hotel mereka. Workshop tersebut menghasilkan komitmen dari hotel dan mall untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui penyusunan prosedur standar (SOP) kedaruratan:

1. Penyusunan Rencana Kontinjensi gempa dan tsunami khusus untuk kawasan Senggigi yang dilanjutkan pemasangan rambu evakuasi.
2. Proses simulasi yang belum terjadwal.
3. Diharapkan industri pariwisata dapat memahami peran mereka dan terlibat secara aktif baik pra-bencana, saat kejadian bencana, maupun pasca-bencana.

BPBD Provinsi NTB juga melakukan kerjasama (MoU) dengan Fakultas Kedokteran di Universitas Mataram, Unizar, Universitas Yarsi, Poltekes yang dijadwalkan pada bulan Januari dan Pebruari 2018 untuk mengadakan simulasi penggulungan bencana. Untuk mewujudkan target penurunan emisi GRK, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). RAN-GRK memiliki kerangka kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan emisi GRK sebesar 26 persen (skenario fair/menggunakan kemampuan sendiri) dan sebesar 41 persen (skenario ambisius/jika mendapat dukungan internasional) pada bidang berbasis lahan, energi dan pengelolaan limbah dalam kurun waktu 2010-2020. Perpres tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing daerah. Komitmen tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 29 persen (scenario fair) dan 41 persen (skenario ambisius) untuk tahun 2030.

2.13.2. Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Tahun 2016 merupakan tahun keenam pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK. K/L terkait serta Pemerintah Daerah telah mengimplementasikan RAN dan RAD-GRK, yang didukung dengan pembiayaan APBN, APBD, swasta, masyarakat dan berbagai program dukungan kerjasama internasional yang bersifat bilateral maupun multilateral.

Provinsi NTB telah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 54 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat (RAD-API). RAD-API disusun untuk perencanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim di Nusa Tenggara Barat sampai dengan tahun 2023. RAD-API berisi upaya-upaya penurunan tingkat kerentanan, tingkat resiko perubahan iklim, memanfaatkan peluang/ dampak positif perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan Masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota) dan RZWP3K Provinsi NTB. Kontribusi penurunan emisi berdasarkan sektor tahun 2014 di provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada grafik 2.42. sebagai berikut :

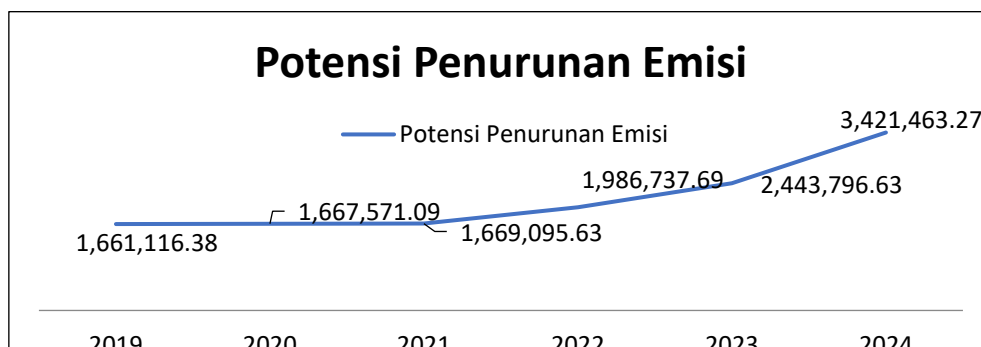
Grafik 2.42 Proporsi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Tahun 2024



Sumber data: <http://pep.pprk.bappenas.go.id> diakses tgl 28 juni 2024

Di provinsi Nusa Tenggara Barat hingga tahun 2024, rekapitulasi penurunan emisi gas rumah kaca didapatkan hasil penurunan emisi; sektor energi 0.01 persen, sektor Hutan dan Lahan sebesar 0.58 persen, sektor pertanian 14.23 persen, pesisir laut sebesar 0.01 persen dan sektor persampahan 85,17 persen, dengan grafik potensi penurunan emisi tersaji dalam grafik 2.43 berikut.

Grafik 2.43 Potensi Penurunan Emisi GRK Tahun 2019-2024



Sumber data : Platform Aksara Bappenas RI <http://pprk.bappenas.go.id>, diolah

Sampai dengan tahun 2024 penurunan emisi sebesar 3.421.463,27 ton CO₂ eq. meningkat 977.666.64 ton CO₂ dibandingkan tahun 2023 sebesar 2.443.796,63 ton CO₂ eq. Tantangan ke depan adalah diperlukannya sinergitas antar sektor, swasta dan masyarakat untuk mempercepat upaya penurunan emisi dengan perubahan pola aktivitas yang rendah karbon.

2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

2.14.1 Jumlah Kawasan Konservasi Perairan di Daerah

Indonesia sudah memiliki landasan pengelolaan sumberdaya kelautan melalui UU No. 32/2014 tentang Kelautan, yang mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) melalui proses sistematis, partisipatif, transparan dan berbasis sains. RTRLN ini sudah masuk proses formalisasi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah. Selain itu, UU No. 27/2007



jo. UU No.1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa disertai 278 pulau-pulau kecil dengan luas perairan laut 29.159,04 km² dan panjang garis pantai mencapai 2.332,80 km, merupakan obyek yang sangat potensial untuk pengembangan banyak sector. Seperti perikanan, pariwisata, konservasi, transportasi laut, industri maritim dan kegiatan lainnya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB juga tidak berbeda jauh dengan wilayah lain yang rentan terhadap kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.

Upaya mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir, berupa konflik kewenangan, konflik kepentingan, konflik pembangunan antar sektor dan ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan, perlu penerapan konsep pengelolaan pesisir terpadu, yang mengatur upaya-upaya pencegahan melalui penegakan hukum dan aturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari upaya tersebut adalah dengan penyediaan produk hukum wilayah pesisir dalam bentuk peraturan daerah khususnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K). Hal ini sejalan dengan perintah Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan, salah satunya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang berfungsi sebagai arahan pemanfaatan bagi berbagai kegiatan berbasis sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB telah diinisiasi sejak tahun 2015 yaitu berupa penyusunan dokumen awal, kemudian di tahun 2016 dilanjutkan dengan proses penyusunan dokumen antara dan dokumen final, maka di tahun 2017 telah dituntaskan proses legislasinya sehingga ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037.

Selama proses penyusunan dokumen antara hingga ditetapkan beserta Draf Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membangun kemitraan dengan berbagai lembaga NGO lainnya seperti FAO, WWF, BCC dan WCS terkait dengan penguatan muatan regulasi yang mendorong optimasi pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan memperhatikan fungsi keberlanjutan. Adapun bentuk keterlibatan NGO dimaksud yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan pembahasan agar peraturan daerah tersebut telah mempertimbangkan relevansinya dengan berbagai aturan perundangan terkait, telah mengakomodasi usulan dan arahan berbagai stakeholder yang terlibat dan potensi kena dampak oleh peraturan yang hendak dibuat, dan yang lebih penting perda ini harus dapat diimplementasikan. Disamping itu, beberapa dukungan strategis dari NGO adalah memfasilitasi dukungan pendanaan dan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), clearing house, konsultasi teknis dan evaluasi ranperda di kementerian dalam negeri.

Salah satu substansi yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah penetapan beberapa kawasan konservasi perairan di Provinsi NTB. Kawasan Konservasi

dimaksudkan sebagai kawasan yang dipergunakan untuk mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal di kawasan perairan laut atau pulau.

Tabel 2.48 Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB

NO	TAHUN	LUAS KAWASAN KONSERVASI (HA)
1	2019	31.132,82
2	2020	126.311,24
3	2021	132.156,91
4	2022	132.156,91
5	2023	182.986,40
6	2024	182.968,40

Sumber Data: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Laut Berkelanjutan.

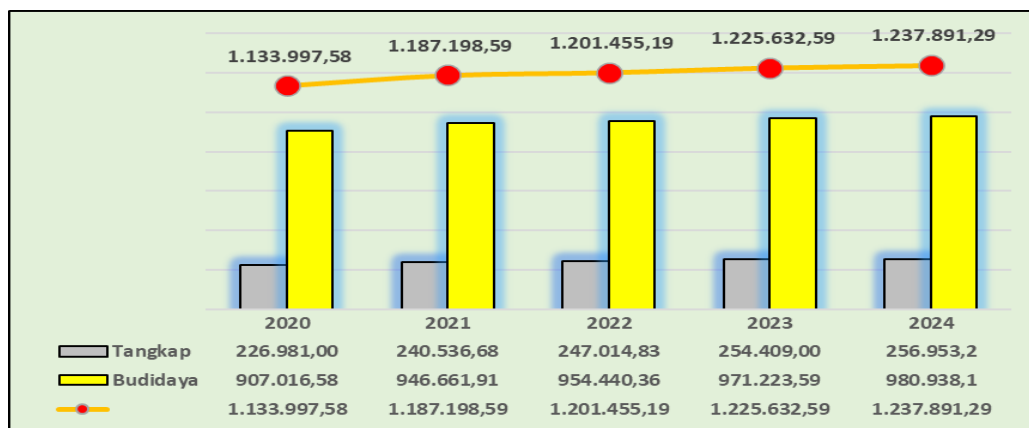
Untuk mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan, Indonesia telah membagi manajemen perikanan ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18/2014. Selanjutnya, Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) untuk semua WPP telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan Perikanan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan pengawasan Sumberdaya Kelautan dari Kewenangan Kabupaten menjadi Kewenangan Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi Membentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk menangani urusan Konservasi dan Pengawasan Berdasarkan kawasan konservasinya, adalah 1) UPTD Balai Konservasi Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok 2) UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa 3) UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima-Dompu.

Balai konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melaksanakan teknis kegiatan :1).perlindungan sumberdaya hayati kelautan dan perikanan 2). Pelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan 3) Menerapkan manajemen pemanfaatan sumberdaya hayati secara bijaksana dan berkelanjutan 4) pengawasan/patroli secara rutin terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dikawasan konservasi 5) Melakukan operasi gabungan terhadap tindakan illegal fishing di kawasan konservasi 6) pencegahan terhadap pencemaran perairan kelautan dan perikanan 7) pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) kelautan dan perikanan 8) pembinaan terhadap peningkatan kapiasitas SDM dan Kelembagaan Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) 9) sosialisasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi dan pengawasan 10) pelatihan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) tentang manajemen pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan11) Memberikan percontohan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Dalam rangka efektivitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk kegiatan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama Wildlife Conservation Society (WCS) telah merancang aplikasi SMART PATROL (spatial, monitoring and reported tool). Aplikasi ini dirancang sebagai media komunikasi antar pihak (masyarakat/pokmaswas dengan pokja pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB). Dengan aplikasi ini setiap pihak bisa memberi laporan terkait pengelolaan dan pelanggaran/distruktif fishing melalui telepon genggam Android, Laporan tersebut langsung terhubung dengan server yang dikelola pokja pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk selanjutnya dianalisa dan disimpan secara otomatis dalam basis data sehingga memudahkan untuk ditindak lanjuti.

Produksi perikanan NTB terus mengalami peningkatan baik perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan pada tahun 2024 mencapai 1,237.891,29 ton, meningkat hanya 0.99 persen dibanding tahun 2023 yang sebesar 1.225.632,59 ton. Dari total produksi, kontribusi produksi budidaya perikanan jauh mendominasi dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap.

Grafik 2.44 Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2024

Peningkatan Kawasan Konservasi Laut (KKL) dan Pemanfaatan Berkelanjutan.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk memiliki 20 juta hektar kawasan KKL. Selain upaya untuk meningkatkan luas KKL, juga dilakukan pengukuran kualitas pengelolaannya dengan mengembangkan alat ukur/evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebut dengan E-KKP3K. E-KKP3K telah digunakan secara rutin, termasuk untuk memberikan penghargaan kepada pengelola kawasan konservasi perairan daerah. Tata cara penetapan kawasan konservasi perairan mengacu pada

Permen KP No. 2/2009. Nusa Tenggara Barat merencanakan pencadangan kawasan konservasi perairan seluas 291.594 Ha (10%) sampai tahun 2020. Sejak Tahun 2019 NTB telah mencadangkan kawasan konservasi seluas 241.052,139 Ha, tahun 2022- 2023 seluas 143.710,91 Ha dan tahun 2024 seluas 182.968,40 Ha.

2.14.2 Kepatuhan Pelaku Usaha

Syarat Perizinan Berusaha: Menjadi salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin lingkungan dan izin berusaha berbasis risiko (sesuai UU Cipta Kerja). Dasar Pengawasan: Menjadi landasan hukum bagi pengawasan kegiatan di laut oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) KKP. Siapa yang Membutuhkan PKPRL. Pelaku usaha atau individu yang melakukan kegiatan di perairan pesisir, wilayah perairan, atau wilayah yurisdiksi secara menetap. Bentuk perizinan lain yang juga terkait dengan pemanfaatan ruang laut. DJPKRL (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut): Unit kerja di KKP yang mengurus tata ruang laut. Dukungan dan Perlindungan Nelayan Kecil. Indonesia juga terus melakukan perlindungan terhadap nelayan kecil sebagaimana tertuang dalam UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengatur beberapa dukungan untuk nelayan kecil.

Tabel 2.49 Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani Perikanan	Indeks	107,61	113,56	107,98	107,08	105,59
Konsumsi Ikan	Kg/Kap/tahun	50,21	52,48	53,29	54,90	58,39
Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman	%	86,19	67,45	61,72	-	-

Sumber : BPS dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Tahun 2024

Dari tabel 2.49 terlihat bahwa Nilai Tukar Nelayan dari tahun ketahun mengalami fluktuasi, Nilai tukar tertinggi pada tahun 2021 sebesar 113,56 dan 3 tahun terakhir mengalami penurunan dan terendah pada tahun 2024 sebesar 105,59. Indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan, dinyatakan dalam persentase. Indeks ini digunakan sebagai indikator kemampuan daya beli nelayan. Jika NTN di atas 100 persen, maka daya beli nelayan mengalami surplus, sebaliknya jika di bawah 100 persen daya belinya mengalami defisit. Dari data diatas maka NTB masih dalam kondisi surplus yang berarti kesejahteraan nelayan makin membaik sebagai dampak dari pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Demikian juga dengan tingkat konsumsi ikan, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin sadar tentang nilai gizi dari produk perikanan. Proporsi tangkapan ikan

yang berada dalam batasan biologis yang aman tahun 2022 sebesar 61,72 persen. Tahun 2023 dan 2024 tidak ada data.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, yang mencabut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, undang-undang ini mengatur pembagian urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan dimana kewenangan daerah adalah :

- a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
- b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.
- c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Sehingga dalam hal ini Pemerintah Provinsi hanya menerima data dari perizinan usaha yang telah disetujui oleh pusat melalui Online Single Submission (OSS) .

2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Kinerja Tata Kelola Kehutanan. Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan dilaksanakan melalui pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan wilayah KPH dibagi atas Kesatuan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Saat ini Dinas LHK NTB sedang mengembangkan 7 jenis HHBK, antara lain bambu, rotan, kemiri, nilam, kayu putih, madu, dan jahe merah. Pengembangan ini meliputi pengembangan dari wilayah hulu sampai ke hilirnya. Hal ini penting karena dapat mendukung kemandirian pengelolaan hutan oleh setiap KPH. Berbagai upaya yang dilakukan ialah memperluas areal penanaman untuk jenis HHBK Kemiri, pemberian kemudahan dalam proses perijinan, mendorong skema Kemitraan bersama KPH, pemberian bantuan peningkatan produksi, menyediakan biaya untuk uji laboratorium kualitas HHBK, dan pembangunan pabrik produksinya.

2.15.1 Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan

Indikator kinerja terkait penutupan lahan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perolehan data Penutupan lahan hutan bersumber dari hasil pengolahan data penutupan lahan secara series dari tahun 2020 sampai tahun 2024 yang bersumber dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat 5 (lima) kelas penutupan lahan hutan diantaranya Hutan Lahan Kering Primer, Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove Sekunder/ Bekas Tebangan dan Hutan tanaman serta terdapat 16 (enam belas) kelas penutupan bukan hutan.

Tabel 2.50 Perubahan Tutupan Lahan Berupa Hutan di Provinsi NTB

No	Kode	Penutupan Lahan	Tahun - Luas (Ha)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2001	Hutan Lahan Kering Primer	305.415,92	308.146,87	304.383,96	302.358,50	302.358,50
2	2002	Hutan Lahan Kering	543.299,10	544.995,82	533.655,28	542.004,12	542.004,12

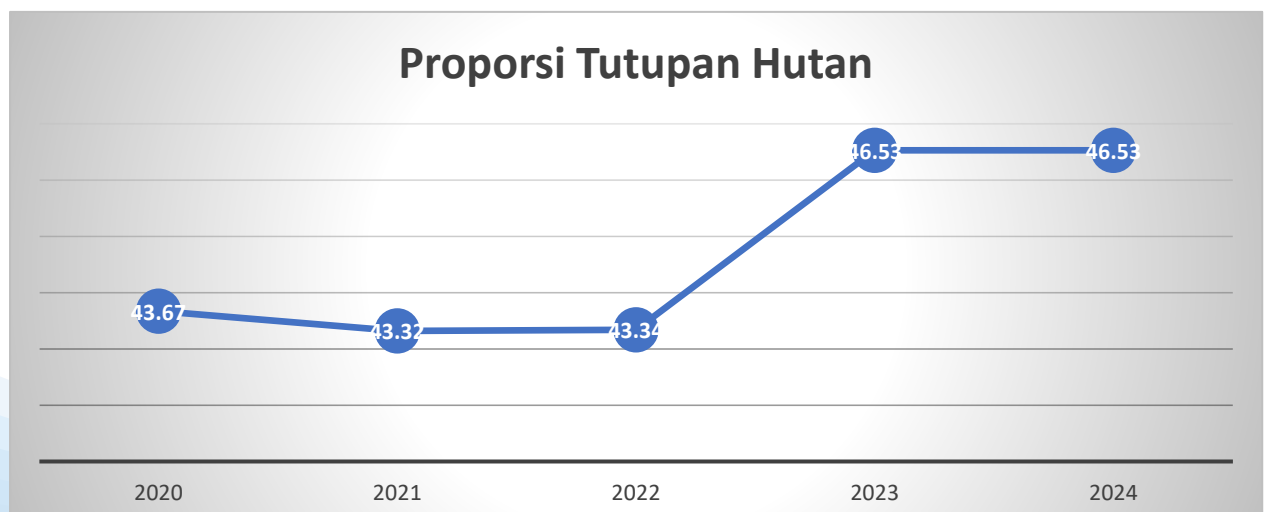


No	Kode	Penutupan Lahan	Tahun - Luas (Ha)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Sekunder					
3	2004	Hutan Mangrove Primer	1.797,18	1.723,57	1.497,74	1.464,45	1.464,45
4	20041	Hutan Mangrove Sekunder	8.589,91	9.112,04	9.478,87	9.531,29	9.531,29
5	2006	Hutan Tanaman	3.270,02	7.953,11	8.253,05	12.593,73	12.593,73
6	2007	Semak Belukar	127.816,19	128.168,46	125.568,01	127.871,39	127.871,39
7	20071	Semak Belukar Rawa	1.036,54	879,96	1.059,97	19,59	19,59
8	20091	Pertanian Lahan Kering	331.910,59	366.038,62	379.001,72	380.212,44	380.212,44
9	20092	Pertanian Lahan Kering Campur	221.816,40	170.539,26	164.677,12	157.285,82	157.285,82
10	20093	Sawah	266.182,41	267.138,34	273.628,98	267.048,35	267.048,35
11	20094	Tambak	14.593,38	14.519,76	16.969,15	14.767,55	14.767,55
12	20122	Pemukiman Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2010	Perkebunan	1.040,92	1.395,83	65,74	1.590,07	1.590,07
14	2012	Permukiman	40.920,62	41.605,46	43.121,48	41.748,26	41.748,26
15	20121	Bandara/ Pelabuhan	651,16	832,51	314,17	846,52	846,52
16	2014	Lahan Terbuka	8.455,69	9.122,37	954,27	9.411,96	9.411,96
17	20141	Pertambangan	1.818,35	1.971,05	57.454,19	2.556,07	2.556,07
18	5001	Tubuh Air	6.744,53	7.082,44	0,00	8.407,99	8.407,99
19	50011	Rawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3000	Savana/ Padang Rumput	81.377,13	86.675,13	37.764,36	87.264,44	87.264,44

Sumber : *Time Series* data Penutupan Lahan NTB 2020 – 2024, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk melihat trend Tutupan lahan Provinsi NTB tahun 2020 – 2024 dapat di lihat pada Grafik 2.45 Berikut .

Grafik 2.45 Proporsi Tutupan Lahan Provinsi NTB tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB (diolah), 2025

Proporsi tutupan lahan hutan pada sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan hingga mencapai poin 46,53 untuk tahun 2024. Rehabilitasi dan penghijauan serta penyediaan bibit berkualitas dilaksanakan dalam bentuk kegiatan hutan rakyat dan penanaman bibit produktif. Sementara perlindungan hutan dengan mempertahankan tutupan lahan hutan dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi kawasan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selain itu dilakukan juga upaya koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari saluh satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintas peredarab hasil illegal lainnya

2.15.2 Proporsi Hutan Yang Terdegradasi

Luas Degradasi Lahan Hutan

Tabel 2.51 Luas Degradasi Hutan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2022

Tahun	Hutan Primer	Hutan Sekunder/ Tanaman	Total Hutan Primer T-1
2019 - 2020	272.963,39	18.202,61	291.116,00
2020 - 2021	266.910,80	5.724,82	272.635,62
2021 - 2022	258.581,90	8.014,71	266.596,61

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2025

Degradasi yaitu perubahan tutupan lahan Hutan Primer menjadi Hutan Sekunder maupun Hutan Tanaman. Berdasarkan data pada tabel di atas bawhwa Luas Hutan Primer menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Total luas Hutan Primer tahun 2019-2020 sebesar $\pm 272.963,39$ ha, menurun seluas $\pm 6.052,59$ ha menjadi $\pm 266.910,80$ ha di tahun 2020-2021 dan berkurang lagi seluas $\pm 8.328,9$ ha menjadi $\pm 258.581,90$ ha sementara untuk tahun 2023-2024 tdak ada data. Beberapa faktor penyebab peningkatan degradasi diantaranya adalah aktivitas illegal, perluasan lahan, konflik ekonomi – sosial dari ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan untuk ekonomi.

Saat ini Dinas LHK NTB sedang mengembangkan 7 jenis HHBK, antara lain bambu, rotan, kemiri, nilam, kayu putih, madu, dan jahe merah. Pengembangan ini meliputi pengembangan dari wilayah hulu sampai ke hilirnya. Hal ini penting karena dapat mendukung kemandirian pengelolaan hutan oleh setiap KPH. Berbagai upaya yang dilakukan ialah memperluas areal penanaman untuk jenis HHBK Kemiri, pemberian kemudahan dalam proses perijinan, mendorong skema Kemitraan bersama KPH, pemberian bantuan peningkatan



produksi, menyediakan biaya untuk uji laboratorium kualitas HHBK, dan pembangunan pabrik produksinya.

Sosialisasi terkait kemitraan terkait pemanfaatan kawasan hutan dan hasilnya antara masyarakat dan pihak KPH semakin ditingkatkan. Dalam APBD 2017, kegiatan ini menjadi salah satu prioritas yang dilaksanakan. Beberapa KPH sudah mulai menginisiasi proses kemitraan tersebut sehingga perlu didukung dengan proses distribusi informasi yang tepat baik metode maupun substansinya, sehingga skema kemitraan nantinya tidak seolah-olah kegiatan bagi-bagi lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk tahun 2017, target 3.800 Hektar direncanakan berasal dari kegiatan rehabilitasi lahan kritis seluas 1.700 Ha, Penyediaan bibit sebanyak 700.000 batang yang equivalen dengan lahan seluas 1.400 Ha (dengan asumsi jarak tanam 4 x 5 m dan jumlah bibit per hektarnya 500 batang) dan rehabilitasi daerah tangkapan air seluas 700 Ha. Selain itu, Dinas LHK juga akan melaksanakan pembangunan Dam Penahan dan Dam Pengendali untuk mengurangi daya rusak air pada lahan kritis. Untuk mendukung pengembangan jenis tanaman endemik yang berkualitas baik, juga dilaksanakan pengembangan perbenihan tanaman hutan dengan target 5 jenis. Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan program, telah dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat, pengukuran calon lokasi RHL serta penyusunan Rancangan Teknisnya bersama KPH dan Pemerintah Desa. Sampai bulan Desember 2017, terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang telah melakukan RHL di wilayah kerjanya

2.16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

2.16.1 Mengurangi Segala Bentuk Kekerasan.

Indikator kinerja daerah yang terkait dengan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2024 adalah penurunan jumlah konflik sosial, dan partisipasi masyarakat dalam politik sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.50 berikut.

Tabel 2.52 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2024



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
			TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase keberhasilan deteksi dini & cegah dini potensi konflik sosial	83,33	100	120	80	100	125	75	83,33	111,11 %	75	87,5	116,7	100	100	100
2	Meningkatkan masyarakat sadar politik	Persentase masyarakat yang mendapat Pendidikan politik pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	1,7	1,7	100	1,7	1,82	107,06	1,7	1,26	74,12%	1,7	1,96	1,27	0,75	0,83	110,6

Sumber: Bakesbangpoldagri Prov. NTB tahun 2024

Penurunan Jumlah Konflik Sosial. Pada sasaran meningkatnya Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan indikator Persentase keberhasilan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik Sosial realisasi kinerja tahun 2020 mencapai 100 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 83,33 persen dengan capaian kinerja 120 persen. Sementara itu capaian kinerja tahun 2021 realisasi kinerja 100 persen melampaui target yang ditetapkan sebesar 80 persen dengan capaian kinerja 125 persen. Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja mencapai 83,33 persen melampaui target yang ditetapkan sebesar 75 persen dengan capaian kinerja 111,11 persen. Adapun Formula dari indikator tersebut adalah $(\text{Jumlah potensi konflik yang dapat dicegah} / \text{potensi konflik sosial}) \times 100\%$ dimana pada Tahun 2022, terdapat 1 konflik sosial pada tahun 2021 yang muncul kembali di Tahun 2022 dengan total Konflik Sosial yang terjadi sebanyak 6 Kasus. Dan pada tahun 2023 realisasi kinerja mencapai sebesar 87,5 persen dari target 75 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 116,7 persen. Dan untuk tahun 2024 realisasi kinerja tercapai 100

Untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator penurunan jumlah konflik telah dilakukan sejumlah kerjasama dengan mitra Bakesbangpoldagri khususnya FKDM, dan Jejaring Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) NTB. Efek yang dapat dilihat dari intensnya membangun kemitraan ini yaitu berkurangnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Keberhasilan dalam mengatasi terjadinya konflik sosial tidak hanya dari kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitasnya juga dapat diturunkan. Artinya bahwa konflik sosial yang terjadi tidak memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat baik yang berada di wilayah berkonflik ataupun wilayah sekitarnya.

Partisipasi masyarakat dalam Politik

Pada sasaran meningkatnya masyarakat sadar politik, realisasi kinerja tahun 2020 mencapai 100 persen. Sementara itu capaian kinerja tahun 2021 realisasi kinerja 1,82 persen

melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,7 persen dengan capaian kinerja 107,06 persen. Untuk Tahun 2022 realisasi kinerja 1,26 dengan target 1,7 dengan capaian kinerja hanya 74,12 persen. Dan pada tahun 2023 realisasi kinerja 1,96 dengan target 1,7 dan capaian kinerja adalah 1,27. Untuk tahun 2024 realisasi kinerja 0,83 dari target 0,75 dengan tingkat capaian sebesar 110,6 persen. Adapun Formula dari indicator tersebut adalah (Jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik/ Jumlah masyarakat yang memiliki hak pilih) x 100.

2.16.2 Membangun Kelembagaan yang Tangguh.

Secara umum upaya untuk menggem- bangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat digambarkan oleh capaian-capaian berikut:

Perilaku anti korupsi di Indonesia; 2) Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk, Kementerian (K)/Lembaga (L)/Pemerintah Daerah; 3) Mendorong dan membina keberlanjutan realisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; 4) Pelaksanaan undang-undang pelayanan publik; 5) Kondisi demokrasi di Indonesia. Pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi tertuang pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (STRANAS PPK) dan aksi tahunan yang dibuat melalui proses yang partisipatif sebagai upaya pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk program anti korupsi lintas sektor secara bersama-sama.

Untuk meminimalkan timbulnya kerugian negara/daerah, Pemerintah Provinsi NTB membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawal program/kegiatan (proyek) perangkat daerah yang bersumber dari dana pusat maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Disamping itu, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2014 telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem tata kelola (Governance), manajemen resiko dan pengendalian internal pada perangkat daerah sehingga maturitas sistem pengendalian Pemerintah Daerah peringkatnya naik dari yang sebelumnya Level II menjadi level III, yang artinya praktik pengendalian dilingkungan APIP dan Pemerintah Daerah telah terdokumentasi dengan baik dengan sistem evaluasi yang perlu didokumentasikan secara memadai. Kondisi inilah yang berkontribusi dalam pencapaian Opini WTP.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas kinerja, serta mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD (dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang berprestasi), Bappeda berupaya untuk menyamakan pemahaman dengan Biro Organisasi dan Inspektorat terkait SAKIP untuk menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP di Provinsi NTB, melibatkan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi, dengan narasumber dari Kota Bandung yang telah mampu mencapai nilai SAKIP A berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB. Dalam kegiatan ini sekaligus di- launching aplikasi e-SAKIP.

Terkait Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan 2024 dengan LKPD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi NTB telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut Opini BPK RI tahun 2019 – 2024.

Tabel 2.53 Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2024

TAHUN PELAPORAN	OPINI

TAHUN PELAPORAN	OPINI
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2023	Wajar Tanpa Pengecualian
2024	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2024

Sedangkan untuk Kab./Kota pada tahun pelaporan 2023 seluruh Kab./Kota se NTB telah mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.54 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2019-2024

NO	KAB./KOTA	OPINI LKPD					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kota Mataram	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Lombok Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Lombok Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
5.	Kab. Lombok Utara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Sumbawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Sumbawa	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Dompu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab. Bima	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Kota Bima	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

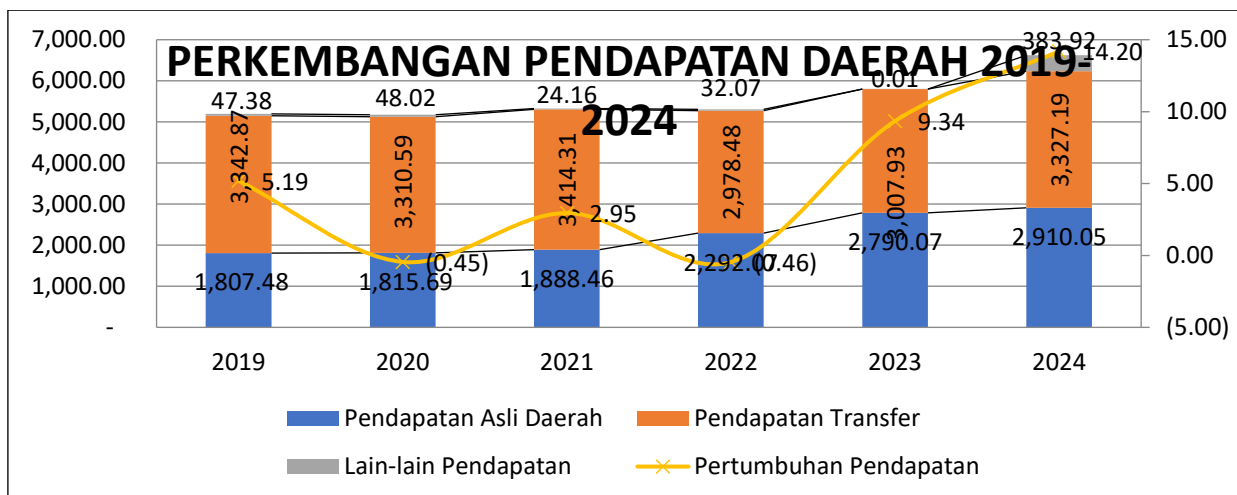
Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2024

2.17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

2.17.1 Mobilisasi Sumber Daya Domestik.

Bagi Indonesia salah satu target penting yang berkaitan dengan mobilisasi sumberdaya domestik adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Pajak merupakan sumber daya domestik yang terpenting bagi negara dalam membiayai pembangunannya termasuk dalam mewujudkan TPB/SDGs. Kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat dalam grafik 2.45 berikut :

Grafik 2.46 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2024

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2024 sebesar 50,25 persen masih lebih besar dibandingkan kontribusi PAD sebesar 43,95 persen, begitu pula pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dimana kontribusi Dana Perimbangan sebesar 51,89 persen, PAD sebesar 48,11 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 0,0002 persen.

Tabel 2.55 Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2019 -2024 (dalam Milyar)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	1,404.96	1,328.31	1,418.22	1,880.84	1,880.84	2,045.00
Retribusi Daerah	21.48	16.47	10.45	14.46	12.47	714.49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	54.17	61.12	46.26	68.19	68.19	79.90
Lain-lain PAD yang Sah	326.86	409.79	413.52	520.86	828.57	70.65
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,807.48	1,815.69	1,888.46	2,484.34	2,790.07	2,910.05
Pertumbuhan PAD	8.86	0.45	4.01	31.55	12.31	4.30

Sumber : Bappenda Provinsi NTB, 2024

Pajak daerah masih menjadi pos dengan kontribusi unggulan dalam penerimaan PAD Provinsi NTB tahun 2019-2024. Pada tahun 2019 kontribusi Pajak Daerah mencapai 79,23 persen dari Total Pendapatan Asli Daerah, pada tahun 2024 kontribusi Pajak Daerah menurun menjadi 70,27 persen dibandingkan tahun 2019 tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 dengan nilai 67,41 persen, terjadi peningkatan penerimaan PAD sebesar 2,86 persen. Perlu adanya analisis potensi PAD yang bisa digali untuk meningkatkan penerimaan PAD tanpa membebani perekonomian secara berat. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pos PAD paling tinggi pada tahun 2019-2024 ditempati oleh Retribusi Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 96,99 persen diikuti oleh hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar 32,20 persen, dan Pajak Daerah sebesar 31,30 persen. Lain-lain PAD yang sah menunjukkan rata-rata pertumbuhan terendah dengan (-362,68) persen.

Untuk masa mendatang, penerimaan pajak masih akan menghadapi beberapa tantangan terutama berkaitan dengan (i) belum optimalnya penggalan potensi sumber pajak dan

efektivitas pengumpulan; serta (ii) rendahnya kesadaran wajib pajak, serta pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan masih sekitar 5 persen.

2.17.2 Kemitraan Multipihak.

Sarana pelaksanaan yang berkaitan dengan kerjasama atau kemitraan menyangkut kemitraan global dan juga kemitraan antara pemerintah dan swasta termasuk organisasi kemasyarakatan.

Investasi menjadi pendorong roda perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan elemen utama dalam peningkatan investasi. Minat investasi di Provinsi NTB dalam rentang waktu 2020 – 2024 terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari jumlah izin dan non izin yang diterbitkan pemerintah sebanyak 16.882 izin yang didominasi perizinan di sektor Perikanan dan Kelautan sebesar 61,45 persen sebagaimana disajikan pada table 2.54 berikut.

Tabel 2.56 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2019 – 2024

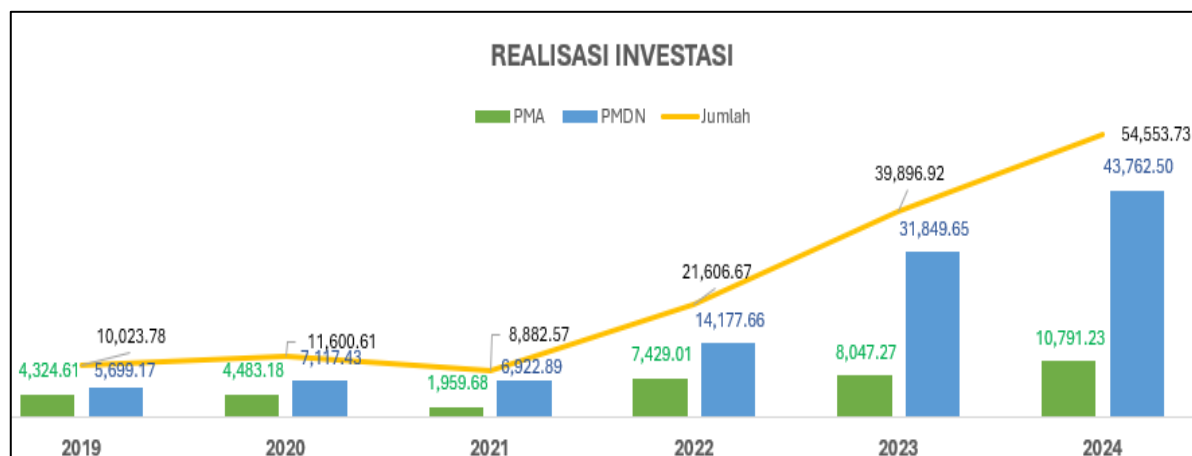
No	Bidang Perizinan	Izin dan Non Izin					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-
2	Perikanan Dan Kelautan	636	610	617	554	4.900	10.374
3	Pertanian	3	2612	-	1	27	2.646
4	Koperasi & Umkm	11	1	-	-	-	15
5	Pekerjaan Umum	15	36	18	27	9	125
6	Kehutanan	10	13	8	1	3	42
7	Lingkungan Hidup & Penelitian	46	51	4	5	7	150
8	Perindustrian	-	-	-	-	538	538
9	Perdagangan	2	-	-	-	6	9
10	Perkebunan	3	-	-	-	-	4
11	Hubkominfo	-	-	-	-	31	76
12	Pertambangan	-	-	-	-	-	539
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	0
14	Kesehatan	29	16	1	-	13	73
15	Pariwisata	1	4	-	-	24	29
16	Pertanahan	-	-	-	-	-	0
17	Peternakan	2.685	-	1.273	1.503	1.990	9.663
18	Sosial	1	20	6	2	3	36
19	Energi dan SDM	-	195	242	-	66	503
20	Perhubungan	-	59	7	3	27	96
TOTAL			3.442	3620	2176	7.644	16.882

Sumber: DPM-PTSP Provinsi NTB, 2024

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah tergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta, tapi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh

banyak faktor, salah satunya adalah pelayanan investasi yang tercermin pada kemudahan dalam memperoleh perijinan dan berapa lama proses perizinan investasi dilakukan. Pelayanan investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dari waktu ke waktu semakin baik, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai investasi selama lima tahun terakhir sebagaimana disajikan pada grafik 2.46 berikut.

Grafik 2.47 Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2024 (Rp.Milyar)



Realisasi investasi di Provinsi NTB tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2019 realisasi investasi sebesar Rp.10,023,78 Trilyun meningkat menjadi Rp.54.553,73 Trilyun di tahun 2024.

2.17.3 Teknologi Informasi.

Teknologi dan informasi menjadi salah satu sarana pelaksanaan yang juga sangat penting untuk mewujudkan TPB/SDGs. Salah satu indikator yang dianggap sangat vital adalah banyaknya individu yang menggunakan internet. Proporsi Individu yang menggunakan internet Provinsi NTB pada tahun 2023 tercatat sebesar 63,2 persen angka ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai capaian nasional sebesar 77 persen.

Sementara itu kunjungan pengguna pada Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB selama tahun 2024 sebanyak 695.582 kali, kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2024 yaitu sebanyak 65.720 kali kunjungan. Jumlah yang mengunduh Daftar Informasi Publik (DIP) tertinggi adalah pada bulan Januari dan April 2024 dengan 198 kali unduhan. Sedangkan untuk Permohonan Informasi yang masuk selama tahun 2024 adalah sejumlah 38 orang pemohon.

Tabel 2.57 Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2024

BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN (Kali)	DOWNLOAD(Kali)	PERMOHONAN INFORMASI (Orang)
1	2	3	4
Januari	64.000	198	4
Februari	63.005	180	3



BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN (Kali)	DOWNLOAD(Kali)	PERMOHONAN INFORMASI (Orang)
Maret	62.007	170	4
April	64.000	198	3
Mei	63.008	168	3
Juni	62.008	159	3
Juli	65.720	178	3
Agustus	63.500	197	3
September	64.564	184	3
Oktober	63.100	172	3
November	64.400	183	3
Desember	65.200	167	3
TOTAL	695,582	1.782	38

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2024

Minat masyarakat cukup tinggi untuk mengakses informasi publik secara online. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kunjungan Sistem Informasi Online PPID Provinsi NTB setiap bulannya menyentuh diatas ribuan kunjungan. Begitu pula dengan banyaknya Daftar Informasi Publik (DIP) yang diunduh oleh pengakses, menggambarkan bahwa informasi publik yang disediakan pada sistem informasi online PPID Provinsi NTB sangat diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan kecilnya angka permohonan informasi pada tahun 2024 menandakan bahwa informasi yang telah disediakan cukup lengkap, sehingga tidak banyak permohonan informasi diluar informasi publik yang telah disediakan dalam sistem informasi PPID Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terbantu dengan adanya sistem informasi ini sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang harus kesulitan dalam memperoleh informasi publik badan publik, artinya Pemerintah Provinsi NTB telah berupaya maksimal dalam melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan mantap.

Perdagangan Internasional.

Salah satu sarana pelaksanaan yang penting bagi pencapaian semua target TPB/SDGs adalah peran dari perdagangan, khususnya perdagangan internasional yang mendorong peningkatan penerimaan negara dan menunjukkan kemitraan global.

Total ekspor Provinsi NTB secara kumulatif dari tahun 2019 sebesar 168,17.41 ton, dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 mencapai hanya sebesar 617.446,49 ton. Bahan galian/ tambang non migas dengan nilai US\$ 2.400.703.302,58 sebagaimana tabel 2.56 berikut.

Tabel 2.58 Perkembangan Ekspor Tahun 2020 – 2024

Tahun	Volume (Ton)	Nilai (Us\$)
2020	379,609.74	591,215,597.15
2021	434,863.73	1,221,564,303.63
2022		3,133,519,559.63



	966,355.16	
2023	665,579.27	2,064,421,160.92
2024	617,446.49	2,400,703,302.58

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2024

Komoditi ekspor yang mendominasi perolehan devisa pada tahun 2015–2019, terdapat tiga komoditi yakni Konsentrat Tembaga, Mutiara, dan Kerajinan Buah Kering selalu menempati 5 besar komoditi ekspor NTB. Lima komoditi ekspor teratas setiap tahun dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.59 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024

No.	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Konsentrat tembaga	582,183,262.98	1,214,179,307.92	3,119,406,275.03	2,046,400,575.11	2,384,464,405.34
2	Perhiasan/Permata					
3	Ikan dan Udang		6,708.64			
4	Buah-Buahan					
5	Perangkat Optik					
6	Garam, Belerang,					
7	Kapur					
8	Perkakas, Perang ptg					
9	Barang Kiriman					
10	Perabot, Penerangan					
11	Rumah					
12	Sayuran					
13	Biji-Bijian Berminyak					
14	Jerami/Banhan Anyaman					
15	Produk Keramik					
16	Serat Stafel Buatan					
17	Barang Lainnya	4,118,321.02				
18	Kerajinan buah kering	226,426.18	329,519.01	363,067.72	127,033.33	
19	Makanan ringan/Snack				18,552.80	985.83
20	Anode					309,125.00
21	Krjn. Ketak		87,479.20			
22	Krjn. Alang-alang		3,183.00	3,350.00		
23	Krjn Batu Alam			2,408.00		
24	Krjn. Bambu		16,545.35	884.10		
25	Krjn . Kayu				4,493.00	



No.	Komoditas	Nilai Ekspor (US\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
26	Gerabah		10,643.00			
27	Mutiara	4,687,586.97	5,286,079.40	4,418,274.59	14,312,465.66	10,756,627.37
28	Rumput Laut		584,139.20	338,994.90	111,123.95	
29	Budidaya Terumbu karang				6,465.80	
30	Ikan Segar					
31	Lobster					307,043.50
32	Udang Vannamei		85,000.00	137,280.00		
33	Fress Yellow Tuna Oil			3,719.05		1,610,489.22
34	Batu Apung		301,115.59	1,657,074.24	2,984,489.95	2,625,445.05
35	The Kelor			4,300.00	4,841.12	1,554.63
36	Manggis				273,502.00	327,350.94
37	Rambutan				3,510.00	
38	Vanili		33,062.00	475,808.00	87,717.70	259,157.00
39	Jahe				11,225.00	
40	Nanas				3,160.00	
41	Salak				5.50	
42	Kopi		111,046.74	13,276.00		35,000.00
43	Jagung			6,616,200.00		
44	Cocoa		27.67			
45	Palm Sugar		766.91			
46	Kelapa		529,680.00			
47	Sample coco beans					6,118.70
48	Wooden Pellets			78,648.00	72,000.00	
Total		591,215,597.15	1,221,564,303.63	3,133,519,559.63	2,064,421,160.92	2,400,703,302.58

Negara Tujuan ekspor Daerah NTB selama periode 2020-2024 tercatat Cina, India, Jepang, Korea Selatan dan Australia secara konsisten selalu berada pada lima besar nilai ekspor terbesar. Berikut negara dengan nilai ekspor terbesar selama periode 2020 -2024 dapat dilihat pada table 2.58 berikut.

Tabel 2.60 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2024

No.	Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor (\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Africa					
2	Australia	3,691,994.52	3,996,404.33	2,956,216.21	10,578,067.81	6,520,845.85
3	Belanda	34,535.68	101,775.42	104,824.62	56,661.28	



No.	Negara Tujuan Ekspor	Nilai Ekspor (\$)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Belgia				4,493.00	
5	Brazil				760.00	720.00
6	Canada		40,090.00			
7	China	274,662,382.73	817,520,913.82	775,858,391.04	372,984,527.99	857,773,789.85
8	Denmark					
9	Filipina	80,524,388.13	23,085,028.00	179,431,297.32	137,043,105.36	226,668.20
10	France	68,675.92	10,643.00		9,747.85	
11	Hongkong	330,200.40	206,656.67	201,491.50	990,315.37	465,943.99
12	India	46,948,372.55	156,831,032.55	499,367,411.06	445,474,901.26	601,056,535.86
13	Inggris					
14	Israel					
15	Jepang	159,841,588.65	126,386,973.18	746,867,561.65	592,479,626.26	446,268,015.01
16	Jerman	8,844.79	16,876.00	72,000.00	72,000.00	
17	Korea Selatan	24,678,517.16	93,016,690.48	927,776,571.38	504,098,278.68	486,370,399.89
18	Malaysia	2,001.49			4,841.12	278,297.04
19	Newzealand				18,552.80	985.83
20	Norway	149.00	16,545.35			
21	Pakistan				11,220.00	
22	Portugal					
23	Singapore		2,275.56	3,719.05		6,161.09
24	Switzerland					
25	Thailand	1,237.50		114,295.30	392,659.80	62,694.94
26	UEA	5,009.94	82,725.13	28,764.20	31,117.50	580.00
27	USA	417,698.70	249,674.14	737,016.30	168,418.70	1,671,665.02
28	Vietnam				1,866.13	
Total		591,215,597.15	1,221,564,303.63	3,133,519,559.63	2,064,421,160.92	2,400,703,302.58

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2024

Kegiatan operasi pasar rakyat sempat mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya alokasi anggaran yang diterima. Program ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga. Hasil dari pelaksanaan kegiatan operasi pasar selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.61 Operasi Pasar 2019-2024

Tahun	Realisasi Penyaluran Bantuan Paket Sembako Untuk Masyarakat Miskin (Paket)
2019	5.250




2020	2.225
2021	Tidak ada paket sembako
2022	Tidak ada paket sembako
2023	3.860
2024	Tidak ada paket sembako

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2024

2.17.4 Ketersediaan Data.

Dalam era persaingan yang semakin ketat serta perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, ketersediaan data dan informasi berkualitas sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi di era globalisasi menjadi suatu keharusan, hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kebijakan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Program NTB Online merupakan satu model implementasi sistem e-government (e-gov), dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, transparansi dan pencegahan korupsi maupun mendukung manajemen pengambilan keputusan oleh pimpinan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, dengan sasaran tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.



BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, dalam kurun waktu 2025-2029 telah ditetapkan 5 target yang diukur melalui 9 indikator seperti yang diuraikan dalam Tabel 3.1. Target-target tersebut terdiri dari: (1) Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari (2) Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, (3) Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan, (4) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, (5) Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi ketahanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan dan bencana.

Kebijakan Tujuan 1. Akan di capai melalui RPJMD 2025-2029

Pada Misi 2 : Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dengan Arah Kebijakan yaitu: (1) Penanggulangan Kemiskinan melalui pendekatan graduasi dan penguatan pendampingan; (2) Penguatan Program Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Tidak Mampu; (3) Penguatan koordinasi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penanggulangan kemiskinan; (4) Pengembangan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah melalui akses pembiayaan, pelatihan manajemen, dan perluasan pasar, serta mendukung inovasi produk untuk meningkatkan daya saing; (5) Mendorong diversifikasi pangan lokal yang berbasis pada tanaman asli NTB yang memiliki nilai gizi tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim; (6) Mengembangkan pasar dan promosi untuk produk pangan lokal agar lebih dikenal dan diminati, baik di dalam maupun luar daerah, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perekonomian local; (7) Penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung kearifan lokal dan ekologi dalam ketahanan pangan; (8) Pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan; (9) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal di luar pusat kota; (10) Mendorong pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, sanitasi) di wilayah dengan akses terbatas; (11) Pengembangan Kawasan Sentra (roadmap) Produksi Komoditas Unggulan Berbasis Wilayah dan potensi lahan kering; (12) Penguatan Kelembagaan



Ekonomi dan Penguatan Sistem Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan Teknis; (13) Meningkatkan kapasitas petani lokal melalui pelatihan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan produksi pangan yang berkelanjutan tanpa merusak ekosistem.

Pada Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif dengan arah Kebijakan: (1) Pemenuhan dan Perkuatan Pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan dengan kuantitas, kualitas dan distribusi yang optimal serta pemberian bantuan/insentif dan afirmasi tenaga pendidik ; (2) Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (3) Penguatan Kapasitas Ketahanan kesehatan; (4) Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Berbasis Masyarakat; (5) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata Kelola.

Program Tujuan 1 Program yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Tujuan 1 SDGs diantaranya adalah : (1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; (2) Program Penanganan Kerawanan Pangan; (3) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen,(4) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, (5) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, (6) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, (7) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Termasuk: Budidaya Lobster, Krpl/P2I),(8) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil, (9) Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat), (10) Program Pengelolaan Persampahan, (11) Program Pengelolaan Hutan,(12) Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, (13) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, (14) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, (15) Program Rehabilitasi Sosial, (16) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, (17) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, (18) Program Penempatan Tenaga Kerja, (19) Program Penempatan Tenaga Kerja, (20) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, (21) Program Pengelolaan Pendidikan, (22) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk), (23) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, Program Pengembangan UMKM, (24) Program Kawasan Permukiman, (25) Program Pengembangan Perumahan, (26) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), (27) Program Penanggulangan Bencana, (2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Disamping Program yang berasal dari Perangkat Daerah terdapat juga Program yang berasal dari NGO/Lembaga diantaranya adalah :

1. Dari Gema Alam : Kegiatan Microloan,
2. YRII : Kegiatan Perlindungan sosial, Pelatihan peningkatan mata pencaharian, Inklusi keuangan, Pemberdayaan Sosial dan Membangun ekosistem ekonomi islam,
3. YRII bersama Baznas : Membangun mahyani,
4. SKALA : Fasilitasi penyusunan dan implementasi regulasi dan kebijakan tentang PDR, Fasilitasi penguatan kapasitas terkait PDRD, Fasilitasi penguatan kapasitas terkait DAU, Fasilitasi penguatan kapasitas terkait Dana Alokasi Khusus, Fasilitasi penguatan kapasitas



terkait Dana Alokasi Khusus, Fasilitas penyusunan kebijakan tentang kelembagaan tata kelola data penerapan dan pemenuhan SPM, Fasilitas penguatan kapasitas terkait perencanaan daerah termasuk pengintegrasian berbagai rencana aksi tematik, Fasilitas penyusunan dokumen perencanaan daerah, Fasilitas penguatan kapasitas terkait penganggaran daerah, Fasilitas penguatan kelembagaan pengelola satu data daerah, Fasilitas identifikasi dan pemutakhiran sistem informasi tingkat desa milik daerah yang memuat variabel data REGSOSEK, Fasilitas penguatan dan integrasi sistem pengelolaan data tingkat daerah dan pusat, Fasilitas penguatan kapasitas penggunaan dan pemanfaatan SIPD-RI, Fasilitas pengembangan kerangka analisis data mikro, makro, dan sektor untuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM dan perencanaan daerah, Fasilitas penguatan kapasitas terkait analisis data mikro terpilah untuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM dan perencanaan daerah, Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait penerapan SPM, Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif, Penguatan komitmen pemimpin daerah terkait pengelolaan PDRD, Penguatan komitmen pemimpin daerah terkait pengelolaan TKD, Penguatan komitmen pimpinan daerah terkait partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan, Fasilitas penyusunan regulasi, kebijakan, dan rencana aksi pengurangan kemiskinan, pengarusutamaan gender, disabilitas, dan kelanjutusiaan, Penguatan platform kolaborasi pemda dan jaringan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan yang inklusif, Fasilitas penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dalam pemanfaatan hasil analisis kebutuhan kelompok rentan, Fasilitas penguatan kapasitas jaringan masyarakat sipil dalam advokasi kebutuhan kelompok rentan dan kolaborasi, Fasilitas kolaborasi pemda dengan Perguruan Tinggi dan CSO untuk perluasan sistem informasi tingkat desa, Fasilitas penguatan kapasitas individu dan kelembagaan daerah pengelola sistem informasi tingkat desa dan Dukungan tata kelola program di Provinsi NTB.

5. Transformasi Perempuan Dotcom :
 - a. Program: Legal and Digital Empowerment for Communities
 - b. Workshop kewirausahaan berbasis digital terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas
 - c. Pembentukan Komunitas Orang Muda Melek teknologi
6. LPA NTB (konsorsium)
 - a. Program: Strengthen Rehabilitation-Reintegration & Improve Social Cohesion Against Violent Extremism (STRIVE) – (GCERF – Global Community Engagement and Resilience Fund) SWISS : exnapiter hidup damai dengan masyarakat, ekonominya menguat dan pemuda terdidik untuk literasi digital berpikir kritis.
 - b. Program: BERANI II (Better Reproductive Health and Rights For All in Indonesia). Fokus pada Penghapusan Praktik Sunat Perempuan (UNICEF – DFAT)) – Amandement
7. LRC : Program: Penguatan ekonomi Bagi masyarakat Rentan

- 
- 
8. LPSDM : Program: INKLUSI (Sekolah Perempuan: Melalui penguatan lembaga ekonomi perempuan (Koperasi), dan Penguatan usaha individu dan kelompok
 9. SIAP-SIAGA :
 - a. Program Peningkatan Sistem Penanggulangan Bencana
 - b. Program: Peningkatan Strategi Penanggulangan Bencana
 - c. Program: Pemetaan Dan Evaluasi Risiko Bencana
 - d. Program: Peningkatan Layanan Data, Manajemen Informasi Dan Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana
 - e. Program: Peningkatan Dan Pengembangan Kebijakan Dan Peraturan Untuk Kesiapsiagaan Bencana
 - f. Program: Perubahan Iklim Dan Kebijakan Ketangguhan Bencana (Penguatan Desa Tangguh Bencana)
 - g. Program: Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana
 - h. Program: Peningkatan Kapasitas Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana Lokal (Daerah)
 10. Santiri Foundation, artcofeelago, relawan :
 - a. Inkubasi UMKM dan pertanian organik
 - b. Bantuan Gizi Pasca Gempa

Target Indikator Tujuan 1. Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel 3.1. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 1 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi non pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 1 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.

Tabel 3.1 Target Pencapaian Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.(PPP: \$ 1,9 per hari)*Nasional menggunakan < 2,15 USD PPP (purchasing Power Parity)	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	2,04	1.64	1.24	0.84	0.44	0	0	Semua Perangkat Daerah
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Susenas Konsumsi dan Pengeluaran (BPS)	Persen	11,91 per Sep 2024 12,91 per maret 2024	11,68-12,18	10,79-11,41	9,9 - 10,65	9,01 - 9,88	8,12 - 9,12	7,17 - 8,17	Semua Perangkat Daerah
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistim dan Upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan											
1.3.1.[a]	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS Kesehatan	persen	37.16	37.16	37.20	38.00	38,57	45,19	48,50	Dinas Kesehatan
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	Dinas Kesehatan	persen	99.6	99.31	99.35	99.39	99.42	99.50	99.54	Dinas Kesehatan
1.3.1.[b]	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	persen	37.16	62.2	64.9	66.8	78.6	70.4	72.2	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat.											
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.(Air minum)	Susenas Kor (BPS)	Persen	49.58	50,25	51,25	52,25	53,25	54,25	55,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.(Penyehatan Dasar) Cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas Kor (BPS)	Persen	77,04	78,04	79,04	82,04	84,04	86.04	92.00	Dinas Kesehatan
	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.(Sanitasi)	Susenas Kor (BPS)	Persen	86,80	86.80	86.96	87.52	88.03	88.50	88.93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa										

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang mendapatkan 119Icohol119 tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki ha katas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe										
	a. Proporsi Rumah Tangga dengan rumah hak milik	Susenas Kor (BPS)	Persen	91,93	97,19	97.20	97.40	97.50	98.00	98.50	Badan Pusat Statistik
	b.Proporsi Rumah Tangga dengan rumah sewa/Kontrak	Susenas Kor (BPS)	Persen	1,28	1.23	1.18	1.13	1.08	1.03	0.98	Badan Pusat Statistik
Target 1.5 : Pada Tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi ketahanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, social, lingkungan dan bencana											
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
	Jumlah korban meninggal akibat bencana /100.000 orang	BNPB	per 100.000 orang	2	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban, hilang, akibat bencana /100.000 orang	BNPB	per 100.000 orang	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban terluka akibat bencana /100.000 orang	BNPB	per 100.000 orang	0.354	1.54	1.46	1.39	1.32	1.25	1.19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah korban mengungsi akibat bencana /100.000 orang	BNPB	per 100.000 orang	2.160	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB	BNPB	Persen PDB	0.57 (2022)	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BNPB	Persen	90	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 11 indikator yang tersedia datanya di Provinsi NTB. Adapun uraian indikator seperti dalam Tabel 3.2. Target-target tersebut terdiri dari (1) Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup cukup sepanjang tahun, (2) Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk pendek anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, (3) Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian, (4) Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan, (5) Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang (6) Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Kebijakan Tujuan 2. Strategi/arah kebijakan RPJMD 2025 -2029 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Melalui Misi 2 : Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dengan arah kebijakan yaitu : (1) Mendorong diversifikasi pangan lokal yang berbasis pada tanaman asli NTB yang memiliki nilai gizi tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim; (2) Mengembangkan pasar dan promosi untuk produk pangan lokal agar lebih dikenal dan diminati, baik di dalam maupun luar daerah, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perekonomian lokal; (3) Penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung kearifan lokal dan ekologi dalam ketahanan pangan; (4)



Pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan untuk mendukung ketahanan pangan; (5) Mendorong pembentukan dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan dan Barang Pokok (BUMDes, Koperasi, Distributor Mitra); (6) Mengembangkan dan memperluas jaringan logistik lokal serta fasilitas penyimpanan (gudang, cold storage) di wilayah sentra dan konsumen; (7) Melaksanakan operasi pasar di wilayah dengan gejolak harga tinggi secara berkala; (8) Mendorong penguatan kerja sama antardaerah/kawasan dalam stabilisasi harga dan distribusi komoditas; (9) Mengembangkan pasar rakyat digital dan sistem informasi harga terpadu antarwilayah

Pada Misi 1: Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif dengan arah Kebijakan diantaranya Adalah : (1) Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (2) Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan; (3) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata Kelola; (4) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat

Program Tujuan 2. Kebijakan operasional dan program Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan yang terkait erat dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs tujuan 2 adalah (1) Program Penanganan Kerawanan Pangan (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan (5) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (6) Program Penyuluhan Pertanian (7) .Selain melalui program OPD, terdapat beberapa program yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan penyediaan pangan. Lembaga non pemerintah tersebut antara lain:

- (1) Rudat Institut : Program Pembibitan Cabai, terong, tomat,kacang panjang, dan sawi (Mendukung Ketahanan Pangan)
- (2) SOBAT NTB
Program: Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT)
 - a. Pelatihan LiLA Keluarga
 - b. Pelatihan Guru PAUD deteksi Dini Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk dengan Pita LiLA
 - c. Melakukan pelatihan PGBT bagi tenaga Kesehatan (Nutrionist) dan pemanfaatan Data EPPGBM/Pelita Kesmas
 - d. Suportif Supervisi di 5 Puskesmas dalam pelaksanaan PGBT

Program: AKSI BERGIZI

- a. Orientasi Aksi Bergizi Bagi Kepala Sekolah, Guru dan Perwakilan Siswa
 - b. Supervisi Fasilitatif Pelaksanaan Aksi Bergizi.
 - c. Pelatihan Aksi Bergizi bagi Kepala Sekolah dan Guru di 20 Sekolah/Madrasah
 - d. Pembuatan Aplikasi Stratifikasi UKS/M
 - e. Supervisi Fasilitatif
- (3) Plan & BKKBN

- 
- 
- a. Program 1. Parents (Peningkatan Kapasitas Kader Untuk Pencegahan Stunting)
 - b. Program Gema Cita (Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak)

(4) Dompot Dhuafa

- a. Monitoring Posyandu ,Pendampingan Balita Mal Nutrisi,Intervensi Balita Malnutrisi Melalui Pemberian Paket Nutrisi dan Pelaksanaan POS GIZI Positif Deviance Adaptive
- b. Pendampingan Balita Mal Nutrisi, Intervensi Balita Malnutrisi Melalui Pemberian Paket Nutrisi dan Pelaksanaan POS GIZI Positif Deviance Adaptive

(5) Santiri, Pemda

- a. Pelatihan pupuk organik & irigasi tetes
- b. Ketahanan Pangan Eco-Climate Village

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel 9. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 2 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi non pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 2 Buku RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.

Tabel 3.2 Target Pencapaian Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 2.1 Pada Tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup cukup sepanjang tahun											
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Susenas Kor (BPS)	Persen	2,74	1,978	1,884	1,790	1,695	1,601	1,507	Dinas Ketahanan Pangan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Susenas Kor (BPS)	Persen	7,71	7,11	6,52	5,94	5,37	4,82	4,28	Dinas Ketahanan Pangan
Target 2.2 Pada Tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk pendek anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Propil Kesehatan NTB 2024 (E-PPGBM)	Persen	29.8	21.7	20.74	19.78	18.82	16.90	15.94	Dinas Kesehatan
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,berdasarkan tipe	Propil Kesehatan NTB 2024	Persen	6,37	7,13	6,87	6,62	6,39	6,19	6,00	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Riskesdas 2013 dan 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021	Persen	93,27	96,80	97,44	98,08	98,72	99,36	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.											
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/ perikanan/kehutanan	BPS (Sensus Pertanian)	USD PPP per hari kerja	9.91 (2023)	10.40	10.40	10.40	11.90	11.90	11.90	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2.3.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di bidang pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Sakernas (BPS)	Rupiah per tenaga kerja	34.819.531,90	41.339.376	43.396.546	45.824.972	48.683.049	52.029.170	55.921.729	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
2.3.2*	Rata-rata pendapatan Produsen	BPS (Sensus	USD PPP	1.009	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	Dinas Pertanian dan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pertanian skala kecil menurut sub sektor	Pertanian)	per produsen pangan skala kecil	(2003)							Tanaman Pangan
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistim produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.											
2.4.1.*	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	BPS: Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI)/ Agricultural Integrated Survey (AGRIS)	Persen	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	36.50	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang											
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	BPS, Kemenkeu dan Bappenas	indeks	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrem.											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan	BPS	Indeks	0.87	-0,19	-0,20	-0,22	-0,23	-0,24	-0,248	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 11 target yang diukur melalui 23 indikator. Adapun uraiannya indikator seperti dalam Tabel 3.2. Target-target tersebut terdiri dari (1) Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, (2) Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000, (3) Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya, (4) Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan, (5) Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan, (6) Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas, (7) Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional, (8) Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang, (9) Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat, (10) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeluargaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. (11) Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 3. Arah kebijakan RPJMD 2025-2029 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 3 : kehidupan sehat dan sejahtera termaktum pada misi 1: Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain : (1) Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; (2) Penguatan Kapasitas Ketahanan kesehatan; (3) Penguatan Upaya Promotif dan Preventif Berbasis Masyarakat; (4) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola; (5) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; (6)



Penguatan Layanan Keluarga Berencana; (6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.

Program Tujuan 3. Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan TPB/SDGs tujuan 3, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup: (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan.

Program Non Pemerintah :

1. Summit Institute for Development
 - a. Program: Implementasi Program Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) untuk Ibu Hamil
2. Dompot Dhuafa NTB
 - a. Program Kawasan Sehat
 - b. Program Bidan Untuk Negri
 - c. Program Respon Darurat Kesehatan
3. Summit Institute for Development
4. Program Gema Cita (Generasi Emas Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak)
 - a. Mengakhiri semua bentuk malnutrisi
 - b. Menurunkan rasio kematian ibu
 - c. Menurunkan angka kematian bayi baru lahir dan balita.
 - d. Persentase ibu hamil yang menerima suplementasi mikronutrien lengkap
 - e. Melakukan pelatihan tenaga bidan di fasilitas layanan dasar.
 - f. Melakukan pelatihan kader
5. LPSDM : Program: INKLUSI
 - a. Menguatnya Komite Pemantau dalam mengimplementasikan pemantauan untuk memastikan perbaikan akses terhadap 6 isu prioritas terutama isu kekerasan seksual
 - b. Sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk dampak perkawinan anak dan UU TPKS
6. Ecco Foundation : Kegiatan Cek Kesehatan Gratis

Target Indikator Tujuan 3. Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada Tabel 3.3. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 3 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi non pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 3 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.

Tabel 3.3 Target Pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Susenas Kor (BPS)	Per 100.000 KH	257	184	167.75	151.50	135.25	119.00	102.75	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) Persentase persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan terlatih	Susenas Kor (BPS)	Persen	98,17	99,17	99,33	99,48	99,62	99,75	99,87	Dinas Kesehatan
	(b) di fasilitas Kesehatan	Susenas Kor (BPS)	Persen	96.06	96.12	96.50	97.00	97.25	97.50	98.00	
	(b) di fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	71,4	88	90	91	93	95	96	
Target. 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh 127Icoho berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000											
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa)	BPS	Per 1.000 KH	29.37	22.84	21.51	20.23	18.92	17.62	17.62	Dinas Kesehatan
	(b) Angka Kematian Bayi	BPS	Per 1.000 KH	24,64 (LF SF 2020)	24,54	24,30	24,25	24,10	24,00	23,50	Dinas Kesehatan
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri 127Icohol127 AIDS, 127Icohol127osis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk										NTB Makmur Mendunia
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Persen	58,96	85	85	85	85	85	85	Dinas Kesehtan
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate)	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Persen	88,53	95	95	95	95	95	95	Dinas Kesehtan
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Per 1.000 orang	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	Dinas Kesehatan
3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria	Profil Kesehatan Indonesia (Kemenkes)	Kab/Kota	6	8	8	10	10	10	10	Dinas Kesehtan
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati.										
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Dinas Kesehatan	Kab/kota	7	8	8	8	9	9	10	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.											
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur 10-18 tahun	Dinas Kesehatan	persen	30,27	27	25	23	20	20	17	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Riskesdas (Kemenkes)	Persen	27.8 (2023)	26.70	25.20	23.70	22.20	20.70	19.20	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Presentase Penderita Hipertensi umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	27.8 (2023)	26.50	25.00	23.50	22.00	20.50	19.00	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Riskesdas (Kemenkes)	Persen	21.30	20.70	20.40	20.10	19.80	19.50	19.00	Dinas Kesehatan
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan 128lcohol yang membahayakan											
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Kementrian Kesehatan	orang	275	290	315	340	365	390	415	BNN
3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi	Badan Narkotika Nasional	orang	110	120	130	140	150	160	170	BNN
Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.											
3.6.1	Kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	Dinas perhubungan	orang	394	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Dinas Perhubungan
	Rasio Kecelakaan Transportasi	Dinas perhubungan	Rasio	2.03	1.30	1.28	1.26	1.24	1.22	1.20	Dinas Perhubungan
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern: (b) Kelompok Pasangan Usia Subur (PUS)	SDKI	persen	90.94	91.38	91.77	92.16	92.55	92.94	93.33	Dinas Kesehatan
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Sensus Penduduk Long Form 2020	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2.37	2.34	2.33	2.32	2.31	2.30	2.29	Dinas Kesehatan
3.7.2*	Angka kelahiran remaja	Sensus Penduduk	persen	38	32.68	32.55	32.41	32.27	32.14	32.00	Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.	Long Form 2020									
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.											
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan	Susenas Kor (BPS)/ NTB satu data	persen	8.24	8.08	7.92	7.76	7.60	7.44	7.28	Dinas Kesehatan
3.8.2.(a)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	Persen	95.79	99.31	99.35	99.39	99.42	99.50	99.54	Dinas Kesehatan
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.											
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	Susenas Kor (BPS)	persen	18.2	32,83	32,80	32,78	32,76	32,74	32,73	Dinas Kesehatan
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai <i>the Doha Declaration</i> tentang <i>the TRIPS Agreement and Public Health</i> , yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.											
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi CAMPAK	Susenas kor maret 2015-2023	persen	84,1	78,30	79,06	80,20	81,69	83,56	85,80	Dinas Kesehatan
	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi DPT	Susenas kor maret 2015-2023	persen	71,9	94,04	94,01	93,98	93,95	93,93	93,90	Dinas Kesehatan
	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan	Susenas kor maret 2015-2023	persen	60	80	82	84	88	88	90	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan	Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Kemenkes): Laporan Rutin Ditjen Farmalkes	persen	83	86	89	92	96	96	96	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan 80% ketersediaan	Dinas Kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	obat dan vaksin esensial menurut kab/kota										
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi Tenaga Kesehatan	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), Ditjen Tenaga Kesehatan (Kemenkes)	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk								Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi spesialis	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi bidan	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	1,41	1,41	1,41	1,41	1,42	1,42	1,42	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,27	0,27	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi perawat	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	2,17	2,17	2,17	2,17	2,18	2,18	2,18	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi tenaga apoteker	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	Dinas Kesehatan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan tradisional	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi tenaga psikolog klinik	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,005	0,005	0,005	0,005	0,006	0,006	0,006	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi tenaga teknik biomedik	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,32	0,32	0,32	0,32	0,33	0,33	0,33	Dinas Kesehatan
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	Tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	Dinas Kesehatan

NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 7 indikator. Uraian indikator dapat dilihat dalam Tabel 3.4. Sedangkan target-targetnya dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, (2) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, (3) Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, (4) Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan, (5) Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan, (6) Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Kebijakan Tujuan 4. Arah kebijakan RPJMD 2025-2029 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas termaktum dalam Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif. Melalui: (1) Pemerataan Akses Pendidikan di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat, (2) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), (3) Pengembangan Sistem Pendidikan Inklusif dan Responsif Gender, (4) Pemenuhan dan Perkuatan Pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan dengan kuantitas, kualitas dan distribusi yang optimal serta pemberian bantuan/insentif dan afirmasi tenaga pendidik (5) Peningkatan dan Pengembangan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi dan kebutuhan daerah, (6) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran, (7) Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.

Program Tujuan 4. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Program Pengelolaan Pendidikan (2) Program Pembinaan .

Program lembaga non pemerintah yang mendukung tujuan 4 salah satunya dilaksanakan oleh

1. INOVASI. Program/kegiatan yang dilaksanakan antara lain : (1) Peningkatan Keterampilan Dasar Pada Siswa SD/MI (Curriculum And Assesment); (2) Teaching Practices; (3) Educational Leadership (4) Gender Equality (5) Climate Change (6) Disability Activities

- 
- 
2. Rudat Institute: Perlindungan Anak Pekerja Migran (Mendekatkan Akses pendidikan, kesehatan dan Adminitrasi kependudukan
 3. LPA NTB (Lead konsorsium): Program: Inisiatif Pengembangan Pendidikan Inklusif Berbasis Komunitas Mendukung Anak dengan Hambatan Belajar/Fungsional di PKBM dan SD
 4. LRC: Program: Mewujudkan Pendidikan Inklusif.
Pembentukan dan Penguatan Satgas PPKPT dalam menurunkan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi
 5. Santiri Foundation
 - a. Sekolah Adat & Budaya Bayan
 - b. Pelatihan Pemuda Delta Api
 6. BASAntb, Ecco Foundation .
 - a. Wiki Bekarye – School Workshop (literasi digital, budaya lokal, isu sosial)
 - b. WISDOM Language Learning (Bahasa Inggris & kelas literasi internasional)

Target Indikator Tujuan 4. Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel 11. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 4 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 4 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.

Tabel 3.4 Target Pencapaian Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 4.1 pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif											
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	Susenas Kor (BPS)	Persen								Dinas Pendidikan
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	98,72	98,37	98,52	98,66	98,78	98,90	99,01	Dinas Pendidikan
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMP/ sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	94,74	95,97	97,15	98,32	99,49	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	66,23	67,42	68,80	70,19	71,57	72,95	74,33	Dinas Pendidikan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun; usia 13-15 tahun; dan usia 16-18 tahun.	Susenas Kor (BPS)	Persen								Dinas Pendidikan
	Angka anak tidak sekolah jenjang SD/ Sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	0,29	0,13	0,09	0,06	0,03	0,00	-0,03	Dinas Pendidikan
	Angka anak tidak sekolah jenjang SMP/ Sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	4,60	3,77	3,74	3,71	3,68	3,65	3,62	Dinas Pendidikan
	Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/ Sederajat	Susenas Kor (BPS)	Persen	17,22	14,17	13,59	13,00	12,41	11,82	11,24	Dinas Pendidikan
Target 4.2 Pada tahun 2030,menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan,pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasa											
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.	Susenas Kor (BPS)	Persen	94,85	94,90	94,95	95,00	95,50	94,60	94,70	Dinas Pendidikan
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas											
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor (BPS)	Persen	34,8	35,07	35,69	36,31	36,93	37,55	38,17	Dinas Pendidikan
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk											



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas Kor (BPS)	Persen	95,93	99,20	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Susenas Kor (BPS)	Persen	75,30	86,29	92,95	99,61	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.										
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat untuk (a) perempuan/ laki-laki	Susenas Kor (BPS)	Persen	99.69	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat: (c) kuintil terbawah/ terata	Susenas Kor (BPS)	Persen	99.41	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat	Susenas Kor (BPS)	Persen	101.16	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	SMP/ sederajat: (a) perempuan/laki-laki										
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat: (c) kuintil terbawah/ atas	Susenas Kor (BPS)	Persen	91.8	92,99	93,20	93,50	93,75	94,10	94,50	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat: (a) perempuan/laki-laki	Susenas Kor (BPS)	Persen	114.41	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ SMK/ sederajat: (c) kuintil terbawah/ atas	Susenas Kor (BPS)	Persen	95.77	96,92	97.10	97.31	97.51	97.72	97.92	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMA/ sederajat: (b) pedesaan/ perkotaan	Susenas Kor (BPS)	Persen	92,57	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat Perguruan Tinggi: (a) perempuan/laki-laki	Susenas Kor (BPS)	Persen	105,23	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Susenas Kor (BPS)	Persen	89.83	89,55	89,81	90,07	90,33	90,59	90,85	Dinas Pendidikan

3.5 Tujuan 5 Kestaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 5 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel 3.5. Sedangkan target-targetnya tersebut terdiri dari : (1) Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan, (2) Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat (3) Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut, (4) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 5. Dalam RPJMD 2025-2029 untuk mencapai target TPB/SDGs Tujuan 5. Kestaraan Gender termaktum dalam misi pertama RPJMD 2025-2029, yaitu Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif, dan Kompetitif. Arah kebijakan untuk mendukung kesetaraan gender Adalah:

1. Penguatan dan pengelolaan system informasi gender dan anak, serta pengembangan data terpilah untuk perencanaan Pembangunan
2. Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pengelola berbasis masyarakat untuk kesetaraan gender, perlindungan anak dan ketahanan keluarga
3. Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, social, politik, dan hukum terutama bagi kelompok rentan.
4. Peningkatan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
5. Penguatan regulasi, kepastian hukum dan mekanisme pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Pengendalian penduduk (kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan pengelolaan database kependudukan)
7. Penguatan perencanaan dan pengendalian jumlah serta persebaran penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah

Program Tujuan 5. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah : (1) Program Perlindungan Perempuan (2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program lembaga non pemerintah untuk mendukung tujuan 5 adalah :

- 
- 
1. LPA NTB : Program: BERANI II (Better Reproductive Health and Rights For All in Indonesia) , Fokus pada isu Pencegahan Perkawinan anak.
 2. Lakpesdam NU NTB (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama) : Program INKLUSI Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak
 3. LRC : Program: Pembentukan Komunitas Perempuan (Kelompok Konstituen) dalam mendorong keterasaan Gender dan penghapusan Kekerasan
 4. LBH APIK NTB : Pemberdayaan Masyarakat dengan menyentuh semua isu, Pemberdayaan dan BinteK untuk perempuan Korban Kekerasan
 5. LPSDM : PROGRAM: INKLUSI dan WAC :
 6. Santiri Foundation, :
 - a. Pemetaan kawasan
 - b. Kelompok Bahari & Ekowisata

Target Indikator Tujuan 5. Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel 12. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 5 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 5 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Sosial.

Tabel 3.5 Target Pencapaian Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Susenas Kor (BPS)	Persen	14,96	14,73	14,51	14,28	14,06	13,83	13,60	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat											
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah.	KPU	Persen	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Sakernas (BPS)	Persen	29,63	PM	PM	PM	PM	PM	PM	Badan Kepegawaian Daerah
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut.											
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan	SDKI	persen	59,78	59,80	59,90	58,00	58,10	58,10	58,20	Dinas Kesehatan
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 5 tahun	Susenas Kor (BPS)	persen	63,38	65,63	67,20	68,77	70,35	71,92	73,49	Dinas Komunikasi dan informatika
	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 0 tahun	Susenas Kor (BPS)	persen	58,04	60,37	62,16	63,95	65,74	67,53	69,32	Dinas Komunikasi dan informatika

3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 4 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel. 3.6. Sedangkan target-target tersebut terdiri dari (1) Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, (2) Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan, (3) Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global, (4) Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 6. Tujuan 6 dari TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, akan dicapai melalui Misi enam RPJMD NTB 2025-2026 yaitu Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan. Ada dua tujuan yang akan diwujudkan melalui misi keenam yaitu : (1) Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan; (2) Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Arah kebijakan dalam RPJMD (2025-2029) yaitu Aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, baik daratan maupun kawasan pesisir dan kepulauan, sangat menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, dan informasi. di laksanakan melalui :

1. Peningkatan kapasitas dan jangkauan sistem perpipaan air bersih
2. Rehabilitasi dan modernisasi jaringan perpipaan eksisting
3. Pembangunan sistem perpipaan di wilayah prioritas
4. Pemanfaatan teknologi dan sistem digitalisasi dalam pengelolaan air bersih
5. Peningkatan kapasitas dan tata kelola BUMD air minum
6. Integrasi pengelolaan air bersih dengan konservasi sumber air
7. Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak atau tidak berfungsi optimal
8. Penguatan kelembagaan dan peran Petugas Pengelola Irigasi serta P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
9. Integrasi pengelolaan irigasi dengan konservasi dan perlindungan sumber air
10. Fasilitasi pembangunan rumah layak dan terjangkau bagi MBR dan kelompok rentan
11. Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi

- 
- 
12. Revitalisasi dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan
 13. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman untuk mencegah kekumuhan
 14. Integrasi penyediaan hunian dengan pengembangan wilayah dan layanan dasar

Program Tujuan 6. Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah: (1) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (2) Program Pengembangan Permukiman (3) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah (4) Program Pengembangan Permukiman

Program/kegiatan non pemerintah yang mendukung tujuan 6 antara lain :

1. Mitra Samya : Kegiatan STBM Inklusi, memperkuat sanitasi masyarakat yang layak menuju aman
2. Plan : Program Water For Women Climate Resilience Inclusive Water and Sanitation Higiene dengan kegiatan Memperkuat sistem di pemerintahan dan masyarakat mewujudkan sanitasi inklusif, Meningkatnya akses sarana air bersih dan sanitasi yang inklusif, Terbentuknya forum PSDAT, Program Jelajah Timur (Aksi solidaritas memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan
3. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB : Program Kawasan Sehat dengan kegiatan Pemicuan Jamban Sehat (Pemberian Stimulasi Jamban Sehat) Edukasi Pemilahan Sampah Indisiasi Kebun Sehat Keluarga, Program Tematik Sanitasi dan (Pemicuan Jamban) dengan kegiatan Pemicuan Jamban Sehat (Pemberian Stimulasi)
4. Santiri Foundation : Program Infrastruktur Air Desa delta Apl

Target Indikator Tujuan 6. Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel 3.6. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 6 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 6 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tabel 3.6 Target Pencapaian Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Aman)	BPS (Susenas)	Persen	96,13	96,20	96.50	97.10	97.60	97.95	98.50	Dinas Kesehatan
Target 6.2. Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.											
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun	BPS	persen	77,04	79.04	81.04	83.04	85.04	87.04	92.00	Dinas Kesehatan
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global											
6.3.2.(a)	Indeks Kualitas Air (IKA)	Kemantieran Lingkungan Hidup	Indeks	70	74.36	74.56	74.76	74.96	75.16	75.36	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.											
6.6.1.(a)	Indeks Kualitas Lahan	Kemantieran Lingkungan Hidup	Indeks	66,49	77.63	77.7	77.77	77.84	77.91	77.97	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Energi merupakan kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu strategi penyediaan serta distribusinya menjadi hal yang penting. Kebutuhan energi akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 1 target yang diukur melalui 3 indikator. Target tersebut terdiri dari (1) Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 7. Untuk meningkatkan ketersediaan energi, strategi dan arah kebijakan yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 melalui Misi 5 : Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan. Dengan arah kebijakan :

1. Menyusun dan memperkuat kebijakan energi daerah yang mendorong bauran energi terbarukan.
2. Mendorong investasi swasta dan kemitraan publik-swasta (PPP) dalam proyek energi terbarukan
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal (matahari, angin, biomassa, air, panas bumi) untuk pembangkit energi
4. Mendorong konversi penggunaan energi fosil ke energi bersih, khususnya di sektor transportasi dan industry
5. Memperluas penyediaan energi listrik untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN (off-grid solutions)
6. Mengembangkan pusat-pusat inovasi energi dan pendidikan energi terbarukan di daerah
7. Meningkatkan kampanye kesadaran publik terhadap konservasi energi dan transisi energi hijau

Program Tujuan 7. Program yang mendukung pencapaian Energi bersih dan terjangkau Adalah :

(1) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan (2) Program Pengelolaan Energi Terbarukan

Program Non Pemerintah :

1. Gema Alam :

Kegiatan Women and Vulnerable Group Benefited and Lead on Transformative and Just Energy Transition in Indonesia (WE for JET)

- a. Kajian pemetaan partisipatif berbasis potensi energi terbarukan lokal desa
- b. Kajian Rapid Care Analisis dalam transisi energi
- c. Pemetaan energi terbarukan lokal di Desa Pandan Indah dan Desa Lantan

- 
- 
- d. Survei dengan tim Ahli untuk pembangunan ET di Desa
 - e. Pendampingan (meningkatkan pemahaman kepada perempuan sekolah setara tentang transisi energi, kebutuhan perempuan dll
 - f. Literasi energi terbarukan

Kegiatan: Pendampingan dan pelatihan

- a. Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Transisi Energi dan Perubahan Iklim di NTT, NTB, dan Aceh
2. Santiri Foundation, Pemda : Program Kemandirian Energi

Target Indikator Tujuan 7. Target pencapaian indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel 3.7. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 7 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 7 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.

Tabel 3.7 Target Pencapaian Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energy yang terjangkau											
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	Kementrian ESDM	Persen	99,99	100	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya mineral
7.1. 1.(a)	Konsumsi Listrik per kapita	Kementrian ESDM	Kwh/kapita	709	751	779	808	840	872	876	Dinas Energi dan Sumber Daya mineral
7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang menggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga	Badan Pusat Statistik (Susenas).	persen	92,68	92,80	92,90	93,00	93,10	93,20	93,30	Dinas Energi dan Sumber Daya mineral

3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Selain sektor tambang, sektor non tambang memiliki potensi besar meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sektor pariwisata. NTB sebagai salah satu provinsi yang terpilih mengembangkan kawasan ekonomi khusus, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika telah mengupayakan sektor pariwisata berkontribusi lebih besar lagi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata perlu diberdayakan karena diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja. Namun selain jumlah kesempatan kerja yang meningkat, perlu diperhatikan juga kualitasnya yang diindikasikan dengan tingkat produktivitas, kondisi kerja, waktu kerja, upah serta perlindungan sosial bagi pekerja. Salah satu upaya dalam peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 7 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Tujuan 8 terdiri dari 7 Target dan 11 Indikator meliputi (1) Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. (2) Mencapai Tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya (3) Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan (4) Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya (5) Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (6) Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya, (7) Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk local. Upaya-upaya dalam pencapaian Tujuan 8 melalui strategi, dan arah kebijakan

Kebijakan Tujuan 8 yang diarahkan untuk mencapai target-target Tujuan 8 yang ditetapkan dalam RPJMD (2025-2029) termaktum dalam Misi 2 yaitu Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan. Adapun strategi dan arah kebijakannya antara lain : (1) Pengembangan sektor Industri Kecil dan



Menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah melalui akses pembiayaan, pelatihan manajemen, dan perluasan pasar, serta mendukung inovasi produk untuk meningkatkan daya saing; (2) Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM dan Wirausaha Baru (3) Penguatan Kemitraan antara UMKM dan Pelaku Usaha Besar/Swasta (4) Pengembangan koperasi yang dikelola secara profesional untuk kemandirian ekonomi (5) Digitalisasi dan Inovasi Pemantapan Hilirisasi Produk Tambang dalam Kawasan Industri (6) Pengawasan dan pengendalian pertambangan (7) Penguatan Infrastruktur dan Sarana Perdagangan yang Terintegrasi (8) Peningkatan Promosi dan Branding Produk Unggulan Daerah (9) Penguatan Sistem Informasi dan Data Perdagangan Daerah (10) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui revitalisasi pelatihan vokasi yang bersifat inklusif (11) Memperluas kesempatan kerja terutama lapangan kerja formal bagi seluruh pencari kerja termasuk penyandang disabilitas (12) Meningkatkan perlindungan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam dan luar negeri (13) Menguatkan dan mengembangkan sistem informasi pasar kerja untuk perencanaan tenaga kerja lebih inklusif (14) Penataan dan Pengembangan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan serta Penguatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Prioritas (15) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pariwisata serta Peningkatan Konektivitas Antar Destinasi Wisata (16) Pengembangan Quality Tourism dengan Penguatan Kelembagaan Pariwisata Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal/SDM Pariwisata dalam Pengelolaan Destinasi (17) Pengembangan Event dan Aktivitas Wisata Unggulan Daerah (18) Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pelaku Ekonomi Pariwisata (19) Promosi dan Branding (halal tourism, Lombok-Sumbawa Infinity Experience) menuju Pariwisata NTB Mendunia (20) Pengembangan Sentra Ekonomi Kreatif Daerah Berbasis Budaya dan Komoditas Lokal

Program Tujuan 8. Kegiatan OPD yang sejalan untuk mendukung pencapaian target-target pada Tujuan 8 TPB/SDGs adalah sebagai berikut : (1) Program Penyuluhan Pertanian (2) Program Hubungan Industrial (3) Program Penempatan Tenaga Kerja (4) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja (5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan (6) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (7) Program Pemasaran Pariwisata (8) Program Peningkatan Daya Tarik destinasi pariwisata

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 8TPB/SDGs. Adapun lembaga non pemerintah yang mendukung tujuan 8 antara lain :

1. Lakpesdam NU NTB: Program P2MI-BK (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas)
2. ECLT-PAACLA-JARAK: Proyek Percontohan Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak berbasis Desa (Pertanian Tembakau dan Kakao) Di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur
3. PT.AOI : Pencegahan Pekerja anak di Sektor Pertanian Tembakau di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah

- 
- 
4. SANTAI-NTB : Proyek Percontohan Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak berbasis Desa (Pertanian Tembakau dan Kakao) Di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, Pencegahan Pekerja anak di Sektor Pertanian Tembakau di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.
 5. Santiri, Dinas Koperasi :
 - a. Inkubasi UMKM & Ekowisata
 - b. Festival Rinjani & Ekonomi Kreatif

Target Indikator Tujuan 8. Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel 3.8. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 8 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi non pemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 8 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.

Tabel 3.8 Target Pencapaian Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan,khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang											
8.1.1.[a]	PDRB per kapita	BPS	Rupiah (ribu)	32,28	35,80	40,33	44,85	49,38	53,90	58,22	Semua Perangkat Daerah
8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	Persen	5.30	6.00	6.90	7.70	8.50	9.30	10.10	Semua Perangkat Daerah
	a. Dengan tambang	BPS	persen)	5.30	6.00	6.90	7.70	8.50	9.30	10.10	Semua Perangkat Daerah
	b. Non Tambang	BPS	persen)	3.87	6.00-6.50	6.02-6.56	6.03-6.63	6.05-6.69	6.07-6.75	6.09-7.00	Semua Perangkat Daerah
Target 8.2 Mencapai Tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya											
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun	BPS	persen)	-1.91	4,32	4,55	4,78	5,01	5,24	5,47	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	persen	70,51	75,63	76,39	77,08	77,72	78,32	78,88	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	Rupiah	13.267	14.544	15.234	15.963	16.732	17.544	18.402	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	persen	2,73	2,19-2,79	2,10-2,74	2,00-2,69	1,91-2,67	1,81-2,59	1,72-2,54	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
8.5.2.[a]	Persentase setengah pengangguran	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	persen	15,23	15.23	15.10	14.00	13,81	13,65	13,49	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	persen	15,44	15.44	15.30	15.20	15.10	15.00	14.80	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya											

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan UU Ketenagakerjaan	BPS: Survei Angkatan Kerja Nasional	persen	4.67	4,66	4,60	4,50	4,40	4,30	4,20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal											
8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.	BPS	Orang	349.447	382.81	418.80	458.16	501.23	548.35	600.00	Dinas Pariwisata
8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	BPS	persen	1.332.223	1.398.834,15	1.468.776	1.542.215	1.619.325	1.700.292	1.785.306	Dinas Pariwisata

NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030, ditetapkan 2 target dan 7 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel 3.9. Adapun target-target dari tujuan 9 meliputi (1) Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, (2) Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 9 yang diarahkan untuk mencapai target-target Tujuan 9 yang ditetapkan dalam RPJMD (2025-2029) pada Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan meliputi strategi/arah kebijakan: (1) Peningkatan kemantapan jalan; (2) Integrasi pembangunan jalan dengan pengembangan wilayah dan tata ruang; (3) Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan jalan strategis antar kabupaten/kota; (4) Peningkatan interkonektivitas sistem transportasi darat-laut-udara secara terpadu; (5) Pengembangan sistem logistik daerah yang mendukung kelancaran arus barang dan jasa; (6) Pemanfaatan teknologi transportasi dan pengelolaan infrastruktur berbasis data; (7) Penguatan Rantai Nilai dan Industri Pengolahan Komoditas Unggulan; (8) Peningkatan Akses Teknologi Produksi dan Inovasi Produk Olahan; (9) Fasilitasi Sertifikasi Mutu dan Standar Produk Olahan; (10) Penguatan Promosi dan Akses Pasar Produk Olahan Agromaritim; (11) Perbaikan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi.

Program Tujuan 9. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian TPB/SDGs Tujuan 9, antara lain adalah: (1) Program Penyelenggaraan Jalan (2) PROGRAM Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) (3) Program Pengelolaan Pelayaran (4) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri (5) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

Target Indikator Tujuan 9. Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel 3.9. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 9 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 9 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi

Tabel 3.9 Target Pencapaian Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Kementrian Pekerjaan Umum	persen	75.54	76,04	76,71	77,42	78,18	78,96	79,76	Dinas Pekerjaan Umum
9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi										
	Jumlah Penumpang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Bongkar/kapal muat)	Kementrian Perhubungan	orang	932.744	971.796	1.014.753	1.062.006	1.113.984	1.171.160	1.234.054	Dinas Perhubungan
	Jumlah Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Muat)	Kementrian Perhubungan	Ton	1.177.152.000	1.177.504.222	1.177.891.656	1.178.317.834	1.178.786.629	1.179.302.304	1.179.869.546	Dinas Perhubungan
9.1.2.[a]	Jumlah bandara.	Kementrian Perhubungan	Bandara	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Perhubungan
9.1.2.[b]	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Kementrian Perhubungan	Unit	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
9.2.1*	Rasio PDRB industri pengolahan dan nilai tambah industri pengolahan per kapita	BPS	Persen	3.87	4.21	4.91	5.61	6.30	7.00	7.30	Dinas Perindustrian
9.2.1.[a]	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur	BPS	Persen	4,19	4,21	4,54	4,60	4,70	4,80	4,85	Dinas Perindustrian
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sector industri manufaktur	BPS	Persen	10.17	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70	Dinas Perindustrian

3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 4 target dan 7 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel 3.10. Target-target dari Tujuan 10 meliputi : (1) Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 % dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, (2) Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya, (3) Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. (4) Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar

Kebijakan Tujuan 10. Kebijakan peningkatan pemerataan antarkelompok pendapatan juga diarahkan dengan menciptakan pertumbuhan inklusif. Arah kebijakan tersebut didukung dengan strategi seperti :

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan kualitas layanan rehabilitasi sosial);
3. Penguatan koordinasi penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penanggulangan kemiskinan;
4. Penanggulangan Kemiskinan melalui pendekatan graduasi dan penguatan pendampingan;
5. Penguatan Program Jaminan Sosial bagi Kelompok Rentan dan Tidak Mampu;
6. Pengembangan program Perlindungan Sosial Responsif terhadap Krisis dan Bencana;
7. Pengembangan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah melalui akses pembiayaan, pelatihan manajemen, dan perluasan pasar, serta mendukung inovasi produk untuk meningkatkan daya saing;
8. Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM dan Wirausaha Baru
9. Penguatan Kemitraan antara UMKM dan Pelaku Usaha Besar/Swasta.
10. Pengembangan koperasi yang dikelola secara profesional untuk kemandirian ekonomi
11. Mengembangkan pasar dan promosi untuk produk pangan lokal agar lebih dikenal dan diminati, baik di dalam maupun luar daerah, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus perekonomian local.
12. Penguatan kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung kearifan lokal dan ekologi dalam ketahanan pangan.
13. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa
14. Perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik
15. Penguatan perekonomian desa melalui pengembangan BUMDesa sebagai katalisator pengembangan ekonomi produktif dan pemanfaatan potensi desa

Program Tujuan 10. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mendukung tujuan 10, antara lain: (1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, (2)



Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan, (5) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, (6) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, (7) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, (8) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, (9) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, (10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, (11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Termasuk: Budidaya Lobster, Krpl/P2I), (12) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil, (13) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat), (14) Program Pengelolaan Persampahan, (15) Program Pengelolaan Hutan, (16) Program Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan, (17) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum, (18) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, (19) Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, (20) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, (21) Program Penempatan Tenaga Kerja, (22) Program Hubungan Industrial, (23) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, (24) Program Pengelolaan Pendidikan, (25) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk), (26) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, (27) Program Pengembangan Umkm, (28) Program Kawasan Permukiman, (29) Program Pengembangan Perumahan, (30) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu), Administrasi Pemerintahan Desa, (31) Program Rehabilitasi Sosial

Program Non Pemerintah

1. LIDI Foundation : Program DIGNITY (Disability Inclusive and Gender Equality Program)
2. BasaNTB : Program Partisipasi pemuda dalam kebijakan publik
3. Santiri, DGMI: Program Pemetaan Adat & Pemuda
4. Lakpesdam NU NTB dan Lakpesdam NU Lombok Timur : Program P2MI-BK (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas)

Target Indikator Tujuan 10. Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel 3.10. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 10 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 10 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.

Tabel 3.10 Target Pencapaian Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 10.1 Pada Tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40 % dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1.(a)	Koefisien Gini	BPS melalui Susenas	Indeks	0,364	0,369-0,373	0,358-0,359	0,347-0,349	0,335-0,338	0,324-0,328	0,313-0,317	Semua OPD
10.1.1.(b)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS melalui Susenas	persen	11,91	11,91	11,68-12,18	10,79-11,41	9,9 - 10,65	9,01 - 9,88	8,12 - 9,12	Semua OPD
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	BPS	Desa	2	2	2	1	1	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	Kementrian Desa	Desa	498	420	439	459	482	500	516	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kependudukan dan Catatan Sipil
Target 10.2 Pada tahun 2030,memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial,ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia,jenis kelamin, disabilitas,ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	BPS	persen	13,79	13,61	12,77	11,92	11,08	10,24	9,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kependudukan dan Catatan Sipil
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif,dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
10.3.1.(a)	Indeks Aspek Kebebasan	BPS	Indeks	64.49	74,99	75,15	75,30	75,46	75,62	75,78	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar											
10.4.1.(b)	Persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	persen	37.16	28,65	31,96	35.27	38,57	45,19	48,50	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi

3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 6 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel 3.11. Target-target tersebut antara lain : (1) Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh., (2) Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota, (3) Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.

Kebijakan Tujuan 11. Strategi/ arah kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 11 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2025-2029

Pada Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan adalah sebagai berikut : (1) Fasilitasi pembangunan rumah layak dan terjangkau bagi MBR dan kelompok rentan; (2) Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah provinsi; (3) Revitalisasi dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dan pedesaan; (4) Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum pada kawasan permukiman untuk mencegah kekumuhan;

Pada Misi 5 : Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan (1) Meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan sampah (TPA, TPS3R, Bank Sampah) (2) Mendorong prinsip ekonomi sirkular dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (3) Meningkatkan pengawasan terhadap sumber pencemar udara, air, dan tanah (4) Peningkatan kualitas pemantauan dan informasi lingkungan hidup (5) Mendorong gerakan lingkungan berbasis komunitas seperti kampung hijau, sekolah adiwiyata, dan desa Lestari (6) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada Misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan arah kebijakan : (1) Menjaga stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban umum

Program Tujuan 11. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain: (1) Program Kawasan Permukiman (2) Program Pengembangan Perumahan (3) Program Pengelolaan Persampahan (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)



Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB/SDGs, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, antara lain :

Program Non pemerintah :

1. LRC : Program: Peningkatan Kaulitas Layanan Berbasis Komunitas dalam Penanganan dan Pendampingan Kasus Keekrasa . Peningkatan Kapasitas pendampinagndalam penanganan dan pendampinagn kasus kekerasan di desa
2. Santiri :
 - a. Program : Rumah Ramah Gempa (Bale jajar)
 - b. Masterplan Kampung Jamblanom
 - c. Eco-Climate Village

Target Indikator Tujuan 11. Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel 3.11. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 11 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 11 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tabel 3.11 Target Pencapaian Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 11.1 Pada tahun 2030,menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau,dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.											
11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS melalui Susenas	persen	67,74	71,68-71,7	71,96-72,08	72,24-72,45	72,51-72,83	73,07-73,2	73,35-73,58	Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orangorang dalam situasi rentan.											
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulan gan Bencana nasional	Orang	2	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Kementrian Lingkungan Hidup	persen	NA	45,16	45,05	44,94	44,85	44,76	44,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Kementrian Lingkungan Hidup	persen	74.15	75.54	81.56	87.58	93.59	99.61	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	Kementrian Lingkungan Hidup	Indeks	96.24	75.62	75.92	76.22	76.52	76.82	77.12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak,manula dan penyandang difabilitas											
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Badan Pusat Statistik	persen	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	Kepolisian

3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 2 indikator. Uraian indikator dapat dilihat pada Tabel. 3.12. Adapun target-target yang mendukung pencapaian tujuan 12 antara lain : (1) Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, (2) Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 12. Kebijakan dalam rangka mendukung Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab telah diinisiasi oleh pemerintah dengan kebijakan terkait Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan. Kebijakan yang kaitannya dengan pencapaian tujuan 12 yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029 antara lain :

Pada Misi 5 : Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan (1) Meningkatkan kapasitas fasilitas pengolahan sampah (TPA, TPS3R, Bank Sampah); (2) Peningkatan kualitas pemantauan dan informasi lingkungan hidup; (3) Mendorong gerakan lingkungan berbasis komunitas seperti kampung hijau, sekolah adiwiyata, dan desa lestari; (4) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup; (5) Menyusun dan memperkuat kebijakan energi daerah yang mendorong bauran energi terbarukan; (6) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal (matahari, angin, biomassa, air, panas bumi) untuk pembangkit energi

Program Tujuan 12. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain: (1) Program Pengelolaan Persampahan (Termasuk: NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah) (2) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan .

Program Non pemerintah

1. Santiri Foundation, SAB, Koptek: Program Wise Smart Agriculture

Target Indikator Tujuan 12. Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel 3.12. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 12 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 12 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tabel 3. 12 Target Pencapaian Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali											
12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah.	Kementerian Lingkungan Hidup	persen	0.29	0.45	0.60	0.76	0.92	1.08	1.24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah sampah dan residu yang terproses akhir di TPA/TPST Regional	Kementerian Lingkungan Hidup	Ton	115.468	116.228	116.988	117.748	118.508	119.268	120.028	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam											
12.8.1.[a]	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Kementerian Lingkungan Hidup	Lembaga	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator dapat dilihat pada Tabel 3.13. Target (1). Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara (2) Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional (3) Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2025-2029 Pada Misi 5 : Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan. Adapun strategi/arah kebijakannya antara lain : (1) Penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana; (2) Meningkatkan sistem peringatan dini (early warning system) dan peningkatan kesiapsiagaan serta respon tanggap darurat bencana (3) Pemberdayaan masyarakat dalam membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana; (4) pengelolaan data dan sistem informasi dalam penanggulangan bencana (5) pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana; (6) perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif dalam penanggulangan bencana; (7) penguatan pembangunan berbasis pengurangan resiko bencana baik mitigasi struktural maupun non structural; (8) Penguatan kelembagaan dan pembiayaan pengelolaan lingkungan hidup; (9) Mengembangkan program konservasi berbasis masyarakat, seperti hutan desa, ekowisata, dan kelompok pengawas lingkungan.

Program Tujuan 13. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain : (1) Program Penanggulangan Bencana; (2) Program 2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3); (3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Program 3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Program/kegiatan non pemerintah yang mendukung tujuan 13 salah satunya dilaksanakan oleh :

1. YRII :
 - a. Program FOMA-PRO Fostering Multistakeholder Alliance for Pro-Poor and Gender Sensitive Low Carbon Development and Climate Resilience dengan kegiatan Memberdayakan ekonomi masyarakat, mengurangi jumlah sampah yang dibuang,



menciptakan produk bernilai tambah, meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah dan perilaku ramah lingkungan

- b. Program BUDLOC (Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience dengan kegiatan Praktik Pelatihan praktis POH, Bantuan bibit untuk komunitas wanatani, Pembuatan demplot agroforestri, Pendampingan penyusunan dokumen PRKBI
 - c. Program Scaling-up graduation and resilience in asia dengan Kegiatan; Pelatihan dan kajian risiko bencana iklim, Penyusunan dokumen risiko iklim, Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim, Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim, Pembentukan dan pelatihan tim siaga bencana komunitas dan daerah.
2. LPSDM : Program: Kepemimpinan Sekolah Perempuan dalam Menghadapi Banjir di 3 Desa Kabupaten Lombok Timur, Program: Memperkuat Perekonomian dan Ketahanan Sistem Pertanian melalui Inklusivitas di Nusa Tenggara, Indonesia, Program: Strengthening Economy and Resilience of Agriculture System through Inclusive (SERASI)/Memperkuat Perekonomian dan Ketahanan Sistem Pertanian melalui Inklusivitas Di Nusa Tenggara, Indonesia
 3. PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat): Program: Peningkatan Ketangguhan melalui Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana di Nusa Tenggara, Program: Strengthening Economy and Resilience of Agriculture System through Inclusive (SERASI)/Memperkuat Perekonomian dan Ketahanan Sistem Pertanian melalui Inklusivitas Di Nusa Tenggara, Indonesia
 4. Gagas Foundation : Program: Penguatan Pendidik Sebaya untuk isu Perubahan Iklim
 5. KONSEPSI : Program: Improvement Community Anticipatory Action (I CAN ACT) Phase II, Program: Inclusive Tackling toward Ecosystem-based Resilience in Alerted Climate Threats (INTER-act), Program: Unlocking Resilience-Program Kelulusan Kemiskinan dan Ketangguhan Masyarakat (P3KM)
 6. Santiri Foundatio n, SAB, Koptek: Program I-CATCH & Delta Api
 7. LRC :
 - a. Program: INKLUSI
 - b. Program : BISA

Target Indikator Tujuan 13. Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel 3.13. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 13 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 13 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tabel 3.13 Target Pencapaian Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara											
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana.	Badan Nasional penanggula ngan Bencana (BNPB	persen	80	90	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan,strategi dan perencanaan nasional											
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton CO ₂ e	446.151,00							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah emisi GRK sektor kehutanan dan lahan (skenario baseline as usual/ tanpa penerapan kebijakan ekonomi hijau)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton CO ₂ e	NA	3.831.436,00	3.796.410,00	3.726.909,00	3.726.909,00	3.692.452,00	3.658.199,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah emisi GRK sektor kehutanan dan lahan (dengan scenario penerapan kebijakan ekonomi hijau)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton CO ₂ e	NA	1.905.230,13	1.628.229,33	1.187.013,97	790.584,40	874.168,02	478.524,41	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah emisi GRK sektor sampah/limbah (skenario baseline as usual/tanpa penerapan kebijakan ekonomi hijau)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton CO ₂ e	NA	754.588,90	767.752,50	780.792,40	793.787,80	806.768,60	819.772,80	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah emisi GRK sektor sampah/limbah (skenario penerapan kebijakan ekonomi hijau)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton CO ₂ e	NA	687.927,26	666.026,38	631.967,19	554.390,25	507.787,56	469.263,19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persen	4.08							Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor sampah/limbah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persen	NA	8,83	13,25	19,06	30,16	37,06	42,76	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persen	NA	50,27	57,11	68,44	78,79	76,33	86,92	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13.2.2.(b)	Prosentase Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	persen	NA	15.31	21.96	28.61	35.26	41.91	48.56	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lembaga	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 2 indikator. Target-target tersebut terdiri dari (1) Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia; (2) Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization. Upaya-Upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 14. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 14 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2025-2029 Pada Misi 5 : Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan antara lain : (1) Memperluas dan memperkuat pengelolaan kawasan konservasi darat dan laut berbasis zonasi dan rencana pengelolaan.

Program Tujuan 14. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs Ekosistem Lautan , program yang akan dilaksanakan OPD antara lain : (1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (2) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan .

Program Non Pemerintah

1. Santiri, Bahari Lestar : Program Transplantasi Terumbu Karang

Target Indikator Tujuan 14. Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel 3.14. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 14 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 14 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tabel 3.14 Target Pencapaian Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 14.5 : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.											
14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	Kementrian Kelautan dan Perikanan	Hektar	182.968,40	249.693	249.693	328.590	328.590	328.590	328.590	Dinas Kelautan dan Perikanan
Target 14.6 : Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yag berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 2 indikator. Target-target tersebut terdiri dari (1) Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional; (2) Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 15. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 15 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2025-2029 termaktum Misi 5 : Memperkuat Sistem Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan dengan arah kebijakan :(1) Melaksanakan pengelolaan DAS melalui rehabilitasi kawasan kritis, mangrove, dan habitat satwa terancam punah; (2) Meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan dan perburuan ilegal; (3) Mengembangkan program konservasi berbasis masyarakat, seperti hutan desa, ekowisata, dan kelompok pengawas lingkungan; (4) Melestarikan plasma nutfah lokal dan spesies endemik melalui kebun raya, taman keanekaragaman hayati, atau pusat konservasi.

Program Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain : Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain :

- (1) Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, melalui kegiatan :
 - a. Pencegahan dan Pengamanan Hutan
 - b. Penegakan Hukum Kehutanan
 - c. Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati d. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- (2) Program Pengelolaan Hutan, melalui kegiatan :
 - a. Perencanaan dan Tata Hutan
- (3) Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- (4) Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat, melalui kegiatan :
 - a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

- 
- 
- b. Pengelolaan DAS
 - c. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Kegiatan Non Pemerintah : (1) KONSEPSI : Program: Kaji Cepat Perhutanan Sosial PT. Amman, (2) LPSDM : Program: Memperkuat Perekonomian dan Ketahanan Sistem Pertanian melalui Inklusivitas di Nusa Tenggara, Indonesia. (3) Program Transplantasi Terumbu Karang: Program Penanaman Pohon & Kampung Bersih

Target Indikator Tujuan 15. Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel 3.15. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 15 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 15 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tabel 3.15 Target Pencapaian Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 15.1 : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional											
15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persen	37.85	38.00	38.15	38.31	38.46	38.46	38.61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Target 15.3 : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.											
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hektar	24.92	24.77	24.61	24.46	24.31	24.16	24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Tujuan 16 memiliki 6 target dengan 16 indikator TPB/SDGs yang ingin dicapai pada tahun 2030. Target tersebut diantaranya Adalah : (1) Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun; (2) Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; (3) Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; (4) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, (5) Menjamin pengambilan Keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; (6) Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran . Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan Tujuan 16.

Kebijakan Tujuan 16. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 16 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2025-2029

Pada Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif adalah sebagai berikut: (1) Penguatan dan pengelolaan system informasi gender dan anak, serta pengembangan data terpilah untuk perencanaan pembangunan, (2) Penguatan kelembagaan dan kapasitas sumberdaya pengelola berbasis masyarakat untuk kesetaraan gender, perlindungan anak dan ketahanan keluarga, (3) Pemberdayaan Perempuan dalam bidang ekonomi, social, politik, dan hukum terutama bagi kelompok rentan, (4) Penguatan regulasi, kepastian hukum dan mekanisme pencegahan, penanganan dan rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, (5) Pengendalian penduduk (kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan pengelolaan database kependudukan), (6) Penguatan perencanaan dan pengendalian jumlah serta persebaran penduduk sesuai daya dukung dan daya tampung wilayah.

Pada misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah. (1) Penguatan sistem merit dalam pengelolaan ASN, (2) Pencegahan dan Penanganan potensi konflik sosial, (3) Penguatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Program Tujuan 16. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain : (1) Program Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana (2) Program Pemenuhan Hak Anak (Bidang PHA) (3) Program



Perlindungan Khusus Anak (Bidang PKA) (4) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan (5) Program Pendaftaran Penduduk (6) Program Pencatatan Sipil (7) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Program Non Pemerintah : (1) LBH APIK NTB: Program Penyuluhan Hukum, (2) Program Konsultasi Hukum, (3) Sosialisasi untuk pencegahan segala Bentuk kekerasan di masyarakat, kampus dan Sekolah Sekolah, (3) Gagas Foundation : Program: Penguatan Institusi Perlindungan Anak dan Forum Partisipasi Anak Desa, Program: Penguatan kelompok anak muda untuk Hak Asasi Manusia, Program P3PD (Program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa), (4) GAGAS Foundation : Sekolah Adat & Pemetaan Wilayah, (5) PERHIMPUNAN PANCA KARSA : Pengembangan Sistem Perlindungan PMI yang Responsif Gender melalui Partisipasi Struktur Sosial di Kabupaten Lombok Utara

Target Indikator Tujuan 16. Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel 3.16. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 16 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 16 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Lingkungan.

Tabel 3.16 Target Pencapaian Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target .16.1 : Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS	persen	0.08	0.07	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	Kepolisian
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	Persen	NA	69,39	69,39	69,39	70,23	70,23	70,23	Kepolisian
Target .16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan,dan segala bentuk kekerasan dan penyiiksaan terhadap anak.											
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Badan Pusat Statistik	persen	NA	69,50	70,67	71,84	73,01	74,18	75,34	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target. 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.											
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	Kasus	7.546	50,83	52,24	53,54	54,75	55,87	56,92	Kepolisian
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi Pemerintah yang mendapat opini WTP	Badan Pemeriksa Keuangan	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Kementerian Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokras	Katagori	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Biro Organisasi
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B.	Kementerian Pendayagunaa n Aparatur Negara dan Reformasi Birokras	Indeks (katgori)	77,99 (BB)	78,77 (BB)	79,56 (BB)	80,35 (A)	81,16 (A)	81,97 (A)	82,79 (A)	Inspektorat



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Ombudsmen	Kepatuhan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Inspektorat
Target .16.7 Menjamin pengambilan Keputusan yang responsif, inklusif,partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Komisi Pemilihan Umum	Persen	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif	Badan Kepegawaian Negara (BKN)									Badan Kepegawaian Daerah
	Eselon I		persen	-	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
	Eselon II		persen	11	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Menkopolhukam, BPS, BAPPENAS	Persen	74,50	74,59	74,74	74,87	74,99	75,09	75,18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Menkopolhukam, BPS, BAPPENAS	Persen	73,19	73,55	73,33	73,14	73,98	72,83	72,70	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.7.2.(c)	Indeks Aspek Kesenjangan	Menkopolhukam, BPS, BAPPENAS	Persen	80,55	80,68	81,42	82,05	82,59	83,07	83,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Target .16.9 Pada tahun 2030,memberikan identitas yang syah bagi semua,termasuk pencatatan kelahiran											
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS Susenas	Persen	87,10	90,79	92,69	94,29	95,61	96,63	97,36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS Susenas	Persen	90,46	92,31	93,78	95,05	96,11	96,97	97,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun	BPS	Persen	81,10	80,46	83,53	86,66	89,85	93,09	96,40	Dinas Pemberdayaan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										Masyarakat dan Perdesaan kependudukan dan Catatan Sipil

NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

3.17 Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hal ini tercermin dari TPB/SDGs 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 3 target yang dijabarkan ke dalam 5 indikator. Target Tujuan 17 terdiri atas (1) Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya; (2) Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber; (3) Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 17. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tujuan 17 seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kolaborasi antara pemda, OJK, BI, perbankan, dan fintech untuk memperluas akses pembiayaan, (2) Mendorong integrasi data dan layanan akses keuangan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Program Tujuan 17. Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs, program yang akan dilaksanakan OPD antara lain : (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah (2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (3) Menyusun regulasi atau insentif daerah untuk lembaga keuangan yang berperan aktif dalam pembiayaan inklusif.

Program Non Pemerintah . (1) Santiri, CSO, Pemda: Program Jaringan Delta Api & Kongres SUKMA

Target Indikator Tujuan 17. Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel 3.17. Belum semua indikator TPB/SDGs Tujuan 17 tercantum pada tabel tersebut. Adapun program dan kegiatan baik pemerintah dan organisasi nonpemerintah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1 Tujuan 17 Matriks RAD TPB/SDGs Pilar Pembangunan Ekonomi.

Tabel 3.17 Target Pencapaian Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber data	Satuan	Baseline 2024	Target Capaian						Pelaksana/ Penanggung Jawab Program/Kegiatan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Target 17.1: Memperkuat mobilitas sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	BPS, Kemenkeu, Kemendagri	Persen	1.70	1,33	1,35	1,35	1,30	1,32	1,71	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	BPS, Kemenkeu, Kemendagri	Persen	1,20	1.04	1.03	1.10	1.12	1.20	1.23	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BPS, Kemenkeu, Kemendagri	Persen	31.34	25.91	31.83	34.69	37.55	35.7	37.22	Badan Pengelolaan Pendapatan daerah
Target 17.3: Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.											
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDRB.	BNP2TKI, BI	US\$	204.96	204.37	204.77	205.18	205.58	205.99	206.40	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan NTB Makmur Mendunia
Target 17.8 : Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi											
17.8.1*	Persentase pengguna internet	Asosiasi Penyelenggara a Jasa Internet Indonesia (APJII).	persen	68,52	71,08	74,65	77,21	80,78	83,34	86,91	Dinas Komunikasi dan informatika



BAB IV

KEBIJAKAN DAN PERKUATAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG

4.1 Partisipasi Non State Actor (NSA)

Keterlibatan non-state actors (NSA) dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs sangat penting karena mereka berperan sebagai mitra pemerintah dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Kelompok-kelompok seperti bisnis, filantropi, universitas, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dilibatkan melalui berbagai cara, seperti dalam penyusunan RAD, implementasi program, serta pengelolaan dan inovasi yang selaras dengan tujuan SDGs.

Provinsi NTB juga melibatkan Non State Actor yang saat ini tergabung dalam Mitra Pembangunan. NSA di NTB terdata sebanyak 149 lembaga dengan rincian : 8 organisasi Internasional, 33 lembaga Nasional, 59 Lembaga Lokal, 29 Organisasi bentukan Pemerintah, 20 Organisasi Dunia Usaha, 2 Pusat Studi Universitas dan untuk Filantropi belum ada data. Dari 149 lembaga tersebut tidak semuanya ikut terlibat dalam penyusunan RAD SDGs karena lembaga-lembaga ini saling berkolaborasi dalam pendanaannya.

4.1.1. Peran Non State Actor

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak, peran NSAs menjadi sangat strategis. Organisasi masyarakat sipil (OMS), lembaga filantropi, institusi akademik, dan sektor bisnis, memiliki kapasitas unik untuk merespons kebutuhan masyarakat secara langsung dan dinamis. Selanjutnya, NSAs juga berperan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas di masyarakat, sekaligus memastikan bahwa keputusan politik dan teknokratis selaras dengan kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu, NSAs turut memperkuat arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, serta responsif terhadap dinamika sosial dan tantangan lingkungan. Dengan peran aktifnya, NSAs menjadi motor penggerak transformasi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi semua.

Untuk mengoptimalkan kontribusi NSAs, diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi acuan dalam mendukung pencapaian SDGs. Kerangka ini tidak hanya menetapkan nilai-nilai dasar, tetapi juga mengidentifikasi ruang lingkup peran NSAs dalam menciptakan dampak yang terukur dan signifikan. Nilai-nilai dasar itu berfungsi sebagai pijakan utama dalam penerapan SDGs, yang di dalamnya berisi nilai-nilai dasar sebagai pegangan. Dengan demikian, kontribusi NSA menjadi lebih terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Sejalan itu, strategi dan rencana aksi juga dirancang untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka kerja itu. Strategi berfokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat peran NSAs, sedangkan rencana aksi merinci program konkret yang harus diimplementasikan guna mewujudkan strategi tersebut secara efektif di lapangan. Kombinasi antara kerangka kerja yang kokoh, strategi yang terarah, dan rencana aksi yang sistematis menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.





Kerangka kerja yang komprehensif, didukung oleh strategi dan rencana aksi yang matang, menjadi pedoman penting untuk memastikan bahwa kontribusi NSA tidak hanya terukur, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, melalui sinergi yang kuat dan komitmen bersama, SDGs dapat menjadi landasan dalam membangun masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.1.2. Kerangka, Strategi dan Rencana Aksi Organisasi Masyarakat Sipil

Kerangka Kerja

Kerangka kerja OMS yang komprehensif mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, partisipasi, sinergi, keselarasan, dan akuntabilitas. Kerangka ini melingkupi tindakan sekaligus memandu OMS dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program SDGs yang berdampak nyata.

Kesetaraan. Nilai ini menegaskan komitmen OMS untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, usia, status sosial, atau latar belakang, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan manfaat pembangunan. Nilai ini juga mendorong penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketimpangan, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan berdaya. Dengan memajukan kesetaraan, OMS berperan aktif dalam membangun fondasi sosial yang kuat demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara adil dan merata.

Partisipasi Inklusif. Partisipasi inklusif OMS memastikan pembangunan berjalan secara adil dan merata. Lebih dari sekadar representasi, hal ini menciptakan ruang dialog yang setara dan memperhitungkan suara kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan komunitas adat. OMS berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan publik, memperkuat partisipasi komunitas lokal, dan mendorong akuntabilitas sektor pemerintah dan swasta. Dengan prinsip inklusivitas, OMS memastikan tak ada individu atau kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan.

Sinergi. Sinergi melibatkan kolaborasi OMS dengan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi inovatif bagi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan menyatukan berbagai perspektif dan sumber daya, sinergi menghasilkan kebijakan yang komprehensif, program yang saling melengkapi, dan intervensi yang tepat sasaran. Lebih dari sekadar kerja sama, sinergi memperkuat pertukaran pengetahuan dan koordinasi agar hasil pembangunan maksimal. Melalui sinergi yang kuat, OMS mempercepat pencapaian SDGs dan membangun pembangunan yang inklusif serta berdaya tahan.

Keselarasan. Keselarasan OMS dalam melaksanakan SDGs bertujuan memastikan setiap inisiatif sejalan dengan agenda global dan relevan dengan kebutuhan lokal. OMS merancang program yang mendukung prinsip SDGs—seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan—dengan memperhatikan potensi domestik. Integrasi antarprogram diperkuat untuk menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Dengan keselarasan strategis, OMS mempercepat pencapaian SDGs dan mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan.



Akuntabilitas. Akuntabilitas OMS melibatkan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan dampak yang dihasilkan. OMS melaporkan kemajuan program secara transparan, melibatkan partisipasi publik, dan memastikan adanya pengawasan independen. Mekanisme umpan balik dari masyarakat juga diperkuat untuk mengakomodasi aspirasi dan kritik secara konstruktif. Dengan prinsip akuntabilitas, OMS memperkuat legitimasi dan kolaborasi, serta memastikan kontribusi nyata bagi pencapaian SDGs yang adil dan inklusif.

Strategi. Peran OMS dalam mendukung pencapaian SDGs tidak hanya terletak pada pelaksanaan program, tetapi juga pada penguatan strategi yang memastikan keberlanjutan, inklusivitas, dan efektivitas dampaknya. Dengan strategi yang terarah, OMS dapat berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Strategi Penguatan Implementasi SDGs di Tingkat Akar Rumput. Pembangunan yang efektif perlu dimulai dari tingkat komunitas dengan kebutuhan dan tantangan lokal lebih nyata dirasakan. Melalui pendekatan berbasis komunitas, OMS menghubungkan aktor-aktor kunci seperti tokoh agama dan pemimpin lokal untuk mempercepat penerapan SDGs yang sesuai dengan konteks daerah. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung, OMS berkontribusi dalam membangun sistem yang lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan masyarakat.,

Strategi Kolaborasi dengan Para Pelaku SDGs. Kemitraan lintas-sektor menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian SDGs, terutama dalam isu-isu yang membutuhkan intervensi multidimensi. Di sini OMS berperan sebagai penghubung antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memastikan sinergi kebijakan dan program yang lebih komprehensif. Dengan menjalin kemitraan strategis, OMS berkontribusi dalam berbagai agenda SDGs. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi pemberdayaan komunitas, yang dapat meningkatkan akses dan kesejahteraan kelompok rentan.

Strategi Advokasi dan Integrasi SDGs dalam Kebijakan Pemerintah. OMS memiliki peran penting dalam mendorong agar prinsip-prinsip SDGs terintegrasi ke dalam kebijakan dan sistem perencanaan nasional maupun daerah. Dengan mengedepankan advokasi berbasis data dan kebutuhan masyarakat, OMS dapat memastikan bahwa SDGs bukan hanya menjadi wacana, tetapi diimplementasikan dalam perencanaan, penganggaran dan kebijakan yang inklusif.

Strategi Keberlanjutan Program SDGs di Tingkat Lokal. OMS perlu memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Keberlanjutan program dapat dicapai melalui penguatan kapasitas komunitas serta integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan desa dan daerah. Dengan memastikan bahwa program SDGs selaras dengan kebutuhan lokal, OMS menciptakan sistem yang lebih adaptif dan relevan bagi masyarakat setempat.

Strategi Monitoring dan Evaluasi SDGs Berbasis Data. Untuk menjamin efektivitas program, OMS mengedepankan pendekatan berbasis data dalam monitoring dan evaluasi implementasi SDGs. Dengan sistem pemantauan yang inklusif dan partisipatif, OMS dapat memastikan bahwa pencapaian SDGs dapat diukur secara transparan dan akuntabel. Dokumentasi praktik-praktik baik (*good practices*) yang dilakukan oleh OMS tidak hanya memperkuat proses pembelajaran internal, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintah dan



pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan kebijakan dan strategi SDGs terus berkembang dan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi.

Rencana Aksi Nyata. Di bawah strategi penguatan implementasi SDGs di tingkat akar rumput, OMS mengembangkan rencana untuk meningkatkan keterlibatan aktif kader komunitas dan tokoh agama yang memiliki peran strategis dalam menyebarkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, penyusunan matriks SDGs yang sesuai dengan kebutuhan daerah menjadi rencana sejajar untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi memiliki relevansi dan efektivitas tinggi. Dengan bergabung sebagai anggota tim SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten, OMS dapat berkontribusi dalam proses perencanaan dan penganggaran, sehingga implementasi program sesuai dengan kondisi social, ekonomi, dan lingkungan di setiap wilayah.

Kolaborasi dengan para pelaku SDGs merupakan elemen penting dalam mempercepat pencapaian SDGs, utamanya dalam mengatasi isu-isu sosial yang mendesak. Salah satu bentuk kolaborasi ini adalah upaya pencegahan stunting, perkawinan anak, dan kekerasan seksual yang membutuhkan pendekatan multisektoral untuk menghasilkan dampak yang luas. Setara itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, juga menjadi bagian krusial dari pembangunan berkelanjutan. Melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan koperasi, akses ekonomi bagi perempuan diperluas untuk kesempatan yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan. Ini semua merujuk pada strategi kolaborasi dengan para pelaku SDGs.

Selanjutnya di bawah strategi advokasi dan integrasi SDGs dalam kebijakan pemerintah, advokasi tentang pengakuan kontribusi OMS dalam laporan resmi pemerintah menjadi hal esensial. Dengan pencatatan resmi, kerja dan kinerja OMS mendapat legitimasi yang kuat, serta menjadi acuan dalam evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan. Selain itu, disusun pula rencana untuk mendorong SDGs menjadi bagian integral dalam perencanaan-penganggaran pemerintah. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Dalam proses ini, perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) menjadi bagian integral, sehingga kebijakan yang disusun lebih adil dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, utamanya kelompok rentan.

Lebih jauh lagi, keberlanjutan program SDGs di tingkat lokal memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan di setiap lokasi. Oleh sebab itu, program yang dikembangkan patut selaras dengan isu-isu prioritas masyarakat setempat. Penguatan implementasi SDGs desa bersama pemerintah desa menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak bersifat sementara, tetapi bertahan dalam jangka panjang. Dengan keterlibatan pemerintah desa, program SDGs dapat terintegrasi dalam kebijakan dan rencana pembangunan daerah, sehingga berdampak luas dan berkelanjutan. Program-program ini dijalankan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan program SDGs di tingkat lokal.

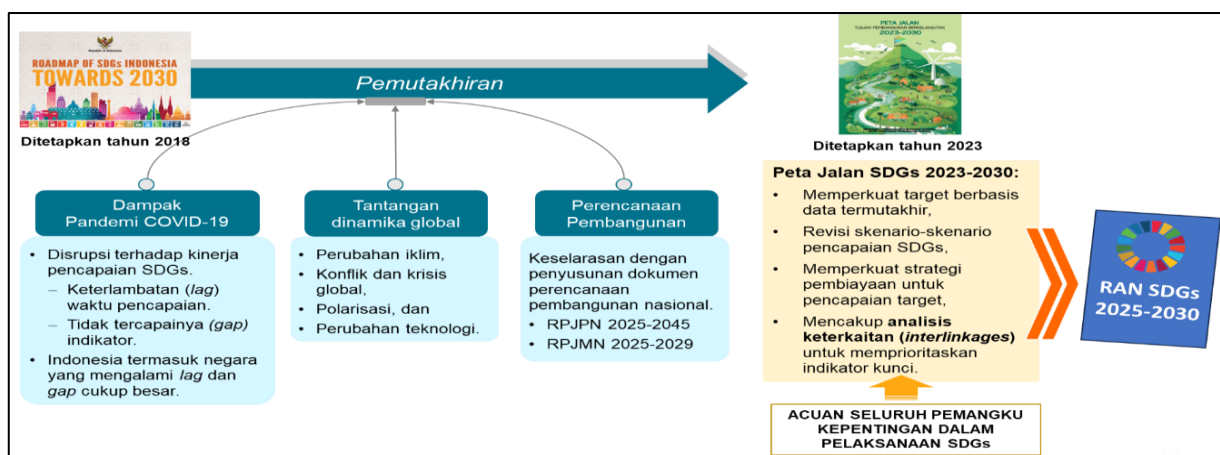
Akhirnya, di bawah strategi monitoring dan evaluasi SDGs berbasis data, OMS menempatkan monitoring dan evaluasi berbasis data sebagai pilar utama dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas implementasi SDGs. Penggunaan data yang inklusif dengan

mempertimbangkan perspektif GEDSI memungkinkan identifikasi kesenjangan serta penyesuaian strategi agar program dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, dokumentasi praktik baik yang dilakukan oleh OMS menjadi aset berharga dalam pembelajaran kolektif serta dapat diadopsi oleh pemerintah untuk memperkuat kebijakan berbasis bukti.

4.2 Interlinkages/Roadmap

RAN SDGs 2025-2030 merupakan 5 tahun terakhir pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. RAN SDGs ini juga merupakan pelaksanaan Roadmap (Peta Jalan) SDGs menuju tahun 2030. Sebelumnya Roadmap SDGs menuju tahun 2030 telah ditetapkan pada tahun 2018 sebagai panduan pencapaian target SDGs hingga tahun 2030. Namun demikian setelah adanya pandemi Covid-19 terjadi berbagai disrupsi terhadap pencapaian target SDGs, sehingga dilakukan pemutakhiran Roadmap SDGs pada tahun 2023. Sehingga pencapaian target pada RAN SDGs 2025-2030 akan mengacu pada Roadmap SDGs 2023-2030 yang merupakan pemutakhiran Roadmap SDGs menuju tahun 2030 seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Pemutakhiran Roadmap SDGs Sebagai Acuan Penyusunan RAN SDGs



Sumber : Draf RAN SDGs, 2024

Dalam penyusunan Roadmap SDGs 2023-2030 telah dilakukan analisis keterkaitan (interlinkages) indikator SDGs yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kemajuan di satu indikator dapat mempengaruhi pencapaian indikator lainnya. Keterkaitan antar goal, target, dan indikator SDGs dapat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas strategis dan tindakan yang efektif untuk mempercepat pencapaian SDGs secara menyeluruh. Analisis keterkaitan indikator SDGs membantu pemahaman implikasi kebijakan dan intervensi pada berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien (Bappenas 2023).

Hasil analisis interlinkages dari 191 indikator SDGs menunjukkan bahwa setidaknya ada 36 indikator dengan nilai centrality tertinggi yang menjadi inti jaringan (Gambar 2). Indikator-indikator ini terkait dengan kesehatan (fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional), hukum (akta kelahiran dan keamanan), air dan sanitasi layak, pendidikan (penyelesaian pendidikan, infrastruktur sekolah dan TIK), ketimpangan (desa tertinggal), energy



(listrik), pangan (stunting), hunian layak, dan lingkungan (kualitas udara, penurunan emisi). Indikator-indikator ini mencerminkan kebutuhan esensial yang menjadi dasar bagi pencapaian indikator-indikator lainnya.

Secara lebih spesifik hasil ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa indikator terkait pelayanan dasar yang memiliki nilai centrality yang tinggi, seperti akses terhadap fasilitas kesehatan (3.1.2*), kepemilikan akta kelahiran (16.9.1.(a) & 16.9.1.(b)), akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak (6.1.1*, 6.2.1*, dan 1.4.1*) dan akses tenaga kesehatan (3.1.2*). Indikator-indikator ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan indikator-indikator lainnya dan memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas.

Indikator 3.1.2* “Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (b) di fasilitas kesehatan”, sebagai contoh, memiliki nilai centrality tertinggi dari 191 indikator-dimensi yang dianalisis. Indikator ini terkait dengan 18 indikator lainnya yang memiliki nilai proximity melebihi threshold 0.7. Indikator tersebut diantaranya perempuan melahirkan yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (3.1.2*_1), akses JKN (3.8.2.(a)), stunting (2.2.1*), akses air dan sanitasi layak (1.4.1*_2, 6.1.1*, 6.2.1*_2), strategi bencana (1.5.4*), tingkat penyelesaian SD & SMP (4.1.2*_1, 4.1.2*_3), keterampilan TIK (4.4.1.(a)_1), perempuan managerial (5.5.2*_1), elektrifikasi (7.1.1*), desa tertinggal (10.1.1.(b)), korban kekerasan (11.7.2.(a) & , 16.1.3.(a)), penurunan emisi GRK (13.2.2.(a)), dan cakupan akta kelahiran (16.9.1.(a), & 16.9.1.(b)). Detail keterkaitan untuk indikator lainnya dapat dipelajari pada Gambar 3-1, dan dashboard SDGs interlinkages. Selain itu, indikator penting lainnya untuk mempercepat pencapaian SDGs adalah keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (4.4.1.(a)), kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (3.c.1*), pengentasan desa tertinggal (10.1.1.(b)), elektrifikasi (7.1.1*), pengentasan stunting (2.2.1*) dan penyelesaian pendidikan dasar dan menengah (4.1.2*).

Keberhasilan dalam mencapai indikator-indikator tersebut dapat secara positif mempengaruhi pencapaian indikator-indikator lainnya. Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kualitas indikator-indikator ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai target-target SDGs dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan kajian terhadap target dan strategi pencapaian indikator SDGs yang dipadukan dengan hasil analisis interlinkages dapat dilakukan pengklasteran kebijakan. Pengklasteran bertujuan untuk menentukan kebijakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas yang paling efektif dan efisien, serta alokasi sumber daya yang lebih baik dengan hasil yang lebih optimal. Hasilnya menunjukkan terdapat 7 klaster kebijakan prioritas antara lain: (1) Peningkatan kualitas gizi anak; (2) Peningkatan kualitas dan pemerataan SDM, sarana dan prasarana kesehatan; (3) Akselerasi vaksinasi/imunisasi; (4) Perbaikan penanganan penyakit menular terutama Malaria; (5) Peningkatan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman; (6) Kebijakan cross-cutting penurunan ketimpangan; serta (7) Akselerasi reformasi basis data kependudukan terpadu (Social registry reform). Ketujuh klaster kebijakan prioritas ini diharapkan menjadi bagian dari strategi prioritas pencapaian target pada RAN SDGs 2025-2030.

Gambar 4.2 Klaster Kebijakan Prioritas Roadmap SDGs (Bappenas 2023)



Sumber : Draf RAN SDGs , 2024

4.3 Kerangka Kerja, Strategi, dan Rencana Aksi Pendanaan SDGs Kerangka Kerja

Pendanaan adalah elemen fundamental untuk mewujudkan SDGs, dengan ketersediaan sumber daya finansial yang memadai sebagai prasyarat utama. Pendanaan ini didasarkan pada enam nilai utama yang menjadi prinsip mendasar dalam mewujudkan SDGs, yakni kepemilikan nasional, keterpaduan, kemitraan, inovasi, dan keberlanjutan.

Kepemilikan Nasional. Kepemilikan nasional menegaskan bahwa pemerintah memegang kendali dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan memantau alokasi serta penggunaan dana, sehingga pendanaan SDGs selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pendanaan tidak hanya responsif terhadap kebutuhan domestik tetapi juga terintegrasi dalam strategi pembangunan jangka panjang. Dengan demikian, kepemilikan nasional memperkuat legitimasi serta efektivitas implementasi SDGs.

Keterpaduan. Keterpaduan menggarisbawahi pentingnya integrasi SDGs ke dalam anggaran pembangunan reguler, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas penggunaan sumber daya. Integrasi ini memerlukan sinkronisasi antara perencanaan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pelaksanaan program agar target SDGs tercapai secara optimal. Keterpaduan mencegah fragmentasi kebijakan, memastikan konsistensi antar-sektor, dan mendorong kolaborasi lintas lembaga guna memaksimalkan dampak dari setiap alokasi dana.

Kemitraan. Kemitraan multipihak menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, lembaga donor, dan organisasi internasional, untuk memobilisasi sumber daya yang lebih luas. Kolaborasi ini memperkuat sinergi dan memaksimalkan kontribusi finansial maupun non-finansial demi mencapai target SDGs. Kemitraan yang solid juga membuka peluang untuk berbagi teknologi, pengetahuan, praktik terbaik yang relevan, serta membangun kepercayaan dan transparansi antar-pihak.

Inovasi. Inovasi mendorong eksplorasi mekanisme pendanaan baru guna meningkatkan kapasitas finansial yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan. Sumber daya finansial tidak hanya bergantung pada pendanaan tradisional, tetapi juga melibatkan skema inovatif. Pendekatan kreatif ini memungkinkan diversifikasi sumber pendanaan, mengurangi risiko



ketergantungan pada satu sumber tertentu. Oleh karena itu, inovasi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan finansial untuk implementasi SDGs.

Keberlanjutan. Keberlanjutan menitikberatkan pada penyediaan sumber daya yang stabil dalam jangka panjang, memastikan kesinambungan pendanaan untuk mencapai target SDGs hingga tahun 2030 dan seterusnya. Ini melibatkan perencanaan keuangan strategis yang mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi serta risiko global. Upaya ini juga memerlukan penguatan kapasitas fiskal negara untuk mendukung kebutuhan pendanaan jangka panjang. Nilai keberlanjutan menjamin bahwa pencapaian SDGs tidak terhenti karena keterbatasan dana di masa depan.

Strategi. Berdasarkan nilai-nilai yang telah dirumuskan, strategi pendanaan SDGs dirancang untuk memastikan ketersediaan, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya finansial. Strategi-strategi ini mencerminkan prinsip dasar dan operasionalisasi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.

Strategi Optimalisasi anggaran publik. Strategi ini bertujuan memastikan pemerintah memainkan peran sentral dalam mengarahkan sumber daya finansial, selaras dengan landasan kepemilikan nasional dan pilar kepemimpinan pemerintah yang terarah. Implementasinya mencakup mekanisme SDGs-budget tagging yang secara eksplisit mengidentifikasi alokasi anggaran untuk program-program SDGs, serta penganggaran berbasis kinerja yang mengaitkan alokasi anggaran dengan pencapaian target-target SDGs. Strategi ini memperkuat peran pemerintah dalam memprioritaskan SDGs melalui kebijakan fiskal yang terarah dan terukur.

Strategi Mobilisasi investasi sektor swasta. Strategi ini merefleksikan landasan kemitraan multipihak dan pilar kemitraan yang solid dan inklusif. Fokusnya adalah mendorong sektor swasta untuk aktif berkontribusi melalui pemberian insentif seperti keringanan pajak, jaminan kredit, serta fasilitasi kemitraan publik-swasta. Dengan pendekatan ini, sektor swasta dapat melihat peluang investasi yang berdampak sosial tinggi, sementara pemerintah memastikan kerangka kerja regulasi yang mendukung kolaborasi strategis.

Strategi Pengembangan instrumen keuangan inovatif. Strategi ini sejalan dengan landasan inovasi dan pilar inovasi instrumen pendanaan. Tujuannya adalah menciptakan sumber-sumber pendanaan baru melalui berbagai mekanisme yang menggabungkan dana publik dan swasta untuk membiayai proyek-proyek SDGs. Pendekatan ini tidak hanya memperluas basis pembiayaan tetapi juga menarik investor yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.

Strategi Peningkatan efektivitas bantuan luar negeri. Strategi ini mencerminkan landasan keterpaduan dan pilar integrasi anggaran yang holistik. Dalam pelaksanaannya, bantuan luar negeri diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional melalui koordinasi yang erat antara pemerintah dan lembaga donor. Penggunaan bantuan juga diawasi untuk memastikan alokasi yang tepat bagi program-program SDGs yang membutuhkan, sekaligus mendukung integrasi dana ini dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan reguler.

Penguatan peran donasi SDGs. Strategi ini sesuai dengan landasan transparansi dan akuntabilitas serta pilar transparansi melalui pelaporan yang kredibel. Upaya ini mencakup penyediaan platform yang akuntabel dan transparan untuk menyalurkan donasi dari organisasi maupun individu, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk mencapai



target SDGs. Dengan pendekatan ini, kontribusi berbagai pihak dapat dimaksimalkan melalui pelaporan yang jelas dan mekanisme pemantauan yang meyakinkan donatur.

Rencana Aksi. Berdasarkan strategi pendanaan yang telah dirumuskan, berbagai rencana aksi disusun secara komprehensif untuk memastikan ketersediaan, efisiensi, dan keberlanjutan sumber daya finansial guna mendukung pencapaian SDGs. Setiap strategi memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat mendorong keberhasilan dalam jangka panjang.

Di bawah strategi optimalisasi anggaran publik, dikembangkan SDGs-budget tagging untuk mengidentifikasi alokasi anggaran bagi program-program SDGs. Rencana aksi ini diikuti oleh penguatan kapasitas lembaga pengelola anggaran di tingkat pusat dan daerah agar mampu mengintegrasikan SDGs ke dalam rencana anggaran tahunan. Penganggaran berbasis kinerja diterapkan dengan indikator yang jelas dan terukur guna memastikan setiap alokasi anggaran berkontribusi langsung pada pencapaian target SDGs.

Merujuk pada strategi mobilisasi investasi sektor swasta, direncanakan program yang difokuskan pada pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha yang berkomitmen berinvestasi dalam proyek-proyek keberlanjutan. Insentif itu berupa keringanan pajak dan jaminan kredit dirancang untuk mengurangi risiko investasi sekaligus mendorong partisipasi aktif sektor swasta. Pemerintah juga memfasilitasi kemitraan publik-swasta melalui penciptaan kerangka regulasi yang transparan, inklusif, dan mendukung kolaborasi strategis.

Berpegang pada strategi pengembangan instrumen keuangan inovatif, pengembangan instrumen keuangan inovatif direncanakan untuk diarahkan pada penerbitan obligasi tematik seperti obligasi hijau, obligasi sosial, dan obligasi keberlanjutan untuk menarik investor berorientasi keberlanjutan. Aksi ini bertujuan menciptakan sumber pendanaan baru bagi proyek-proyek SDGs dengan memperkenalkan mekanisme blended finance yang menggabungkan dana publik dan swasta guna membiayai proyek strategis berdampak sosial tinggi. Pemerintah juga menginisiasi program edukasi bagi pemangku kepentingan di pasar modal untuk meningkatkan pemahaman mengenai instrumen keuangan pendukung SDGs dan membangun ekosistem investasi kondusif untuk mendanai pencapaian SDGs.

Berorientasi pada strategi peningkatan efektivitas bantuan luar negeri, direncanakan program penguatan koordinasi antara pemerintah dan lembaga donor agar dana bantuan digunakan secara efisien dan sesuai prioritas pembangunan nasional. Forum koordinasi reguler dibentuk dan diselenggarakan untuk memperkuat komunikasi serta memastikan bantuan luar negeri dialokasikan pada program SDGs yang tepat. Transparansi dalam penggunaan dana bantuan dijamin melalui sistem pelaporan yang akuntabel, menjaga kepercayaan donor, dan mengarahkan dana secara tepat sasaran.

Di bawah strategi penguatan peran donasi, digagas pengembangan digital platform yang transparan dan mudah diakses publik untuk memfasilitasi penyaluran donasi dari organisasi maupun individu bagi pendanaan SDGs. Platform ini dilengkapi fitur pelaporan dan pelacakan dana secara real-time sehingga donatur dapat memantau penggunaan dana yang mereka sumbangkan. Kolaborasi dengan berbagai organisasi diperkuat melalui kampanye promosi yang menekankan pentingnya kontribusi mereka dalam pencapaian tujuan pembangunan



berkelanjutan. Untuk menjamin akuntabilitas, sistem pemantauan yang kredibel diterapkan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memaksimalkan kontribusi dari berbagai pihak untuk mendanai SDGs secara optimal.

4.3.1. Penguatan Peran Pemerintah Daerah Kerangka Kerja

Sebagai garda terdepan pelaksanaan pembangunan di daerah, pemerintah daerah (pemda) memiliki pemahaman mendalam tentang konteks spesifik, kebutuhan masyarakat, dan tantangan yang dihadapi di wilayahnya. Penguatan peran pemda dalam implementasi SDGs mengikuti nilai-nilai atau prinsip-prinsip desentralisasi, koordinasi, partisipasi, pengarusutamaan SDGs, dan penguatan kapasitas.

Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemda diberdayakan melalui kewenangan otonomi daerah yang memungkinkan mereka merancang kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan kewenangan ini, pemda dapat menyesuaikan implementasi TPB berdasarkan kebutuhan spesifik wilayahnya, memastikan relevansi dan dampak program pembangunan yang lebih besar bagi masyarakat.

Prinsip koordinasi dan sinkronisasi. Kerangka kerja ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi yang terstruktur memastikan keselarasan kebijakan, mencegah tumpang tindih program, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pemda berfungsi sebagai penghubung antara berbagai tingkatan pemerintahan untuk mewujudkan visi TPB secara komprehensif.

Prinsip partisipasi masyarakat. Implementasi TPB harus melibatkan masyarakat secara aktif di semua tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemda diharapkan membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil, organisasi lokal, kelompok rentan, dan pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat, meningkatkan rasa kepemilikan bersama terhadap program TPB.

Prinsip pengarusutamaan SDGs dalam perencanaan daerah. Pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam dokumen-dokumen strategis daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Dengan menjadikan TPB sebagai dasar kebijakan dan prioritas pembangunan, pemda memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan selaras dengan target pembangunan berkelanjutan, menciptakan kerangka pembangunan yang holistik dan terukur.

Prinsip penguatan kapasitas pemda. Kemampuan teknis pemda menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi TPB. Penguatan ini memungkinkan Pemda bekerja lebih efektif dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. Keenam, prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kerangka kerja ini menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang jelas dan transparan. Pemda memastikan penggunaan sumber daya secara efektif melalui laporan yang dapat diakses publik. Transparansi ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pemda dalam mengelola program TPB.

Strategi. Berdasarkan kerangka kerja di atas, strategi-strategi berikut dirancang untuk memperkuat peran pemda dalam implementasi SDGs.



Strategi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia. Strategi ini bertumpu pada penguatan kapasitas pemerintah daerah (pemda) dan pilar kepemimpinan progresif untuk mendukung implementasi SDGs. Pelatihan, bimbingan teknis, dan lokakarya diselenggarakan guna meningkatkan kemampuan aparatur pemda dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, penganggaran responsif terhadap SDGs, serta pemantauan dan evaluasi program. Pendekatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pemda memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dengan kapasitas yang kuat, pemda diharapkan mampu menjalankan program SDGs secara optimal sesuai dengan kebutuhan lokal.

Strategi Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Antar-Tingkat Pemerintahan. Strategi ini didasarkan pada prinsip koordinasi dan sinkronisasi serta pilar kemitraan inklusif untuk memperkuat hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Forum koordinasi, pertemuan berkala, dan platform digital dikembangkan untuk memastikan keterpaduan kebijakan dan harmonisasi program terkait SDGs. Melalui komunikasi yang efektif dan kolaboratif, setiap tingkat pemerintahan memiliki pemahaman yang selaras mengenai prioritas pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, strategi ini mendorong sinergi yang kuat, meminimalisasi tumpang tindih kebijakan, dan mempercepat pencapaian target SDGs.

Strategi Pengembangan Sistem Informasi dan Data SDGs di Tingkat Daerah. Strategi ini berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi serta diperkuat oleh pilar solusi lokal inovatif. Sistem informasi yang relevan memungkinkan pemda mengakses data akurat dan terkini untuk mendukung proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi SDGs. Teknologi digital dimanfaatkan untuk memastikan pengambilan keputusan yang berbasis bukti, meningkatkan efisiensi pelaporan, dan memudahkan kolaborasi antarlembaga. Dengan sistem data yang handal, pemda mampu merespon tantangan pembangunan secara tepat sasaran dan terukur.

Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi SDGs. Strategi ini berpijak pada prinsip partisipasi masyarakat dan pilar kemitraan inklusif untuk memperkuat keterlibatan publik dalam setiap tahap implementasi SDGs. Pemda memfasilitasi dialog publik, konsultasi dengan kelompok rentan, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil guna memastikan kebijakan pembangunan merefleksikan kebutuhan dan aspirasi lokal. Partisipasi aktif masyarakat dan NSAs memperkuat rasa memiliki terhadap program SDGs, sehingga menciptakan dukungan sosial yang berkelanjutan.

Strategi Penguatan Kemitraan dengan NSAs. Strategi ini mengacu pada prinsip koordinasi dan sinkronisasi serta pilar kemitraan inklusif untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan NSAs. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan sinergi dalam mendukung inovasi, pertukaran sumber daya, dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pencapaian SDGs. Pemerintah memfasilitasi kemitraan strategis melalui platform dialog multi-pihak yang transparan dan efektif. Dengan demikian, penguatan kemitraan ini tidak hanya memperluas cakupan pendanaan, tetapi juga mempercepat adopsi solusi inovatif bagi pembangunan berkelanjutan.

Rencana Aksi. Suatu rencana aksi diperlukan untuk memastikan bahwa SDGs dijalankan berdasarkan kerangka kerja dan strategi yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk mewujudkan



strategi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selaras dengan RAN SDGs menjadi langkah pertama yang krusial. Pemda perlu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal, sambil memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur daerah mengenai pencapaian target SDGs di tingkat daerah. Proses ini juga mencakup integrasi program pelatihan yang memadai bagi aparatur untuk memastikan bahwa mereka dapat merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan SDGs secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan pilar kepemimpinan progresif dalam strategi yang telah dirancang.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari strategi fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi antar-tingkat pemerintahan, pemda mengintegrasikan SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD dan RKPD. Integrasi ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan daerah tidak hanya mencerminkan visi nasional tetapi juga memenuhi kebutuhan lokal. Pemda juga akan menetapkan indikator dan target SDGs yang sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian SDGs, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Dalam rangka mendukung strategi pengembangan sistem informasi dan data SDGs, pemda akan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk SDGs. Sistem ini akan memberikan data yang relevan dan akurat untuk membantu pemda dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian SDGs secara berkala. Dengan adanya sistem ini, pemda dapat memastikan bahwa implementasi SDGs berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dilakukan penyesuaian kebijakan secara tepat waktu. Teknologi digital yang digunakan juga memastikan bahwa pengambilan keputusan berbasis bukti dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selanjutnya, sebagai implementasi dari strategi peningkatan partisipasi masyarakat, pemda akan menyelenggarakan forum partisipasi publik secara rutin. Forum ini akan melibatkan masyarakat, kelompok rentan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam diskusi terkait implementasi SDGs di daerah mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemda memastikan bahwa kebijakan yang diambil akan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan menciptakan rasa kepemilikan bersama atas kebijakan tersebut.

Sebagai bagian dari strategi penguatan kemitraan dengan pihak NSAs, pemda mendorong terbentuknya kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam mencapai TPB melalui kolaborasi dalam program bersama, berbagi sumber daya, serta kegiatan capacity building. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini sangat penting untuk mendorong inovasi dalam menemukan solusi lokal yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus memanfaatkan berbagai keahlian yang ada untuk mempercepat pencapaian target TPB.

4.4 Pendanaan SDGs

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang berasal dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

Optimalisasi Penerimaan Daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (grant), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (means of implementation).

Sumber Pembiayaan Nonpemerintah dari Masyarakat. Kedermawanan masyarakat Nusa Tenggara Barat sangatlah tinggi, Kegiatan-kegiatan di daerah menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, mempunyai potensi yang sangat besar. Kedermawanan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus berkembang.

Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat. Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, dll). Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU

4.5 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

RAD tidak berhenti hanya sampai pada tersusunnya arah kebijakan, indikator TPB/SDGs provinsi, dan rencana program aksi /kegiatan, tetapi juga perlu menggaransi bagaimana target pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi terwujud. Untuk itu diperlukan kegiatan pemantauan dan evaluasi yang menjadi tahapan penting dari keseluruhan rangkaian kegiatan rencana aksi pelaksanaan TPB/SDGs tahun 2024-2026. Sebagai bagian integral dari siklus rencana aksi pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi, kegiatan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan perlu dilaksanakan oleh para pelaksana baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.

Landasan Peraturan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Tim Pelaksanaan TPB/SDGs yang ditetapkan dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RAD TPB/SDGs Provinsi NTB dibentuklah wahana bagi para peneliti dan akademisi untuk berkontribusi menyampaikan pemikiran konstruktif dalam usaha-usaha pencapaian TPB/SDGs yang dinamakan SDGs Center Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Gubernur NTB. Salah satu tugas dari SDGs Center adalah memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).

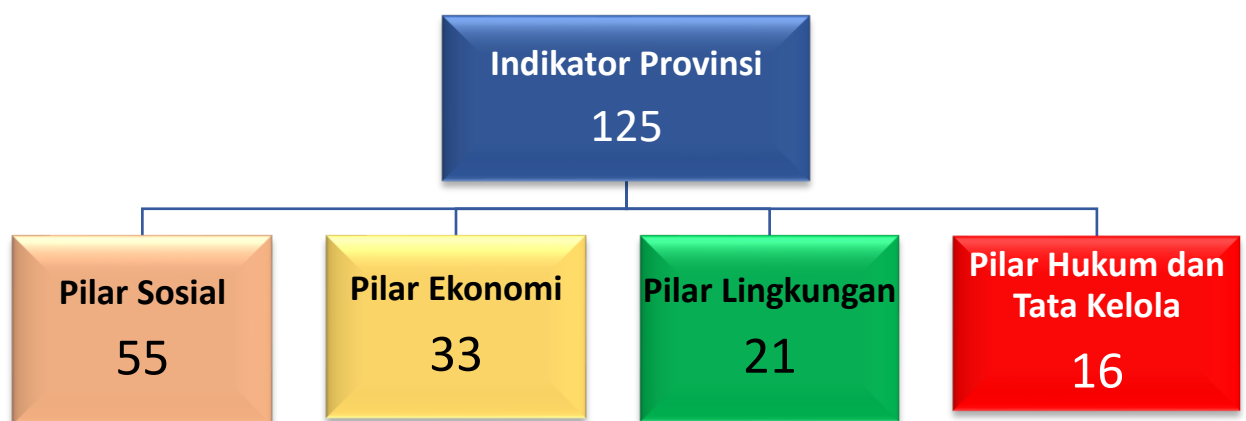
Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs dikoordinasikan oleh sekretariat SDGs Provinsi dimana tugas tim adalah : (1) Mengumpulkan data yang berkaitan dengan laporan tahunan pencapaian indikator TPB/SDGs di Provinsi NTB, (2) Menyusun laporan tahunan

pencapaian indikator TPB/SDGs di Provinsi NTB dan (3) Memberikan informasi yang detail tentang pencapaian indikator TPB/SDGs di Provinsi NTB.

Setiap tahun Gubernur NTB juga menetapkan tim sekretariat SDGs yang bertugas untuk: (1) Memberikan dukungan teknis operasional kepada Tim Penyusun RAD, Data Base dan Laporan Tahunan Kegiatan TPB/SDGs, (2) Memberikan pelayanan administrasi dalam penyusunan RAD, Data Base dan Laporan Tahunan Kegiatan TPB/SDGs, (3) Menyelenggarakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan dan tindak lanjut pelaksanaan tugas Tim Penyusun RAD, Data Base dan Laporan Tahunan TPB/SDGs, (4) Memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Tim Penyusun RAD, Database dan Laporan Tahunan SDGs dengan Lembaga Pemerintah dan Pihak Lain yang terkait, (5) Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) dan (6) Menyelenggarakan kegiatan administrasi keanggotaan Tim TPB/SDGs serta melaksanakan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Sekretariat Tim TPB/SDGs.

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi. Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan faktor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Gambar 4.3 Indikator TPB/SDGs Provinsi NTB Berdasarkan Pilar Pembangunan



Sumber : Sekretariat SDGs Provinsi NTB

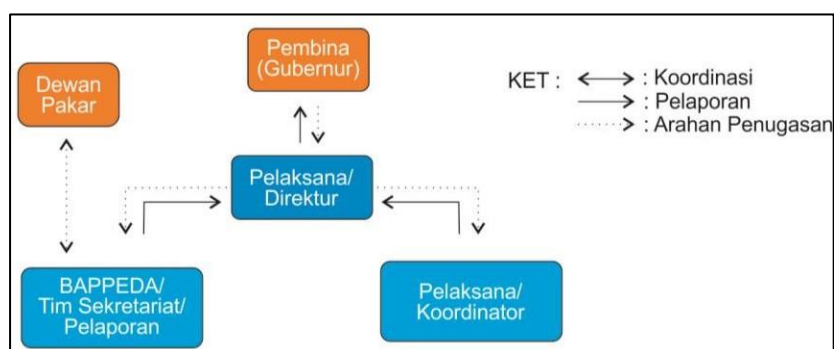
Lingkup Pemantauan dan Evaluasi. Secara nasional, TPB/SDGs mencakup 17 goals, 94 target/sasaran, dan 319 indikator, berdasarkan indikator TPB/SDGs nasional. Pemetaan di NTB menunjukkan ada 122 indikator SDGs yang mempunyai disagregasi pada wilayah administrasi provinsi dan/atau kabupaten/kota. Keseluruhan jumlah indikator tersebar ke dalam pilar

pembangunan sosial sebanyak 50, pilar pembangunan ekonomi sebesar 37, pilar pembangunan lingkungan sebanyak 23, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola sebanyak 12 indikator.

4.5.1 Mekanisme Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi

Alur pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs dilakukan dengan mengikuti arahan pembagian tugas dan fungsi yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 050.13-636 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertugas memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi NTB.

Gambar 4.4 Alur Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB



Sumber : Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, 2020

Alur pelaporan dalam pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs (Gambar 4.2) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

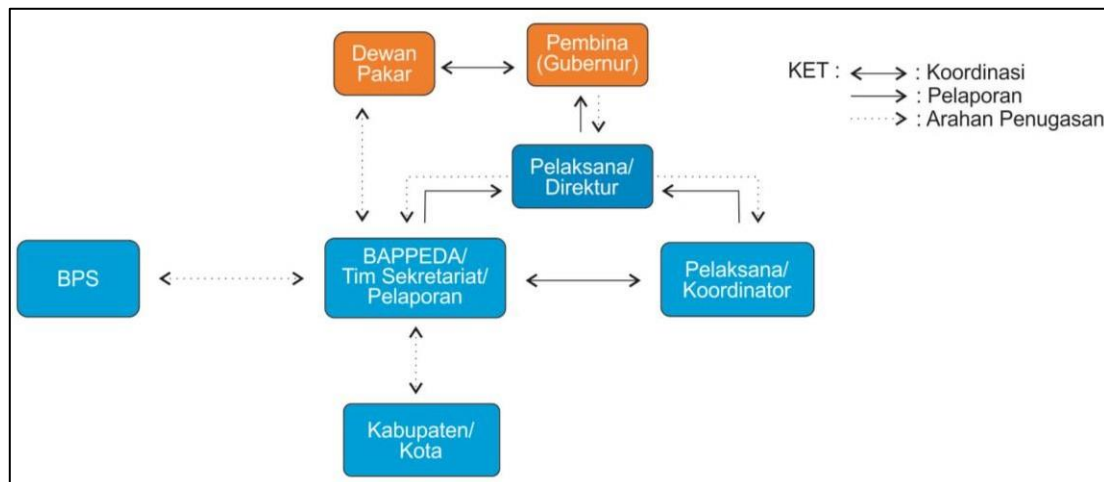
1. Tim Sekretariat/Tim Penyusunan Laporan Tahunan dan Database (Bappeda) menyusun laporan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan dengan membuat laporan tahunan TPB/SDGs pada bulan September setiap tahunnya.
2. Kepala Bappeda Provinsi NTB menyampaikan laporan Tahunan dan DataBase capaian indikator SDGs yang berisi progres kemajuan indikator beserta kendala dan hambatan pencapaiannya kepada ketua Pelaksana yang di jabat oleh Gubernur Provinsi NTB. Ketua pelaksana dan dewan pakar mengarahkan kepada Bappeda dan koordinator pelaksana (tim sekretariat SDGs) untuk mengkaji dan memvalidasi laporan pencapaian indikator TPB/SDGs.
3. Pelaksana/Direktur (Sekretaris Daerah) menyampaikan laporan kepada Pembina (Gubernur).
4. Pembina (Gubernur) menyampaikan laporan capaian TPB/SDGs kepada Kementerian PPN/Bappenas dan ditembuskan ke Sekretariat TPB/SDGs Pusat.

4.5.2 Mekanisme Evaluasi RAD TPB/SDGs Provinsi

Sejalan dengan pemantauan, evaluasi RAD perlu dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam periode 5 tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan dan ditujukan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB/SDGs serta menganalisa upaya untuk mengatasi kesenjangan

yang terjadi antara target dan realisasi indikator-indikator yang ada. Alur pelaporan dalam evaluasi RAD TPB/SDGs (Gambar 4.3) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 4.5 Alur Pelaporan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs



Sumber : Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs,2020

Alur pelaporan dalam pelaporan dan evaluasi RAD TPB/SDGs (Gambar 4.3) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

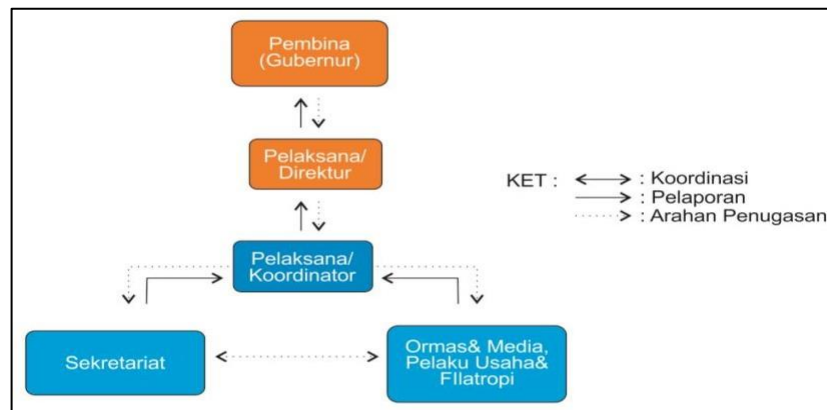
1. Tim Sekretariat menyusun laporan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan. Kabupaten/Kotasaling berkoordinasi dengan Provinsi terkait program/kegiatan yang mendukung capaian indikator TPB/SDGs. BPS bersama Sekretariat TPB/SDGs melakukan koordinasi terkait data capaian indikator-indikator TPB/SDGs.
2. Kepala Bappeda Provinsi NTB menyampaikan laporan Tahunan dan DataBase capaian indikator SDGs yang berisi progres kemajuan indikator beserta kendala dan hambatan pencapaiannya kepada Direktur Pelaksana yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB. Direktur pelaksana dan dewan pakar mengarahkan kepada Bappeda dan koordinator pelaksana (tim SDGs centre) untuk mengkaji dan memvalidasi laporan pencapaian indikator TPB/SDGs.
3. Pelaksana/Direktur (Sekretaris Daerah) menyampaikan laporan kepada Pembina (Gubernur).
4. Pembina (Gubernur) menyampaikan laporan capaian TPB/SDGs kepada Kementerian PPN/Bappenas dan ditembuskan ke Sekretariat TPB/SDGs Pusat.

4.5.3 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Reaksi Pihak Non Pemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan

mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannyapun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati.

Gambar 4.6 Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah



Sumber : Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, 2020

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.6) sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self assessment tool. lalu disampaikan kepada Pelaksana/Koordinator dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi NTB selaku Tim Sekretariat SDGs.
2. Pelaksana/Koordinato melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi lembaga non pemerintah kepada Direktur (Sekretaris Daerah).
3. Sekretaris Daerah melaporkan kepada Gubernur sebagai dewan pembina





BAB V

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Barat. Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target masing-masing indikator saling berkait, dan/atau tidak akan terlepas dari upaya pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu tujuan/goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari tujuan/goal yang lainnya. Keterkaitan antartujuan tersebut menjadi penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun nonpemerintah.

Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi.

Perluasan Penggunaan Teknologi. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilaksanakan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Kemitraan Multipihak. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat nasional, juga telah diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar pemerintah, filantropi dan pelaku usaha, perguruan tinggi, serta organisasi kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya masing-masing unsur dalam keanggotaan Tim Koordinasi Daerah (TKD) TPB/SDGs. Kemitraan ini memberi ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama-sama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Penguatan Koordinasi. Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk



pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat provinsi. BAPPEDA di tingkat provinsi mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

Untuk aspek kerangka hukum, koordinasi koheren ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kerangka hukum ini mengatur tentang kelembagaan, strategi implementasi target dan indikator, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan TPB/SDGs serta hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah. Untuk aspek kelembagaan, telah dibentuk SDGs Center yang bertugas untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan SDGs yang melibatkan peran unsur pemerintah maupun organisasi nonpemerintah, serta wewenang, tugas, dan tata cara kerjanya. Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu Tim Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 050.13-636 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sustainable Development Goals (SDGs) Center Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam aspek pendanaan telah dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

Peningkatan Kapasitas. Untuk melaksanakan RAD TPB/SDGs diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

Penghargaan Kepada Para Pihak. Penghargaan diberikan kepada OPD provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta perguruan tinggi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh TKD TPB/SDGs provinsi.

Strategi Komunikasi. Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Telah disusun dokumen model Komunikasi TPB/SDGs yang dijabarkan lebih operasional.

Pemutakhiran Dokumen. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik baik dilakukan secara



langsung maupun tidak langsung pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H.LALU MUHAMMAD IQBAL



DAFTAR PUSTAKA

- (Susenas), Survey Sosial Ekonomi Nasional ,(2025). Perkembangan Gini Ratio di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Hasil Uji Indeks Kualitas Udara.
- Draf RAN TPB 2025-2030, (2024). Klaster Kebijakan Prioritas Roadmap SDGs (Bappenas 2023).
- Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, (2020). Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah.
- Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, (2020). Alur Pelaporan dan Evaluasi RAD TPB/SDGs.
- Bappenas, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs, (2020). Alur Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi NTB.
- BPKAD, (2025), Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- BPS NTB, (2025), Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- BPS NTB, (2025), Jumlah dan Persentase Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- BPS NTB, (2025), Perkembangan Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan).
- BPS NTB. (2025). Perkembangan Garis Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan).
- BPS NTB. (2025). Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024 (Rp/Kapita/Bulan).
- BPS NTB. (2025). Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2024.
- Survey Ekonomi Sosial. (2024). Persentase Ruta yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak Provinsi NTB Tahun 2018-2024.
- <http://pep.pprk.bappenas.go.id>. (2024). Proporsi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor Tahun 2024.
- <http://pprk.bappenas.go.id>Aksara Bappenas Platform. (2024). Potensi Penurunan Emisi GRK Tahun 2019-2024.
- Kemmenristekdikti. (2025). Perguruan Tinggi di Provinsi NTB Tahun 2024.
- Sekretariat Nasional SDGs (2024). Pemutakhiran Roadmap SDGs Sebagai Acuan Penyusunan RAN SDGs.
- NTB, Bakesbangpoldagri. (2024). Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2024.
- NTB, BPKAD. (2024). Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2019-2024.
- NTB, BPS. (2024). Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019-2024.
- NTB BPS, (2024). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Provinsi NTB Tahun 2020 -2024.



NTB BPS, (2024). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi NTB Tahun 2020-2024.

NTB BPS, (2025). Angka Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Menginap pada Hotel Bintang Tahun 2019-2024.

NTB BPS, (2025). Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2019-2024.

NTB BPS, (2025). Distribusi Pengeluaran Penduduk di Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 – 2024.

NTB BPS, (2025). Indeks Pembangunan Gender (IPG) di NTB Tahun 2019-2024.

NTB BPS. (2025). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di NTB Tahun 2019-2024.

NTB BPS. (2025). Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.

NTB BPS. (2025). PDRB NTB Berdasarkan Jenis Usaha Tahun 2019-2024.

NTB BPS. (2025). Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja menurut Sektor Ekonomi/Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 (Persen).

NTB BPS. (2025). Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2021-2024.

NTB BPS. (2025). TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.

NTB dan Dinas Kelautan dan PerikananBPS. (2024). Nilai Tukar Nelayan, Angka Konsumsi Ikan, Proporsi Tangkapan Ikan Dalam Batasan Biologis Yang Aman dan Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024.

NTB, Satu Data NTB. (2025). Status Gizi Balita di Provinsi NTB Tahun 2024.

NTB, DP3AP2KB. (2023). Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi Provinsi NTB Tahun 2023.

NTB DP3AP2KB, (2025). Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019-2024.

NTB DP3AP2KB, (2025). Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Tahun 2019-2024.

NTB DP3AP2KB, (2025). Realisasi Kinerja PPRG Tahun 2019-2024.

NTB DPMPTSP, (2024). Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2019 – 2024.

NTB DPMPTSP, (2024). Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2019 – 2024 (Rp.Milyar).

NTB ESDM, (2025). Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2022-2024.

NTB ESDM, (2025). Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2024.

NTB ESDM, (2025). Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2024.

NTB, Bank Indonesia, di oleh Pusdatin Kementerian Pertanian. (2025). Perkembangan Harga Pangan Ditingkat Eceran di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan, (2025). Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.

NTB Kesehatan Dinas, (2025). Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.

NTB Kesehatan Dinas, (2025). Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2024.

NTB, Dinas Kesehatan. (2025). Jumlah Kematian Bayi di Provinsi NTB.

NTB, Dinas Kesehatan, (2025). Jumlah Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Kesehatan, (2025). Kematian Bayi Tahun 2020-2024.

NTB, Dinas Kesehatan, (2025). Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas menurut Kab/Kota se Provinsi NTB Tahun 2019-2024.



- NTB, Dinas Kesehatan, (2025). Penemuan Kurang Gizi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Kesehatan, (2025). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Kesehatan, (2025). Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U, dan BB/TB Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- NTB Dinas Kesehatan, (2025). Tren Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Kesehatan, (2025). Tren Kasus Baru HIV-AIDS di Provinsi NTB 2019-2024.
- NTB, Dinas Kesehatan, (2025). Tren Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) TB Paru, Kesembuhan dan Pengobatan Lengkap TB Paru di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Ketahanan Pangan, (2025). Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Ketahanan Pangan, (2025). Cadangan Pangan Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Ketahanan Pangan, (2025). Konsumsi Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Ketahanan Pangan, (2025). Konsumsi Energi dan Protein Provinsi NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Ketahanan Pangan, (2025). Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Ketahanan Pangan, (2025). Perkembangan Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Ketahanan Pangan, (2025). Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, (2024). Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2024.
- NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2024). Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2022-2024.
- NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2024). Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024.
- NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2025). Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se-NTB Tahun 2024.
- NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, (2025). Luas Lahan Kritis dalam KPH yang di rehabilitasi Tahun 2020-2024 dan Jumlah DAS Prioritas yang Dilindungi Mata Airnya dan Dipulihkan Kesehatannya Tahun 2020-2024.
- NTB, Dinas Pariwisata, (2025). Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2024.
- NTB, BadanPegelolaan Pendapatan Daerah, (2024). Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2019 - 2024 (dalam Milyar).
- NTB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (2025). Target dan Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2019-2024.
- NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2020). Pendidikan yang Memiliki Akreditasi Minimal B SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat.




NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2025). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2025). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Pendidikan dan kebudayaan, (2025). Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2025). Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2025). Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2025). Capaian Kinerja Utama Perluasan Akses Pendidikan.

NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2025). Jumlah Guru, Murid, dan Rasio Guru-Murid Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2023/2024.

NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2025). Perkembangan Lulusan SD/MI dan Angka Melanjutkan ke SMP/MTs Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (2025). Perkembangan Lulusan SMP/MTs dan Angka Melanjutkan ke SMA/MA dan SMK Tahun 2019-2024.

NTB pendidikan dan Kebudayaan Dinas. (2025). Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/Paket C Tahun 2019-2024.

NTB, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, (2024). Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Perdagangan, (2024). Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2024.

NTB, Dinas Perdagangan, (2024). Operasi Pasar 2019-2024.

NTB, Dinas Perdagangan. (2024). Perkembangan Ekspor Tahun 2020 – 2024.

NTB, Dinas Perdagangan, (2024). Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Perhubungan, (2025). Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2024.

NTB, Dinas Perhubungan (2025). Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban Meninggal Dunia Di NTB .

NTB, Dinas Perhubungan, (2025). Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2020 – 2024.

NTB, Dinas Perhubungan, (2025). Rute Angkutan Darat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

NTB, Dinas Perhubungan, (2025). Rute Angkutan Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat.

NTB, Dinas Perhubungan, (2025). Rute Angkutan Udara Provinsi Nusa Tenggara Barat.

NTB, UPT Persampahan kebon Kongok, (2024). Jumlah Sampah yang Masuk ke TPA Tahun 2024.

NTB, UPT Persampahan kebon Kongok, (2024). Neraca Pengelolaan Sampah NTB.

NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan, (2025). Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Perumahan dan Pemukiman, (2024). Data Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB Tahun 2019-2024.




NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (2025). Capaian Kinerja Sub Sektor Peternakan (Ternak Sapi) Tahun 2020-2024.

NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2025). Perkembangan Populasi Sapi di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2025). Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2019-2024.

NTB, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2025). Populasi Ternak Unggas Tahun 2019-2024.

NTB, Draf Rencana Umum Kebutuhan Energi Daerah, (2024). Kebutuhan Pembangkit Listrik Energi Sumber Daya Mineral di NTB Tahun 2017-2020, 2025-2050.

NTB, Draf RUED, (2025). Rekap Kapasitas Terpasang Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) Tahun 2020-2024.

NTB, Sekertariat SDGs. (2025). Indikator TPB/SDGs Provinsi NTB Berdasarkan Pilar Pembangunan.

NTB, Sekertariat SDGs. (2024). Keterkaitan RPJMD, RPJMN, Terhadap SDGs. NTB.

NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (2025). Jumlah Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan NTB. (2024). Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB.

Time Series data Penutupan Lahan NTB 2020 – 2024, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Perubahan Tutupan Lahan Berupa Hutan di Provinsi NTB*

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB (diolah), 2025, *Proporsi Tutupan Lahan Provinsi NTB tahun 2020-2024*



Lampiran - Lampiran

1. Matrik 2b : Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB Yang Mendukung Indikator TPB/SDGs
2. Matrik 3 : Program Kegiatan Dan Anggaran Non Pemerintah



PROGRAM/KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI NTB YANG MENDUKUNG INDIKATOR TPB/SDGs

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP: \$ 1,9 per hari*Nasional menggunakan <2,15 USD PPP										
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur										
PROGRAM 1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Kegiatan 01. Kegiatan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	25,855,897,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	21,355,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	300,000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan	0	0	1	1	1	1	1	6,843,497,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	1		1	1	1	1	1	400,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Koordinasi Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kegiatan	0	0	1	1	1	1	1	400,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	laporan	1	0	1	1	1	1	1	5,138,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran	laporan	1	0	1	1	1	1	1	2,525,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	sarana pascapanen hortikultura											
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan	1	0	0	1	1	1	1	300,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	1	0	1	1	1	1	1	1,033,800,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 02. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	Persen		100	100	100	100	100	100	63,553,581,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman	Persen		2	2	2	2	2	2		APBD	
	Persentase sertifikasi benih tanaman	Persen		90	90	90	90	90	90		APBD	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat		11	265	270	272	280	280	1,048,038,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	774,093,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan											
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,800,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0	0	0	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1,014,034,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	480,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	145,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Ton	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	120,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,796,104,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan	Ton	0	96	96	104	104	104	104	4,892,198,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	berbentuk biji/benih yang diperbanyak											
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton	0	0	0	8	8	8	8	1,320,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	11,896,837,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih hortikultura	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	23,410,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih perkebunan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	15,631,370,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi										460,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan	Varietas	0	0	1	1	1	1	1	230,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Mikroorganisme yang Dinilai											
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	230,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM 2. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
	Persentase fasilitas prasarana pertanian	Persen	18.25	7.92	8.21	7.59	7.05	6.59	6.18	154.082.406,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persen	62.93	63.56	64.19	64.84	65.49	66.14	66.80		APBD	
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	0	0	2	2	0	2	2	3,000,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	135,329,635,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Koordinasi,	Jumlah	Dokumen	1	1	52	70	70	70	70	64,562,629,00	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani									0		Pertanian dan Perkebunan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dokumen	0	0	0	0	0	1	1	1,000,000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	unit	2	0	11	12	15	12	11	11,878,549,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	0	0	237,240	237,240	237,240	237,240	237,240	400,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Pemanfaatan	Jumlah prasarana	Unit	0	-	1	1	-	1	1	300.000,000	APBD	Dinas Pertanian dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Prasarana Pascapanen Hortikultura	pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan											Perkebunan
Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	0	0	0	1	0	1	0	497.645,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	250,000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	10	10	10	10	10	10.640.000,00 0	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan	Unit	0	0	2	2	2	2	2	2.000.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	dan dimanfaatkan											
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	0	1	1	1	1	1	400.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM 3. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN												
Kegiatan 01. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rata-rata	Persen	0	65.83	65.93	66.03	65.93	66.03	66.03	23,835,577,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase Penanggulangan OPT Tanaman Pangan	Persen	0	75.20	75.30	75.40	75.30	75.40	75.40		APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase Penanganan DPI Tanaman Pangan	Persen	0	60.20	60.30	60.40	60.30	60.40	60.40		APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase Penanganan OPT Tanaman Perkebunan	Persen	0	67.70	67.80	67.90	67.80	67.90	67.90		APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Persentase	Persen	0	60.20	60.30	60.40	60.30	60.40	60.40		APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Penanganan DPI Tanaman Perkebunan											Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	0	0	14,320	15,751	17,327	19,060	19,060	19,179,477,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0	0	75	75	75	75	75	3,306,100.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	0	0	0	3	3	3	3	1,350,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Desa Pertanian	Jumlah	kelompok	0	0	0	3	3	3	3	1,350,000,000	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Organik	Kelompok Tani yang menerapkan Pertanian Organik											Pertanian dan Perkebunan
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulang an pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM 4. PENYULUHAN PERTANIAN												
Kegiatan 01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	0	4	4	4	4	4	3,187,700.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub kegiatan 1. Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	0	0	0	23	23	23	23	3,336,000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub kegiatan 2. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	17	300	300	300	300	300	2,719,700.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	Persen	75	75	75	75	75	75	75	8.328.166.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Siswa yang bekerja di sektor	Persen		5	5	5	5	5	5		APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	pertanian											
Sub kegiatan 1. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	7,859,000.000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub kegiatan 2. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Poktan	0	0	300	300	300	300	300	5,717,166,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 03 Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk dan beroperasi	Persen	0	14	12	11	10	9	9	2,300,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub kegiatan 1. Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah Korporasi Petani Yang didampingi	Unit	0	0	18	18	18	18	18	600,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub kegiatan 2. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	0	0	10	20	20	20	20	4,000,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 4. Penyediaan	Tersedianya bibit dan	Ekor	10.300	101.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	161.591.163.023	APBD	Dinas Peternakan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	ternak yang unggul											dan Kesehatan Hewan
Sub Kegiatan 1. Pengadaan Hijau Pakan ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Jumlah Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi lainnya	Ton	5	25	100	100	100	100	100	14.433.925.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Kegiatan 2. Pengadaan Benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lainnya	Jumlah Benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lainnya	Dosis	0	100.000	100	100	100	100	100	3.215.765.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Kegiatan 3. Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Jumlah Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Ekor	3.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	143.941.446.023.9	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM 5. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
Kegiatan 1. 2.09.04.1.02 Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	2	4	4	4	4	4	12.084.506.007	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 1. 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	8.524.250.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											
Subkegiatan 2. 2.09.04.1.02.0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	3.045.656.007	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 3. 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	164.600.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 4. 2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	350.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
PROGRAM 6. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												
Kegiatan 1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kasus yang di tangani	Persen	0	80	100	100	100	100	100	11.699.612.000	APBD	Dinas Perdagangan
Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah Pengaduan Konsumen	Kasus	0	0	65	68	70	75	75		APBD	Dinas Perdagangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen	yang ditangani											
Sub Kegiatan 2. Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	lembaga	0	6	6	6	6	6	6		APBD	Dinas Perdagangan
Sub Kegiatan 3. Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	lembaga	0	0	50	55	60	65	65		APBD	Dinas Perdagangan
PROGRAM 7. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna Industri Provinsi										3.368.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	kegiatan	2	2	3	4	4	5	6		APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 2.												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kegiatan	5	5	6	7	7	7	8	1.642.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 3. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kegiatan	3	3	4	5	5	6	6	13.147.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 4. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil	IKM	50	50	60	70	75	80	85	57.002.000.000	APBD	Dinas Perindustrian



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											
PROGRAM 8. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata provinsi yang di kelola	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	2.374.817.525	APBD	Dinas Pariwisata
Sub kegiatan 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	521.979.685	APBD	Dinas Pariwisata
Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	598.866.913	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah											
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	205.953.829	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	20	20	20	20	20	20	20	598.866.913	APBD	Dinas Pariwisata
Kegitan 2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikelola	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	3.885.563.734	APBD	Dinas Pariwisata
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	1.639.812.810	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	unit	5	5	5	5	5	5	5	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	598.866.913	APBD	Dinas Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	orang	20	20	20	20	20	20	20	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Kegiatan 3. Pengelolaan Destinasi	Jumlah destinasi	Lokasi	7	7	7	7	7	7	7	6.737.012.088	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pariwisata Provinsi	pariwisata provinsi yang dikelola											
Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	3	3	3	3	3	3	3	2.844.377.153	APBD	Dinas Pariwisata
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	898.300.369	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	598.866.913	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Pariwisata MICE Provinsi											
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	748.583.641	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	orang	20	20	20	20	20	20	20	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Kegiatan 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kotadalam1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha pariwisata yang tanda usahanya telah terdaftar	Usaha	50	50	50	50	50	50	50	1.048.017.098	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Sertifikasi SNI	Jumlah usaha	Usaha	20	20	20	20	20	20	20	449.150.185	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
9042:2021 (SNI CHSE)	pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021											Pariwisata
Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata	10	10	10	10	10	10	10	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Usaha Pariwisata	10	10	10	10	10	10	10	149.716.728	APBD	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	149.716.728	APBD	Dinas Pariwisata
PROGRAM 9. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
Kegiatan 1. Pelaksanaan	Jumlah Sumber Daya	Orang	90	90	90	90	90	90	90	13.053.370.520	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Manusia yang ditingkatkan kapasitasnya											
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.684.026.080	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1.568.185.440	APBD	Dinas Pariwisata
Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1.568.185.440	APBD	Dinas Pariwisata
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Asesor (WPA) Bidang Pariwisata	Jumlah produk kreatif	Produk	17	17	17	17	17	17	17	1.568.185.440	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	10	10	10	10	10	10	10	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Orang	10	10	10	10	10	10	10	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	10	10	10	10	10	10	10	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah SDM Ekonomi	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif											
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	784.092.720	APBD	Dinas Pariwisata
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Orang	10	10	10	10	10	10	10	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Kegiatan 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah orang pelaku ekonomi kreatif	Orang	100	100	100	100	100	100	100	7.056.834.480	APBD	Dinas Pariwisata
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan,	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif											
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi	Jumlah Lembaga	Lembaga	5	5	5	5	5	5	5	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal											
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
PROGRAM 10. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	Ijin	44	28	28	28	28	28	28	599.965.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	285.451.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi											
Sub kegiatan 2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	314.550.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Kegiatan 2. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RT	9710	300	325	687	945	1107	1547	10.114.073.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan												
Sub kegiatan 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	378.344.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub kegiatan 2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	Unit	9710	300	325	687	945	1107	1547	9.735.729.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
PROGRAM 11. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												
Kegiatan 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan tangkap Non pelabuhan	Ton	227.636,54	225.959	228.219	230.502	232.807	235.135	237.486	12.013.429.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	74.569,400	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	sampai dengan 12 Mil											
Sub kegiatan 2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1.754.500,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 3. Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan	Rekomen dasi	1	1	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 4. Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	95.000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 5. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	100	50	60	60	60	60	60	10.089.360,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 6. Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	jumlah sarana pendukung pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur	Unit	1	1	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan 2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap	Unit	94	100	100	100	100	100	100	166.923,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan 12 mil beroperasi sampai dengan	persen	100	100	100	100	100	100	100	84.525,700,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	82.397.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	tersedia											
Kegiatan 3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	Unit	735	250	250	250	250	250	250	169.230,000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	735	250	250	250	250	250	250	84.615,000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan I	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	84.615,000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 4. Penetapan	Jumlah	Unit	1	1	1	1	1	1	1	18.209.060,00	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	pelabuhan perikanan yang memenuhi SPM									0		Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	1	1	1	1	1	1	1	324.000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	10	4	4	4	4	4	4	16.934.200,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 3. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	layanan	20	20	20	20	20	20	20	950.860,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 5. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persetujuan penerbitan izin Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	PPKP	205	50	50	50	50	50	50	112.820,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	56.410,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
30 GT	Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi											
Sub kegiatan 2. Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	rekomendasi	205	50	50	50	50	50	50	56.410,000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 6 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kapal perikanan di atas 10GT sampai dengan 30 GT	Unit	104	65	65	65	65	65	65	112.820,000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	56.410,000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomen-dasi	104	65	65	65	65	65	65	56.410,000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 7. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran	Unit	735	250	250	250	250	250	250	112.820,000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar											
Sub kegiatan 1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	112.820.000,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomen dasi	735	250	250	250	250	250	250	56.410.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 12. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Termasuk: Budidaya Lobster, KRPL/P2L)												
Kegiatan 1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan	Izin	17	1	1	1	1	1	1	56.410.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	an Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terbit											
Sub kegiatan 1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	256.396.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	5	5	5	5	5	5	53.046.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	203.350.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2. Pengelolaan	Produksi budidaya ikan	Ton		706.240	710758,08	723283,92	736288,56	749820,96	763871,76	4.384.019.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pembudidayaan Ikan di Laut	di laut											Perikanan
Sub kegiatan 1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	2	2	2	2	2	2	1.030.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	10	10	10	10	10	10	3.050.000.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya	orang	30	30	30	30	30	30	30	53.228.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	0	1	1	1	1	1	1	125.791.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 5. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	125.000.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi benih ikan air payau dan tawar	Ekor	15.150.000	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.250.000	14.500.000	14.750.000	8.865.535.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
di Perairan Darat												
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	25	4	10	10	10	10	10	6.577.855.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	1	3	4	5	6	10	2.287.680.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 13. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL												
Kegiatan 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	Ha	183.139,59	249.693,8	395.315,53	446.584,21	460.539,97	474.495,73	474.495,73	11.088.963.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	182968	249693,8	395315,53	395315,53	395315,53	395315,53	395315,53	5.200.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau	Ha	10	10	10	10	10	10	10	1.822.897.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Kecil yang Direhabilitasi											
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	orang	100	100	100	100	100	100	100	98.817.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	36.143.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	33.100.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP											
Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku usaha	30	25	25	25	25	25	25	125.815.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan										APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	235.500.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	Ton	143.796,62	160.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	302.408.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penetapan	Jumlah	Dokumen									APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Rekomendasi Prioritas dan Desain pembangunan prasarana usaha pergarman	rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergarman yang ditetapkan											Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergarman yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	106.730.000.00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertimbangan teknis izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	144.615.000.00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	84.615.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	60.000.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	kelompok	14	2	2	3	4	5	5	7.510.702.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	140	20	30	40	40	50	50	318.242.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	kelompok	1	2	3	4	4	5	5	84.615.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggara	kelompok	1	2	3	4	4	5	5	84.615.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	an Pendidikan dan Pelatihan											
Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	unit	9	10	10	10	10	10	10	3.663.230.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	unit	5	5	5	5	5	5	5	3.360.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 14. PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT)												
Kegiatan: 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	Sekolah	16	15	15	15	15	15	15	500.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	5	7	8	9	10	11	500.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 15. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
Kegiatan: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase sampah yang ditangani di TPA	Persen	53,20	58,70	64,20	69,7	70	69,7	70	25.700.368.300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah kabupaten/kota	Kabupaten/kota	10	10	10	10	10	10	10	4.186.400.000	APBD	Dinas Lingkungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	kota yang menerapkan pemilahan sampah di areal publik											Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah dan residu yang terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	115.468	116.228	116.988	117.748	118.508	119.268	120.028	21.968.838.300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	3	1	1	1	1	1	1	1.981.530.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase sampah yang ditangani dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	Ton	0	1	1	1	1	1	1	1.750.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di Desa/ Kelurahan yang Tersedia	Unit	7.157	10	15	20	25	30	35	121.500.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sink	Dokumen	0	10	10	10	10	10	10	294.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	ronisasi penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus											Kehutanan
PROGRAM 16. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
Kegiatan: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	Hektar	1.160,11	113,75	165,75	165,75	163,75	163,75	163,75	38.089.830.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	196.793.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara	Hektar	0	3,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	5.500.450.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara	Hektar	80	50	50	50	50	50	50	740.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka pengembangan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan	Laporan	5	0	22	24	26	28	30	879.587.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Rehabilitasi Lahan	dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan											
Sub Kegiatan: Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	25	189	189	189	189	189	10.350.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	15	85	85	85	85	85	16.092.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 16. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												
Kegiatan: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Prosentase peningkatan kelompok tani hutan	KTH	57	57	57	57	57	57	57	22.778.564.600	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Prosentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial	KUPS	21	21	21	21	21	21	21			
Sub Kegiatan: 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	60	67	67	67	67	67	67	1.683.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang	Kelompok	15	80	80	80	80	80	80	11.922.349.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan											
Sub Kegiatan: 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan	Hektar	5.985,18	1000	1000	1000	1000	1000	1000	480.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	5	5	5	5	5	5	5	9.393.215.600	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 17. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM												
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian keseluruhan program yang diukur dari penyusunan dokumen evaluasi, basis data, dan pembinaan teknis di tingkat kabupaten/kota	Persen	84,41	85.41	86.41	87.41	88.41	89.41	90.41	50.782.251.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian keseluruhan program yang diukur dari penyusunan dokumen evaluasi, basis data, dan pembinaan teknis di	Persen	10	25	50	70	85	95	100	50.782.251.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	tingkat kabupaten/kota											
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	2	0	1	4	4	6	2	43.982.151.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
POGRAM 18. PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Cakupan Penurunan kasus Kematian Ibu	Persen	10	7	7	7	7	7	7	26,911,557,596	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Antenatal Care sesuai Standar (ANC 6 kali)	Persen	66,23	80	82	85	88	90	92			
	Cakupan Persalinan Di fasilitas Kesehatan sesuai Standar	Persen	70,17	88	89	90	91	92	93			
	Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan Nifas lengkap	Persen	70,02	88	89	90	91	92	93			
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1			



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak											
PROGRAM 19. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
Kegiatan 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	7.105.436.279	APBD	Dinas Sosial
Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	orang	400	400	440	560	570	580	590	6.199.653.779	APBD	Dinas Sosial
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	orang			105	110	115	120	125	905.782.500	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase anak terlantar yang tertangani sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	20.769.269.375	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	orang		5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	20.769.269.375	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 3. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase PPKS di luar HIV AIDS dan Napza di RPTC yang tertangani dan berfungsi sosial kembali				83	86	89	92	95	4.180.127.240	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				250	250	250	250	5	907.500.000	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun				250	250	250	250		300.750.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Kewenangan Provinsi											
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				250	250	250	250		244.500.000	APBD	Dinas Sosial
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				250	250	250	250		2.176.877.240	APBD	Dinas Sosial
Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib				150	150	150	150		382.500.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah											
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraan nya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi				30	34	40	45		168.000.000	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 4. Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti Non SPM	Persentase PPKS didalam Panti Non SPM yg tertangani dan berfungsi sosial kembali	persen	100	100	100	100	100	100	100	16.125.788.501	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang	150	150	150	150	150	150	150	7.698.886.122	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang	orang	150	150	150	150	150	150	150	986.948.377	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi											
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	orang	150	150	150	150	150	150	150	396.306.686	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang	150	150	150	150	150	150	150	582.292.592	APBD	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang	150	150	150	150	150	150	150	600.272.258	APBD	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang	150	150	150	150	150	150	150	51.853.406	APBD	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan	Jumlah Orang	orang	150	150	150	150	150	150	150	4.657.396.396	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Keterampilan Dasar	yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi											
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	orang	150	150	150	150	150	150	150	442.124.333	APBD	Dinas Sosial
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	709.708.331	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 20. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase data fakir miskin yang termutakhirkan	persen		100	100	100	100	100	100	11.221.317.500		Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Penerima	Jiwa	699	500	500	500	500	500	500	6.088.550.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Keluarga	Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi											
Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	10	10	4.528.912.500	APBD	Dinas Sosial
Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	10	10	603.855.000	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase penduduk miskin penerima bantuan sosial peningkatan ekonomi yang mendapatkan pendampingan	persen	30	30	35	40	45	50	55	41.689.509.894	APBD	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	orang	750	750	750	750	750	750	750	41.070.561.894	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Provinsi											
Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	KK	150	750	150	75	75	75	75	618.948.000	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 21. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	396	296	410	524	638	752	866	11.830.002.656	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (BID. LATTAS) (skill center)	orang	396	200	250	300	350	400	450	3.160.609.509	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (BLK) (skill center)	orang	96	96	160	224	288	352	416	7.037.283.546	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	10	10	10	10	10	10	10	274.608.540	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja (Skill center)	unit	36	36	34	17	18	19	20	1.157.501.061	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan /koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kesepakatan	7	7	7	9	11	13	15	200.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga	Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai	LPK	5	5	20	30	40	50	60	937.355.180	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pelatihan Kerja												
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	5	5	5	5	5	5	937.355.180	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan3. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	5	5	5	5	5	5	5	178.335.984	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan			5	5	5	5	5	178.335.984	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan 4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	157.321.031	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	157.321.031	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Tenaga Kerja di Tingkat daerah											
PROGRAM 22. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	orang	0	615	715	870	1.025	1.180	1.335	2.379.373.578	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	orang	0	500	500	600	700	800	900	588.820.855	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	0	0	100	125	150	175	200	216.725.719	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	0	100	100	125	150	175	200	403.451.438	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Su kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah tenaga kerja	Orang	0	15	15	20	25	30	35	1.170.375.567	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD											Trasmigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang	180	250	250	370	490	610	730	3.360.040.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (BID. PENEMPATAN)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	200	200	300	400	500	600	1.366.968.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	180	50	50	70	90	110	130	1.993.072.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
PROGRAM 23. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	11	11	11	11	11	11	26.770.634.764	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten												
Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	orang	8100	13.000	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	26.770.634.764	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM 24. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI												
Kegiatan 1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	KK	15	5	15	15	15	15	15	6.840.563.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	KK	15	0	15	15	15	15	15	691.950.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan PenyuluhanPe njajakan	KK	0	0	50	55	60	65	70	1.288.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan 2. Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Lokasi			2	2	2	2	2	985.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	KK	15	0	15	15	15	15	15	465.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penampungan Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	KK	15	0	15	15	15	15	15	675.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	KK	15	0	15	15	15	15	15	675.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Bantuan Non- Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Jumlah Bantuan Non- Standar yang Diberikan kepada Transmigran	KK	15	0	15	15	15	15	15	947.000.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang	KK	15	0	15	15	15	15	15	1.113.613.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi											
PROGRAM 25. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Angka Drop Out (DO) SMA	persen	0,03	0,029	0,028	0,027	0,026	0,025	0,024	8,082,963,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 1. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non akademik	Peserta didik	NA	125	125	125	125	125	125	1,706,745,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	NA	120	120	120	120	120	120	424,206,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan	Satuan Pendidikan	NA	72	72	72	72	72	72	1,052,357,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	dan Manajemen											
Sub kegiatan 4. Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1,311,607,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	973,127,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 6 . Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	7	7	7	7	7	7	7	857,977,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 7. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Kegiatan	NA	2	2	2	2	2	2	835,562,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 8.	Jumlah Satuan	Satuan	NA	72	72	72	72	72	72	921,382,000	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	pendidikan										Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK	persen	0,06	0.059	0.058	0.057	0.056	0.055	0.054	6,957,413,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 1 Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	100	360	360	360	360	360	360	3,511,719,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 2. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	NA	5	5	5	5	5	5	846,196,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Kegiatan 3. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	NA	100	100	100	100	100	100	1,041,281,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 4. Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	974,339,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan											
Sub kegiatan 5. Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	NA	1	1	1	1	1	1	583,878,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 26. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
Kegiatan 1. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	persen	37.75	37.75	38.68	39.6	40.13	41.45	42.37	25.036.701.800	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan wirausaha	persen	4.49	4.54	4.58	4.58	4.63	4.68	4.72		APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UKM yang tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan									25.036.701.800		



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	ekonomi dan pengentasan kemiskinan											
Sub kegiatan. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMK yang menjalin Kemitraan dan Export	UKM	400	400	100	400	532	586	590	3.294.650.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kegiatan 2. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMK dan Kewirausahaan	Orang	160	160	170	194	213	234	234	1.668.252.950	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemulihan Usaha-usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	UKM	0	0	50	150	150	150	150	565.805.600	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	UKM	0	0	0	1000	1331	1464	1464	1.225.287.400	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM	Jumlah SDM yang Memahami	Orang	0	0	22	24	53	59	60	1.052.358.350	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan											dan Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	175	176	200	280	300	300	300	10.679.100.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	UKM	0	40	40	48	53	59	60	1.529.182.500	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	UKM	20	30	20	20	40	44	44	1.774.683.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	UKM	0	0	0	0	0	150	7	692.602.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah UKM yang Terfasilitasi NIB	UKM						234	150	946.460.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perizinan Berusaha	Jumlah UKM	UKM						234	234	823.703.000	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
bagi Usaha Kecil	yang Terfasilitasi NIB											Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 27. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya	Koperasi	40							16.388.796.300	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit	30	30	30	50	55	60	120	2.735.954.300	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan dalam Pembentukan Koperasi	Unit	0	0	15	17	19	21	23	7.274.011.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemulihan Usaha	Jumlah	Koperasi		25	30	60	40	65	90	1.090.000.000	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi yang Dipulihkan Usahanya											Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Koperasi	80	80	100	150	150	150	150	1.111.653.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Akses Permodalan	Koperasi	10	10	10	10	10	10	10	1.125.522.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Dibina	Koperasi	3	3	10	60	90	100	120	3.051.656.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 28. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang meningkat Produksi dan Keuangannya	UKM	514	514	520	520	520	520	520	17.155.580.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan	unit	20	0	20	48	53	150	200	2.498.889.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Desain dan Teknologi	Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi											Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UKM	Jumlah Pelaku UKM yang Memahami Literasi Hukum	unit	0		50	242	266	293	200	2.933.851.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	unit	0	0	20	48	53	100	60	2.462.788.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	unit	0	0	50	363	399	439	440	2.740.477.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Pengembangan Inkubasi yang Terfasilitasi	unit	0	0	50	61	67	350	75	4.298.190.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Difasilitasi	unit	0	0	150	200	399	439	440	11.702.980.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 29. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Kegiatan 1. 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas	Jumlah rumah tidak layak huni pada	unit	175	174	600	1000	1000	1000	1000	131.101.748.793	APBD	Dinas Perumahan dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang tertangani											Permukiman
Subkegiatan 1. 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	175	174	480	800	800	800	800	82.183.215.353	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman
Subkegiatan 2. 1.04.03.1.02.0003 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	unit	0	0	120	200	200	200	200	48.918.533.440	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman
INDIKATOR SDGs :	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJSN-K										
PROGRAM 30. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui	orang	0	615	715	870	1.025	1.180	1.335	2.379.373.578	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	mekanisme AKAD/ AKL											
Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	orang	0	500	500	600	700	800	900	588.820.855	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	0	0	100	125	150	175	200	216.725.719	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	0	100	100	125	150	175	200	403.451.438	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Penyelenggaraan UnitLayanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	0	15	15	20	25	30	35	1.170.375.567	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang	180	250	250	370	490	610	730	3.360.040.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (BID. PENEMPATAN)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	200	200	300	400	500	600	1.366.968.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	180	50	50	70	90	110	130	1.993.072.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
PROGRAM 31. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	11	11	11	11	11	11	26.770.634.764	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar	orang	8100	13.000	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	26.770.634.764	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan											
PROGRAM 32. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN												
Kegiatan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	299	265	327	352	377	402	427	11.853.724.996	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) Di Pulau Lombok	Perusahaan	50	75	117	127	137	147	157	1.722.833.400	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Perusahaan	125	100	75	75	75	75	75	1.206.065.621	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	(Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) Di Pulau Sumbawa											
Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BID. WAS]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	49	40	50	60	70	80	90	4.052.343.750	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPL]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	25	50	50	50	50	50	50	4.317.705.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan [BPKPS]	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan	50	0	35	40	45	50	55	554.777.225	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi
INDIKATOR SDGs	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Air minum)										
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Penyehatan Dasar)										
	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Sanitasi)										
	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe										
PROGRAM 33. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian keseluruhan program yang diukur dari penyusunan dokumen evaluasi, basis data, dan pembinaan	%	84.41	85.41	86.41	87.41	88.41	89.41	90.41	33,341,562,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Cipta Karya)



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	teknis di tingkat kabupaten/kota											
Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab/Kota	5	10	10	10	10	10	10	33,341,562,000	APBD	Dinas Kesehatan
Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen	2	-	1	4	4	6	2	28,441,562,000		
PROGRAM 34 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	35.8	37	40	45	50	55	60	90,488,521,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
Subkegiatan	Kapasitas	Liter/Desa	100	100	-	30	45	45	50	26,009,950,00	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	k								0		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Liter/Detik	N/A	-	30	30	30	30	30	12,000,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
Subkegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasi ya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Unit	N/A	-	1	1	1	1	1	33,461,006,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
Subkegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan startegis provinsi	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem	SR	N/A	-	-	1000	1150	1200	1250	10,617,565,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi											Permukiman)
PROGRAM 35 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
Kegiatan 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase penyelesaian keseluruhan program yang diukur dari penyusunan dokumen evaluasi, basis data, dan pembinaan teknis di tingkat kabupaten/kota	persen	5.56	5.56	12	18	24	30	33	16,120,781,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2		1				5	9,600,123,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh	Kab/Kota	3		3				10	6,520,658,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)											Ruang (Pengembangan Permukiman)
Subkegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan 1 unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	30	25	35	90	120	150	150	6,900,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
PROGRAM 36. PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1 Penyediaan layanan kesehatan	Persentase desa/kelurahan	persen	100	100	100	100	100	100	100		APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
perorangan dan kesehatan masyarakat	n yang berpotensi terdampak bencana yang diberikan KIE kesehatan berencana											
Penegloaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi sesuai standar	orang	32.579	33673	52775	53430	54092	54763	54763	61.778.180.391	APBD	Dinas Kesehatan
Upaya pengurangan resiko krisis kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Upaya Pengurangan Resiko krisis kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1.189.805.690	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
	1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDB										
	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana										
PROGRAM 37. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	8.325.545.950	APBD	Badan Penanggulangan Bencana



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Terhadap Bencana	untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi											daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1			1				395.075.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Desa	615	140	82	82	82	82	83	4.257.805.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen Renkon Tiap Jenis Bencana Tingkat Provinsi	Dokumen			2			3	1	880.000.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Pelatihan Peningkatan Kapasitas TRC Provinsi dan Kab/Kota	Orang			120	120	120	120	120	1.712.480.550	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi	Orang	400	400	400	400	400	400	400	1.080.185.400	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Kesiapsiagaan											
Kegiatan 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	12.712.170.700	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.05.03.1.03.0025 Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	2	2	2	2	2	2	1.388.809.800	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.05.03.1.03.0026 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang			3	3	3	3	3	457.882.500	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.05.03.1.03.0028 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	26000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	8.941.630.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.05.03.1.03.0030 Sub Kegiatan Respon Cepat	Jumlah Laporan	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	1.465.965.900	APBD	Badan Penanggulangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penanganan Darurat Bencana	Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana											an Bencana daerah
Kegiatan 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan			2	2	2	2	2	457.882.500	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.04.0007 Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen			1	1	1	1	1	449.126.000	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.04.0012 Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan	Dokumen			1	1	1	1	1	353.017.750	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	pascabencana Provinsi											
1.05.03.1.04.0014 Sub Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokumen		1	1	1	1	1	1	405.517.750	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.04.0018 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen				1	1	1	1	765.765.000	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.04.0022 Sub Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Laporan		2	2	2	2	2	2	887.295.150	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.04.0023 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Kab/Kota		10	10	10	10	10	10	975.803.250	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Alokasi Anggaran (2025-2030)	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun											
1.05.03.1.04.0024 Sub Kegiatan Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Laporan		2	4	4	4	4	4	2.823.925.600	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
PROGRAM 38. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
Kegiatan 1. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Daerah Rawan Bencana Kebakaran yang Terpetakan dibandingkan Jumlah Daerah Rawan Bencana	persen		100					100	111.700.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Tujuan 2. Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)										
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan										
PROGRAM 1. (2.09.04) PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
<u>Kegiatan 1.</u> 2.09.04.1.02 Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Laporan Penaganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	2	4	4	4	4	4	12.084.506.007	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 1. 2.09.04.1.02.0002	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	8.524.250.000	APBD	Dinas Ketahanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi											Pangan
<u>Subkegiatan 2.</u> 2.09.04.1.02.0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	3.045.656.007	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 3. 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	164.600.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 4. 2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	350.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita										



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.000 Kkal/Kapita/Hari										
		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.100 Kkal/Kapita/Hari										
	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe										
PROGRAM 2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1. Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Ruukan, UKM dan UKM rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Balita Wasting	persen	9,4	8	7,5	7	6,5	6	5,5		APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase Balita Underweight	Persen	24	15	14	13	12	11	10		APBD	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	53.477.400.297		
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	24.65.739.547	APBD	Dinas Kesehatan
Pengelolaan surve lens Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pneglolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	2.449.336.926	APBD	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Ruukan, UKM dan UKM rujukan Tingkat Daerah Provinsi	persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Cakupan imunisasi bayi lengkap (IDL)	persen	80	80	82	84	85	86	87		APBD	Dinas Kesehatan
Investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh Kabupaten/Kota	Umlah Dokumen Hasil investigasi lanjutan imunisasi dan pemberian obat massal oleh	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1.002.072.458	APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Kabupaten/kota											
PROGRAM 3. (2.09.03) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
<u>Kegiatan 1.</u> 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Jumlah Laporan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dokumen	2	3	3	3	3	3	3	3.006.751.646	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
<u>Subkegiatan 1.</u> 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	0	1	1	1	1	1	245.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
<u>Subkegiatan 2.</u> 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	2.623.751.646	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 3. 2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	138.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Harapan Provinsi												
PROGRAM 4 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Post Market dan Pre Market	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	3.786.346.900	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 1. '2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	65	25	65	65	65	65	65	1.502.100.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 2. '2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	843.346.900	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 3. '2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	970.900.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 4. '2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	470.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	asal tumbuhan											
INDIKATOR SDGs	2.3.1*	Volume Produksi per tenaga kera menurut kelas usaha tani tanaman/peternakan/perikanan/kehutanan										
	2.3.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
	2.3.2*	Rata-rata pendapatan Produsen pertanian skala kecil menurut sub sektor										
	2.4.1	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan										
	2.a.1*	Indeks Orientasi Pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah										
	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan)										
PROGRAM 5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Kegiatan 01. Kegiatan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	25,855,897	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	21,355,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	300,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan	0	0	1	1	1	1	1	6,843,497	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	1		1	1	1	1	1	400,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Koordinasi Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	keg	0	0	1	1	1	1	1	400,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	laporan	1	0	1	1	1	1	1	5,138,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan	1	0	1	1	1	1	1	2,525,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan	1	0	0	1	1	1	1	300,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	1	0	1	1	1	1	1	1,033,800	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 02. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih	Persentase ketersediaan benih tanaman	Persen		100	100	100	100	100	100	63,553,581	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Tanaman												
	Persentase peningkatan produksi benih tanaman	Persen		2	2	2	2	2	2		APBD	
	Persentase sertifikasi benih tanaman	Persen		90	90	90	90	90	90		APBD	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat		11	265	270	272	280	280	1,048,038	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	774,093	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,800,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0	0	0	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1,014,034	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	480,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan	Tersedianya benih bersertifikat	Setek	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Berbentuk Setek	Tanaman Pangan berbentuk Setek											
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	0	0	10,00 0	10,00 0	10,00 0	10,00 0	10,00 0	145,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Ton	0	0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	50,00 0	120,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,796,104	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	96	96	104	104	104	104	4,892,198	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton	0	0	0	8	8	8	8	1,320,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	11,896,837	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih hortikultura	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	23,410,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih perkebunan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	15,631,370	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi										460,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas	0	0	1	1	1	1	1	230,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	230,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM 6. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
Kegiatan 01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	0	4	4	4	4	4	3,187,700	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan	Unit	0	0	0	23	23	23	23	3,336,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Kapasitasnya											
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	17	300	300	300	300	300	2,719,700	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	Persen	75	75	75	75	75	75	75	8.328.166	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Siswa yang bekerja di sektor pertanian	Persen		5	5	5	5	5	5		APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	7,859,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Poktan	0	0	300	300	300	300	300	5,717,166	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 03 Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk dan beroperasi	Persen	0	14	12	11	10	9	9	2,300,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pendampingan dan pengawalan korporasi	Jumlah Korporasi Petani	Unit	0	0	18	18	18	18	18	600,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
petani	Yang didampingi											
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	0	0	10	20	20	20	20	4,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 04. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	Tersedianya bibit dan ternak yang unggul	Ekor	10.300	101.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	161.591.163.023	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Kegiatan 1. Pengadaan Hijau Pakan ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Jumlah Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi lainnya	Ton	5	25	100	100	100	100	100	14.433.925.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Kegiatan 2. Pengadaan Benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lainnya	Jumlah Benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lainnya	Dosis	0	100.000	100	100	100	100	100	3.215.765.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Kegiatan 3. Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Jumlah Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Ekor	3.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	143.941.446.023.9	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Target 3.1 Pada Tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup												
INDIKATOR SDGs	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)										
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (b).di fasilitas kesehatan										
PROGRAM 1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Cakupan Penurunan kasus Kematian Ibu	Persen	10	7	7	7	7	7	7	26,911,557,596	APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Antenatal Care sesuai Standar (ANC 6 kali)	Persen	66,23	80	82	85	88	90	92		APBD	Dinas Kesehatan
	Cakupan Persalinan Di fasilitas Kesehatan sesuai Standar	Persen	70,17	88	89	90	91	92	93		APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase Ibu Nifas yang mendapatkan pelayanan Nifas lengkap	Persen	70,02	88	89	90	91	92	93		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Kesehatan
Target.3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000												
Indikator SDG's	3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa), (b) Angka Kematian Bayi										
PROGRAM 2. PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
	Cakupan Penurunan kasus Kematian Balita	Persen	5	5	5	5	5	5	5		APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangnya	Persen	92,39	50	55	60	65	70	75		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	26,911,557,596	APBD	Dinas Kesehatan
Target.3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya												
Indikator SDG's	3.3.2*	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk										



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
PROGRAM 3 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	Persen	4,90	70	70	70	70	70	70			
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15	32,434,407,475	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	Persen	96,55	100	100	100	100	100	100		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15	32,434,407,475	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria										
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang										
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun										
PROGRAM 4. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai Positivity Rate (PR) Malaria <5%	Persen	10	10	10	10	10	10	10		APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi												
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15	32,434,407,475	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati.										
	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta										
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati.										
PROGRAM 5. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	Persen	84.27	86	86	87	88	89	90		APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	Persen	84.97	84.97	84.97	90	90	90	90		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15	32,434,407,475	APBD	Dinas Kesehatan
Target.3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan												
INDIKATOR SDGs	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur 10-18 tahun										
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi										
	3.4.1.(b)	Presentase Penderita Hipertensi umur ≥18 tahun.(Dalam pengendalian)										
PROGRAM 6. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan skrining penyakit jantung pada populasi target	%	N/A	30	50	50	50	50	50		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15	32,434,407,475	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun										
PROGRAM 7. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten/kota yang memiliki proporsi obesitas < 23,4	Kab/Kota	N/A	3	5	6	6	7	7		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15	32,434,407,475	APBD	Dinas Kesehatan
Target 3.5. 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan												
INDIKATOR SDGs	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis										
	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi										
PROGRAM 8. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan NAPZA	Puskesmas	9								APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
dengan Kecanduan NAPZA												
Target.3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.												
Indikator SDGs	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern: (b) Kelompok Pasangan Usia Subur (PUS)										
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)										
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.										
	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi CAMPAK										
	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi DPT										
	3.b.1*	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan										
	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan										
	3.b.3*	Persentase Puskesmas dengan 80% ketersediaan obat dan vaksin esensial menurut kab/kota										
PROGRAM 9. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan								Puske smas : 81,92 RS : 73,3	Puske smas : 81,92 RS : 73,3		APBD	Dinas Kesehatan
Target.3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.												
Indikator SDGs	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan Kesehatan										
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)										
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	78,48	80	80	80	80	80	80		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	827,623,326,082	APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Masyarakat												
Target.3.a Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control WHO</i> di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.												
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun										APBD	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	persen	18,2	32,83	32,80	32,78	32,76	32,74	32,73		APBD	Dinas Kesehatan
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur 10-21 tahun	persen	30	27	25	23	20	20	17		APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 10. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	10		APBD	Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kab/Kota	7	7	8	8	9	10	10		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	15	15	15	15	15	15	15	32,434,407,475	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDG's	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi CAMPAK										
		Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi DPT										
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan										



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
PROGRAM 11. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan imunisasi bayi lengkap (IDL)	persen	80	80	82	84	85	86	87		APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1,207,593,692	APBD	Dinas Kesehatan
Indikator SDG's	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan										
		Persentase Puskesmas dengan 80% ketersediaan obat dan vaksin esensial menurut kab/kota										
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan fasilitas kesehatan yang memiliki obat,vaksin, dan BMHP sesuai standar		80	85	88	90	93	95	95		APBD	Dinas Kesehatan
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari LS yang Ditindaklanjuti oleh Pemda (RIBK Renstra)		0	100	100	100	100	100	100		APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		10	10	10	10	10	10	10	6,961,150,550	APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan									451,047,369,914	APBD	Dinas Kesehatan
Target.3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil												
Indikator SDG's	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi Tenaga Kesehatan										
		Kepadatan dan distribusi dokter gigi spesialis										
		Kepadatan dan distribusi bidan										
		Kepadatan dan distribusi dokter umum										
		Kepadatan dan distribusi dokter gigi										
		Kepadatan dan distribusi perawat										
		Kepadatan dan distribusi tenaga apoteker										
		Kepadatan dan distribusi tenaga gizi										
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan										
		Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan tradisional										
		Kepadatan dan distribusi tenaga psikolog klinik										
		Kepadatan dan distribusi tenaga teknik biomedik										
		Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik										
PROGRAM 12. PROGRAM PENINGKATAN KAPSITAS SUMBER DAYA KESEHATAN												
Kegiatan 1	Cakupan Puskesmas	Persen	85,31	86	87	88	89	90	91	3,483,743,264	APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	dengan SDM Kesehatan sesuai standar											
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan RS Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	66	73	73	80	80	86	86	3,483,743,264	APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	SDMK	16.509	16,610	16,720	16,830	16,910	16,980	16,980	,673,181,681	APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	SDMK	16.509	16,610	16,720	16,830	16,910	16,980	16,980	,810,561,583	APBD	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan SDM Kesehatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang meningkat	Persen	3.18	3.2	3,3	3,4	3,6	3,7	3,7	29,607,793,083	APBD	Dinas Kesehatan
Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	SDMK	1,062	1,112	1,162	1,212	1,262	1,312	1,312	27,751,698,758	APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Daya Manusia Kesehatan												
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	,856,094,325	APBD	Dinas Kesehatan



Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	4.1.2	Tingkat Penyelesaian pendidikan jenang SD/Sederajat,SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat										
	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah usia 7-12 tahun, usia 13-15 tahun dan usia 16-1 tahun										
	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar) menurut jenis kelamin										
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Angka Drop Out (DO) SMA	persen	0,03	0,029	0,028	0,027	0,026	0,025	0,024	8,082,963,0 00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 1. Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non akademik	Peserta didik	NA	125	125	125	125	125	125	1,706,745,0 00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 2. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golonga n Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	NA	120	120	120	120	120	120	424,206,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidika n	NA	72	72	72	72	72	72	1,052,357,0 00	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub kegiatan 4. Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1,311,607,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 5. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	973,127,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 6 . Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	7	7	7	7	7	7	7	857,977,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 7. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan kekerasan dan intoleransi	Kegiatan	NA	2	2	2	2	2	2	835,562,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 8. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan pendidikan	NA	72	72	72	72	72	72	921,382,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Angka Drop Out (DO) SMK	persen	0,06	0.059	0.058	0.057	0.056	0.055	0.054	6,957,413,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub kegiatan 1 Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	orang	100	360	360	360	360	360	360	3,511,719,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 2. Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	NA	5	5	5	5	5	5	846,196,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Kegiatan 3. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	orang	NA	100	100	100	100	100	100	1,041,281,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 4. Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	974,339,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 5. Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	NA	1	1	1	1	1	1	583,878,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs :	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)										
	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa umur 15-24 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (%)										
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
Kegiatan 1: Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang dibangun	ruang	17							3,511,719,000	APBD	Balai Teknologi Informasi dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Menengah Kejuruan												Komunikasi Pendidikan
INDIKATOR SDGs :	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada Tingkat SD/Sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tingkat SMP/sederaat, SMA/SMK/Sederajat dan Perguruan Tinggi untuk (a) Perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbaah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas										
PROGRAM 3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
Kegiatan 1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Persentase Ketersediaan data Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten / Kota dalam satu provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	365,305,140 ,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub kegiatan 1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	5	2	2	2	2	2	2	341,055,464 ,000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
Sub Kegiatan 2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	1	3	3	3	3	3	3	24,249,676, 000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB



Tujuan 5. Kesenjangan Gender

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs :	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.										
PROGRAM 1. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
Kegiatan 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	persen	5	5	5	5	5	5	5	3,430,089,224	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	408,114,769	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
monitoring evaluasi dan pe dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	408,114,769	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan provinsi	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	1,020,286,922	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta kabupaten/kota	orang	350	400	450	500	550	600	650	2,040,573,844	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Kegiatan 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang memperoleh	persen	100	100	100	100	100	100	100	2,564,727,015	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan rujukan lanjutan secara tepat waktu dan terorganisasi											Penduduk danKB
Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	50	50	170,047,820	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan pendampingan oleh tenaga ahli Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	50	50	255,071,731	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah	orang	50	50	50	50	50	50	50	255,071,731	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota											
Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	50	50	408,114,769	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	50	50	850,239,101	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	50	50	170,047,820	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Jumlah perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin bpjs dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang	50	50	50	50	50	50	50	340,095,641	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
INDIKATOR SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah: Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota										
	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah: DPRD										
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial										
PROGRAM 2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
Kegiatan 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan ARG	persen	100	100	100	100	100	100	100	2,633,775,227	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraa n PUG di Tingkat Provinsi	Kebijakan	60	-	2	4	6	8	11	1,105,126,250	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Monitoring, Evaluasi, dan Pe penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Dokumen		2	2	2	2	2	2	408,114,769	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan Bimtek	orang		50	50	50	50	50	50	918,258,230	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan pemerintah)	Lembaga		40	40	40	40	40	40	204,057,385	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Kegiatan 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentase Perempuan Kepala Keluarga yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha	persen		50	50	50	50	50	50	3,061,872,887	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Lembaga		40	40	40	40	40	40	340,095,641	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Monitoring, evaluasi, dan pe pemberdayaan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Dokumen		2	2	2	2	2	2	408,114,769	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
perempuan kewenangan provinsi	pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi											Pengendalian Penduduk danKB
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	orang		300	350	400	450	500	550	2,380,669,485	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
INDIKATOR SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan										
PROGRAM 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
Kegiatan 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan atau dokumen perencanaan daerah yang telah mengintegrasika n arah kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	Dokumen	NA	1	1	1	1	1	1	2,298,928,553	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal	Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Kabupaten /kota	NA	2	2	2	2	2	2	408,114,769	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
dan Informal Pada Ormas Pengelola Masyarakat												
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di satuan Pendidikan Jenjang SLTA- MA sesuai kearifan loka	Dokumen		3	3	3	3	3	3	306,086,076	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan sektor lain	Daerah		2	2	2	2	2	2	544,153,025	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal melalui Kediklatan, Kepramukaan dan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal Melalui	Dokumen		3	3	3	3	3	3	306,086,076	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Jalur Informal Melalui Masyarakat/Umum	Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Masyarakat/Umum Sesuai											
Kegiatan 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk	Dokumen		10	10	10	10	10	10	1,360,376,563	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis keluarga	Dokumen		10	10	10	10	10	10	1,360,376,563	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
INDIKATOR SDGs	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 5 tahun										
	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 0 tahun										
PROGRAM 4. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
Kegiatan 1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Infrstruktur TIK yang Disediakan oleh Dinas Kominfotik	Persen	75	75	80	85	90	95	100	14.499.790.000	APBD	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	OPD		43	43	43	43	43	43	1.114.750.000	APBD	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2023	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Aman)										
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian keseluruhan program yang diukur dari penyusunan dokumen evaluasi, basis data, dan pembinaan teknis di tingkat kabupaten/kot a	%	84.41	85.41	86.41	87.41	88.41	89.41	90.41	33,341,562,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Cipta Karya)
Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Ko ta yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab/Kota	5	10	10	10	10	10	10	33,341,562,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Ko ta yang disusun	Dokumen	2	-	1	4	4	6	2	28,441,562,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
PROGRAM 2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	35.8	37	40	45	50	55	60	90,488,521,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2023	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kawasan Strategis Daerah Provinsi												Ruang (Pengembangan Permukiman)
Subkegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Liter/Detik	100	100	-	30	45	45	50	26,009,950,000	APBD	
Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Liter/Detik	N/A	-	30	30	30	30	30	12,000,000,000	APBD	
Subkegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasi nya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Unit	N/A	-	1	1	1	1	1	33,461,006,000	APBD	
Subkegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	SR	N/A	-	-	1000	1150	1200	1250	10,617,565,000	APBD	
INDIKATOR SDGs	6.2.1*	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air										
	6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak										
PROGRAM 3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2023	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Prosentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	persen	86,8								APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
Subkegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase penyelesaian keseluruhan program yang diukur dari penyusunan dokumen evaluasi, basis data, dan pembinaan teknis di tingkat kabupaten/kot a	%	5.56	5.56	12	18	24	30	33	16,120,781,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Cipta Karya)
Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	-	1	-	-	-	5	9,600,123,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Cipta Karya)
Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kot a yang memperoleh Pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab/Kota	3	-	3	-	-	-	10	6,520,658,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Cipta Karya)
PROGRAM 4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												
Kegiatan : Penyelenggaraan	Jumlah kawasan strategis/prioritas	Kawasan	5								APBD	Dinas Pekerjaan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2023	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Provinsi yang terlayani akses dan prasarana pendukung kesehatan											Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	35.8	37	40	45	50	55	60	111,426,891,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)
Subkegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan 1 unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/ sesuai	Rumah Tangga	30	25	35	90	120	150	150	6,900,000,000	APBD	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Pengembangan Permukiman)



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2023	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.											
PROGRAM 5. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
Kegiatan 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provins											APBD	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkunga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkunga	Dokumen	1								APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku (Indeks Kualitas Air)										
INDIKATOR SDGs	6.6.1*	Perubahan Tingkat Sumber Daya Air Terkait Ekosistem dari Waktu ke Waktu (Indeks Kualitas Lahan)										
PROGRAM 6. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Kegiatan: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Udara) (Unit Usaha)	Unit Usaha	13	13	13	13	13	13	13	7.890.412.215	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	737.500.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2023	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut												
Sub kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	7.152.912.215	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 7. PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)												
Kegiatan: 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	Daerah Aliran Sungai	540	540	540	540	540	540	540	581.314.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	281.314.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	0	0	2	2	2	2	2	200.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	100.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 8. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2023	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase kasus hukum kehutanan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	16.382.409.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase kejadian kebakaran hutan/lahan yang dapat ditanggulangi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	1.513.500.000		
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Hektar	164.231	180.44 1	180.63 2	180.63 2	180.63 2	180.63 2	180.63 2	7.827.300.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	3.564.400.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	7.1.1*	Rasio Elektrifikasi										
	7.1. (a)	Konsumsi Listrik per kapita										
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan	Jumlah pertimbangan teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	Ijin	44	28	28	28	28	28	28	599.965.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi												
Sub kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	285.451.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub kegiatan 2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	314.550.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Kegiatan 2. Penganggaran	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RT	9710	300	325	687	945	1107	1547	10.114.073.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembanguna n Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan												Mineral
Sub kegiatan 1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	378.344.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub kegiatan 2. Pembanguna n Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	Unit	9710	300	325	687	945	1107	1547	9.735.729.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
INDIKATOR SDGs	7.1.2.(b)	Proporsi rumah tangga yang emnggunakan gas/LPG sebagai bahan bakar utama untuk memasak terhadap total rumah tangga										
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN												
Kegiatan 1. Penatausaha an Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton	Jumlah izin usaha bahan bakar nabati yang melaksanaka n kegiatan usaha niaga sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku	izin	1	1						5,380,000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Per Tahun												
Sub kegiatan: Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan	Laporan		1						5,380,000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan	Laporan		1						5,380,000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka energi terbarukan di daerah.	laporan		1						5,380,000	APBD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral



Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	8.1.1.[a]	PDRB per kapita										
	8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita										
PROGRAM 1 : PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
Kegiatan 01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	0	0	4	4	4	4	4	3,187,700,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	0	0	0	23	23	23	23	3,336,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	17	300	300	300	300	300	2,719,700,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan 02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	Persen	75	75	75	75	75	75	75	8.328.166,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Siswa yang bekerja di sektor pertanian	Persen		5	5	5	5	5	5		APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	7,859,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Poktan	0	0	300	300	300	300	300	5,717,166,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 03 Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk dan beroperasi	Persen	0	14	12	11	10	9	9	2,300,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah Korporasi Petani Yang didampingi	Unit	0	0	18	18	18	18	18	600,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	0	0	10	20	20	20	20	4,000,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang	Tersedianya bibit dan ternak yang unggul	Ekor	10.300	101.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	161.591.163.023	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sumbernya dari Daerah												
Sub Kegiatan 1. Pengadaan Hijau Pakan ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Jumlah Hijauan pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Provinsi lainnya	Ton	5	25	100	100	100	100	100	14.433.925.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Kegiatan 2. Pengadaan Benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lainnya	Jumlah Benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lainnya	Dosis	0	100.000	100	100	100	100	100	3.215.765.000	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Kegiatan 3. Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Jumlah Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah Provinsi lainnya	Ekor	3.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	143.941.446.023.9	APBD	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
INDIKATOR SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun										
PROGRAM 2. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	11	11	11	11	11	11	26.770.634.764	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan	orang	8100	13.000	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	26.770.634.764	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Sosial Ketenagakerjaan											
INDIKATOR SDGs	8.3.1*	Proporsi kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin										
PROGRAM 3 : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	orang	0	615	715	870	1.025	1.180	1.335	2.379.373.578	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	orang	0	500	500	600	700	800	900	588.820.855	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	0	0	100	125	150	175	200	216.725.719	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	0	100	100	125	150	175	200	403.451.438	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Penyelenggaraan UnitLayanan Disabilitas	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan	Orang	0	15	15	20	25	30	35	1.170.375.567	APBD	Dinas Tenaga Kera dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Ketenagakerjaan	fasilitasi layanan ULD											Trasmigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang	180	250	250	370	490	610	730	3.360.040.000	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (BID. PENEMPATAN)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	200	200	300	400	500	600	1.366.968.000	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pencari kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan	orang	180	50	50	70	90	110	130	1.993.072.000	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
PROGRAM 4 : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	396	296	410	524	638	752	866	10.472.496.745	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Klaster Kompetensi												
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	orang	300	200	250	300	350	400	450	3.160.609.509	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLKDLN matram)	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	96	96	160	224	288	352	416	7.037.278.696	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	Jumlah Kesepakatan/Koord inasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	5	10	10	10	10	10	10	274.608.540	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
PROGRAM 5 : PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN												
Kegiatan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3	Perusahaan	334								APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
INDIKATOR SDGs	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja										
PROGRAM 6. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (HI)												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan dan pekerja yang dibina	Perusahaan	1,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	760.562.500	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial [BID. HI]	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	0	35	35	35	35	35	35	500.375.000	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja [BID. HI]	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	260.187.500	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	35	76	91	106	121	136	151	1.860.378.125	APBD	Disnakertran



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
(Satu) Daerah Provinsi												
Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	35	20	25	30	35	40	45	560.421.875	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	0	20	25	30	35	40	45	260.187.500	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID.HI]	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	0	11	11	11	11	11	11	584.440.625	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi [BID. HI]	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala	Perusahaan	0	25	30	35	40	45	50	455.328.125	APBD	Disnakertran



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Provinsi											
Kegiatan 3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat keputusan	11	11	1	1	1	1	1	325.234.375	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) [BID. HI]	Jumlah Penetapan UMP	Surat keputusan	11	11	1	1	1	1	1	325.234.375	APBD	Disnakertran
INDIKATOR	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka										
	8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran										
PROGRAM 7 : PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	orang	0	615	715	870	1.025	1.180	1.335	2.379.373.578	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	orang	0	500	500	600	700	800	900	588.820.855	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	0	0	100	125	150	175	200	216.725.719	APBD	Disnakertran



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]												
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	0	100	100	125	150	175	200	403.451.438	APBD	Disnakertran
Penyelenggaraan UnitLayanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	0	15	15	20	25	30	35	1.170.375.567	APBD	Disnakertran
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Disnakertran
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang	180	250	250	370	490	610	730	3.360.040.000	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (BID. PENEMPATAN)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	200	200	300	400	500	600	1.366.968.000	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan	Jumlah Pencari	orang	180	50	50	70	90	110	130	1.993.072.000	APBD	Disnakertran



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	kerja, PMI Purna Yang Diberdayakan											
PROGRAM 8: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	396	296	410	524	638	752	866	10.472.496.745	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	orang	300	200	250	300	350	400	450	3.160.609.509	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLKDLN matram)	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	96	96	160	224	288	352	416	7.037.278.696	APBD	Disnakertran
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koord inasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	5	10	10	10	10	10	10	274.608.540	APBD	Disnakertran



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
[BID. LATTAS]												
PROGRAM 9. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI												
Kegiatan : Pendataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Paket	5	0	15	15	15	15	15	2.341.162.000	APBD	Disnakertrans NTB
Sub Kegiatan Bantuan non strandar transmigrasi (dalam bentuk barang sesuai kearifan lokal)	Jumlah Bantuan Non- Standar yang Diberikan kepada Transmigran	Paket	5	5	5	5	5	5	5	1.170.581.000	APBD	Disnakertrans NTB
Sub kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Paket	0	5	5	5	5	5	5	1.170.581.000	APBD	Disnakertrans NTB
Indikator SDGs	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)										
	8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja										
PROGRAM 10. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Kegiatan 1. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Dokumen	11	11	11	11	11	11	11	26.770.634.764	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	orang	8100	13.00 0	20.00 0	20.00 0	25.00 0	30.000	35.000	26.770.634.764	APBD	Dinas Tenaga Kera dan Trasmigrasi
Indikator SDGs	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.										
	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara										
PROGRAM 11. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
Kegiatan 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	17.217.400.000	APBD	Dinas Pariwisata
Sub Kegiatan 1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	4.526.072.947	APBD	Dinas Pariwisata
Sub Kegiatan 2. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	2.973.904.259	APBD	Dinas Pariwisata
Sub Kegiatan 3. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	9.717.422.794	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Negeri												
PROGRAM 12. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
Kegiatan 1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi :	Jumlah daya tarik wisata provinsi yang di kelola	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	2.374.817.525	APBD	Dinas Pariwisata
Sub Kegiatan 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	521.979.685	APBD	Dinas Pariwisata
Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	521,979,685	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	598,866,913	APBD	Dinas Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	598,866,913	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan	orang	20	20	20	20	20	20	20	205,953,829	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Tarik Wisata Provinsi	kapasitasnya											
Kegiatan 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikelola	lokasi	4	4	4	4	4	4	4	3,885,563,734	APBD	Dinas Pariwisata
Sub Kegiatan 1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	449,150,185	APBD	Dinas Pariwisata
Sub kegiatan 2. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	449,150,185	APBD	Dinas Pariwisata
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	unit	5	5	5	5	5	5	5	1,639,812,810	APBD	Dinas Pariwisata
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	449,150,185	APBD	Dinas Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	598,866,913	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM	Jumlah Orang Pengelola	Orang	20	20	20	20	20	20	20	299,433,457	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan											Pariwisata
Kegiatan 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kotadalam1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha pariwisata yang tanda usahanya telah terdaftar	usaha	50	50	50	50	50	50	50	1,048,017,098	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	usaha	20	20	20	20	20	20	20	449,150,185	APBD	Dinas Pariwisata
Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata	10	10	10	10	10	10	10	299,433,457	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Usaha Pariwisata	10	10	10	10	10	10	10	149,716,728	APBD	Dinas Pariwisata
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	149,716,728	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Provinsi	Investasi Pariwisata Provinsi											

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Provinsi										
PROGRAM 1. PROGRAM PENYELENGGARAN JALAN												
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kondisi Mantap Jalan Provinsi	persen	75.54	76,04	76,71	77,42	78,18	78,96	79,76	630,712,732,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bina Marga)
Subkegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	41.04	13.7	11.31	11.78	23.015	15.107	16.18	395,997,118,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	Dokumen	2	6	2	2	2	2	2	14,412,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Jembatan yang Disusun											
Subkegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	1493.12	1493.12	1504.1027	1504.1027	1504.1027	1504.1027	1504.1027	2,657,845,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
Subkegiatan Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	Dokumen	N/A	-	1	1	1	1	1	720,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Km	30913	280.52	285.68	328.4	303.8653311	298.06	333.46	72,619,404,000	APBD	Dinas PUPR (Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi)
Subkegiatan Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	2	2	60	30	25	35	55	90,914,746,000	APBD	Dinas PUPR (Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi)
Subkegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	Km	N/A	2	3	3	3	3	3	46,272,000,000	APBD	Dinas PUPR (Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi)
Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter	N/A	0.025	3294.81	3294.81	3294.81	3294.81	3294.81	7,089,620,000	APBD	Dinas PUPR (Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi)
PROGRAM 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
Kegiatan 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan	Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	persen	56.35	55	57	57	59	61	63	49,087,562,278.42	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
di Jalan Provinsi												
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Provinsi yang tersedia	unit	18	449	124					46,487,562,278.42	APBD	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	unit	24		347					2,600,000,000.00	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase Fasilitas Terminal yang Terpenuhi Sesuai dengan SPM	persen		42.5	44	45.5	47	48.5	49	4,754,849,891.00	APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe B yang Terbangun yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	unit		1						169,500,000.00	APBD	Dinas Perhubungan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit		1	1	1	1	1	1	4,585,349,891.00	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu	Laporan	12	12	24	24	24	24	24	4,290,295,145.40	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Lintas											
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	laporan	6	6	12	12	12	12	12	3,535,458,000	APBD	Dinas Perhubungan
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	laporan	6	6	12	12	12	12	12	3,788,818,627.20	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 4. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Andalalin	laporan	24	24	24	24	24	24	24	1,117,805,000.80	APBD	Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	laporan	12	12	12	12	12	12	12	557,027,500.80	APBD	Dinas Perhubungan
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	umlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	laporan	12	12	12	12	12	12	12	560,777,500.00	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 5. Kegiatan Audit dan	Persentase Pelaksanaan	persen	100	100	100	100	100	100	100	1,769,068,129.96	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan											
Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Terminal	laporan	2		2	2	2			371,595,170.00	APBD	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi. Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan		12	1	1	2	2		279,895,700.00	APBD	Dinas Perhubungan
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas Jalan yang Diidentifikasi dan Dilakukan Pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Dokumen		2	2	2	2	2	2	639,477,500.00	APBD	Dinas Perhubungan
Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	428,358,410.00	APBD	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Pengawasan	Jumlah Laporan Uji Petik terhadap	laporan			3	2	2	2	2	299,724,500.00	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi. Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan	Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor											
INDIKATOR SDGS	9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi										
	9.1.2.[a]	Jumlah bandara										
	9.1.2.[b]	Jumlah Pelabuhan penyeberangan										
PROGRAM 3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN												
Kegiatan 1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/K ota dalam Daerah Provinsi. Pelabuhan Antar Daerah Provinsi. dan Pelabuhan Internasionaldan Pelabuhan Internasional	Persentase Perusahaan Pelayaran Rakyat sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	persen	100	100	100	100	100	100	100	357,002,005.00	APBD	Dinas Perhubungan
Fasilitasi	Jumlah Angkutan	unit		6						24,806,700.	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan									00		Perhubungan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan	6		6	6	6	6	6	332,195,305.00	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam	Persentase Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan yang sesuai Spesifikasi Teknis	persen	100	100	100	100	100	100	100	739,506,875.00	APBD	Dinas Perhubungan
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan	umlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan	laporan	27	27	27	27	27	27	27	739,506,875.00	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengoperasian Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai. Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi											
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang. Jasa Pengurusan Transportasi. Angkutan Perairan Pelabuhan. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut. Tally Mandiri. dan Depo Peti Kemas	Persentase Perusahaan Jasa di Kawasan Pelabuhan yang beroperasi dan memiliki izin	persen		62.5	65.63	68.75	71.88	75	78.13	1,255,895,967.00	APBD	Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang. Jasa Pengurusan Transportasi.	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang. Jasa	Laporan		40	42	44	46	48	50	1,255,895,967.00	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Angkutan Perairan Pelabuhan. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut. Tally Mandiri. dan Depo Peti Kemas	Pengurusan Transportasi. Angkutan Perairan Pelabuhan. Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut. Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas											
Kegiatan 3. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Potensi dan Kelayakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	persen		5	2	2	1	1	1	5,400,000,000.00	APBD	Dinas Perhubungan
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen		5	2	2	1	1	1	5,400,000,000.00	APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang	persen		100	100	100	100	100	100	18,451,090,303.00	APBD	Dinas Perhubungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pelabuhan Pengumpan Regional	Dikelola. Dipelihara dan Diawasi											
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	unit		1	1	1	1	1	1	17,117,405,703.00	APBD	Dinas Perhubungan
Kegiatan 4. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Izin Angkutan Penyeberangan yang Melayani Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persen		100	100	100	100	100	100	1,001,880,000.00	APBD	Dinas Perhubungan
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai. Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai. Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	unit		12	12	12	12	12	12	1,001,880,000.00	APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs	9.2.1*	Rasio PDRB industry pengolahan dan nilai tambah industry pengolahan per kapita										
	9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan										
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industry pengolahan										
PROGRAM 4. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana											APBD	Dinas Perindustrian



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pembanguna Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	kegiatan	2	2	3	4	4	5	6	3.368.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 2. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kegiatan	5	5	6	7	7	7	8	1.642.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 3. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kegiatan	3	3	4	5	5	6	6	13.147.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 4.												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM	50	50	60	70	75	80	85	57.002.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
PROGRAM 5. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
Kegiatan 1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Infrstruktur TIK yang Disediakan oleh Dinas Kominfotik	Persen	75	75	80	85	90	95	100	14.499.790.000	APBD	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	OPD		43	43	43	43	43	43	1.114.750.000	APBD	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	10.1.1*	Koefisien Gini										
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur										
PROGRAM 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN												
Kegiatan 01. Kegiatansan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	25,855,897,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	21,355,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	300,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Peredaran Sarana Pertanian	Peredaran Sarana Pertanian											
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan	0	0	1	1	1	1	1	6,843,497,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	1		1	1	1	1	1	400,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Koordinasi Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	keg	0	0	1	1	1	1	1	400,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	laporan	1	0	1	1	1	1	1	5,138,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan	1	0	1	1	1	1	1	2,525,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan	1	0	0	1	1	1	1	300,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	1	0	1	1	1	1	1	1,033,800,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 02. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	Persen		100	100	100	100	100	100	63,553,581,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 3.	Persentase	Persen		2	2	2	2	2	2		APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah	peningkatan produksi benih tanaman											Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pengembangan ternak unggas (bibit)	Persentase sertifikasi benih tanaman	Persen		90	90	90	90	90	90		APBD	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat		11	265	270	272	280	280	1,048,038,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	774,093,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	1,800,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0	0	0	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1,014,034,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	480,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Setek	0	0	0	0	0	0	0	0	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	145,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan	Ton	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	120,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Berbentuk Biji	Berbentuk Biji											
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	0	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,796,104,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	96	96	104	104	104	104	4,892,198,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton	0	0	0	8	8	8	8	1,320,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	11,896,837,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih hortikultura	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	23,410,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih perkebunan	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	15,631,370,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kegiatan 3. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi										460,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas	0	0	1	1	1	1	1	230,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	0	0	1	1	1	1	1	230,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM 2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
<u>Kegiatan 1.</u> 2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi melalui media provinsi	Jumlah Laporan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Dokumen	2	3	3	3	3	3	3	3.006.751.646	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
<u>Subkegiatan 1.</u> 2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	0	1	1	1	1	1	245.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
<u>Subkegiatan 2.</u> 2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	2.623.751.646	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 3. 2.09.03.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	138.000.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
PROGRAM 3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
<u>Kegiatan 1.</u> 2.09.04.1.02 Kegiatan Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Laporan Penaganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	2	4	4	4	4	4	12.084.506.007	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
<u>Subkegiatan 1.</u> 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	8.524.250.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
<u>Subkegiatan 2.</u> 2.09.04.1.02.0003 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	3.045.656.007	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 3. 2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	164.600.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 4.	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	350.000.000	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.09.04.1.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Pangan dan Gizi Provinsi											Ketahanan Pangan
PROGRAM 4 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												
Kegiatan 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Post Market dan Pre Market	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	3.786.346.900	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 1. '2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikasi	65	25	65	65	65	65	65	1.502.100.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 2. '2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	843.346.900	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 3. '2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	970.900.000	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Subkegiatan 4.	Jumlah sarana dan prasarana	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	470.000.000	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
'2.09.05.1.01.0010	pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan											Ketahanan Pangan
PROGRAM 5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												
Kegiatan 1. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan kasus yang di tangani	Persen	0	80	100	100	100	100	100	11.699.612.000	APBD	Dinas Perdagangan
Sub Kegiatan 1. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang ditangani	Kasus	0	0	65	68	70	75	75		APBD	Dinas Perdagangan
Sub Kegiatan 2. Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	lembaga	0	6	6	6	6	6	6	11.699.612.000	APBD	Dinas Perdagangan
Sub Kegiatan 3. Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	lembaga	0	0	50	55	60	65	65		APBD	Dinas Perdagangan
PROGRAM 6. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
Kegiatan 1. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembanguna											APBD	Dinas Perindustrian



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	kegiatan	2	2	3	4	4	5	6	3.368.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 2. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kegiatan	5	5	6	7	7	7	8	1.642.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 3. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kegiatan	3	3	4	5	5	6	6	13.147.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
Kegiatan 4. Penyusunan,												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi												
Sub kegiatan 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM	50	50	60	70	75	80	85	57.002.000.000	APBD	Dinas Perindustrian
PROGRAM 7. PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
Kegiatan 1. Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daya tarik wisata provinsi yang di kelola	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	2.374.817.525	APBD	Dinas Pariwisata
Sub kegiatan 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	521.979.685	APBD	Dinas Pariwisata
Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	598.866.913	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	dan legal ditetapkan Kepala Daerah											
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	205.953.829	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	20	20	20	20	20	20	20	598.866.913	APBD	Dinas Pariwisata
Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang dikelola	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	3.885.563.734	APBD	Dinas Pariwisata
Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	1.639.812.810	APBD	Dinas Pariwisata
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Kawasan Pariwisata Provinsi yang	unit	5	5	5	5	5	5	5	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kawasan Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpelihara											
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	598.866.913	APBD	Dinas Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	orang	20	20	20	20	20	20	20	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Kegiatan 2. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi pariwisata provinsi yang dikelola	Lokasi	7	7	7	7	7	7	7	6.737.012.088	APBD	Dinas Pariwisata
Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi	2	2	2	2	2	2	2	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	3	3	3	3	3	3	3	2.844.377.153	APBD	Dinas Pariwisata
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	898.300.369	APBD	Dinas Pariwisata
Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	598.866.913	APBD	Dinas Pariwisata
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	748.583.641	APBD	Dinas Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	orang	20	20	20	20	20	20	20	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi											
Kegiatan 3. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/ Kotadalam1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha pariwisata yang tanda usahanya telah terdaftar	Usaha	50	50	50	50	50	50	50	1.048.017.098	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Usaha	20	20	20	20	20	20	20	449.150.185	APBD	Dinas Pariwisata
Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata	10	10	10	10	10	10	10	299.433.457	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha	Usaha Pariwisata	10	10	10	10	10	10	10	149.716.728	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)											
Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	149.716.728	APBD	Dinas Pariwisata
PROGRAM 8. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF												
Kegiatan 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	90	90	90	90	90	90	90	13.053.370.520	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.684.026.080	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1.568.185.440	APBD	Dinas Pariwisata
Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1.568.185.440	APBD	Dinas Pariwisata
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah produk kreatif	Produk	17	17	17	17	17	17	17	1.568.185.440	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Bidang Pariwisata												
Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang	10	10	10	10	10	10	10	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Orang	10	10	10	10	10	10	10	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang	10	10	10	10	10	10	10	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	784.092.720	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif											
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Orang	10	10	10	10	10	10	10	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Kegiatan 2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah orang pelaku ekonomi kreatif	Orang	100	100	100	100	100	100	100	7.056.834.480	APBD	Dinas Pariwisata
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Pelatihan Asesor Kompetensi/Workpl	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
ace Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Asesor Kompetensi/Workpl ace Asesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif											
Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Lembag a	5	5	5	5	5	5	5	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang	20	20	20	20	20	20	20	1.176.139.080	APBD	Dinas Pariwisata
ROGRAM 9. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN												
Kegiatan 1. Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah pertimbanga n teknis perizinan berusaha bidang ketenagalistrikan yang diterbitkan	Ijin	44	28	28	28	28	28	28	599.965.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	285.451.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi											
Sub kegiatan 2. Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	314.550.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Kegiatan 2. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran	RT	9710	300	325	687	945	1107	1547	10.114.073.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub kegiatan 1. Pengumpulan dan	Jumlah Dokumen Terkait Penerima	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	378.344.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu											Mineral
Sub kegiatan 2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	Unit	9710	300	325	687	945	1107	1547	9.735.729.000	APBD	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
PROGRAM 10. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP												
Kegiatan 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan tangkap Non pelabuhan	Ton	227.636,54	225.959	228.219	230.502	232.807	235.135	237.486	12.013.429.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	2	2	2	2	2	2	74.569,400	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1.754.500,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 3. Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Jumlah rekomendasi surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan	Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 4.	Jumlah data dan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	95.000,000	APBD	Dinas Kelautan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	n										dan Perikanan
Sub kegiatan 5. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	100	50	60	60	60	60	60	10.089.360,00 0	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 6. Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	jumlah sarana pendukung untuk pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan terukur	Unit	1	1	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang memiliki izin usaha perikanan tangkap	Unit	94	100	100	100	100	100	100	166.923,00	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan 12 mil beroperasi sampai dengan	persen	100	100	100	100	100	100	100	84.525,70	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penyediaan Data	Jumlah data dan informasi perizinan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	82.397	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia											
Kegiatan 3. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terdaftar	Unit	735	250	250	250	250	250	250	169.230	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen	735	250	250	250	250	250	250	84.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan I	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	84.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 4.	Jumlah pelabuhan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	18.209.060	APBD	Dinas Kelautan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	perikanan yang memenuhi SPM											dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan	1	1	1	1	1	1	1	324.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	10	4	4	4	4	4	4	16.934.200	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 3. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	layanan	20	20	20	20	20	20	20	950.860	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 5. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Persetujuan penerbitan izin Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	PPKP	205	50	50	50	50	50	50	112.820	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	56.410	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Kewenangan Provinsi											
Sub kegiatan 2. Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	rekome ndasi	205	50	50	50	50	50	50	56.410	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 6 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah kapal perikanan di atas 10GT sampai dengan 30 GT	Unit	104	65	65	65	65	65	65	112.820	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	56.410	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekome ndasi	104	65	65	65	65	65	65	56.410	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 7. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)	Unit	735	250	250	250	250	250	250	112.820	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Daerah Provinsi yang terdaftar											
Sub kegiatan 1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	112.820	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	735	250	250	250	250	250	250	56.410	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 8. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Produksi Perikanan tangkap Non pelabuhan	Ton	227.636,54	225.959	228.219	230.502	232.807	235.135	237.486	12.013.429.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 11. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA (Termasuk: Budidaya Lobster, KRPL/P2L)												
Kegiatan 1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang terbit	Izin	17	1	1	1	1	1	1	56.410	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang	Rekomendasi	1	1	1	1	1	1	1	256.396	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Bidang Pembudidayaan Ikan	Pembudidayaan Ikan											
Sub kegiatan 2. Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	5	5	5	5	5	5	53.046	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	203.350	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Produksi budidaya ikan di laut	Ton		706.240	710758,08	723283,92	736288,56	749820,96	763871,76	4.384.019	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	1	2	2	2	2	2	2	1.030.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	10	10	10	10	10	10	10	3.050.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 3. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah	Jumlah Pembudidaya	orang	30	30	30	30	30	30	30	53.228	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kabupaten/Kota												
Sub kegiatan 4. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit	0	1	1	1	1	1	1	125.791	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub kegiatan 5. Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	125.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Produksi benih ikan air payau dan tawar	Ekor	15.150.000	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.250.000	14.500.000	14.750.000	8.865.535	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	25	4	10	10	10	10	10	6.577.855	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	15	1	3	4	5	6	10	2.287.680	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 12. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL												
Kegiatan 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas	Ha	183.139,59	249.693,8	395.315,53	446.584,21	460.539,97	474.495,73	474.495,73	11.088.963.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Luar Minyak dan Gas Bumi	bumi yang terkelola											
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	182968	249693,8	395315,53	395315,53	395315,53	395315,53	395315,53	5.200.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	10	10	10	10	10	10	10	1.822.897	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau kecil	orang	100	100	100	100	100	100	100	98.817	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	36.143	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	33.100	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP											
Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku usaha	30	25	25	25	25	25	25	125.815	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan										APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	235.500	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	Ton	143.796,62	160.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	302.408	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pemerintah Pusat												
Penetapan Rekomendasi Prioritas dan Desain pembangunan prasarana usaha pergarman	Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergarman yang ditetapkan	Dokumen									APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergarman yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	106.730	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertimbangan teknis izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	144.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	84.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	60.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Jumlah Kelompok masyarakat pesisir	kelompok	14	2	2	3	4	5	5	7.510.702	APBD	Dinas Kelautan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
dan Pulau-Pulau Kecil	yang diberdayakan											dan Perikanan
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	140	20	30	40	40	50	50	318.242	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	kelompok	1	2	3	4	4	5	5	84.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok	1	2	3	4	4	5	5	84.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	unit	9	10	10	10	10	10	10	3.663.230	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM 13. PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT)												
Kegiatan 1. 2.11.08.1.01	Jumlah lembaga formal/lembaga	Unit	230	230	230	230	230	230	230	500.000.000	APBD	Dinas Lingkungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang ditingkatkan kesadarannya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup											Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan endampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	1	5	7	8	9	10	11	500.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 14. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
Kegiatan 1. 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase sampah yang ditangani di TPA	Persen	53,20	58,70	64,20	69,7	70	69,7	70	25.700.368.300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah di areal publik	Kabupaten/kota	10	10	10	10	10	10	10	4.186.400.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah dan residu yang terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	115.468	116.228	116.988	117.748	118.508	119.268	120.028	21.968.838.300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	3	1	1	1	1	1	1	1.981.530.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub Kegiatan: Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase sampah yang ditangani dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	Ton	0	1	1	1	1	1	1	1.750.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: 2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di Desa/ Kelurahan yang Tersedia	Unit	7.157	10	15	20	25	30	35	121.500.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	Dokumen	1	10	10	10	10	10	10	2.273.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenanga n provinsi yang ditangani	Ton	0	10	10	10	10	10	10	294.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/ kota	Ton	0	10	10	10	10	10	10	294.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Dokumen	0	10	10	10	10	10	10	294.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 15. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
Kegiatan1. 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	Hektar	1.160,11	113,75	165,75	165,75	163,75	163,75	163,75	38.089.830.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	196.793.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	0	3,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	5.500.450.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang di hijaukan di luar kawasan hutan negara	Hektar	80	0	20	20	20	20	20	740.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	879.587.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Rehabilitasi Lahan											
Sub Kegiatan: Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit	0	25	189	189	189	189	189	10.350.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit	0	15	85	85	85	85	85	16.092.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 16. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN												
Kegiatan: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Prosentase peningkatan kelompok tani hutan	KTH	57	57	57	57	57	57	57	22.778.564.600	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2. Prosentase peningkatan kelas kelompok usaha perhutanan sosial	KUPS	21	21	21	21	21	21	21			
Sub Kegiatan: 3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	60	67	67	67	67	67	67	1.683.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	15	80	80	80	80	80	80	11.922.349.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sub Kegiatan: 3.28.05.1.01.0003 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang diisiapkan	Hektar	5.985,18	1000	1000	1000	1000	1000	1000	480.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit	5	5	5	5	5	5	5	9.393.215.600	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 17. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTIM PENYEDIAAN AIR MINUM												
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian keseluruhan program yang diukur dari penyusunan dokumen evaluasi, basis data, dan pembinaan teknis di tingkat kabupaten/kot a	%	84.41	85.41	86.41	87.41	88.41	89.41	90.41	33,341,562,00 0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Cipta Karya)
Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Ko ta yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab/Kot a	5	10	10	10	10	10	10	33,341,562,00 0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Ko ta yang disusun	Dokum en	2	-	1	4	4	6	2	28,441,562,00 0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian keseluruhan program yang diukur dari penyusunan dokumen evaluasi, basis data, dan pembinaan teknis di tingkat kabupaten/kota	%	84.41	85.41	86.41	87.41	88.41	89.41	90.41	33,341,562,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Cipta Karya)
PROGRAM 18. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
Kegiatan 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	7.105.436.279	APBD	Dinas Sosial
Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	orang	400	400	440	560	570	580	590	6.199.653.779	APBD	Dinas Sosial
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	orang			105	110	115	120	125	905.782.500	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	Persentase anak terlantar yang tertangani sesuai	persen	100	100	100	100	100	100	100	20.769.269.375	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Terlantar di Dalam Panti	standar											
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	orang		5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	20.769.269.375	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 3. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Persentase PPKS di luar HIV AIDS dan Napza di RPTC yang tertangani dan berfungsi sosial kembali				83	86	89	92	95	4.180.127.240	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				250	250	250	250	5	907.500.000	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				250	250	250	250		300.750.000	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan				250	250	250	250		244.500.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Panti	Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi											
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				250	250	250	250		2.176.877.240	APBD	Dinas Sosial
Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah				150	150	150	150		382.500.000	APBD	Dinas Sosial
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi				30	34	40	45		168.000.000	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 4.	Persentase PPKS	persen	100	100	100	100	100	100	100	16.125.788.50	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti Non SPM	didalam Panti Non SPM yg tertangani dan berfungsi sosial kembali									1		
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	7.698.886.122	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	986.948.377	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	orang		150	150	150	150	150	150	396.306.686	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	582.292.592	APBD	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	600.272.258	APBD	Dinas Sosial
Pemberian	Jumlah Peserta	orang		150	150	150	150	150	150	51.853.406	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi											
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	4.657.396.396	APBD	Dinas Sosial
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	orang		150	150	150	150	150	150	442.124.333	APBD	Dinas Sosial
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	709.708.331	APBD	Dinas Sosial
PROGRAM 20. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
Kegiatan 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase data fakir miskin yang termutakhirkan	persen		100	100	100	100	100	100	11.221.317.500		Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jiwa	699	500	500	500	500	500	500	6.088.550.000	APBD	Dinas Sosial
Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	10	10	4.528.912.500	APBD	Dinas Sosial
Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Kabupaten/Kota	10	10	10	10	10	10	10	603.855.000	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase penduduk miskin penerima bantuan sosial peningkatan ekonomi yang mendapatkan pendampingan	persen		30	35	40	45	50	55	41.689.509.894	APBD	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	orang		750	750	750	750	750	750	41.070.561.894	APBD	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh	KK			150	75	75	75	75	618.948.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota											
PROGRAM 21. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi	orang	396	296	410	524	638	752	866	10.472.496.745	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BID. LATTAS]	Jumlah Pencari Kerja Yang Mengikuti Pemagangan Luar Negeri	orang	300	200	250	300	350	400	450	3.160.609.509	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi [BLKDLN matram)	Jumlah Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	orang	96	96	160	224	288	352	416	7.037.278.696	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lembaga	5	10	10	10	10	10	10	274.608.540	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pelatihan Kerja [BID. LATTAS]	pada Tahun n											
PROGRAM 22. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten /Kota	jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme AKAD/ AKL	orang	0	615	715	870	1.025	1.180	1.335	2.379.373.578	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	orang	0	500	500	600	700	800	900	588.820.855	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah Dan AKL Antar Kerja Lokal) [BID. PENEMPATAN]	Jumlah Pencari Kerja AKAD / AKL Yang Dibina.	orang	0	0	100	125	150	175	200	216.725.719	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja (BID. PENEMPATAN)	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	orang	0	100	100	125	150	175	200	403.451.438	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Penyelenggaraan UnitLayanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang	0	15	15	20	25	30	35	1.170.375.567	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	Orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kerja												
Sub Kegiatan Job Fair /Buruh Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui job fair	orang	1.000	100	100	150	200	250	300	2.417.740.200	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 3. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	PMI/Pencaker Yang Ditempatkan, Dilindungi Dan Diberdayakan	orang	180	250	250	370	490	610	730	3.360.040.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 23. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
Kegiatan 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan dan pekerja yang dibina	Perusahaan	1,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	760.562.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial [BID. HI]	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	perusahaan	0	35	35	35	35	35	35	500.375.000	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja [BID. HI]	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek)	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	260.187.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan 2. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat /Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina	Perusahaan	35	76	91	106	121	136	151	1.860.378.125	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di I (Satu) Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	perkara	35	20	25	30	35	40	45	560.421.875	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	0	20	25	30	35	40	45	260.187.500	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Provinsi [BID. HI]												
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi [BID. HI]	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	0	11	11	11	11	11	11	584.440.625	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi [BID. HI]	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	0	25	30	35	40	45	50	455.328.125	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Kegiatan 3. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK)	Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan.	Surat keputusan	11	11	1	1	1	1	1	325.234.375	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) [BID. HI]	Jumlah Penetapan UMP	Surat keputusan	11	11	1	1	1	1	1	325.234.375	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi
PROGRAM 24. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
Kegiatan 1. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	persen	37.75	37.75	38.68	39.6	40.13	41.45	42.37	25.036.701.800	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan												
	Pertumbuhan wirausaha	persen	4.49	4.54	4.58	4.58	4.63	4.68	4.72		APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha UKM yang tangguh dan Mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan									25.036.701.800		
Sub kegiatan. Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang menjalin Kemitraan dan Export	UKM	400	400	100	400	532	586	590	3.294.650.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	160	160	170	194	213	234	234	1.668.252.950	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan												
Pemulihan Usaha-usaha Kecil	Jumlah usaha kecil yang terfasilitasi	UKM	0	0	50	150	150	150	150	565.805.600	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	UKM	0	0	0	1000	1331	1464	1464	1.225.287.400	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	Orang	0	0	22	24	53	59	60	1.052.358.350	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UMKM dan Kewirausahaan	Orang	175	176	200	280	300	300	300	10.679.100.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	UKM	0	40	40	48	53	59	60	1.529.182.500	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	UKM	20	30	20	20	40	44	44	1.774.683.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	UKM	0	0	0	0	0	150	7	692.602.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Jumlah UKM yang Terfasilitasi NIB	UKM						234	150	946.460.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang Terfasilitasi NIB	UKM						234	234	823.703.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 25. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
Kegiatan 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dikembangkan usahanya	Koperasi	40							16.388.796.300	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	unit	30	30	30	50	55	60	120	2.735.954.300	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha											
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan dalam Pembentukan Koperasi	Unit	0	0	15	17	19	21	23	7.274.011.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Koperasi		25	30	60	40	65	90	1.090.000.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Koperasi	80	80	100	150	150	150	150	1.111.653.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Akses Permodalan	Koperasi	10	10	10	10	10	10	10	1.125.522.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Daerah Provinsi												
Pemberdayaan Koperasi Dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Yang Dibina	Koperasi	3	3	10	60	90	100	120	3.051.656.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 26. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
Kegiatan 1. Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang meningkat Produksi dan Keuangannya	UKM	514							17.155.580.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	unit	20	0	20	48	53	150	200	2.498.889.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UKM	Jumlah Pelaku UKM yang Memahami Literasi Hukum	unit	0		50	242	266	293	200	2.933.851.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pengembangan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	unit	0	0	20	48	53	100	60	2.462.788.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
												Menengah
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha yang Difasilitasi	unit	0	0	50	363	399	439	440	2.740.477.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Pengembangan Inkubasi yang Terfasilitasi	unit	0	0	50	61	67	350	75	4.298.190.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Difasilitasi	unit	0	0	150	200	399	439	440	11.702.980.000	APBD	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM 29. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Kegiatan 1. Kegiatan 1. 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang tertangani	Unit Rumah	175	174	600	1000	1000	1000	1000	131.101.748.793	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman
Subkegiatan 1. 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	175	174	480	800	800	800	800	82.183.215.353	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman
Subkegiatan 2. 1.04.03.1.02.0003	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk	Unit Rumah	0	0	120	200	200	200	200	48.918.533.440	APBD	Dinas Perumahan dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha											Permukiman
INDIKATOR SDGs	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal										
	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri										
PROGRAM 30. PROGRAM PENATAAN DESA												
Kegiatan 1. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase Fasilitas Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	persen	100	100	100	100	100	100	100	951.249.500	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	26	26	26	26	26	26	26	951.249.500	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
INDIKATOR SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas										
PROGRAM 31. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
Kegiatan 1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	100	7.105.436.279	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Disabilitas Terlantar di dalam Panti	sesuai standar											
Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	orang	400	400	440	560	570	580	590	6.199.653.779	APBD	Dinas Sosial
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	orang			105	110	115	120	125	905.782.500	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase anak terlantar yang tertangani sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100	20.769.269.375	APBD	Dinas Sosial
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	orang		5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	20.769.269.375	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 3. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar	Persentase PPKS di luar HIV AIDS dan Napza di RPTC yang tertangani dan berfungsi sosial kembali				83	86	89	92	95	4.180.127.240	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti												
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				250	250	250	250	5	907.500.000	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				250	250	250	250		300.750.000	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				250	250	250	250		244.500.000	APBD	Dinas Sosial
Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya				250	250	250	250		2.176.877.240	APBD	Dinas Sosial
Pelaksanaan Penyuluhan Sosial	Jumlah orang yang mendapatkan				150	150	150	150		382.500.000	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah											
Pemulasaraan	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi				30	34	40	45		168.000.000	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 4. Rehabilitasi Sosial Dasar dalam Panti Non SPM	Persentase PPKS didalam Panti Non SPM yg tertangani dan berfungsi sosial kembali	persen	100	100	100	100	100	100	100	16.125.788.501	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	7.698.886.122	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang	orang		150	150	150	150	150	150	986.948.377	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi											
Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	orang		150	150	150	150	150	150	396.306.686	APBD	Dinas Sosial
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	582.292.592	APBD	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	600.272.258	APBD	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	51.853.406	APBD	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	orang		150	150	150	150	150	150	4.657.396.396	APBD	Dinas Sosial
Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan	orang		150	150	150	150	150	150	442.124.333	APBD	Dinas Sosial



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal											
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Laporan	3	3	3	3	3	3	3	709.708.331	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Aspek Kebebasan										
PROGRAM 1.												
												Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri



Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau										
PROGRAM 1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
Kegiatan 1. Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni pada kawasan permukiman kumuh 10-15 Ha yang tertangani	Unit Rumah	175	174	600	1000	1000	1000	1000	131.101.748.79 3	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman
Subkegiatan 1. 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan	Unit Rumah	175	174	480	800	800	800	800	82.183.215.353	APBD	Dinas Perumahan dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki											Permukiman
Subkegiatan 2. 1.04.03.1.02.0003 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah	0	0	120	200	200	200	200	48.918.533.440	APBD	Dinas Perumahan dan Permukiman
INDIKATOR SDGs	11.6.1.(a)	Presentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya										
	11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah										
	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara										
PROGRAM 2.PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (termasuk: NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)												
Kegiatan: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase sampah yang ditangani di TPA	Persen	53,20	58,70	64,20	69,7	70	69,7	70	25.700.368.300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan pemilahan sampah di areal publik	Kabupat en/ kota	10	10	10	10	10	10	10	4.186.400.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pemrosesan Akhir di TPA/TPST	Jumlah sampah dan residu yang terproses akhir di TPA/TPST	Ton	115.468	116.228	116.988	117.748	118.508	119.268	120.028	21.968.838.300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Regional	Regional											Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	3	1	1	1	1	1	1	1.981.530.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase sampah yang ditangani dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	Ton	0	1	1	1	1	1	1	1.750.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: 2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di Desa/ Kelurahan yang Tersedia	Unit	7.157	10	15	20	25	30	35	121.500.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1	10	10	10	10	10	10	2.273.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Dokumen	0	10	10	10	10	10	10	294.000.000		
INDIKATOR SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										
PROGRAM 1.												
												Kepolisian



Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	12.5.1.(a)	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang.										
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (termasuk: NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)												
Kegiatan: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Prosentase sampah yang ditangani di TPA	Persen	53,20	58,70	64,20	69,7	70	69,7	70	25.700.368.300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah di areal publik	Kabupate n/ kota	10	10	10	10	10	10	10	4.186.400.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah dan residu yang terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	115.468	116.228	116.988	117.748	118.508	119.268	120.028	21.968.838.300	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.11.1.01.0003	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional	Unit	3	1	1	1	1	1	1	1.981.530.000	APBD	Dinas Lingkungan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST regional	yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik											Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase sampah yang ditangani dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang dilaksanakan	Ton	0	1	1	1	1	1	1	1.750.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: 2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di Desa/ Kelurahan yang Tersedia	Unit	7.157	10	15	20	25	30	35	121.500.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen	1	10	10	10	10	10	10	2.273.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Dokume n	0	10	10	10	10	10	10	294.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
INDIKATOR SDGs	12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas Masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan Hidup										
PROGRAM 4. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
Kegiatan: 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan	Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat	Sekolah	16	15	15	15	15	15	15	500.000.000	APBD	Dinas lingkungan Hidup damn



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	adiviyata tingkat provinsi											Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	0	5	7	8	9	10	11	500.000.000	APBD	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana										
PROGRAM 1. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Kegiatan 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Dokumen Perencanaan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang ditanggulangi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	8.325.545.950	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1			1				395.075.000	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
Sub Kegiatan : Penguatan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan	Desa	615	140	82	82	82	82	83	4.257.805.000	APBD	Badan Penanggulang



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana											an Bencana daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen			2	3	1	1	1	880.000.000	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang			120	120	120	120	120	1.712.480.550	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	400	400	400	400	400	400	400	1.080.185.400	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
Kegiatan 2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Kejadian Bencana Yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	12.712.170.700	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.03.002 5 Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	2	2	2	2	2	2	1.388.809.800	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.03.002 6 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan	Orang			3	3	3	3	3	457.882.500	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
penanganan keadaan darurat Provinsi	keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis											
1.05.03.1.03.002 8 Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	26000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	8.941.630.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.05.03.1.03.003 0 Sub Kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	1.465.965.900		
Kegiatan 3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan			2	2	2	2	2	457.882.500	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.05.03.1.04.0007 Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen			1	1	1	1	1	449.126.000	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah
1.05.03.1.04.0012 Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang	Dokumen			1	1	1	1	1	353.017.750	APBD	Badan Penanggulangan Bencana daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
penanganan Pascabencana Provinsi	terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi											
1.05.03.1.04.0014 Sub Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokumen		1	1	1	1	1	1	405.517.750	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.04.0018 Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen				1	1	1	1	765.765.000	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.04.0022 Sub Kegiatan Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Laporan		2	2	2	2	2	2	887.295.150	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah
1.05.03.1.04.0023 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan	Kab/Kota		10	10	10	10	10	10	975.803.250	APBD	Badan Penanggulang an Bencana daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kabupaten/Kota	Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun											
1.05.03.1.04.0024 Sub Kegiatan Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Laporan		2	4	4	4	4	4	2.823.925.600	APBD	Badan Penanggulangan an Bencana daerah
INDIKATOR SDGs	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun										
	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
	13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										
PROGRAM 2. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3 lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 provinsi (Unit)	Unit	3	3	3	3	3	3	3	5.615.590.701	APBD	Dinas lingkungan Hidup damn Kehutanan
Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan an, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	3.072.575.797	APBD	Dinas lingkungan Hidup damn Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penimbunan	Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewengannya											
Sub Kegiatan: Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1.087.252.899	APBD	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi yang dilakukan	Usaha	3	3	3	3	3	3	3	1.455.762.007	APBD	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM 3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
Kegiatan 1: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	Unit Usaha	13	13	13	13	13	13	13	7.890.412.215	APBD	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan:	Jumlah Dokumen	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	737.500.000	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut											lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	898.868.565	APBD	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1.354.089.555	APBD	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	898.868.565	APBD	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan:	Jumlah kegiatan	Dokumen	1	3	3	3	3	3	3	4.090.430.642	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelapora	sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim											lingkungan Hidup damn Kehutanan
Sub Kegiatan: Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	1.297.765.602	APBD	Dinas lingkungan Hidup damn Kehutanan
Sub kegiatan: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	7.152.912.215	APBD	Dinas lingkungan Hidup damn Kehutanan
Kegiatan 2: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	Lokasi	10	10	10	10	10	10	10	4.519.956.259		
Sub kegiatan: Pemberian informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	2.280.978.130		
INDIKATOR SDGs	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
PROGRAM 4. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT												
Kegiatan:	Jumlah sekolah yang	Sekolah	16	15	15	15	15	15	15	500.000.000	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi											lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	0	5	7	8	9	10	11	500.000.000	APBD	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan



Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	20206	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan										
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL												
Kegiatan 1. Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Luas wilayah ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi yang terkelola	Ha	183.139,59	249.693,8	395.315,53	446.584,21	460.539,97	474.495,73	474.495,73	11.088.963.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	182968	249693,8	395315,53	395315,53	395315,53	395315,53	395315,53	5.200.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	10	10	10	10	10	10	10	1.822.897	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau kecil	orang	100	100	100	100	100	100	100	98.817	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	36.143	APBD	Dinas Kelautan dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Provinsi/Doku men Final RZWP-3-K											Perikanan
Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasi kan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	33.100	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku usaha	30	25	25	25	25	25	25	125.815	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan										APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	235.500	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Sentra	Volume produksi	Ton	143.796,	160.000	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	302.408	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	20206	2027	2028	2029	2030			
Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	garam lokal pada SEGAR		62									Kelautan dan Perikanan
Penetapan Rekomendasi Prioritas dan Desain pembangunan prasarana usaha pergaraman	Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman yang ditetapkan	Dokumen									APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	106.730	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pertimbangan teknis izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	144.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasi kan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	84.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	60.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	20206	2027	2028	2029	2030			
	dan Perikanan											
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan	kelompok	14	2	2	3	4	5	5	7.510.702	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	140	20	30	40	40	50	50	318.242	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	kelompok	1	2	3	4	4	5	5	84.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan	kelompok	1	2	3	4	4	5	5	84.615	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	unit	9	10	10	10	10	10	10	3.663.230	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.										
PROGRAM 3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN												



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan 1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa	Pelaku Usaha	187	30	30	30	30	30	30	4,571,193,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Penangan- an perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani (Perkara)	perkara	1	1	1	1	1	1	1	2,487,000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Pembentu kan Sumber Daya Manusia Pengawas an Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawas- an Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk (Orang)	orang	4	3	5	5	5	5	5	11,241,000,00	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Sub Kegiatan: Operasi Kapal Peng- awas Kelautan dan perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan perikanan (hari operasi)	Hari operasi	20	150	150	175	175	175	175	450.000.000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Perawat- an Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	unit	3	3	3	3	3	3	3	1,000,000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Pengada- an Kapal Peng- awas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	unit			1	1	1	1	1	1,989,000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Pengawas an Usaha Perikanan Bidang Pembudid ayaan Ikan di Laut sampai	Jumlah pelaku Usaha Perikanan Bidang Pembudid ayaan Ikan di Laut	Pelaku usaha	17	10	10	10	10	10	10	100,000,000	APBD	Dinas kelautan dan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
dengan 12 Mil	sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provins (Pelaku usaha)											Perikanan
Pengawas an Usaha penangka pan ikan dan/atau usaha pengangk utan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenang an provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapa n ikan dan/atau usaha pengangkuta n ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhanny a sesuai kewenang-an provinsi (Pelaku usaha)	Pelaku usaha	125	10	10	10	10	10	10	3,843,000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Pengawas an usaha pemanfaat an sumber daya kelautan kewenang an provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhanny a sesuai kewenang-an provinsi (Pelaku Usaha)	Pelaku usaha	45	10	10	10	10	10	10	40,035.000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Penumbuh an dan Pengemba ngan Kelom- pok Masyarak at Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masya-rakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif (Kelompok)	kelompok	51	55	60	65	70	75	80	217,540.000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Koordi- nasi Penangan- an Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Jumlah Forum Koordinasi Penangan- an TPKP tingkat Daerah yang dilaksanak- an (Forum)	Forum	1	1	1	1	1	1	1	17,250,000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2.	Jumlah pelaku	Pelaku	14	14	14	14	14	14	14		APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pengawas an Sumber Daya Perikan- an di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genang- an Air Lainnya yang Dapat Diusahak an Lintas Kabupate n/Kota dalam 1 (Satu)	usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa (Pelaku Usaha)	usaha								100,000,000,000		kelautan dan Perikanan
Pengawas an Usaha Pemasar- an hasil perikanan dan/atau usaha Pengolah- an Hasil	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan	Usaha pengolahan	14	14	14	14	14	14	14	100,000,000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Kegiatan 3. Pengawas an pelaksana an pemanfaa tan Kawasan Konser- asi sesuai dengan keten- tuan peraturan perundang- undangan	Jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diperiksa (Pelaku Usaha)	Pelaku usaha	0	15	15	15	15	15	15	200,000,000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan
Pengawas an pelaksana an pemanfaat an Kawasan Konser- vasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Jumlah kegiatan pemanfaat- an Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang terawasi (Kegiatan)	Kegiatan		3	3	3	3	3	3	200,000,000,000	APBD	Dinas kelautan dan Perikanan



Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	15.1.1*	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan										
	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan										
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN												
Kegiatan 1. 3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	Km	1	1	1	1	1	1	1	7.040.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.01.02 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	0	1	1	2	2	2	3	7.040.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 2. 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan perencanaan	Dokume n	1	1	1	1	1	1	1	16.364.503.36 0	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)											
Sub Kegiatan: Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Dokumen		0	1	1	1	1	1	20.129.879.200	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	7	29	25	25	27	27	24	730.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen perubahan	Dokumen		0	1	1	1	0	1	79.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 4: 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	Hektar	1.160,11	113,75	165,75	165,75	163,75	163,75	163,75	38.089.830.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub kegiatan: 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	196.793.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi	Hektar	0	3,75	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75	5.500.450.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara												
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang dihiijaukan di luar kawasan hutan negara	Hektar	80	0	20	20	20	20	20	740.000.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	879.587.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kegiatan 5: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	16.382.409.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	1.513.500.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektar	164.231	180.441	180.632	180.632	180.632	180.632	180.632	7.827.300.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.05.04 Koordinasi,	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,Sinkronis	Dokumen	1	1	9	9	9	9	9	294.329.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	asi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan											
Sub Kegiatan: 3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	3.564.400.000	DBH-DR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya										
PROGRAM 1. PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA												
Kegiatan : Penindak Tindak Pidana Umum	Jumlah Tindak Pidana Umum	Persen	1.4								APBN	Kepolisian
		Orang	5.666.314								APBN	Kepolisian
INDIKATOR SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir										
PROGRAM 2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
Kegiatan 1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	persen		5	5	5	5	5	5	3,428,182,040.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan: Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	340,095,641.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
												Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan: Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan beeran aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	PD	46								APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan provinsi	Dokumen		4	4	4	4	4	4	544,153,025.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan: Monitoring evaluasi dan pe dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan provinsi	Dokumen		2	2	2	2	2	2	408,114,769.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan 3. Penyediaan Layanan bagi Anak	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang	persen		100	100	100	100	100	100	3,847,015,927.00	APBD	Dinas Pemberdayaa



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	memperoleh layanan secara tepat waktu dan terkoordinasi											n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang		80	80	80	80	80	80	272,076,513.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang		80	80	80	80	80	80	408,114,769.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang		80	80	80	80	80	80	1,360,382,563.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
												Berencana
Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban kekerasan yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang		80	80	80	80	80	80	435,322,420.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang		80	80	80	80	80	80	272,076,513.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan kesehatan yang tidak dijamin bpjs dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	orang		80	80	80	80	80	80	544,153,025.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat	orang		80	80	80	80	80	80	272,076,513.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota											Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/kota	orang		80	80	80	80	80	80	652,983,630.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan AMPK yang mendapatkan peningkatan kapasitas	lembaga		10	10	10	10	10	10	2,844,803,280.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK kewenangan provinsi	Dokumen		2	2	2	2	2	2	408,114,769.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	orang		250	250	250	250	250	250	2,040,573,844.00	APBD	Dinas Pemberdayaa



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	yang Memerlukan Perlindungan Khusus											n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Monitoring evaluasi dan pe penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus	Dokumen		2	2	2	2	2	2	408,114,769.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
INDIKATOR SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										
PROGRAM 3. PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA												
Kegiatan : Penindak Tindak Pidana Umum	Jumlah Tindak Pidana Umum	Kasus	7.546								APBN	Kepolisian
INDIKATOR SDGs	16.6.1.(a)	Persentase opini instansi Pemerintah yang mendapat Opini WTP										
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B										
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan indeks Repormasi Birokrasi (RB) ≥ B										
PROGRAM 4. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah yang tersusun	Dokume	8	8	8	8	8	8	8	9,281,391,061	APBD	BPKAD
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten /Kota	Dokumen	31	30	30	30	30	30	30	11,191,906,430	APBD	BPKAD



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang tersusun	Dokumen	155	15	15	15	15	15	15	2,909,904,070	APBD	BPKAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Provinsi NTB yang tersusun tepat Waktu	Dokumen	4	3	3	3	3	3	3	6,112,664,406	APBD	BPKAD
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Dana Bagi Hasil dan Dana Bantuan Keuangan Provinsi yang tersusun	Laporan	4	14	14	14	14	14	14	6,800,088,091 ,341	APBD	BPKAD
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan yang Tersusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3	2,688,590,880	APBD	BPKAD
PROGRAM 5. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	Dokumen	11	4	4	4	4	4	4	20,531,358,87 6	APBD	BPKAD
INDIKATOR SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan Keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)										
PROGRAM 4. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
Kegiatan 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan ARG	persen	100	100	100	100	100	100	100	2,633,775,227	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di Tingkat Provinsi	Kebijakan	60	-	2	4	6	8	11	1,105,126,250	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Monitoring, Evaluasi, dan Penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Dokumen		2	2	2	2	2	2	408,114,769	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan Bimtek	orang		50	50	50	50	50	50	918,258,230	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan pemerintah)	Lembaga		40	40	40	40	40	40	204,057,385	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
Kegiatan 2. Pemberdayaan	Persentase Perempuan Kepala	persen		50	50	50	50	50	50	3,061,872,887	APBD	Dinas



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Keluarga yang Dilatih Pemberdayaan Ekonomi Menjadi Wirausaha											Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Lembaga		40	40	40	40	40	40	340,095,641	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Monitoring, evaluasi, dan pe pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Dokumen		2	2	2	2	2	2	408,114,769	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB
Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	orang		300	350	400	450	500	550	2,380,669,485	APBD	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk danKB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi										
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan										
	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan										
PROGRAM 5.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												
KEGIATAN PerumusanKebijaka nTeknis danPemantapanPel aksanaan BidangPemberdaya andan PengawasanOrgani sasi Kemasyarakatan											APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas ,Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing diDaerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	200	200	200	200	200	200	200	12.065.466.394	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	500	500	500	500	500	500	500	1.435.992.171	APBD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	462.399.969	APBD	Badan Kesatuan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah											Bangsa dan Politik Dalam Negeri
INDIKATOR SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah										
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun										
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur										
PROGRAM 6. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
Kegiatan 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	926,594,100	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	565,220,000	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	361,374,100.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Lintas Kabupaten / Kota dalam Satu Provinsi	Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi											n dan Catatan Sipil
Kegiatan 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persen	100	100	100	100	100	100	100	1,468,003,000.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	507,235,000.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	480,000,000.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	480,638,130.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Kegiatan 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	1,152,762,400.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	476,612,400.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	676,150,000.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
PROGRAM 7. PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
Kegiatan 1. Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Persen	100	100	100	100	100	100	100	1,009,703,200.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa Kependuduka n dan Catatan Sipil
Sub Kegiatan: Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	501,655,800.00	APBD	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Desa



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
												Kependudukan dan Catatan Sipil
Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	508,047,400.00	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
Kegiatan 2. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	100	100	100	100	1,163,260,000.00	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	625,758,000.00	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil
Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	537,502,000.00	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil



Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Output		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
INDIKATOR SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB										
	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya										



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Output		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik										
PROGRAM 1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
Kegiatan 1.1. 5.02.02.1.01 Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya koordi-nasi dan penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	87,50	100	100	100	100	100	100	663.780.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatar Daerah
Subkegiatan 1.1.1 5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordi-nasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	663.780.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatar Daerah
Kegiatan 1.2. 5.02.02.1.03 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordi-nasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	50,33	54,43	51,33	50,08	48,80	47,42	46,15	465.510.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatar Daerah
Subkegiatan 1.2.1 5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordi-nasi, Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	465.510.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatar Daerah
PROGRAM 2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
Kegiatan 2.1 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan	Terlaksananya pengelo-laan Pendapatan Daerah sesuai prosedur dan	Persen	NA	-14.51	5,74	7,70	7,85	8,21	7,68	71.952.714.200	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatar



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Output		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pendapatan Daerah	perundangan yg berlaku											Daerah
Subkegiatan 2.1.1 5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelo-laan Pajak Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	10	10	10	10	10	10	10	2.416.300.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.2 5.02.04.1.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terlaksananya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4	1.454.320.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.3 5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebi-jakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	2.897.985.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.4 5.02.04.1.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penge-lolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	69	95	95	95	95	95	95	22.357.301.200	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.5 5.02.04.1.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	laporan	12	12	12	12	12	12	12	4.887.000.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.6 5.02.04.1.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeli-haraan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	1.869.260.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Output		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Subkegiatan 2.1.7 5.02.04.1.01.07 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersusunnya dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	11.941.980.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.8 5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsul-tasi Pajak Daerah	Terlaksananya Layanan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	12	12	12	12	12	12	12	198.148.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.9 5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifi-kasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	48.060.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.10 5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	12	12	3.614.000.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.11 5.02.04.1.01.11 Penyelesaian Keberat-an Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesai-an Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	1	1	1	1	1	82.360.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.12 5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pngen-dalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	18.769.820.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.13 5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelo-laan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan Pengawasan dan Pengelo-laan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	690.520.000	APBD	Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
Subkegiatan 2.1.14 5.02.04.1.01.14	Terlaksananya Pengembangan dan	Laporan	12	8	16	16	16	16	16	725.660.000	APBD	Badan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Output		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	diversifikasi metoda Transaksi Pemerintah Daerah											Pengelolaan dan Pendapatan Daerah
INDIKATOR SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB										
PROGRAM 3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
Kegiatan 1. Perlindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi	Dan fasilitasi penyelesaian kasus kasusnya Dan fasilitasi penyelesaian kasus kasusnya	orang	5220	5220	5275	6400	7525	8650	9775	3.647.864.960	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan Dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (BID. PENEMPATAN)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	orang		200	200	300	400	500	600	719.200.000	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronika (BID. PENEMPATAN)	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	orang		5000	5000	6000	7000	8000	9000	541.507.200	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran (BID. PENEMPATAN)	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	orang		5000	5000	6000	7000	8000	9000	458.205.760	APBD	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
Sub Kegiatan	Jumlah PMI Purna	orang		50	50	70	90	110	130	458.205.760	APBD	Dinas Tenaga



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Output		Satuan	Baseline 2024	Target						Anggaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan (BID. PENEMPATAN)	yang Diberdayakan											kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.										
PROGRAM 4. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
Kegiatan 1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Infrstruktur TIK yang Disediakan oleh Dinas Kominfotik	Persen	75	75	80	85	90	95	100	14.499.790.000	APBD	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	OPD		43	43	43	43	43	43	1.114.750.000	APBD	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik



PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN NON PEMERINTAH

Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	1.1. 1	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP: \$ 1,9 per hari)										
	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur										
Program												
Kegiatan Microloan	Memberikan pinjaman kepada UMKM / pengusaha perempuan dalam skala kecil dengan konsep syariah (0,5 %)	Desa								Global Micro Initiative German		Gema Alam
	Pemberdayaan ekonomi perempuan											
	Pendampingan manajemen keuangan											



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	dan bisnis											
Program												
Kegiatan; Perlindungan sosial	Mengurangi kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis islam										Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah	YRII
Pelatihan peningkatan mata pencaharian												
Inklusi keuangan												
Pemberdayaan Sosial												
Membangun ekosistem ekonomi islam												
Program												
Membangun mahyani	Meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kerentanan, dan meringankan penderitaan keluarga miskin ekstrem dan yatim piatu				2024					IR UK dan Baznas Loteng & Lobar		YRII bersama Baznas
Program: Legal and Digital Empowerment for Communities												
Penguatan paralegal dalam penanganan kasus	Updating kasus yang didampingi oleh paralegal. Memaksimalkan layanan dukungan yang diperlukan oleh korban.	Kegiatan	2						4,500,000	Donatur individual Transformasi Perempuan Dotcom	Desa Sigar Penjalin, Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Desa Sabe, Desa Stuta, Lingkoq Beringe, Desa Janggawana Kecamatan Janapria Kabupaten	Transformasi Perempuan Dotcom



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											Lombok Tengah. Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Tengah.	
Pemberdayaan dan Literasi Digital terkait perubahan iklim terhadap kelompok rentan	Masyarakat sadar dampak perubahan iklim dan kerentanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kegiatan	2						2.740.000	Donatur individual Transformasi Perempuan Dotcom	Desa Jenggala dan Desa Pemenang	Transformasi Perempuan Dotcom
Gerakan Digital Ramah Lingkungan	Netizen mendapatkan informasi dan paham mengenai dampak perubahan iklim dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kegiatan	12								Prov NTB	Transformasi Perempuan Dotcom
Workshop kewirausahaan berbasis digital terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas	Kelompok rentan dan disabilitas mampu mempromosikan produknya secara digital dan/atau mampu meningkatkan perekonomian secara digital melalui online shop affiliator, membuat konten dan lain sebagainya.	Kegiatan	1						6.300.000	Donatur individual Transformasi Perempuan Dotcom	Desa Sigar Penjalin, Desa Jenggala, Desa Sabe, Desa Stuta, Lingkoq Beringe, Desa Janggawana, Desa Batu Layar.	
Pembentukan Komunitas Orang Muda Melek teknologi	Terbentuknya Komunitas Orang Muda Melek Teknologi Edukasi Penggunaan Teknologi yang positif	Kegiatan	4						2.000.000	Donatur individual Transformasi Perempuan Dotcom	Desa Sigar Penjalin, Desa Jenggala, Desa Sabe, Desa Stuta, Lingkoq Beringe, Desa Janggawana,	



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
										Desa Batu Layar.	
Program: Strengthen Rehabilitation-Reintegration & Improve Social Cohesion Against Violent Extremism (STRIVE) – (GCERF - Global Community Engagement and Resilience Fund) SWISS											
exnapiter hidup damai dengan masyarakat, ekonominya menguat dan pemuda terdidik untuk literasi digital berpikir kritis.	jiwa	25	25	25				3.000.000.000	GCERF Swiss	Kabupaten Bima, Kecamatan Bolo (Desa Rato, Kanganga dan desa Tumpu)	LPA NTB (konsorsium)
Program: Penguatan ekonomi Bagi masyarakat Rentan											
Penguatan Kapasitas Pengelola UMKM								70.000.0000	DFAT-Australia	Masbagik Utara baru, Danger, Paok Motong, Banjarsari, Aikmel Utara, Aikmel Timur, Aikmel Barat, Gelora, Kotaraja, Sikur selatan,	LRC
Program: INKLUSI											
Sekolah Perempuan: Melalui penguatan lembaga ekonomi perempuan (Koperasi), dan Penguatan usaha individu dan kelompok	kabupaten	2	2	2	2			5.203.490.840	Kerjasama Indonesia-Ausaid	1. Kab. Lotim: Desa Lenek Kalibambang, Desa Labuan Lombok, Desa Loyok, Desa Rarang Selatan, Desa Sepit, Montong Betok, Spit, Ketapang Raya 2. Kab. Lombok Utara: Desa Sesait, Desa	LPSDM



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											Andalan, Desa Menggala, Desa Batu Rakit, Sukadana, Bayan, Sokong, Teniga	
Program: DELTA API (Desa Ekologis Tangguh dan Adaptif terhadap Perubahan Iklim)												
Inkubasi UMKM & Pertanian Organik		Desa	8	10	12					Samdhana Institute, Kemenkop	Kombok Utara, Sumbawa	Santiri Foundation, Pemda
Program: Pengembangan Sistem Perlindungan PMI yang Responsif Gender melalui Partisipasi Struktur Sosial di Kabupaten Lombok Utara												
Pelatihan Pengelolaan Remitten	Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya mempunyai kemampuan mengelola remitansi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif, mampu mengelola usaha, mampu memproduksi dan mengembangkan produk, mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran	kegiatan	2	1					37,365,000	AWO International	Lombok Utara	Perkumpulan Panca Karsa
Pelatihan Kewirausahaan dan Pengelolaan Usaha		kegiatan	4	2					58,140,000	AWO International	Lombok Utara	Perkumpulan Panca Karsa
Pelatihan Keterampilan (Membuat Produk dari Bahan Baku Lokal)		kegiatan	4	2					89,610,000	AWO International	Lombok Utara	Perkumpulan Panca Karsa
Pelatihan Digital Marketing		kegiatan	1	1					98,280,000	AWO International	Lombok Utara	Perkumpulan Panca Karsa
Workshop Pengembangan Usaha		kegiatan	1	1					50,000,000	AWO International	Lombok Utara	Perkumpulan Panca Karsa
Program												
Membangun Mahyani	Meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kerentanan, dan meringankan penderitaan keluarga miskin ekstrem dan yatim piatu	Unit rumah	534	600	700	800	900	1000	113.350.000.000	BAZNAS NTB	10 Kab/Kota se-NTB	BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kab/Kota
Program: Penguatan ekonomi Bagi masyarakat Rentan												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Penguatan Kapasitas Pengelola UMKM	Pemberdayaan Ekonomi Pengusa Kecil/Bakulan dengan tujuan Transformasi mustahik menjadi muzaki	mustahik/o rang	580	650	750	850	900	1000	37.840.000.000	BAZNAS NTB	10 Kab/Kota se NTB	BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota Se-NTB
INDIKATOR SDGs	1.3.1.(b)	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan/PSJSN-K										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Air minum)										
		Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Penyehatan Dasar)										
		Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar (Sanitasi)										
	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe										
Program: kemanusiaan pasca gempa												
Bantuan Gizi Pasca-Gempa		Paket	1500	2000	2500					Donasi Publik	Pulau Lombok	Santiri Foundation, Artcofeelago, Relawan
SKALA : Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar												
Area Fokus 1: Dukungan penguatan pendapatan daerah	Rekomendasi teknis rancangan peraturan kepala daerah tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang PDRD	Kegiatan	1	1					310.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 2: Dukungan penguatan pengelolaan transfer ke daerah	ASN Pemerintah Daerah pada unit kerja yang relevan terlatih dalam merencanakan dan mengelola Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	Kegiatan	1	1					130.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 3;	Penyusunan rencana	Kegiatan	1	1					45.000.000,-	Pemerintah	Provinsi NTB	SKALA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Dukungan penguatan pengelolaan implementasi penerapan SPM	aksi dan peningkatan kapasitas Tim Penerapan SPM Provinsi									Australia		
Area Fokus 4; Dukungan penguatan Perencanaan daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif	Input teknis rancangan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD) yang inklusif	Kegiatan	1	1					160.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 5; Dukungan penguatan Penganggaran daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif	Rekomendasi teknis perhitungan kebutuhan pembiayaan penerapan dan pemenuhan layanan dasar, kebutuhan disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya	Kegiatan	1	1					60.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 6; Dukungan penguatan kebijakan dan kelembagaan satu data daerah	Rekomendasi teknis pedoman tata kelola satu data daerah dan penyelenggaraan siklus satu data daerah	Kegiatan	1	1					260.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 7; Dukungan penguatan sistem informasi tingkat desa	Input teknis pemutahiran sistem informasi yang memuat data mikro terpilah	Kegiatan	1	1					95.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 8; Dukungan penguatan sistem dan integrasi antar sistem pengelolaan data	Input teknis penyesuaian platform data daerah untuk integrasi dan bagi pakai data di daerah	Kegiatan	1	1					215.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 9;	Input teknis pedoman	Kegiatan	1	1					400.000.000,-	Pemerintah	Provinsi NTB	SKALA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Dukungan penguatan analisis, pemutahiran dan pemanfaatan data	pengelolaan dan pemanfaatan portal satu data termasuk daftar data daerah untuk pemenuhan SPM									Australia		
Area Fokus 10: Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam penerapan SPM dan peningkatan kualitas belanja daerah	Fasilitasi teknis penyampaian kemajuan dan tantangan penerapan SPM kepada pimpinan daerah	Kegiatan	1	1					95.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 11; Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam pengelolaan dan penguatan kapasitas fiskal daerah	Fasilitasi teknis pengembangan pedoman dan panduan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan PDRD ke kabupaten/kota	Kegiatan	1	1					40.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 12; Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam pemantapan siklus data daerah	Fasilitasi teknis penyampaian kemajuan dan tantangan pengelolaan satu data daerah	Kegiatan	1	1					30.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 13; Dukungan penguatan komitmen pimpinan daerah dalam memastikan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan daerah	Fasilitasi teknis penyampaian isu-isu terkait kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan daerah	Kegiatan	1	1					20.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 14:	Input teknis	Kegiatan	1	1					240.000.000,-	Pemerintah	Provinsi NTB	SKALA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Dukungan penguatan perencanaan daerah untuk penerapan dan pemenuhan layanan dasar yang inklusif	penyusunan RAD Penyandang Disabilitas, Kelanjutusiaan dan RAD Kesenjangan Gender									Australia		
Area Fokus 15; Dukungan penguatan partisipasi, representasi dan pengaruh kelompok rentan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan	Rekomendasi teknis dan fasilitasi teknis penyelenggaraan model kolaborasi lintas pemangku penting termasuk melalui forum perencanaan inklusif	Kegiatan	1	1					165.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 16; Dukungan penguatan partisipasi, representasi dan pengaruh kelompok rentan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan	Tersedianya jaringan masyarakat sipil/simpul jaringan kelompok perempuan dan disabilitas sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran responsif GEDSI	Kegiatan	1	1					30.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Area Fokus 17: Dukungan penguatan sistem informasi tingkat desa	Rekomendasi teknis model kolaborasi pemerintah daerah dengan universitas dan organisasi masyarakat sipil untuk perluasan dan pemanfaatan sistem informasi di tingkat desa.	Kegiatan	1	1					310.000.000,-	Pemerintah Australia	Provinsi NTB	SKALA
Program: BERANI II (Better Reproductive Health and Rights For All in Indonesia). Fokus pada Penghapusan Praktik Sunat Perempuan (UNICEF – DFAT)) – Amandement												
									400.000.000	DFAT - UNICEF	Desa Aik Desa	LPA NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											Kecamatan Pringgasela, Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik – Kabupaten Lombok Timur	
INDIKATOR SDGs	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
	1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana										
Program Peningkatan Sistem Penanggulangan Bencana												
Kegiatan Menginisiasi BINWAS SPM Sub Urusan Bencana (SUB) dengan pendekatan berbasis kawasan dengan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA)	Percepatan implementasi SPM SUB melalui pendekatan yang berfokus pada kualitas dan inklusivitas, dengan integrasi KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana) sebagai metode strategis untuk mempercepat pencapaian SPM SUB, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan ketangguhan lokal	Laporan	1						300.000.000	DFAT	NTB Lombok Utara Sumbawa	SIAP-SIAGA
Menguatkan mekanisme asistensi BINWAS SPM SUB dari Provinsi ke Kab/Kota	Peningkatan implementasi dan pemantauan SPM SUB melalui penguatan mekanisme	Laporan	1						100.000.000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Meningkatkan kapasitas kab/kota dalam tahapan penvelenggaraan	pendampingan, perencanaan, dan koordinasi, didukung oleh peningkatan								150.000.000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
SPM SUB	kapasitas, kerangka hukum, dan integrasi penanggulangan bencana ke dalam perencanaan tingkat kabupaten, memastikan keselarasan dengan NSPK dan implementasi efektif di tingkat sub-nasional											
Peningkatan kapasitas BINWAS SPM SUB berbasis NSPK									50.000.000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Program: Peningkatan Strategi Penanggulangan Bencana												
Memfasilitasi penyusunan dokumen RPB di level Kabupaten	Pengembangan dan penguatan perencanaan strategi PB melalui penyesuaian dengan prioritas lokal serta dukungan peningkatan kualitas regulasi terkait PB untuk memperkuat perencanaan, prioritasasi, dan alokasi anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten	Laporan	1						200.000.000		Lombok Tengah	SIAP-SIAGA
Asistensi teknis dan dukungan dalam integrasi PB ke dalam DOKRENDA dan penganggaran di level Provinsi									125.000.000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Program: PEMETAAN DAN EVALUASI RISIKO BENCANA												
Menyusun dokumen KRB yang terintegrasi ke dalam DOKRENDA	Peningkatan kualitas Kajian Risiko Bencana (KRB) dan dokumen penanggulangan bencana dengan mengintegrasikan metode berbasis bukti yang sesuai dengan regulasi	Laporan	1						200.000.000	DFAT	Lombok Utara	SIAP-SIAGA
Memfasilitasi	Penguatan	Laporan	1						150.000.000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
pertemuan rutin untuk pemantauan capaian IKD dan IRBI dan diselaraskan dengan DOKRENDA	pemantauan IKD dan IRBI untuk memastikan pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang akurat											
Program: PENINGKATAN LAYANAN DATA, MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA												
Memperluas penggunaan dan pemanfaatan Data dan Manajemen Informasi Kebencanaan pada pemangku kepentingan kunci (e.g. Media, Forum PRB, PUSDALOPS)	Penguatan Sistem Manajemen Informasi bencana di seluruh provinsi, memastikan interoperabilitas, inklusivitas, dan keselarasan dengan kerangka kerja nasional dan lokal untuk meningkatkan perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan untuk pengurangan dan manajemen risiko bencana yang efektif	Laporan	1						300.000.000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Memfasilitasi lanjutan pengembangan sistem informasi Kebencanaan (SIK) dan DESTANA yang inklusif dan integratif untuk mendukung sinergi dalam perencanaan dan pemantauan program desa (termasuk konvergensi antara API-PRB dan SDGs Desa)		Laporan	1						350.000.000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Program: Peningkatan Dan Pengembangan Kebijakan Dan Peraturan Untuk Kesiapsiagaan Bencana												
Sosialisasi dan harmonisasi antar aktor pentahelix	Peningkatan kolaborasi dan keterlibatan pentahelix, yang	Laporan	1							DFAT	NTB Lombok Utara Sumbawa	SIAP-SIAGA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
terkait dukungan terhadap penyelenggaraan SPM SUB di tingkat sub-nasional	mendiring efektifitas implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui penguatan koordinasi, berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, media dan pemangku kepentingan masyarakat di tingkat Sub-Nasional											
Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi (negeri dan swasta) sebagai bagian dari pentahelix										DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Mensinergikan rencana kerja dengan program seperti KKN Tematik, relawan, mitra pembangunan lainnya, dll.										DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Harmonisasi instrumen pemantauan untuk meningkatkan ketangguhan pulau-pulau kecil										DFAT	Lombok Utara Sumbawa	SIAP-SIAGA
Program: Perubahan Iklim Dan Kebijakan Ketangguhan Bencana (Penguatan Desa Tangguh Bencana)												
Meningkatkan pemantauan (BINWAS) dalam proses perencanaan di tingkat desa yang mengintegrasikan API-PRB-SDGs desa	Penguatan inisiatif Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui pendampingan teknis, pengembangan kebijakan, dan peningkatan kapasitas dengan fokus pada perencanaan yang inklusif, integrasi API-PRB-SDGs, mobilisasi sumber daya lokal, dan	Laporan	1						300,000,000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Mendorong pendekatan pembangunan desa berbasis kawasan dengan		Laporan	1						350,000,000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
menyelaraskan dokumen KRB, KLHS dan RTRW	pendekatan berbasis wilayah, yang didukung oleh upaya kolaboratif dengan CSO, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Adat untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan di tingkat desa.											
Memfasilitasi pemetaan korelasi indikator API-PRB-SDGs di tingkat desa		Laporan	1						50,000,000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Menyusun pedoman bagi desa untuk perencanaan dan pelaksanaan berdasarkan konvergensi indikator API-PRB-SDGs desa		Laporan	1						100,000,000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Mendorong pemanfaatan PKD sebagai acuan dalam musyawarah desa	Penguatan pelaksanaan dan pemanfaatan PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) melalui bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan	Laporan	1						150,000,000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Mendorong pemanfaatan PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) dan KRB sebagai baseline RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan dokumen penting lainnya dalam pengukuran dan perencanaan.	kolaborasi multipihak, mempromosikan integrasinya ke dalam pertemuan konsultasi desa, perencanaan tata ruang, dan kerangka kerja pembangunan utama lainnya untuk meningkatkan ketahanan dan perencanaan bencana di tingkat lokal	Laporan	1						150,000,000	DFAT	NTB	SIAP-SIAGA
Program: Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemulihan Pasca Bencana												
Memfasilitasi asistensi teknis	Penguatan kapasitas pemulihan dan	Laporan	1						150,000,000	DFAT	"NTB Lombok Utara	SIAP-SIAGA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
untuk penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) termasuk peningkatan kapasitas sektor RR untuk JITUPASNA	rehabilitasi pascabencana (RR) melalui pengembangan rencana pemulihan, replikasi Indeks Pemulihan Pascabencana (PDRI), bantuan teknis bagi tim JITUPASNA, rapat koordinasi, dan platform manajemen pengetahuan, memastikan perencanaan, pemantauan dan dukungan psikososial yang efektif di tingkat provinsi dan kabupaten										Sumbawa"	
Program: PENINGKATAN KAPASITAS LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA LOKAL (DAERAH)												
Memfasilitasi asistensi teknis dalam pembentukan dan penguatan Klaster Logistik di tingkat Provinsi dan Kabupaten	Peningkatan logistik bencana dan koordinasi klaster melalui pembentukan dan penguatan platform logistik, pengembangan dan pengujian sistem informasi, penilaian kapasitas, dan pembuatan SOP, didukung oleh bantuan teknis, simulasi, dan kolaborasi multipihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respon di tingkat Provinsi dan kabupaten								150,000,000	DFAT	NTB Lombok Utara Sumbawa	SIAP-SIAGA



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Program: INKLUSI												
Penguatan perempuan dalam menghadapi perubahan iklim		kabupaten	2	2	2	2			3.067.210.800	Kerjasama Indonesia-Ausaid	1. Kab. Lotim: Desa Lenek Kalibambang, Desa Labuan Lombok, Desa Loyok, Desa Rarang Selatan, Desa Sepit 2. Kab. Lombok Utara: Desa Sesait, Desa Andalan, Desa Menggala, Desa Batu Rakit	LPSDM
Program: DELTA API & I-CATCH												
Pelatihan pertukangan rumah ramah gempa	Tukang terlatih dan rumah dibangun	Orang	100	120	150					PUPR, Pemprov NTB	Bayan, Lombok Utara	Santiri Foundation, PUPR
Adaptasi iklim komunitas pesisir (I-Catach)	Renacana aksi dan desa terpetakan	desa	3	4	5					USAID, IMACS	NTB (5 Kabupaten)	Santiri Foundation

Tujuan 2. Tanpa Kelaparan



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)										
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan										
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.000 Kkal/Kapita/Hari										
	2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH): AKE 2.100 Kkal/Kapita/Hari										
	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe										
Program												
Pembibitan Cabai, terong, tomat,kacang panjang, dan sawi (Mendukung Ketahanan Pangan)									200 juta	Rudat institute	Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga	Rudat institute
Program: Pengelolaan Gizi Buruk Terintegrasi (PGBT)												
Pelatihan LiLA Keluarga										UNICEF	Desa Terara (Lombok Timur), Desa Golong dan Meninting (Lombok Barat) dan Desa Labuan Badas (Sumbawa)	SOBAT NTB
Pelatihan Guru PAUD deteksi Dini Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk dengan Pita LiLA										UNICEF	Lombok Timur dan Lombok Utara	SOBAT NTB
Melakukan pelatihan PGBT bagi tenaga Kesehatan (Nutrionist) dan pemanfaatan Data EPPGBM/Pelita Kesmas										UNICEF	10 Kab/Kota Provinsi NTB	SOBAT NTB Dan Dikes Prov NTB
Suportif Supervisi di 5 Puskesmas dalam pelaksanaan PGBT										UNICEF	Lombok Timur.	SOBAT NTB
Program: AKSI BERGIZI												
Orientasi Aksi Bergizi Bagi Kepala Sekolah, Guru dan		Kab/Kota		2						UNICEF	Lombok Utara dan Sumbawa	SOBAT NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Perwakilan Siswa												
Supervisi Fasilitatif Pelaksanaan Aksi Bergizi.		Kab/Kota		3						UNICEF	Kota Mataram, Lombok Timur dan Lombok Utara	SOBAT NTB
Pelatihan Aksi Bergizi bagi Kepala Sekolah dan Guru di 20 Sekolah/Madrasah		Kab/Kota		1						Dana Hibbah Pemerintah Kota Mataram dan APBD Kota Mataram	Kota Mataram	SOBAT NTB dan TP UKS/M Kota Mataram
Pembuatan Aplikasi Stratifikasi UKS/M		Kab/Kota		1						Dana Hibbah Pemerintah Kota Mataram dan APBD Kota Mataram	Kota Mataram	SOBAT NTB dan TP UKS/M Kota Mataram
Supervisi Fasilitatif		Kab/Kota		1						Dana Hibbah Pemerintah Kota Mataram dan APBD Kota Mataram	Kota Mataram	SOBAT NTB dan TP UKS/M Kota Mataram
INDIKATOR SDGs	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita										
PROGRAM 1. PARENTS (PENINGKATAN KAPASITAS KADER UNTUK PENCEGAHAN STUNTING)												
Kegiatan Melaksanakan BCC (Behavior Change Communication	Memperkuat partisipasi orang tua dalam pencegahan stunting									Pemerintah Australia	Pulau Lombok	Plan & BKKBN
Menyusun modul advokasi 1000 HPK												
PROGRAM GEMA CITA (GENERASI EMAS BANGSA BEBAS PERKAWINAN USIA ANAK)												
Kegiatan;	Menguatkan										Kabupaten	Plan



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Intervensi langsung dan Memperkuat mekanisme perlindungan anak melalui Sekolah Ramah Anak	kapasitas dari agensi remaja untuk mencegah perkawinan anak dan kehamilan remaja										Lombok Barat	
	Terbentuknya sahabat pengadilan											
Program Kawasan Sehat												
Monitoring Posyandu Pendampingan Balita Mal Nutrisi Intervensi Balita Malnutrisi Melalui Pemberian Paket Nutrisi dan Pelaksanaan POS GIZI Positif Deviance Adaptive	Aktivitas berfokus pada pendampingan posyandu dan monitoring status gizi balita, mengintervensi balita dengan malnutrisi melalui MHS (mobile education servis)/ pendampingan khusus dan pemberian paket nutrisi, dan melakukan	Desa Kedaro Kecamatan Sekotong LOBAR	342	375	-	-	-	-	Rp 7.500.000	Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kab, Lombok Barat	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	pendekatan POS gizi PD adaptive											
Program Bidan Untuk Negri												
1. Monitoring Posyandu 2. Pendampingan Balita Mal Nutrisi Intervensi Balita Malnutrisi Melalui Pemberian Paket Nutrisi dan Pelaksanaan POS GIZI Positif Deviance Adaptive	a. Pemantau an status gizi balita b. Peningkata n Kapasitas Kader c. Pelaksanaa n Pos Gizi dengan Pendekata n Positif Deviance Adaptif d. Kelas Ibu balita malnutrisi e. Kunjungan rumah baduta beresiko	Penerima Manfaat	a. 308 b. 40 c. 24	B. 40 D. 60 e.25					5.000.0000	Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB
INDIKATOR SDGs	2.3.1.(a)	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Program Agrotourism												
Pelatihan Pariwisata Berbasis Pertanian bagi Kelompok Tani & Remaja Desa	Meningkatka n kapasitas petani dan pemuda desa dalam pengelolaan wisata pertanian dan layanan	Jumlah Pelatihan		2					50.000.000	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra ECCO Foundation	Desa Genggelang, Kabupaten Lombok Utara	Ecco Foundation



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	wisata											
Pelaksanaan Eco Trip Edukasi Pertanian (Farm tour, panen edukatif, tanam bersama)		Jumlah Kegiatan		1	3				30.000.000	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra ECCO Foundation	Desa Genggeling, Kabupaten Lombok Utara	Ecco Foundation
INDIKATOR SDGs	2.c.1*	Indikator anomali harga pangan)										
Program												
Pelatihan Pupuk	kebun	Sesi	6	8	10					Dinas pertanian	Sokong	Santiri
Organik dan irigasi tetes										Kemendes	Genggeling	Pemda
Ketahanan pangan eco-climate village	Masterplan dan kebun pangan	Desa	4	5	6					Samdhana, UNDP	Medana, Jambianom, Lombok Utara	Santori, dan komunitas

Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target	Indikatif Alokasi Anggaran 2025-	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Lembaga Pelaksana



			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030 (Juta Rp)		Kegiatan	
INDIKATOR SDGs	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih										
Program: Implementasi Program Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) untuk Ibu Hamil												
Meningkatkan/memperb aiki luaran kehamilan		Jumlah penerima manfaat	-	6000	6000	-	-	-	13.000.000.000	Sight and life	Lima Kabupaten/ kota di Lombok	Summit Institute for Development
Menurunkan rasio kematian ibu		AKI per 100.000 kelahiran hidup	-	140	135	-	-	-		Sight and life	Lima Kabupaten/ kota di Lombok	Summit Institute for Development
Menurunkan BBLR		Angka BBLR	-	17%	15%					Sight and life	Lima Kabupaten/ kota di Lombok	Summit Institute for Development
Menurunkan angka kematian bayi baru lahir		AKB per 1000 kelahiran	-	57	57	-	-	-		Sight and life	Lima Kabupaten/ kota di Lombok	Summit Institute for Development
Meningkatkan kepatuhan konsumsi Suplemen		Orang		65%	75%	-	-	-		Sight and life	Lima Kabupaten/ kota di Lombok	Summit Institute for Development
Melakukan pelatihan tenaga bidan di fasilitas layanan dasar.		Orang	200	200	200	-	-	-		Sight and life	Lima Kabupaten/ kota di Lombok	Summit Institute for Development
Melakukan pelatihan kader		Orang	200	200	200	-	-	-		Sight and life	Lima Kabupaten/ kota di Lombok	Summit Institute for Development
Program Bidan Untuk Negri												
1. Monitoring Kesehatan Ibu Hamil 2. Pendampingan Ibu Hamil dengan Anemia dan KEK	Aktifitas yang di lakukan bertujuan untuk menurunkan angka AKI dan AKB juga deteksi dini Komplikasi	Penerima Manfaat	a. 68 B.60 C.20	A.60 B.40 C.15 D. 25					5.000.000	Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	kehamilan,persalinan dan Nifas. Jenis a. Pemantauan kesehatan ibu hamil b. Kelas ibu hamil bersama pendamping c. Pemdampingan ibu hamil beresiko, KEK dan anemia d. Kunjungan rumah ibu menyusui											
INDIKATOR SDGs	3.3.3.(a)	Jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi malaria										
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang										
	3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta										
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan: (b) Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati.										
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi										
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun										
Program Kawasan Sehat												
3. Screening PTM 4. Maintenace Pasien dengan Resiko PTM 5.Maintenance Pasien Dengan PTM	a. Maintenance PTM b. ALS (Aksi Layanan Sehat) c. Senam Sehat	Penerima Manfaatt	1.389	1.879	-	-	-	-	14.120.000	Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kab, Lombok Barat	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB
Program Bidan Untuk Negri												
5. Screening PTM 6. Maintenance Pasien dengan Resiko PTM	d. Maintenance PTM e. ALS (Aksi	Penerima Manfaat	a. 780 B.10	A.70 B.100					3.000.000	Dana Program LKC DD NTB	Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
7.Maintenance Pasien Dengan PTM	Layanan Sehat) f. Senam Sehat		0 c.100	c.50						dan Mitra Lain	Utara	(LKC) Dompot Dhuafa NTB
Program Respon Darurat Kesehatan												
RDK Individu Pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi dhuafa, secara individu dalam bentuk layanan ambulans gratis, peminjaman alat kesehatan, bantuan kesehatan non cover BPJS, layanan <i>telemedicine</i> , serta advokasi jaminan kesehatan dan kepesertaan RDK Kebencanaan Respon krisis kesehatan dalam bentuk tanggap bencana pada kejadian bencana yang terjadi maupun korban yang terdampak. RDK Event 1. Event Skrining Kesehatan dan Pengobatan : Bentuk pelayanan kesehatan promotif, kuratif, dan preventif bagi masyarakat dhuafa 2. Event Pelatihan : Pelatihan yang		Penerima Manfaat	193							Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
umumnya diberikan kepada masyarakat dalam tema Bantuan Hidup Dasar (BHD) 3. Event Khitan Massal : Upaya membangun kesadaran bagi masyarakat, khususnya dhuafa, dalam menjalankan syariat Islam 4. Event Donor Darah : Untuk membantu pemerintah menyediakan kebutuhan stok darah yang ada di Unit Transfusi Darah (UTD)											
Program: INKLUSI											
Menguatnya Komite Pemantau dalam mengimplementasikan pemantauan untuk memastikan perbaikan akses terhadap 6 isu prioritas terutama isu kekerasan seksual		kabupaten	2	2	2	2		1.006.683.600	Kerjasama Indonesia-Ausaid	1. Kab. Lotim: Desa Lenek Kalibambang, Desa Labuan Lombok, Desa Loyok, Desa Rarang Selatan, Desa Sepit 2. Kab. Lombok Utara: Desa Sesait, Desa Andalan, Desa	LPSDM



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											Menggala, Desa Batu Rakit	
Sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk dampak perkawinan anak dan UU TPKS		jiwa	5000							Kerjasama Indonesia-Ausaid	1. Kab. Lotim: Desa Lenek Kalibambang, Desa Labuan Lombok, Desa Loyok, Desa Rarang Selatan, Desa Sepit 2. Kab. Lombok Utara: Desa Sesait, Desa Andalan, Desa Menggala, Desa Batu Rakit	LPSDM
Kegiatan Cek Kesehatan Gratis	Meningkatkan deteksi dini penyakit tidak menular dan kesehatan umum masyarakat	Jumlah Kegiatan		1	1	1	1	1	50.000.000	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra ECCO Foundation	Desa Genggeling, Kabupaten Lombok Utara	Ecco Foundation
Program Respon Darurat Kesehatan												
Layanan Ambulance Gratis Layanan Peminjaman Alat Kesehatan Konsultasi Kesehatan		Dana	5 M	6 M	7 M	8 M	9 M	10 M	45.000.000.000	Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Screening Kesehatan Telemedecine Pendampingan Pasien Dhuafa Advokasi Dhuafa Pembiayaan Non Cover BPJS Bagi Dhuafa										BAZNAS NTB		Dhuafa NTB BAZNAS Provinsi NTB dan BAZNAS Kab/Kota
INDIKATOR SDGs	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern: (b) Kelompok Pasangan Usia Subur (PUS)										
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR)										
	3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.										
	3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi CAMPAK										
		Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional imunisasi DPT										
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak umur 12-23 bulan										
	3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan										
		Persentase Puskesmas dengan 80% ketersediaan obat dan vaksin esensial menurut kab/kota										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi Tenaga Kesehatan										
Program												
Kegiatan												



Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang: (a) PAUD/Sederajat; (b) SD/Sederajat; (c) SMP/Sederajat; dan (d) SMA/Sederajat										
	4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.										
Program												
Perlindungan Anak Pekerja Migran (Mendekatkan Akses pendidikan, kesehatan dan Adminitrasi kependudukan)									100.000.000	Rudat Institute	Desa Wnasaba, Lelek Lauq dan Wanasaba	Rudat Institute
Program: Inisiatif Pengembangan Pendidikan Inklusif Berbasis Komunitas Mendukung Anak dengan Hambatan Belajar/Fungsional di PKBM dan SD												
		orang	12						400.000.000	Program INOVASI NTB	Desa Kuripan Timur, Kecamatan Kuripan	LPA NTB (Lead



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											– Kabupaten Lombok Barat	konsorsium)
Wiki Bekarye – School Workshop (literasi digital, budaya lokal, isu sosial)	Meningkatkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran terhadap isu sosial dan pelestarian budaya lokal melalui pelatihan, praktik kolaboratif, dan partisipasi publik aktif di lingkungan sekolah.	Orang	300	500	500	500			400.000.000	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra BASAntb - ECCO	SMA/MA/SMK di Kota Mataram	BASAntb, Ecco Foundation
WISDOM Language Learning (Bahasa Inggris & kelas literasi internasional)	Meningkatkan kemampuan bahasa asing siswa dan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesempatan global	Jumlah siswa	100	100	100	100			240.000.000	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra ECCO Foundation	Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara	Ecco Foundation
Program Beasiswa Tunas Bangsa												
Pemberian Beasiswa Bagi anak tidak mampu, yatim piatu atau anak dengan	Meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak tidak mampu,	Jumlah siswa	30	10	10	10	10	10	184.000.000	LRC dan Mitra lainnya	Kabupaten Lombok Timur	LRC



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kebutuhan Khusus	yatim piatu atau anak dengan Kebutuhan Khusus											
Pemberian Beasiswa Bagi anak tidak mampu, yatim piatu atau anak dengan Kebutuhan Khusus	Meningkatkan akses pendidikan bagi anak anak tidak mampu, yatim piatu atau anak dengan Kebutuhan Khusus	Jumlah siswa	1.200	1.500	2000	2.500	3.000	4.000	3.450.000.000	BAZNAS NTB	10 Kab/Kota se-NTB	BAZNAS Provinsi NTB dan BAZNAS Kab/Kota
Program Peningkatan layanan Pendidikan Inklusif												
Mentoring dan Peningkatan layanan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada sekolah formal	Sekolah	1	1	1	1	1	1	70.000.000	DFAT-INKLUSI	Lombok Timur	LRC
INDIKATOR SDGs	4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)										
Program												
Kegiatan												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030								
INDIKATOR SDGs	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).														
		Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)														
		Proporsi dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)														
Program: Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Lombok Timur																
Pembentukan dan Penguatan Satgas PPKPT dalam menurunkan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi		Perguruan Tinggi	1	1	1	1	1	1	20.000.000	DFAT	Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur	LRC				
Program																
Sekolah adat dan budaya bayan	Kurikulum dan siswa aktif	Modul	3	4	5					kemendikbud	Bayan dan kayangan, KLU	Santiri, dan sekolah adat bayan				
Pelatihan pemuda delta api	Fasilitator dan pemetaan	orang	75	100	120					Samdhana institute	Sunda kecil dan Maluku	Santiri dan komunitas				
INDIKATOR SDGs	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas														
Program: INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia)																
Kegiatan 1: Mendukung aktor dalam melakukan identifikasi dan penyediaan bahan pendukung implementasi KM jenjang SD/MI khususnya untuk kecakapan dasar	Meningkatnya kemampuan ekosistem 5 kabupaten mitra dalam mengidentifikasi masalah dan solusi untuk implementasi Kurikulum Nasional untuk kecakapan dasar	Kabupaten/Kota	5	5					500,000,000	DFAT	5 Kab/Kota	INOVASI				



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kegiatan 2: Mendukung aktor dalam ekosistem kabupaten Lombok Timur untuk menguatkan ULD Kabupaten dalam melakukan identifikasi dan pengembangan alat/bahan pendukung implementasi asesmen diagnostic dan formatif literasi yang adaptif oleh guru bagi siswa dengan ragam kesulitan fungsional belajar	Meningkatnya pemahaman aktor dalam ekosistem Kabupaten Lombok Timur tentang peran ULD	ULD	1						150,000,000	DFAT	Kabupaten Lombok Tengah	INOVASI
Pelatihan Identifikasi Hambatan Fungsional Belajar menggunakan Profil Belajar Siswa (PBS)	Meningkatnya kemampuan ekosistem dalam mendukung ULD Kabupaten untuk identifikasi dan pengembangan alat/bahan pendukung implementasi asesmen literasi yang adaptif oleh guru bagi siswa dengan ragam kesulitan fungsional	Kabupaten	3						275,000,000	DFAT	Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Barat	INOVASI



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Program 2: Teaching Practices													
Kegiatan 2: Mendukung ekosistem 2 kabupaten mitra untuk menemukan cara yang dapat mengaktifkan komunitas belajar guru tingkat SD/MI dalam meningkatkan kemampuan kecakapan dasar yang inklusif dengan menggunakan materi-materi yang sudah dikembangkan dengan dukungan INOVASI	Menguatnya ekosistem 2 kabupaten untuk melakukan upaya peningkatan efektivitas penggunaan buku paket	Sekolah (SD & MI)	48							350,000,000	DFAT	Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur	INOVASI
Program 3: Educational Leadership													
Kegiatan; 1 Mendukung aktor-aktor ekosistem kabupaten Lombok Timur untuk menemukan pola kepemimpinan MI yang secara efektif dapat menguatkan karakter siswa (bergeser ke Lombok Tengah melalui penguatan	Menguatnya kapasitas aktor dalam ekosistem Kabupaten Lombok Timur untuk menemukan pola kepemimpinan MI yang secara efektif dapat menguatkan karakter siswa	Satuan Pendidikan								175,000,000	DFAT	Kabupaten Lombok Tengah	INOVASI



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
kemampuan kepala sekolah mengembangkan dan memfasilitasi program penguatan karakter positif, kegiatan ini dengan pendampingan pengawas)												
Program 4: Gender Equality												
Kegiatan 1: Mendukung aktor dalam ekosistem di 5 kabupaten mitra menemukan cara yang relevan dan efektif dalam mengurangi kesenjangan capaian belajar kecakapan dasar siswa laki-laki dengan siswa perempuan	Lokakarya Pencegahan dan Penganganan Perkawinan usia Anak Aktor-aktor lokal memahami faktor-faktor penyebab kesenjangan capaian pembelajaran anak laki-laki dan perempuan.	Kabupaten	2						97,500,000	DFAT	Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Barat	INOVASI
Program 5: Climate Change												
Kegiatan 1: Mendukung aktor dalam ekosistem setidaknya 1 kabupaten mitra untuk menemukan cara-cara yang relevan dan efektif dalam	Workshop Pendidikan Perubahan Iklim Meningkatnya kemampuan aktor dalam ekosistem di setidaknya 1 kabupaten mitra untuk menemukan	Kabupaten	1						75,000,000	DFAT	Kabupaten Lombok Tengah	INOVASI



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam pembelajaran	cara-cara yang relevan dan efektif dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam pembelajaran											
Program 6: Disability Activities												
Kegiatan 1: Mendukung kolaborasi aktor di 3 kabupaten termasuk dinas, bappeda, kemenag, ULD, LPTK dengan KNTBM dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan orang dewasa dan anak-anak terhadap isu-isu disabilitas melalui bahan bacaan yang relevan dan berkualitas	Meningkatnya kolaborasi aktor yang relevan dalam ekosistem dalam meningkatkan kesadaran dan penerimaan orang dewasa dan anak-anak terhadap isu-isu disabilitas melalui bahan bacaan yang relevan dan berkualitas	Kabupaten	1						350,000,000	DFAT	1 Kabupaten Lombok Timur	INOVASIS
INDIKATOR SDGs	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun										
Program												
Kegiatan												



Tujuan 5. Kesenjangan Gender

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun										
Program: BERANI II (Better Reproductive Health and Rights For All in Indonesia) , Fokus pada isu Pencegahan Perkawinan anak.												
									1.700.000.000)	UNICEF	15 desa di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara	LPA NTB
Program INKLUSI Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak												
Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pemangku kepentingan terkait isu pencegahan perkawinan anak	Adanya bukti peningkatan pemahaman, kesadaran dan sikap dari pemangku kepentingan (keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, OMS dan pemerintah) terhadap isu pencegahan dan penanganan perkawinan anak	Kabupaten	1	1	1	1			1. Tahun 2024 : 600.049.333 2. Tahun 2025 : 775. 982. 281	DFAT	Kab. Lombok Utara : Kec. Pemenang Desa Pemenang Barat, Kec. Tanjung Desa Sigar Penjalin, dan Desa Tegal Maja. Kec Kayangan Desa Santong	Lakpesdam NU NTB dan PC Fatayat NU Lombok Utara
Perbaikan akses dan layanan pencegahan dan pasca kawin anak yang inklusif di tingkat Kabupaten	Penyedia layanan memberikan layanan pencegahan dan pasca kawin anak yang lebih inklusif											



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
dan Desa	di Kabupaten dan Desa											
Memperluas akses dan dukungan generasi muda dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dan mendorong terbukanya akses layanan bagi kaum muda untuk pencegahan dan penanganan perkawinan anak	Kaum muda di komunitas aktif bergerak dan mendapatkan akses layanan yang lebih luas dan relevan di Kabupaten											
Mendorong lahirnya kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan anak di tingkat Kabupaten dan Desa	Lahirnya kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak termasuk pencegahan perkawinan anak oleh Pemerintah desa dampingan dan pemerintah kabupaten											
Pengembangan aliansi dan kolaborasi forum multi pihak untuk mendukung gerakan pencegahan dan penanganan perkawinan anak	Adanya forum multipihak di tingkat provinsi, Kabupaten. Dan Desa untuk Pencegahan Perkawinan Anak											



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program: Pembentukan Komunitas Perempuan (Kelompok Konstituen) dalam mendorong keteresaan Gender dan penghapusan Kekerasan												
Penguatan dan Pembentukan kelompok		Kelompok	15	15	15	15	15		160.000.000	DFAT	Labuhan Haji, Kertasari, Banjarsari, Teros, Aikmel Utara, Aikmel Timur, Aikmel Barat, Kembang Kerang, Masbagik Uatra Baru, Lendang Nagka Utara, Danger, Paok Motong, Gelora, Kotaraja dan Sikur Selatan	LRC
Penguatan kapasitas advokasi dan partisipasi kelompok rentan dalam politik desa		Kelompok	15	15	15	15	15		160.000.000	DFA	Labuhan Haji, Kertasari, Banjarsari, Teros, Aikmel Utara, Aikmel Timur, Aikmel Barat, Kembang Kerang, Masbagik Uatra Baru, Lendang Nagka Utara, Danger, Paok Motong, Gelora, Kotaraja dan Sikur Selatan	LRC
Program:												
Pemberdayaan Masyarakat dengan menyentuh semua isu		Provinsi	1	1	1	1	1	1		BPHN, Swakelola Type 2 dan 3 kemePPA	NTB	LBH APIK NTB
Pemberdayaan dan		Provinsi	1							Swakelola	NTB	LB APIK NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Bintek untuk perempuan Korban Kekerasan										Type 3 KemenPPA		
INDIKATOR SDGs	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (b) pemerintah daerah: Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota										
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah: DPRD										
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial										
Program: INKLUSI												
Meningkatkan partisipasi perempuan pemimpin akar rumput dalam posisi strategis di desa dan melalui Musrenbang desa-kabupaten		Kabupaten	2	2	2	2	2		251.670.910	Kerjasama Indonesia-Ausaid	1. Kab. Lotim: Desa Lenek Kalibambang, Desa Labuan Lombok, Desa Loyok, Desa Rarang Selatan, Desa Sepit 2. Kab. Lombok Utara: Desa Sesait, Desa Andalan, Desa Menggala, Desa Batu Rakit	LPSDM
Woman in Sustainable Development (WISDOM)												
Pelatihan Keterampilan, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Perempuan	Meningkatkan keterampilan perempuan dalam ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan untuk membuka peluang kerja dan meningkatkan jumlah perempuan	Jumlah perempuan yang bekerja	20	40	60	80			50.000.000	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra ECCO Foundation	Desa Genggulang, Kabupaten Lombok Utara	Ecco Foundation



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	yang bekerja.											
Program												
Pemetaan kawasan	Perempuan terlibat aktif	Sesi	6	8	10					LPDP	Bayan, Jambiano, Lombok Utara	Santiri dan sekolah adat bayan
Kelompok bahari dan ekowisata	Kelompok aktif dan pelatihan	kelompok	4	5	6					UNDP, GEF	Jambiano, Lombok Utara	Santiri dan kelompok bahari
Program INKLUSI												
Kegiatan 1: Mentoring dan Technical Asisten Anggota Parlemen Perempuan	Meningkatkan kapasitas Anggota Parlemen Perempuan	Orang	3	3	3				20.000.000	DFAT	DPRD Lombok Timur	LRC
INDIKATOR SDGs	5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan: (a) kelompok WUS										
		Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan: (b) kelompok PUS										
PROGRAM: INKLUSI dan WAC												
Melakukan peningkatan kesadaran kritis, kepemimpinan perempuan, komitmen politik dan life skill (kecakapan hidup) perempuan akar rumput yang dikembangkan melalui Sekolah Perempuan: Pembentukan dan penguatan kelembagaan		Kabupaten	2	2	2	2			766.802.700/tahun	Kerjasama Indonesia-Ausaid	1. Kab. Lotim: Desa Lenek Kalibambang, Desa Labuan Lombok, Desa Loyok, Desa Rarang Selatan, Desa Sepit 2. Kab. Lombok Utara: Desa Sesait, Desa Andalan, Desa Menggala, Desa	LPSDM



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Sekolah Perempuan dengan menggunakan modul Pendidikan Adil Gender											Batu Rakit	
WAC: Peningkatan kapasitas pemberi layanan dan komunitas dalam Upaya pencegahan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan praktik berbahaya (Perkawinan anak, Sunat perempuan)		jiwa	160						350.000.000	Dana Hibah Takeda-Indonesia	Kabupaten Lombok Timur: - Desa Montong Betok Desa Lenek duren	LPSDM
INDIKATOR SDGs	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 5 tahun										
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. >= 0 tahun										
Program												
Kegiatan												

Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target	Indikatif Alokasi	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan	Lembaga Pelaksana



			2025	2026	2027	2028	2029	2030	Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)		Kegiatan	
INDIKATOR SDGs	6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman (Air Minum Layak)										
Program												
Infrastruktur air desa delta api	Tersedianya sistem air dan sanitasi	desa	6	8	10					Samdhana institute	Medana, jambianom	Santiri dan pemda
INDIKATOR SDGs	6.2.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak										
	6.2.1*	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air										
Program												
Kegiatan STBM Inklusi	memperkuat sanitasi masyarakat yang layak menuju aman	Kabupaten							780.000.000	WVI (wahana Visi Indonesia)	Lombok Timur dan Lombok Utara	Mitra Samya
Program	WINNER (Women, Disability inclusive and nutrion sensitive wash										Kota mataram, loteng	Plan, Transform
Advokasi dokumen roadmap pencegahan stunting	Terbentuknya dokumen sebagai pedoman bagi desa dan kelurahan dalam pencegahan stunting											
Program	Water For Women Climate Resilience Inclusive Water and Sanitation Higyene											
Kegiatan Memperkuat sistem di pemerintahan dan masyarakat mewujudkan	Meningkatnya kualitas perilaku hidup bersih dan sehat									DFAT	Kabupaten Sumbawa	Plan



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
sanitasi inklusif												
Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengurangi risiko terkait air dan sanitasi	Meningkatnya akses sarana air bersih dan sanitasi yang inklusif											
Mendorong kaum rentan sebagai penggerak perubahan dalam ketahanan iklim	Terbentuknya forum PSDAT											
	Terbentuknya sekolah hijau											
Program	Jelajah Timur (Aksi solidaritas memperjuangkan pemenuhan hak anak dan kesetaraan bagi anak dan kaum muda perempuan											
Kegiatan melaksanakan kegiatan charity lari marathon	Terkompulnya charity untuk pengadaan akses air bersih								3,863.150.000	charity	Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur	Plan
Program Kawasan Sehat												
- Pemicuan Jamban Sehat (Pemberian Stimulasi Jamban Sehat) - Edukasi Pemilahan	a. Kegiatan sosialisasi 5 pilar STBM b. Suport bahan stimulan jamban sehat keluarga	Desa kedaro kec sekotong lombok barat NTB	A 158 B 35 C 100	a. 189 B.35 C. 100					5.500.000	Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kab, Lombok Barat	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Sampah Indisiasi Kebun Sehat Keluarga	c. Sosialisasi pemilahan sampah											
Program Tematik Sanitasi dan (Pemicuan Jamban)												
Pemicuan Jamban Sehat (Pemberian Stimulasi)	a. Pemicuan dan sosialisasi 5 pilar STBM b. Pemberian suport bahan bangunan jamban sehat keluarga c. Sosialisasi pemilahan sampah dan pemamfaatan sampah plastik menjadi paving blok	Desa Senaru kecamatan bayan lombok utara NTB	A.150 B.50 C.150	A.100 B.100 C.150					80.000.000	Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara <i>(Tentatip Sesuah Hasil Rapat Kerja 2025 nanti)</i>	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB
Program Bidan Untuk Negeri												
Sanitasi yang layak	a. Penyuluhan STBM b. Pemicuan Jamban c. Penyaluran Stimulan Bahan Bangunan Pembuatan Jamban Sehat d. Pemanfaatan Lahan untuk Toga e. Sosialisasi Pengelolaan Sampah	KK	A.149 B.149 c.57	C.30 D.50 E.50					15.000.000	Dana Program LKC DD NTB dan Mitra Lain	Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara	Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhuafa NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Rumah Tangga											
INDIKATOR SDGs	6.3.2.(a)	Kualitas Air Permukaan Sebagai Air Baku (Indeks Kualitas Air)										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	6.6.1*	Perubahan Tingkat Sumber Daya Air Terkait Ekosistem dari Waktu ke Waktu (Indeks Kualitas Lahan)										
Program												
Kegiatan												

Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	7.1.1*	Rasio Elektrifikasi										
	7.1. (a)	Konsumsi Listrik per kapita										
Program												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kegiatan Women and Vulnerable Group Benefited and Lead on Transformative and Just Energy Transition in Indonesia (WE for JET)	TOT inklusi disabilitas	Desa								DFAT-OXFAM Penabulu	Tetebatu Selatan, Rarang, Dasan Geria, Taman Ayu, Lantan, dan Pandan Indah	Gema Alam
	Kajian pemetaan partisipatif berbasis potensi energi terbarukan lokal desa											
	Kajian Rapid Care Analisis dalam transisi energi											
	Pemetaan energi terbarukan lokal di Desa Pandan Indah dan Desa Lantan											
	Survei dengan tim Ahli untuk pembangunan ET di Desa											
	Pendampingan (meningkatkan pemahaman kepada perempuan sekolah setara tentang transisi energi,											



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	kebutuhan perempuan dll											
	Literasi energi terbarukan											
Program : Empower												
Kegiatan: Pendampingan dan pelatihan	Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Transisi Energi dan Perubahan Iklim di NTT, NTB, dan Aceh									WRI_UN Women	Tetebatu Selatan, Rarang, Dasan Geria, Taman Ayu, Lantan, dan Pandan Indah	Gema Alam
INDIKATOR SDGs	7.1.2.(b)	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga										
Program												
Kemiskinan energi desa desla api	Tersedianya Teknologi ramah lingkungan	desa	6 8	10						Samdhana	SUKMA	Santiri dan komunitas

Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	8.1.1.[a]	PDRB per kapita										
	8.1.1*	Laju Pertumbuhan PDRB per kapita										
Program												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	8.3.1*	Proporsi kerja informal berdasarkan sektor dan jenis kelamin										
Program:												
Inkubasi UMKM dan Ekowisata	Terbentuknya UMKM aktif dan wisata lokal	UMKM	8	10	12					Kemedes dan pemda	Sokong dan genggelang	Sanitiri dan dinas koperasi
Festival Rinjani dan Ekonomi Kreatif	Produk lokal dan peserta	event	4	5	6					Dana indonesiana	Lombok utara dan mataram	Santiri dan komunitas
INDIKATOR SDGs	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja										
	8.5.2.[a]	Tingkat setengah pengangguran										
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)										
Program												
Kegiatan												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja									
Program											
Proyek Percontohan Pemantauan dan Remediasi Pekerja Anak berbasis Desa (Pertanian Tembakau dan Kakao) Di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur		Desa	100 Pekerja Anak 800 anak Rentan					891.875.000	ECLT-PAACLA-JARAK	Kabupaten Lombok Utara : Desa Genggeling dan Desa Selelos Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Timur : Desa Borok Toyang – Kecamatan Sakra Barat dan Pandan Wangi – Kecamatan Jerowaru	SANTAI-NTB
Pencagahan Pekerja anak di Sektor Pertanian Tembakau di Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah		Desa	800 anak rentan 200 orang tua dan buruh tani					291.852.250	PT.AOI	Kabupaten Lombok Timur : Desa Gelanggang, Kabar, Sakra Selatan, Bungtiang, dan Batu Putik. Lombok Tengah : Desa	SANTAI-NTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											Setuta, Saba, dan Lekor	
INDIKATOR SDGs	8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB.										
	8.9.1.[a]	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.										
	8.9.1.[b]	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara										
Woman in Sustainable Development (WISDOM)												
Pelatihan Keterampilan, Wirausaha, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Berkelanjutan untuk Perempuan	Perempuan memiliki keterampilan produktif di sektor ekonomi kreatif & wisata guna meningkatkan pendapatan rumah tangga perempuan.	Jumlah perempuan yang bekerja	20	40	60	80			50.000.000	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra ECCO Foundation	Desa Genggeling, Kabupaten Lombok Utara	Ecco Foundation

Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	9.1.1.(a)	Kondisi Mantap Jalan Provinsi										
Program												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Rumah ramah gempa (bale jajar)	Terbangunnya rumah dan terlatihnya tukang	unit	30	40	50					PUPR NTB	Bayan, KLU	Santiri, PUPR
Masterplan kampung jambianom	Tersusunnya mastreplan dan pemetaan	dokumen	3	4	5					UNDP, Samdhana	Jambianom	Santiri & komunitas
	9.1.2*	Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Bongkar)										
		Jumlah Penumpang dan Barang Berdasarkan Moda Transportasi (Kapal Muat)										
	9.1.2.[a]	Jumlah bandara										
	9.1.2.[b]	Jumlah Pelabuhan penyeberangan										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	9.2.1*	Rasio PDRB industry pengolahan dan nilai tambah industry pengolahan per kapita										
	9.2.1.[a]	Pertumbuhan PDRB industri pengolahan										
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industry pengolahan										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile										
Program												
Kegiatan												

Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030								
INDIKATOR SDGs	10.1.1*	Koefisien Gini														
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
Program DIGNITY (Disability Inclusive and Gender Equality Program)																
Penyusunan Draft RAD-PD	Terpenuhinya hak hak disabilitas dalam program yang ada di setiap OPD	Provinsi	1							INKLUSI		LIDI Foundation				
Pembentukan TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat	Maksimalnya penanganan ODDP (orang dengan disabilitas Psikososial	Kabupaten & Kecamatan	1							INKLUSI	Lombok Timur - Keruak	LIDI Foundation				
Pembentukan SHG (Self-Help Goup)	Keterlibatan disabilitas dalam pembangunan desa	DESA	2							INKLUSI	desa selebung ketangga dan desa ketangga jeraeng kecamatan keruak kabupaten lombok timur.	LIDI Foundation				
Membangun Kelompok usaha (peternakan dan pertanian)	Menikatknya kemandirian disabilitas melalui kelompok berbasis masyarakat	DESA	2							Inklusi	desa selebung ketangga dan desa ketangga jeraeng kecamatan keruak kabupaten lombok timur.	LIDI Foundation				
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir selatan	Terbangunnya kesadaran masyarakat	Desa	4							LIDI Fondation dan Mitra	Desa Sekaroh, Desa Pemongkong,					



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	tentang pentingnya ekosistem hutan tadah hujan dan pungsi mangrove										Desa Paremas, Desa Seriwe	
INDIKATOR SDGs	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal										
	10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri										
Program												
Pemetaan adat dan pemuda	Terlibatnya kelompok marginal	desa	15	20	25					samdhana	bayam santiri, DGMI	
INDIKATOR SDGs	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas										
Program P2MI-BK (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Berbasis Komunitas)												
Penguatan perlindungan pekerja migran berbasis komunitas	Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan keterampilan terkait perlindungan pekerja migran di tingkat komunitas dan desa	Kabupate n	1	1						GIZ dan Kementerian P2MI	Kab. Lombok Timur (Kec. Jerowaru Desa Pemongkong, Kec. Montong Gading Desa Jenggik Utara, Kec. Priggasela Desa Pringgasela, Kec. Desa Anjani Kec Suralaga dan Kec. Wanasaba Desa Wanasaba)	Lakpesdam NU NTB dan Lakpesdam NU Lombok Timur
Mendorong kebijakan perlindungan	Adanya kebijakan yang											



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
pekerja migran di tingkat desa	berkaitan dengan perlindungan pekerja migran di desa											
Mendorong Satgas perlindungan pekerja migran ditingkat desa dan kabupaten	Terbentuknya satgas / komunitas perlindungan pekerja migran di desa dan kabupaten											
INDIKATOR SDGs	10.3.1.(a)	Indeks Aspek Kebebasan										
Program Partisipasi pemuda dalam kebijakan publik												
Wikithon 1		Provinsi	1	1	1	1	1	1	295jt	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra BASAntb - ECCO	Provinsi NTB	BasaNTB
Wikithon 2		Provinsi	1	1	1	1	1	1	300jt	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra BASAntb - ECCO	Provinsi NTB	BasaNTB
Wikithon 3		Provinsi		1	1	1	1	1	250jt	Dana Grant BOTNAR	Provinsi NTB	BasaNTB



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
										Foundation dan sponsorship mitra BASAntb - ECCO		
Kongres pemuda		Provinsi	1	1	1	1	1	1	600jt	Dana Grant BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra BASAntb - ECCO	Provinsi NTB	BasaNTB
Gerak Dampak Academy		Provinsi	1	1	1	1	1	1	40.000.000	Indika Foundation	Kota Mataram	Ecco Foundation

Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	11.1.1.(a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau										
Program												
Eco-Climate Village	Permukiman berkelanjutan	desa	4	5	6					Samdhana	SUKMA	Santiri
INDIKATOR SDGs	11.6.1.(a)	Presentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya										
	11.6.1.(b)	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah										
	11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										
Program: Peningkatan Kaulitas Layanan Berbasis Komunitas dalam Penanganan dan Pendampingan Kasus Keekrasa												
Peningkatan Kapasitas pendampinagndalam penanganana dan pendampinagn kasus kekerasan di desa	Meningkatnya kapasitas kumintas dalam memberikan layanan bagi korban kekerasan	Unit LBK	15	15	15	15	15		200.000.000	DFAT	Labuhan Haji, Kertasari, Banjarsari, Teros, Aikmel Utara, Aikmel Timur, Aikmel Barat, Kembang Kerang, Masbagik Uatra Baru, Lendang Nagka Utara, Danger, Paok Motong, Gelora, Kotaraja dan Sikur Selatan	LRC



Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	12.5.1.(a)	Persentase timbunan sampah yang didaur ulang.										



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang										
Program												
Wise smart Agriculture	Tersedianya lahan pecatu	hektar	4	4	4					New Zealand Embassy	KLU	Santiri, SAB Koptek

Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana										
Program: Kepemimpinan Sekolah Perempuan dalam Menghadapi Banjir di 3 Desa Kabupaten Lombok Timur												
Sekolah Perempuan Tangguh Bencana sebagai Pusat Aksi Kemanusiaan Komunitas yang Responsif Gender dengan Sistem Peringatan Dini Adaptif yang Dipimpin oleh Perempuan		Desa	-	3	-	-	-	-	500.000.000	Caritas Germany (ToGether)	Desa Pijot, Desa Ketapang raya, Desa Tanjung Luar	LPSDM
Program: Peningkatan Ketangguhan melalui Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana di Nusa Tenggara												
Melakukan pelatihan teknis bagi penyuluh tentang aplikasi PCH										World Neighbors (WN)	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Giri Tembesi, Banyu Urip, Kuripan Selatan, Saribaye dan Batu Mekar.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan mengenai pertanian konservasi, termasuk IPM										World Neighbors (WN)	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Giri Tembesi, Banyu Urip, Kuripan Selatan, Saribaye dan Batu Mekar.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan mengenai										World Neighbors (WN)	Desa Cendi Manik, Mareje,	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan



Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
		2025	2026	2027	2028	2029	2030				
tanaman sayur, termasuk IPM										Sekotong Timur, Giri Tembesi, Banyu Urip, Kuripan Selatan, Saribaye dan Batu Mekar.	Nusa Tenggara Barat)
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan mengenai produksi tanaman pangan lokal, termasuk IPM									World Neighbors (WN)	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Giri Tembesi, Banyu Urip, Kuripan Selatan, Saribaye dan Batu Mekar.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan mengenai pertanian Agroforestry.									World Neighbors (WN)	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Giri Tembesi, Banyu Urip, Kuripan Selatan, Saribaye dan Batu Mekar.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Konservasi Mata Air di kawasan Sumber Mata Air									World Neighbors (WN)	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Giri Tembesi, Banyu Urip,	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											Kuripan Selatan, Saribaye dan Batu Mekar.	
Pengurangan Risiko Bencana (pembuatan rinkon, penyusunan KRB)										World Neighbors (WN)	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Giri Tembesi, Banyu Urip, Kuripan Selatan, Saribaye dan Batu Mekar.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Peningkatan ekonomi masyarakat										World Neighbors (WN)	Desa Cendi Manik, Mareje, Sekotong Timur, Giri Tembesi, Banyu Urip, Kuripan Selatan, Saribaye dan Batu Mekar.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Program:												
I-CATCH dan delta api	Terbentuknya rencana adaptasi iklim	desa	30	40	50					USAID	NTB	Santiri, Yascita
INDIKATOR SDGs	13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun										
	13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
	13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										
Program FOMA-PRO Fostering Multistakeholder Alliance for Pro-Poor ang Gender Sensitive Low Carbon Development and Climate Resilience;												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Kegiatan: Keungan nikro syariah untuk Ekonomi Sirkuler	Memberdayakan akan ekonomi masyarakat, mengurangi jumlah sampah yang dibuang, menciptakan produk bernilai tambah, meningkatkan kesadaran akan pengelolaan sampah dan perilaku ramah lingkungan.								4.832.250.000		Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara	YRII
Program BUDLOC (Building and Deepening Low Carbon Development and Climate Resilience)												
Praktik Pelatihan praktis POH	Meningkatkan kesejahteraan								23.630.000.000		Kab.Bima, kab.Dompu, Kota Bima	YRII
Bantuan bibit untuk komunitas wanatani	Berkurangnya konflik hutan dan lahan											
Pembuatan demplot agroforestri	Kesetaraan laki-laki dan Perempuan											
Pendampingan penyusunan dokumen PRKBI												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program Scaling-up graduation and resilience in asia												
Kegiatan; Pelatihan dan kajian risiko bencana iklim	Meningkatkan mata pencaharian yang tangguh, asset, dan pengembangan sosial								13.940.000.000		Perigi, suntalangu, puncak jeringo, mekarsari, selaparang	YRII
Penyusunan dokumen risiko iklim	Memperkuat ketahanan keluarga menghadapi bencana dampak perubahan iklim											
Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim	Memperkuat sistem dan kapasitas Lembaga dan pemangku kepentingan dalam ketahanan bencana dan meningkatkan mekanisme adaptasi.											
Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim	Memperkuat sistem dan kapasitas Lembaga dan											



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	pemangku kepentingan dalam ketahanan bencana dan meningkatkan mekanisme adaptasi.											
Pembentukan dan pelatihan tim siaga bencana komunitas dan daerah	Memperkuat kapasitas di Tingkat regional dan global untuk berbagi inovasi dalam mengurangi kemiskinan, dan ketangguhan bencana.											
Program: Memperkuat Perekonomian dan Ketahanan Sistem Pertanian melalui Inklusivitas di Nusa Tenggara, Indonesia												
Pembentukan Kelompok Proklim (Program Kampung Iklim)		Kel	36	2	2	-	-	-	60.000.000	World Neighbors	Desa Perian, Desa Timbanuh, Desa Pringgajurang Utara, Desa Senanggalih	LPSDM
Program: Strengthening Economy and Resilience of Agriculture System through Inclusive (SERASI)/Memperkuat Perekonomian dan Ketahanan Sistem Pertanian melalui Inklusivitas Di Nusa Tenggara, Indonesia												
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan mengenai pertanian konservasi		Desa	3	3						World Neighbors (WN)	Desa Eyat Mayang, Desa Buwun Mas dan Sekotong	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara)



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
											Tengah.	Barat)
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan mengenai tanaman sayur.		Desa	3	3						World Neighbors (WN)	Desa Eyat Mayang, Desa Buwun Mas dan Sekotong Tengah.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan mengenai produksi tanaman pangan lokal.		desa	3	3						World Neighbors (WN)	Desa Eyat Mayang, Desa Buwun Mas dan Sekotong Tengah.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Melakukan pelatihan dan pendampingan serta pemantauan mengenai pertanian Agroforestry.		Desa	3	3						World Neighbors (WN)	Desa Eyat Mayang, Desa Buwun Mas dan Sekotong Tengah.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Konservasi Mata Air di kawasan Sumber Mata Air		Desa	3	3						World Neighbors (WN)	Desa Eyat Mayang, Desa Buwun Mas dan Sekotong Tengah.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Pengurangan Risiko Bencana (pembuatan rinkon, penyusunan KRB)		Desa	3	3						World Neighbors (WN)	Desa Eyat Mayang, Desa Buwun Mas dan Sekotong Tengah.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Peningkatan ekonomi masyarakat. (pembentukan kelompok UBSP/simpan pinjam, kewirausahaan/bisnis).		Desa	3	3						World Neighbors (WN)	Desa Eyat Mayang, Desa Buwun Mas dan Sekotong Tengah.	PSP-NTB (Pusat Studi Pembangunan Nusa Tenggara Barat)
Program: INKLUSI												
Pendampingan Desa tanggap Perubahan Iklim	Meningkatnya kapasitas Pemerintah	desa	1	2	2	2			50.000.000	DFAT	Lombok Timur	LRC



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan iklim											
Program : BISA												
Penguata KelompokPetani dalam Mengyunakan Biostimulan berbasis Potensi lokal	Meningkatn ya kapasitas kelompok tani memanfaatkan potensi lokal sebagai input produksi yang ramah lingkungan	Petani	100	100					80.000.000	UNDP	Lombok Timur	LRC
INDIKATOR SDGs	13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
Program: Penguatan Pendidik Sebaya untuk isu Perubahan Iklim												
Penguatan Pendidik Sebaya untuk isu Perubahan Iklim	Sejumlah Pendidik Sebaya mampu melakukan andokasi terkait Isu Perubahan Iklim	Kota	1						123.000.000	Donatur	Mataram	Gagas Foundation
Program: Improvement Community Anticipatory Action (I CAN ACT) Phase II												
melibatkan partisipasi aktif	Meningkatn	Kabupate	2						970.009.365	OXFAM	Kabupaten	KONSEPSI



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
masyarakat desa dalam isu bencana iklim	ya pemaham an masyarakat desa mengenai pendekatan aksi antisipasi bencana (Anticipatory Action/AA)	n									Lombok Barat : Desa Dasan Geria, Kec. Lingsar dan Desa Taman Ayu, Kec. Gerung serta Kabupaten Lombok Timur : Desa Obel-Obel, Kec. Sambelia, Desa Dara Kunci, Kec. Sambelia dan Desa Belanting, Kec. Sambelia	
Program: Inclusive Tackling toward Ecosystem-based Resilience in Alerted Climate Threats (INTER-act)												
Pemenuhan hak-hak petani kecil, baik laki-laki maupun perempuan, serta kelompok-kelompok yang terpinggirkan, melalui pembangunan ketahanan lokal yang inklusif untuk mengantisipasi, beradaptasi, mengatasi, dan pulih dari dampak negatif perubahan iklim	Profil Bencana iklim Desa dan Rencana Aksi Masyarakat Peluncuran Sekolah Lapang Iklim untuk Petani Tadah Hujan dan Sekolah Lapang Iklim berdasarkan	Kabupate n	1						1.394.839.583	ForumCIV	Desa Sukadana dan Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut – Kabupaten Lombok Tengah	KONSEPSI



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Potensi Pertanian lahan Kering yang Responsif terhadap GEDSI											
Program: Unlocking Resilience-Program Kelulusan Kemiskinan dan Ketangguhan Masyarakat (P3KM)												
Kelulusan Kemiskinan dan Ketangguhan Masyarakat (PK3M)	model graduasi dengan penyesuaian kontekstual	Kabupaten	1	1					1.081.200.000	YRII	Desa Puncak Jeringo, Desa Perigi, Desa Mekarsari, Desa Selaparang, Desa Sotalangu, Kecamatan Suela-Kabupaten Lombok Timur	KONSEPSI
Program												
Mendukung pembentukan dan pelatihan tim siaga bencana komunitas dan daerah	Memperkuat kapasitas di Tingkat regional dan global untuk berbagi inovasi dalam mengurangi kemiskinan, dan ketangguhan bencana.	Dana	300.000.000	500.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	4.200.000.000	BAZNAS NTB	10 Kab/Kota se-NTB	BAZNAS Prov., BAZNAS Kab/Kota, dan BPBD



Tujuan 14. Ekosistem Lautan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	14.5.1	Jumlah luas kawasan konservasi perairan										
Program												
Transplantasi terumbu karang	Terumbu dan kelomp[ok aktif	lokasi	3	4	5					UNDP, GEF	Medana bay, KLU	Santiri, bahari lestari
INDIKATOR SDGs	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.										
Program												
Kegiatan												



Tujuan 15. Ekosistem Daratan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030					
INDIKATOR SDGs	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap total luas lahan											
Program: Kaji Cepat Perhutanan Sosial PT. Amman													
Kegiatan susun kajian terkait perhutanan sosial PT.Amman	Kajian yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan PT.Amman	dokumen	1							360.689.700	PT. AMNT	Kabupaten Sumbawa Barat & Kabuparen Sumbawa Besar (KPH SEJORONG MATAIYANG, KPH BRANG BREA PUNCAK NGENGAS, KPH BRANG BEH)	KONSEPSI
Program: Memperkuat Perekonomian dan Ketahanan Sistem Pertanian melalui Inklusivitas di Nusa Tenggara, Indonesia													
Meningkatkan tutupan lahan dan perlindungan sumber mata air	15.1.1.(a)	Ha	1,5	1,5	-	-	-	-	10.000.000	Word Neighbors	Desa Perian, Desa Pringgajurang Utara, Desa timbanuh	LPSDM	
Pelatihan dan praktek model agroforestry yang berketahanan iklim	15.1.1.(a)	Ha	2	2	-	-	-	-	25.000.000	World Neighbors	Desa Perian, Desa Pringgajurang Utara, Desa timbanuh, Desa Senanggalih	LPSDM	
INDIKATOR SDGs	15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan											
Program													
Penanaman pohon dan kampung bersih	Pohon tertanam dan kampung bersih	pohon	1500	2000	2500					Pemprov NTB	Lombok Utara	Santiri dan Komunitas	



Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030					
INDIKATOR SDGs	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir											
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya											
Program													
Penyuluhan Hukum		Kab/kota	10	10	10	10	10	10		LBH APIK dan BPHN	Semua Wilayah di 10 kabupaten /Kota	LBH APIK NTB	
Konsultasi Hukum		Kab/kota	10	10	10	10	10	10		LBH APIK dan BPHN	Semua Wilayah di 10 kabupaten /Kota	LBH APIK NTB	
Sosialisasi untuk pencegahan segala Bentuk kekerasan di masyarakat, kampus dan Sekolah Sekolah		Kab/kota	10	10	10	10	10	10		LBH APIK dan BPHN	Semua Wilayah di 10 kabupaten /Kota	LBH APIK NTB	
Program:													
Sekolah adat dan pemetaan wilayah	Kurikulum dan peta wilayah	modul	3	4	5					Kemendikbud. samdhana	bayar	Saniri, SAB, DGMI	
Program: Pengembangan Sistem Perlindungan PMI yang Responsif Gender melalui Partisipasi Struktur Sosial di Kabupaten Lombok Utara													
Pelatihan Paralegal	Struktur Sosial memiliki kemampuan dalam menangani kasus yang dialami Pekerja Migran	Kegiatan	1	1					49,280,000	AWO International	Lombok Utara	Perkumpulan Panca Karsa	



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Indonesia											
Sosialisasi Migrasi Aman dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Struktur Sosial memiliki kemampuan dalam mensosialisasikan migrasi aman dan tindak pidana perdagangan orang	Kegiatan	3						21,345,000	AWO International	Lombok Utara	Perkumpulan Panca Karsa
INDIKATOR SDGs	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir										
Program: Penguatan Institusi Perlindungan Anak dan Forum Partisipasi Anak Desa												
Kegiatan Pendampingan Penguatan Organisasi Perlindungan Anak Desa	Aktifnya LPA Desa	Desa	2						300.000.000	Swadaya	Desa Kuta Desa Waja Geseng	GAGAS Foundation
Kegiatan: Pendampingan Forum Partisipasi Anak Desa	Aktifnya Sanggar Anak/Forum Anak Desa	Desa	2						176.000.000	Swadaya	Desa Kuta Desa Waja Geseng	GAGAS Foundation
IDEA Voice of Peace												
Lomba Cipta Lagu & Musik Perdamaian untuk Pemuda		Provinsi	1	1	1	1	1	1	75.000.000	BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra ECCO Foundation	Provinsi NTB	Ecco Foundation
Dialog & Ruang Ekspresi Damai untuk Pemuda		Provinsi	1	1	1	1	1	1	60.000.000	BOTNAR Foundation dan sponsorship mitra ECCO Foundation	Provinsi NTB	Ecco Foundation



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030								
INDIKATOR SDGs	16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.														
Nama Program: Penguatan kelompok anak muda untuk Hak Asasi Manusia																
Volunteer Camp	Volunteer memiliki kemampuan pendampinga Issu Perlindungan Anak	Provinsi	1	1	1					90.000.000	Donatur	NTB	GAGAS Foundation			
Program:																
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan secara Non Litigasi		Kab/kota	10	10	10	10	10	10			BPHN, Forum Pengada layanan, Asosiasi Apik, Grab Indonesia,	Semua Wilayah di 10 kabupaten /Kota	LBH APIK NTB			
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok rentan secara Non Litigasi		Kab/kota	10	10	10	10	10	10			BPHN, Forum Pengada layanan, Asosiasi Apik, Grab Indonesia	Semua Wilayah di 10 kabupaten /Kota	LBH APIK NTB			
Pendampingan Kasus Masyarakat terkait Hak hak dasar dan layanan Publik		Kab/kota	10	10	10	10	10	10			LBH APIK	Semua Wilayah di 10 kabupaten /Kota	LBH APIK NTB			
INDIKATOR SDGs	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).														
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan Keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)														
	16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi														
	16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan														



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan											
Program P3PD (Program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa)													
Penguatan Desa Inklusi dan akuntabilitas sosial desa	Pemerintah desa lebih inklusif dan akuntabel dalam pengelolaan pembangunan desa	Kabupaten	1							300.000.000	Kementerian Desa dan Lakpesdam PBNU	Lombok Barat (Desa Taman Ayu, Desa) Lombok Utara (Desa Pemenang Barat, Desa Malaka, Desa Teniga,Desa Sokong, Desa Jenggala, Desa Rempek Darussalam, Desa Santong, Desa Kayangan, Desa Bayan) Sumbawa : Desa Marente, Desa Muer, Desa Juran Alas, Desa Batu Tering, Desa Bungin, Desa Labuhan Sumbawa	Lakpesdam NU NTB dan Lakpesdam NU Lombok Utara
	Meningkatnya partisipasi kelompok rentan dan												



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	marginal dalam perencanaan pembangunan desa											
	Terbukanya akses dan layanan dasar yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan dan marginal											
Program:												
Pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan kepemimpinan Perempuan dan pengambilan keputusan		Kab/kota	10	10	10	10	10	10		LBH APIK	Semua Wilayah di 10 kabupaten /Kota	LBH APIK NTB
INDIKATOR SDGs	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah										
	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun										
	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur										
Program : Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Kelompok Rentan												
Kegiatan 1: Pemenuhan Hak Dasar Kelompok Rentan (Administrasi Kependudukan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial	Meningkatnya jumlah Kelompok Rentan yang memiliki Identitas Kependudukan (Disabilitas, Anak)	Orang	200	200	200				20.000.000	Program Inklusi	Lombok Timur	LRC



Tujuan 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp))	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
INDIKATOR SDGs	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB										
	17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya										
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik										
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB										



Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target						Indikatif Alokasi Anggaran 2025-2030 (Juta Rp))	Sumber Pendanaan	Lokasi Aktual Pelaksanaan Kegiatan	Lembaga Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Program												
Kegiatan												
INDIKATOR SDGs	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.										
Program												
Kegiatan												